



#SalatigaBEDA
Bergerak **Energik** Dinamis Adaptif
Salatiga *Mendunia*

Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Tahun 2027

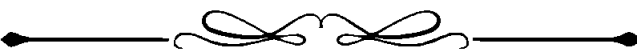


Rancangan Awal RKPD

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2027**



bit.ly/rkpdsalatiga



Tema Pembangunan Tahun 2027

*Pengembangan SDM yang sehat & cerdas
dan perekonomian daerah yang unggul,
didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah
yang sesuai daya dukung lingkungan hidup*

FORMULIR MASUKAN TERHADAP RANWAL RKPD 2027

Nama : _____

Instansi : _____

Nomor WA : _____

Saran/Masukan :

Salatiga, Februari 2026

* Informasi Nama & Instansi Anda membantu kami dalam identifikasi dan klasifikasi masukan.
* Anda dapat menggunakan halaman sebaliknya jika diperlukan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
FORMULIR MASUKAN TERHADAP RANWAL RKPD 2027	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Proses Penyusunan.....	2
1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan.....	4
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	6
1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD	8
1.4. Maksud dan Tujuan	10
1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2027	10
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	1
2.1. Aspek Geografis dan Demografis.....	1
2.1.1. Kondisi Geografi	1
2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	3
2.1.3. Wilayah Rawan Bencana	5
2.1.4. Aspek Demografi	7
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	10
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	10
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	26
2.3. Aspek Daya Saing Daerah.....	35
2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah	35
2.3.2. Daya Saing SDM.....	42
2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah.....	49
2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi.....	54
2.4. Aspek Pelayanan Umum.....	56
2.4.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar.....	58
2.4.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	89
2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan.....	121
2.4.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	129
2.4.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya	135
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	1
3.1.1. Kondisi Perekonomian Global.....	1
3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional	2
3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah	5
3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga	8
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	9
3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	10
3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah	15
3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	19
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	1
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan	1
4.1.1 Visi Pembangunan Daerah.....	1

4.1.2	Misi Pembangunan Daerah	3
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	4
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027	11
4.2.1.	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027	11
4.2.2.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	21
4.2.3.	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027	27
4.3	Pokok – Pokok Pikiran DPRD	69
4.4	Prioritas Pembangunan Daerah dalam mendukung Kebijakan Nasional	73
4.4.1	Sustainable Development Goals (SDGs)	73
4.4.2	Pengarusutaman Gender (PUG) dan Inklusi Sosial	95
4.4.3	Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan	104
4.4.4	Standar Pelayanan Minimal	111
4.4.5	Penanggulangan Kemiskinan	133
4.4.6	Percepatan Penurunan Stunting	155
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH		1
5.1.	Rencana Kerja	2
5.1.1.	Rencana Kerja Prioritas Pertama	2
5.1.2.	Rencana Kerja Prioritas Kedua	77
5.2.	Pendanaan Daerah	99
LAMPIRAN BAB V		102
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN		0
6.1	Indikator Kinerja Utama	0
6.2	Indikator Kinerja Daerah	1
6.3	Keselaran Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga	8
6.4	Keselaran Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga	9
6.5	Keselaran Intervensi Pembangunan Kewilayahan RKP dengan RKPD	18
6.6	Keselaran Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga	22
6.7	Indikator Kinerja Program	30
6.8	Indikator Utama Pembangunan	86
BAB VII PENUTUP		1
7.1	Kaidah Pelaksanaan	1
7.2	Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi	2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1	Diagram Proses Penyusunan RKPD 2027.....	4
Gambar 1. 2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga	9
Gambar 2. 1	Peta Kota Salatiga.....	2
Gambar 2. 2	Peta Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan	4
Gambar 2. 3	Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga	7
Gambar 3. 1.	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III - 2025	5
Gambar 3. 2.	Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2025.....	6
Gambar 3. 3.	Gambaran Struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2025.....	7

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1	Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	8
Grafik 2. 2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2021-2025(Tw III)	11
Grafik 2. 3	Inflasi Kota Salatiga tahun 2021-2025	12
Grafik 2. 4	Indeks Gini Tahun 2023-2024	13
Grafik 2. 5	Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025	13
Grafik 2. 6	Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025	14
Grafik 2. 7.	Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025.....	15
Grafik 2. 8.	Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2021 – 2025	16
Grafik 2. 9.	Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025.....	16
Grafik 2. 10.	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2021– 2025.....	17
Grafik 2. 11.	Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025.....	18
Grafik 2. 12.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2025.....	19
Grafik 2. 13.	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2022- 2025.....	19
Grafik 2. 14.	Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025.....	20
Grafik 2. 15.	Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)	24
Grafik 2. 16.	Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)	24
Grafik 2. 17.	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025(%).....	26
Grafik 2. 18.	Score Capaian KLA di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	29
Grafik 2. 19.	Perbandingan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	30
Grafik 2. 20.	Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	31
Grafik 2. 21.	Perbandingan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	33
Grafik 2. 22.	Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	33
Grafik 2. 23.	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	34
Grafik 2. 24.	Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)	40
Grafik 2. 25.	Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Ribu Rupiah)	40
Grafik 2. 26.	Grafik PDRB Perkapita Tahun 2020-2024 (Tw III).....	41

Grafik 2. 27.	Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.....	42
Grafik 2. 28.	Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	44
Grafik 2. 29.	Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024	44
Grafik 2. 30.	Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2024	45
Grafik 2. 31.	Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021-2025.....	45
Grafik 2. 32.	Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025	46
Grafik 2. 33.	Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021-2025.....	47
Grafik 2. 34.	Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).....	47
Grafik 2. 35.	Angka Melek Huruf (usia 15-59) Tahun 2021-2025.....	48
Grafik 2. 36.	Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025.....	50
Grafik 2. 37.	Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	50
Grafik 2. 38.	Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025.....	51
Grafik 2. 40.	Realisasi IKLH di Kota Salatiga Tahun 2021-2025.....	52
Grafik 2. 39.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga	54
Grafik 2. 40.	Realisasi Pertumbuhan Investasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	55
Grafik 2. 41.	Persentase Peminat Transmigrasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	55
Grafik 2. 42.	Indeks Reformasi Birokrasi di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	58
Grafik 2. 43.	Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2020-2025	60
Grafik 2. 44.	Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	66
Grafik 2. 45.	Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	67
Grafik 2. 46.	Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	67
Grafik 2. 47.	Succes Rate Tuberkulosis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	69
Grafik 2. 48.	Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	79
Grafik 2. 49.	Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga	79
Grafik 2. 50.	Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2021-2025.....	81
Grafik 2. 51.	Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun.....	83
Grafik 2. 52.	Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	86
Grafik 2. 53.	Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	89
Grafik 2. 54.	Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	91
Grafik 2. 55.	Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	92
Grafik 2. 56.	Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	95
Grafik 2. 57.	Tren Emisi dan Serapan GRK	99

Grafik 2. 58. Tren Emisi GRK Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi
2020-2024..... 101

Grafik 2. 59. Tren Emisi GRK Sektor Limbah 2020-2024 101

Grafik 2. 60. Tren Emisi GRK Sektor IPPU (Proses dan penggunaan Produk
Industri) 2020-2024 102

Grafik 2. 61. Tren Emisi GRK Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Land
Use) 2020-2025 103

Grafik 2. 62. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun
2021-2025..... 106

Grafik 2. 63. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024..... 111

Grafik 2. 64. Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga
Tahun 2021-2025..... 115

Grafik 2. 65. Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga
Tahun 2021-2025..... 119

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Prinsip Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027	5
Tabel 1. 2	Prinsip Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027	5
Tabel 2. 1	Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	8
Tabel 2. 2	Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025.....	8
Tabel 2. 3	Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025.....	9
Tabel 2. 4	Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025.....	10
Tabel 2. 5.	Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga.....	22
Tabel 2. 6.	Data Stunting Kota Salatiga 2020-2024.....	34
Tabel 2. 7.	Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah).....	35
Tabel 2. 8.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)	36
Tabel 2. 9.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2040 (dalam miliar rupiah)	37
Tabel 2. 10.	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)	38
Tabel 2. 11.	Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (persen).....	39
Tabel 2. 12.	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2020-2024	39
Tabel 2. 13.	Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2021-2025	43
Tabel 2. 14.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	49
Tabel 2. 15.	Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2024.....	57
Tabel 2. 16.	Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga tahun 2020-2025.....	58
Tabel 2. 17.	Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga.....	59
Tabel 2. 18.	Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2020-2025	59
Tabel 2. 19.	Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota Salatiga Tahun 2020--2025	59
Tabel 2. 20.	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2020-2025.....	60
Tabel 2. 21.	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2020-2025.....	61
Tabel 2. 22.	Laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024.....	62
Tabel 2. 23.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan	64
Tabel 2. 24.	Capaian SDGs Urusan Pendidikan.....	64
Tabel 2. 25.	Data Stunting Kota Salatiga 2020-2024.....	68
Tabel 2. 26.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan	70
Tabel 2. 27.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan	71

Tabel 2. 28.	Capaian SDGs Urusan Kesehatan.....	72
Tabel 2. 29.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	75
Tabel 2. 30.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum.....	76
Tabel 2. 31.	SPM Pelayanan Dasar Air Minum.....	76
Tabel 2. 32.	SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik.....	77
Tabel 2. 33.	Capaian SDGs Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	77
Tabel 2. 34.	Luas PSU berdasarkan nBA/SK.....	79
Tabel 2. 35.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat.....	82
Tabel 2. 36.	Capaian SDGs Perumahan Rakyat.....	82
Tabel 2. 37.	Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	82
Tabel 2. 38.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	83
Tabel 2. 39.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	84
Tabel 2. 40.	Capaian SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	85
Tabel 2. 41.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial	87
Tabel 2. 42.	SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial	87
Tabel 2. 43.	Capaian SDGs Urusan Sosial.....	88
Tabel 2. 44.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja.....	89
Tabel 2. 45.	Capaian SDGs Urusan Tenaga Kerja.....	90
Tabel 2. 46.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92
Tabel 2. 47.	Capaian SDGs Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	93
Tabel 2. 48.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan.....	93
Tabel 2. 49.	Capaian SDGs Urusan Pangan.....	95
Tabel 2. 50.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan.....	96
Tabel 2. 51.	Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup	96
Tabel 2. 52.	Data Potensi Energi Baru Terbarukan Kota Salatiga	98
Tabel 2. 53.	Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan	98
Tabel 2. 54.	Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor	99
Tabel 2. 55.	Ketersediaan RTH di Kota Salatiga 2021-2025.....	106
Tabel 2. 56.	Persentase Sampah yang Terangkut Tahun 2021 sd 2025	106
Tabel 2. 57.	Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2021-2025.....	107
Tabel 2. 58.	Capaian SDGs Urusan Lingkungan Hidup	107
Tabel 2. 59.	Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil	109
Tabel 2. 60.	Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga.....	110
Tabel 2. 61.	Capaian SDGs Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	110
Tabel 2. 62.	Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2020-2024.....	112
Tabel 2. 63.	Capaian SDGs Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	112
Tabel 2. 64.	Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025.....	113
Tabel 2. 65.	Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	114
Tabel 2. 66.	Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga	116

Tabel 2. 69.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2020-2025	118
Tabel 2. 68.	Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga.....	118
Tabel 2. 69.	Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025.....	119
Tabel 2. 70.	Data Dukung Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025	120
Tabel 2. 71.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	120
Tabel 2. 72.	Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2020-2024	121
Tabel 2. 73.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kelautan dan Perikanan	121
Tabel 2. 74.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata	122
Tabel 2. 75.	Capaian SDGs Urusan Pariwisata	124
Tabel 2. 76.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian	124
Tabel 2. 77.	Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kota Salatiga 2021-2025	125
Tabel 2. 78.	Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Kota Salatiga 2021-2025.....	126
Tabel 2. 79.	Luas Penggunaan Lahan Pertanian Kota Salatiga 2021-2025	126
Tabel 2. 80.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan	127
Tabel 2. 81.	Capaian SDGs Urusan Perdagangan.....	128
Tabel 2. 82.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian.....	128
Tabel 2. 83.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi	128
Tabel 2. 84.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan	129
Tabel 2. 85.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025.....	130
Tabel 2. 86.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Keuangan Tahun 2021-2025.....	131
Tabel 2. 87.	Capaian SDGs Urusan Keuangan	132
Tabel 2. 90.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Kepegawaian Tahun 2021-2025.....	132
Tabel 2. 91.	Capaian SDGs Kepegawaian	133
Tabel 2. 90.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Pengawasan Tahun 2020-2024.....	134
Tabel 2. 91.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024.....	135
Tabel 2. 92.	Capaian SDGs Setwan.....	135
Tabel 2. 93.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024.....	136
Tabel 2. 94.	Capaian SDGs Setda.....	136
Tabel 2. 95.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidomukti Tahun 2021-2025.....	137
Tabel 2. 96.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidorejo Tahun 2021-2025.....	138
Tabel 2. 97.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Tingkir Tahun 2021-2025.....	139
Tabel 2. 98.	Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Argomulyo Tahun 2021-2025.....	140

Tabel 3. 1	Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021-2023.....	21
Tabel 3. 2	Persentase Kemiskinan Esktrek Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah per Maret 2024	22
Tabel 3. 1.	Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2027	5
Tabel 3. 2.	Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2023, 2024, 2025 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027	9
Tabel 3. 2.	Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025, Target Pendapatan Tahun 2026 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2027	11
Tabel 3. 2.	Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027	14
Tabel 3. 2.	Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027	15
Tabel 3. 2.	Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027	18
Tabel 3. 2.	Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027	21
Tabel 3. 2.	Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2027.....	21
Tabel 3. 2.	Alokasi Pagu Perangkat Daerah Tahun 2027	22
Tabel 3. 2.	Alokasi Pagu Dana Kelurahan Tahun 2027	23
Tabel 4. 1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target kinerja Tahun 2027 berdasarkan hasil capaian tahun 2025	5
Tabel 4. 2.	Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027.....	7
Tabel 4. 3.	Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2027	12
Tabel 4. 4.	Keterkaitan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2027.....	30
Tabel 4. 5.	Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027	34
Tabel 4. 6.	Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2027	37
Tabel 4. 7.	Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Prioritas Tahun 2027 sesuai Rancangan RPJMD dengan Program Unggulan Kepala Daerah	61
Tabel 4. 8.	Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Strategi sesuai Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2027	63
Tabel 5. 1	Rekapitulasi Dukungan Program pada Prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2027	3
Tabel 5. 2	Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2027	33
Tabel 5. 3	Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2027	49
Tabel 5. 4	Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2027	55
Tabel 5. 5	Kerangka Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2027	99

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 juga memperhatikan penjabaran tahun ketiga dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Selanjutnya penyusunan RKPD Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045, serta mempertimbangkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2027 memperhatikan hasil evaluasi capaian kinerja RKPD Tahun 2025, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional di daerah yang meliputi kebijakan program strategis nasional, amanat pembangunan global / nasional / regional, regulasi yang berlaku, dan dinamika agenda pembangunan nasional lainnya. Selain itu, kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 juga memperhatikan berbagai proyeksi dalam RKPD Tahun 2027. Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 juga memedomani arah kebijakan pembangunan dari program Asta Cita dalam RPJMN 2025 – 2029, RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, rancangan RKP 2027, Program Strategis Nasional, dan RKPD Provinsi Tahun 2027. Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, RKPD Kota Salatiga tahun 2027 diarahkan pada tahap kedua pembangunan lima tahun yaitu tahap **“Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup”**. Tahun kedua ini difokuskan pada **“Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul”**. Prioritas Kota Salatiga tahun 2027 diharapkan memberikan dukungan pada tahap pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 untuk “Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah” yang difokuskan pada tema pembangunan **“Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”**. Selain itu tema pembangunan 2027 Kota Salatiga juga mendukung Fokus tahapan RPJMN pada tahun 2027 yaitu **penguatan fondasi transformasi ekonomi** melalui implementasi proyek strategis nasional.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah, RKPD mempunyai nilai yang penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, antara lain :

1. Merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah jangka menengah;
2. Menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, berupa program/kegiatan OPD dan/atau lintas OPD;
3. Mewujudkan konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah;

4. Menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun RAPBD; dan
5. Menjadi pedoman dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD

1.1.1 Proses Penyusunan

Proses penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 6 (enam) tahapan, mulai dari persiapan penyusunan RKPD; penyusunan rancangan awal; penyusunan rancangan; pelaksanaan Musrenbang yang dimulai dari tingkat Kelurahan sampai ke tingkat Kota; perumusan rancangan akhir; dan penetapan RKPD.

Penjelasan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebagai berikut :

1. Persiapan Penyusunan RKPD
 - a. Penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - b. Orientasi mengenai RKPD oleh Tim Penyusun RKPD;
 - c. Penyusunan agenda tim kerja penyusunan RKPD; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
2. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
 - a. Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - b. Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - c. Analisis kapasitas keuangan daerah;
 - d. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 - e. Penelaahan rancangan awal renja perangkat daerah;
 - f. Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - g. Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h. Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dengan program strategis nasional;
 - i. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j. Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - k. Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

Rancangan awal RKPD dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.

3. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan Rancangan RKPD sebagai proses penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 berdasarkan hasil verifikasi Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan dengan penyelarasan tema pembangunan, prioritas dan arah kebijakan pembangunan baik Nasional, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Salatiga.
4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Musrenbang RKPD sebagai forum pemangku kepentingan, dilaksanakan untuk membahas Rancangan RKPD. Musrenbang RKPD di tingkat Kota Salatiga merupakan rangkaian

proses perencanaan yang dimulai dari Pra Musrenbang di tingkat RT dan RW, Musrenbang Kelurahan, Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum Perangkat Daerah. Proses Musrenbang RKPD ini melibatkan berbagai stakeholders seperti unsur pemerintah daerah beserta jajarannya, DPRD, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, tokoh masyarakat dan tokoh agama, termasuk pelibatan perempuan dan anak secara terintegrasi dan partisipatif.

5. Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Perumusan Rancangan Akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan Rancangan RKPD berdasarkan Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang RKPD Kota Salatiga. Rancangan Akhir RKPD yang telah disempurnakan disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh perangkat daerah untuk memastikan seluruh program dan kegiatan perangkat daerah telah diakomodir.

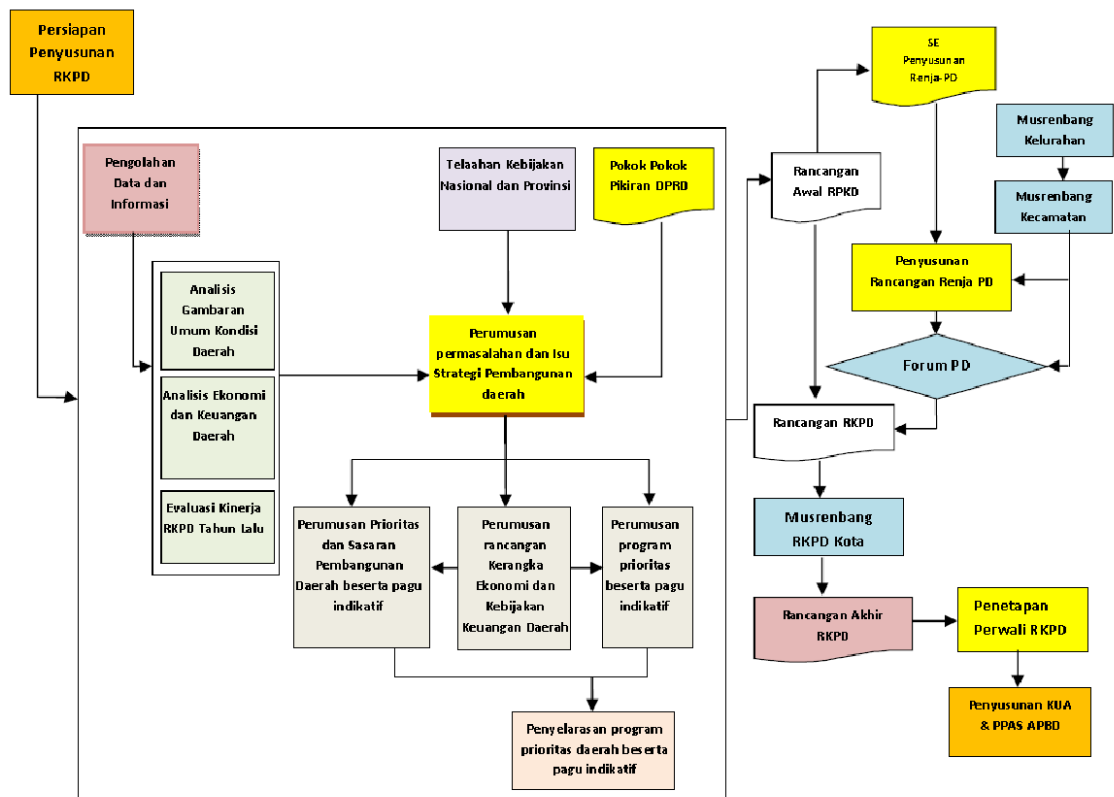
6. Penetapan RKPD Tahun 2027

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh kepala Bappeda kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan penetapan dan pengundangan.

Kedudukan dokumen RKPD sangat strategis dan terkait erat dengan dokumen penganggaran daerah, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional juga menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Peraturan Walikota) menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 untuk menyusun APBD Tahun Anggaran 2027.

Proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 secara sederhana dapat dibuat diagram pada Gambar 1.1 berikut

Gambar 1. 1 Diagram Proses Penyusunan RKPD 2027



1.1.2 Prinsip dan Pendekatan Penyusunan

Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 diwajibkan untuk memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip perbaikan tata kelola pemerintahan sebagaimana diukur melalui *Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention* (MCSP) yang dikoordinasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen RKPD Tahun 2027 ini mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai berikut :

1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. 1 Prinsip Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

PRINSIP	INDIKATOR
Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional	Konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah Kota Salatiga (RKPD) tahun 2027 dengan RKPD Provinsi Jawa Tengah dan Rencana Kerja Pemerintah
Dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing	Pelibatan para pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen perencanaan melalui Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, Kecamatan, dan Tingkat Kota; forum konsultasi publik, dan forum Rencana Kerja Perangkat Daerah
Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah	Pendekatan yang berorientasi pada substansi, dengan penyusunan rencana kerja yang diperjelas lokasi kegiatan sesuai dengan RTRW sebagaimana Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043, pembangunan kewilayahan Propinsi Jawa Tengah dan Nasional
Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional	Penetapan urutan kegiatan sebagai prioritas pembangunan disusun berdasarkan pada data potensi dan kebutuhan lokasi kegiatan, serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional

Sementara itu pendekatan penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada proses yaitu pendekatan teknokratik, partisipatif, *bottom up/top down* serta politik, serta pendekatan yang berorientasi pada substansi yaitu pendekatan tematik-holistik, integratif, dan spasial. Detil konfigurasi pendekatan proses penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2026 adalah sebagaimana tabel-tabel di bawah ini.

Tabel 1. 2 Prinsip Penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

PRINSIP	PARAMETER
TEKNOKRATIK	Dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
	Ketersediaan dan kelengkapan sumber data dan informasi dalam penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
	Kapasitas Perencana Daerah dalam Penyiapan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027.
	Mendasarkan pada hasil evaluasi kinerja RKPD periode tahun 2025
PARTISIPATIF	Dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang dilaksanakan melalui forum-forum yang diselenggarakan seperti Musrenbang dan Konsultasi Publik
DARI BAWAH (BOTTOM – UP)	Usulan dari Musrenbang berjenjang dari tingkat Kelurahan, tingkat kecamatan, dan Tingkat Kota
	Partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan
DARI ATAS (TOP-DOWN)	Sinkronisasi Prioritas Daerah dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, Prioritas Provinsi Jawa Tengah dalam RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan Prioritas Nasional dalam RKP 2027

PRINSIP	PARAMETER
	Sinergitas program dan kegiatan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 dan RKP Tahun 2027
POLITIK	Dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala Daerah terpilih yang dijabarkan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD
	Melakukan telaah terhadap pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang dilaksanakan saat reses pada tahun 2025
HOLISTIK - TEMATIK	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya
INTEGRATIF	Menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah
DARI BAWAH (BOTTOM – UP)	Dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan

Minimal;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Salatiga-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Salatiga;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengarusutaman Gender;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diperjelas dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Ineventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

1.3. Hubungan Antar Dokumen RKPD

RKPD Kota Salatiga tahun 2027 memiliki hubungan erat dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. RKPD dan RPJPD 2025-2045
RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan penjabaran periode kedua RPJPD yakni periode 2025-2029. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Salatiga Tahap kedua yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RPJPN.
2. RKPD dengan RPJMD 2025-2029
RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD tahun 2025-2029 yang berisikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan. RKPD berisi penjabaran program pembangunan dan capaian kinerja tahunan dalam mendukung target capaian lima tahunan. Melalui RKPD, dapat dilakukan upaya penyesuaian dalam mencapai target pembangunan akhir periode RPJMD.
3. RKPD dan Renja PD
RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan OPD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra OPD.
4. RKPD dan APBD
RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memastikan bahwa APBD telah disusun berdasarkan RKPD.
5. RKPD dan RTRW

- Penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai rencana pola ruang, rencana struktur ruang, dan rencana kawasan strategis Kota Salatiga sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.
6. RKPD dan RPKD

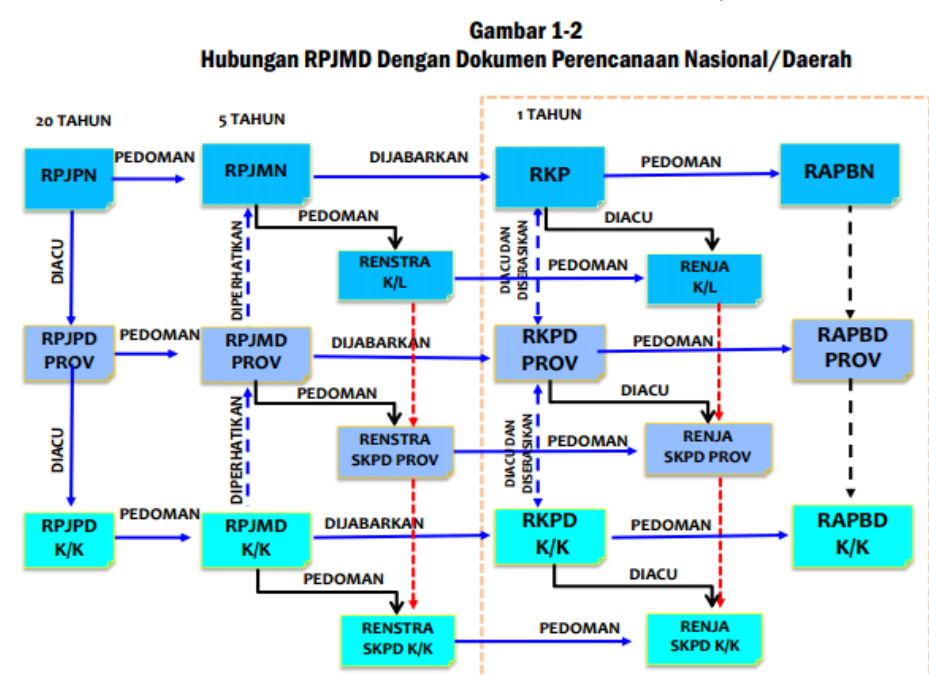
Dalam penyusunan RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Tahun 2023-2027, di mana program-program dalam RPKD telah masuk ke dalam RKPD yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam hal penurunan angka kemiskinan.
 7. RKPD dan TPB (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

Dalam penyusunan RKPD telah memuat empat pilar pembangunan TPB, yang telah masuk dalam program kegiatan di RKPD
 8. RKPD dan SPM

Dalam penyusunan RKPD telah memuat indikator SPM ke dalam indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana SPM.
 9. RKPD dengan Dokumen Perencanaan Nasional dan Provinsi

Dalam siklus manajemen pembangunan yang meliputi proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, RKPD memiliki fungsi dan peran yang cukup krusial. RKPD merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan 20 tahunan yaitu RPJPD dan dokumen perencanaan 5 tahunan yaitu RPJMD serta memperhatikan dan mengacu pada dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Dokumen RKPD menjadi acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) yang juga disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah (Renstra PD) sebagai dokumen perencanaan strategis perangkat daerah.

Gambar 1. 2 Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Antara Pusat, Provinsi dan Kota Salatiga



Selain berpedoman pada Dokumen Pusat dan Provinsi yang merupakan dokumen wajib yang perlu diselaraskan, RKPD Kota Salatiga tahun 2027 juga mengacu pada dokumen-dokumen sektoral yang menjadi salah satu sumber informasi penting untuk digunakan sebagai bahan telaahan dalam menentukan permasalahan dan isu strategis pembangunan. Selanjutnya akan menjadi salah satu dasar penentuan prioritas dan sasaran pembangunan, rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan daerah serta penyelarasan program prioritas dan pagu indikatif.

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 dimaksudkan untuk :

- 1) Sebagai acuan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2027 dan menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
- 2) Sebagai acuan dalam menetapkan program prioritas untuk seluruh urusan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target indikator utama pembangunan (IUP) RPJPD Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
- 3) Sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang didahului dengan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027.

b. Tujuan

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 bertujuan untuk :

- 1) Memberikan landasan operasional dan pedoman penyelenggaraan pembangunan bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) yang berisikan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2027;
- 2) Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2027 yang berpedoman pada dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJMD Tahun 2025-2029;
- 3) Memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi serta menjadi instrumen untuk melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah;
- 4) Sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini mengemukakan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memberikan penjelasan tentang gambaran umum kondisi daerah yang terdiri dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. Selanjutnya mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai dengan tahun 2025 dan realisasinya terhadap target RPJMD serta permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis di Kota Salatiga.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun 2025 dan perkiraan tahun 2027, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan serta prioritas pembangunan tahun 2027 berdasarkan hasil evaluasi dan analisis pelaksanaan RKPD tahun 2025, keterkaitannya dengan RPJPD dan teknokratik RPJMD serta identifikasi prioritas pembangunan di tingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Memuat rencana program dan kegiatan daerah yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran, prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2027 beserta pagu indikatif.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Memuat indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII PENUTUP

Memuat harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kota Salatiga tahun 2027.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Kondisi Geografi

Kota Salatiga terletak antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan, dan antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur. Kota Salatiga terletak di ketinggian 450-825 dari permukaan air laut Wilayah Kota Salatiga secara morfologis berada di daerah cekungan kaki Gunung Merbabu dan dikelilingi oleh beberapa gunung, antara lain Gunung Telomoyo, Gunung Payung dan Gunung Rong. Keberadaan gunung tersebut menyebabkan tanah di Kota Salatiga subur dan potensi alam yang cukup besar.

Berdasarkan kondisi topografi, wilayah Kota Salatiga dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

- Daerah Bergelombang $\pm 65\%$, terdiri dari Kelurahan Dukuh, Ledok, Kutowinangun Lor, Kutowinangun Kidul, Salatiga, Sidorejo Lor, Bugel, Kumpulrejo dan Kauman Kidul.
- Daerah Miring $\pm 25\%$, terdiri dari Kelurahan Tegalrejo, Mangunsari, Sidorejo Lor, Sidorejo Kidul, Tingkir Lor, Pulutan, Kecandran, Randuacir, Tingkir Tengah dan Cebongan.
- Daerah Datar $\pm 10\%$, terdiri dari Kelurahan Kalicacing, Noborejo, Kalibening dan Blotongan

Berdasarkan kondisi geologi, tekstur tanah Kota Salatiga dibedakan menjadi tanah Latosol Coklat dan tanah Latosol Coklat Tua, dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah Latosol Coklat

Tanah latosol coklat bahan induknya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur remah dan gembur, produktivitas tanah sedang sampai tinggi. Jenis tanah ini terdapat di sebagian wilayah Kota Salatiga dan cocok ditanami padi, palawija, sayur-sayuran, buah-buahan, cengkih dan lain-lain.

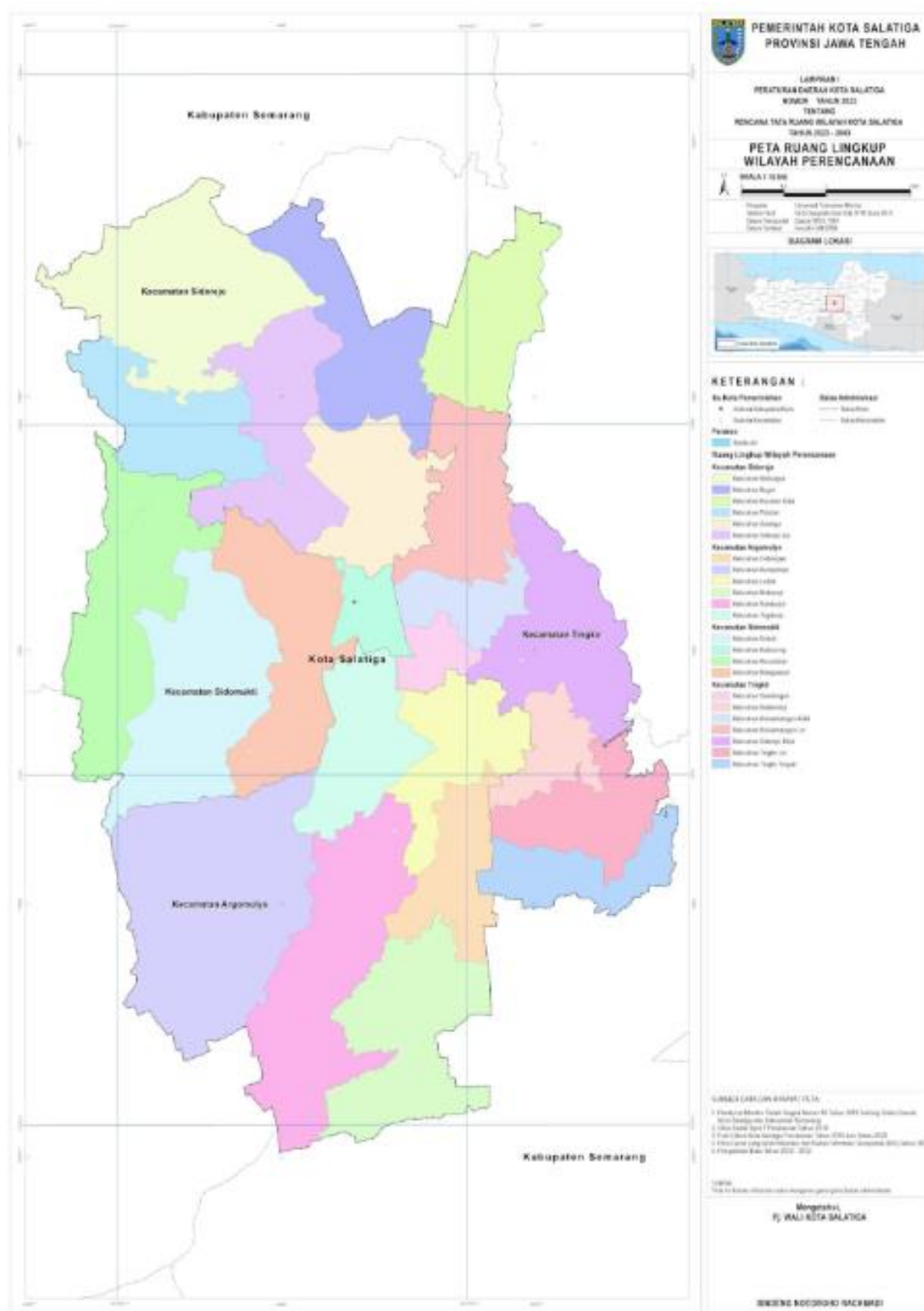
- Tanah Latosol Coklat Tua

Bahan dasarnya terdiri dari tufa vulkanis intermedier, tekstur tanahnya remah dan gembur sekali. Tanah ini terdapat di bagian ujung kota, sekitar Gunung Rong. Tanah ini cocok ditanami kopi, teh, coklat, padi, pisang, cengkih dan tanaman campuran

Berdasarkan kondisi klimatologi, Kota Salatiga beriklim tropis dengan suhu udara rata-rata 23°C-28°C. Curah hujan dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan perputaran/pertemuan arus udara.

Peta wilayah Kota Salatiga disajikan pada Gambar 2.1.

Gambar 2. 1 Peta Kota Salatiga



Sumber : Perda Nomor 03 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043

Berdasarkan letak geografisnya, Kota Salatiga beriklim tropis dengan dua pergantian musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Nopember–April dipengaruhi oleh angin muson barat, sedang musim kemarau terjadi antara bulan Mei–Oktober yang dipengaruhi oleh angin muson timur. Sedangkan jumlah curah hujan terendah 3 mm/tahun dan tertinggi 62 mm/tahun.

Wilayah administrasi Kota Salatiga dikelilingi oleh wilayah Kabupaten Semarang dengan batas wilayah sebagai berikut:

a. Sebelah Utara berbatasan dengan:

- Kecamatan Pabelan: Desa Pabelan, Desa Pejanten
- Kecamatan Tuntang: Desa Kesongo, Desa Watu Agung

b. Sebelah Timur berbatasan dengan:

- Kecamatan Pabelan: Desa Ujung-ujung, Desa Sukoharjo, Desa Glawan
- Kecamatan Tenganan: Desa Bener, Desa Tegal Waton, Desa Nyamat

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan:

- Kecamatan Getasan: Desa Sumogawe, Desa Samirono, Desa Jetak
- Kecamatan Tenganan: Desa Patemon, Desa Karang Duren

d. Sebelah Barat berbatasan dengan:

- Kecamatan Tuntang: Desa Candirejo, Desa Jombor, Desa Sragen, Desa Gedongan
- Kecamatan Getasan: Desa Polobogo Kecamatan Getasan.

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Kota Salatiga berjarak $\pm$ 53 kilometer dari Kota Surakarta dan $\pm$ 50 kilometer dari Kota Semarang, serta dilintasi jalur arteri primer (jalan nasional) Jakarta-Semarang-Surakarta. Karena menjadi perlintasan dua kota besar di Jawa Tengah (Semarang–Surakarta) dan perlintasan dari Jawa Timur (jalur tengah) ke Jawa Barat, maka transportasi darat yang melalui Kota Salatiga cukup ramai. Oleh karena itu, Kota Salatiga berpotensi menjadi kota transit.

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029, pengembangan Kawasan Perkotaan Salatiga (tematik kota pendidikan) sebagai kota satelit dari WM Semarang, antara lain melalui :

- a. Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu
- b. Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau
- c. Penyediaan dan penirgkatan layanan pendidikan/pelatihan tenaga keda yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan
- d. Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan

[illegible]

Menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga, pembagian Sistem Pusat Pelayanan di Kota Salatiga, masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut.

- 11-4

di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.

b. **Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Salatiga** adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub daerah yang meliputi :

- 1) **SPPK Sidorejo** yang berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
- 2) **SPPK Tingkir** yang berfungsi sebagai kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
- 3) **SPPK Argomulyo** yang berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, sport centre, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
- 4) **SPPK Sidomukti** yang berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan keamanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti.

c. **Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) Salatiga** berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, Pendidikan, permukiman dan perdagangan dan jasa berada di:

- 1) Kecamatan Argomulyo, terdiri atas Kelurahan Noborejo, Kelurahan Ledok, Kelurahan Tegalrejo, Kelurahan Kumpulrejo dan Kelurahan Cebongan;
- 2) Kecamatan Sidomukti, terdiri atas Kelurahan Kecandran dan Kelurahan Dukuh;
- 3) Kecamatan Sidorejo, terdiri atas Kelurahan Blotongan; Kelurahan Bugel; Kelurahan Kauman Kidul dan Kelurahan Pulutan;
- 4) Kecamatan Tingkir, terdiri atas Kelurahan Gendongan, Kelurahan Kalibening, Kelurahan Tingkir Lor dan Kelurahan Tingkir Tengah.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah rawan bencana di Kota Salatiga tersebar di beberapa kelurahan diantaranya di Kelurahan Blotongan, Bugel, Sidorejo Kidul, Tegalrejo, Randuacir dan Kumpulrejo. Peningkatan dan Pembangunan jalur evakuasi bencana meliputi:

- a. Jalan lingkungan menuju lapangan Prampelan pada Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
- b. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
- c. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
- d. Jalan lingkungan menuju gedung pertemuan pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan

Argomulyo;

- e. Jalan lingkungan menuju lapangan sepak bola di Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
- f. Jalan lainnya berdasarkan kajian.

Sedangkan untuk tempat evakuasi bencana meliputi :

- a. Lapangan Kelurahan Randuacir di Argomulyo dan Kelurahan Blotongan di Kecamatan Sidorejo;
- b. Bangunan kantor pemerintah pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo, Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir, Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo; dan
- c. Ruang/Bangunan lainnya.

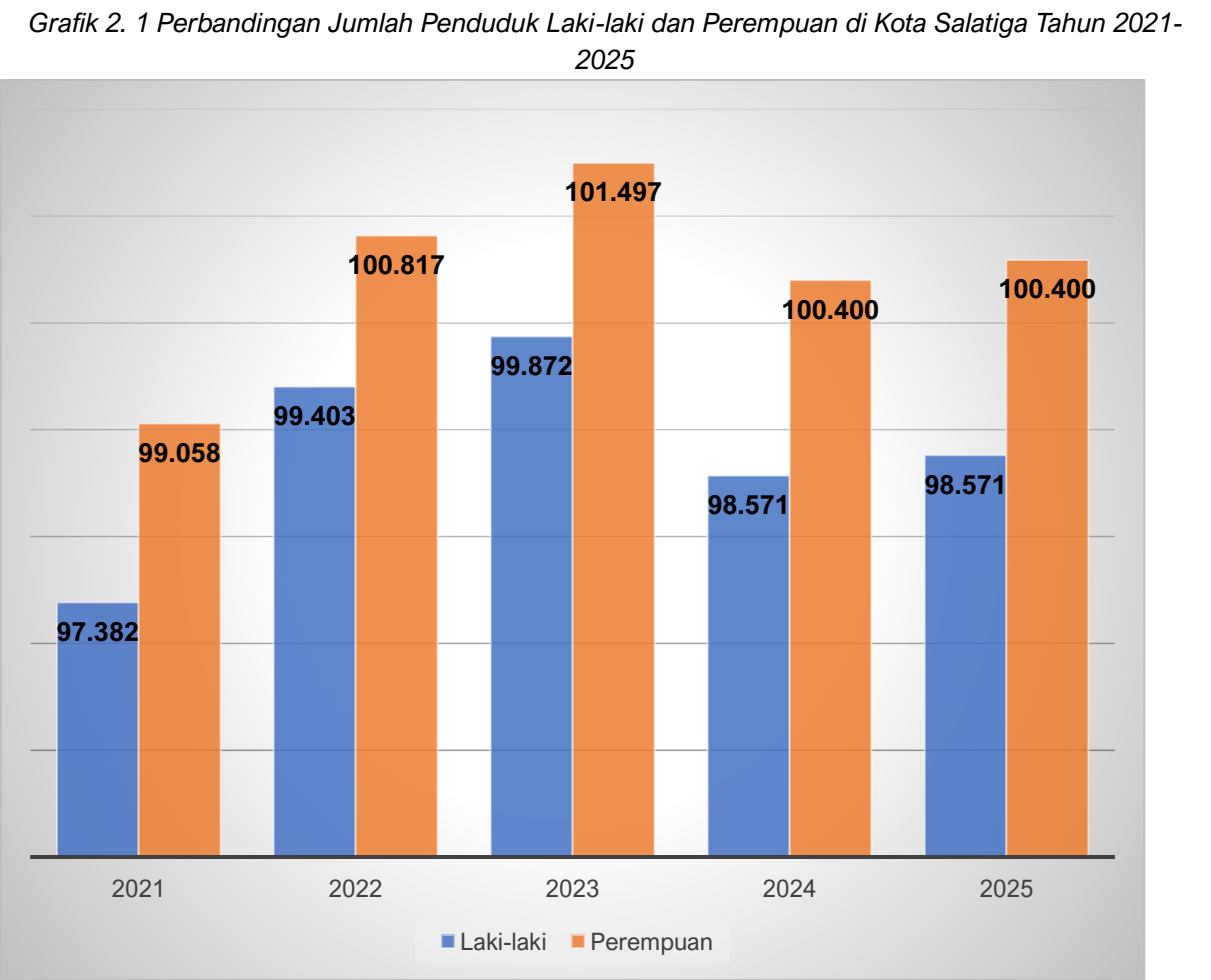
Peta Rencana Pola Ruang Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana Kota Salatiga sebagai berikut:

laki lebih sedikit dibanding penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tahun 2025 sebesar 98,18%, meningkat sebesar 0,01% dibandingkan tahun 2024 sebesar 98,17%. Data jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin di Kota Salatiga tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Data Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Total	
1.	2021	97.382	99.058	196.440	98,30
2.	2022	99.403	100.817	200.220	98,59
3.	2023	99.872	101.497	201.369	98,39
4.	2024	98.571	100.400	198.971	98,17
5.	2025	98.761	100.589	198.350	98,18

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2025



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2025

Persebaran penduduk Kota Salatiga tahun 2025 tertinggi di Kecamatan Sidorejo dengan jumlah penduduk sebanyak 54.807 jiwa dan terendah di Kecamatan Sidomukti sebanyak 45.714 jiwa. Data persebaran penduduk per Kecamatan di Kota Salatiga tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2. 2 Data Persebaran Penduduk Per Kecamatan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

Tahun	Argomulyo	Tingkir	Sidomukti	Sidorejo	Kota Salatiga
2021	50.264	46.838	45.054	54.284	196.440
2022	51.542	47.699	45.764	55.215	200.220
2023	52.045	48.106	46.125	55.093	201.369
2024	51.376	47.206	45.634	54.755	198.971
2025	51.573	47.256	45.714	54.807	199.350

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2025

Pada tahun 2025, jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tertinggi yaitu kelompok usia lebih dari 60 tahun sebanyak 27.285 jiwa atau sebesar 13,68% dari jumlah penduduk. Sedangkan kelompok usia terendah yaitu kelompok usia kurang dari 1 tahun sebanyak 735 jiwa atau sebesar 0.37% dari jumlah penduduk.

Data jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Kelompok Usia Tahun 2025

No	Usia (tahun)	Jenis Kelamin		Jumlah (jiwa)	%
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)		
1.	0 sd.1	382	353	735	0,37
2.	1 sd 5	6.178	5.735	11.913	5,97
3.	6 sd 10	7.479	6.975	14.454	7,25
4.	11 s.d. 15	7.987	7.557	15.544	7,78
5.	16 s.d. 20	8.043	7.590	15.633	7,84
6.	21 s.d. 25	7.384	7.122	14.506	7,27
7.	26 s.d. 30	7.169	7.287	14.456	7,25
8.	31 s.d. 35	7.335	7.119	14.454	7,25
9.	36 s.d. 40	6.827	7.066	13.893	6,97
10.	41 s.d. 45	8.159	8.418	16.577	8,31
11.	46 s.d. 50	7.463	7.555	15.018	7,53
12.	51 s.d. 55	6.216	6.637	12.853	6,45
13.	56 s.d. 60	5.659	6.370	12.029	6,03
14.	Lebih dari 60	12.480	14.805	27.285	13,68
Jumlah 2025		98.761	100.589	199.350	
2024		98.571	100.400	198.971	
2023		99.872	101.497	201.369	
2022		99.403	99.058	200.220	
2021		97.382	98.629	196.440	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga Tahun, 2025

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penduduk Kota Salatiga tahun 2025 tertinggi adalah penduduk berpendidikan SLTA/ Sederajat sebanyak 52.430 jiwa dan terendah adalah penduduk berpendidikan Sarjana Strata III sebanyak 190 jiwa.

Data penduduk Kota Salatiga berdasarkan tingkat pendidikan berdasarkan pendidikan tahun 2025 disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Data Penduduk Kota Salatiga Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1)	Tidak/Belum Sekolah	45.228 Jiwa
2)	Belum Taman SD/Sederajat	18.959 Jiwa
3)	Tamat SD/ sederajat	26.601 Jiwa
4)	SLTP/ Sederajat	26.742 Jiwa
5)	SLTA/ Sederajat	52.430 Jiwa
6)	Diploma I/II	1.817 Jiwa
7)	Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	6.062 Jiwa
8)	Diploma IV/Strata I	19.454 Jiwa
9)	Strata II	1.867 Jiwa
10)	Strata III	190 Jiwa
Jumlah		199.350 Jiwa

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun, 2025

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yang merupakan upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Aspek kesejahteraan masyarakat meliputi (1) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan ekonomi, dan (2) aspek kesejahteraan dengan fokus kesejahteraan sosial budaya. Kinerja masing-masing aspek kesejahteraan masyarakat sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

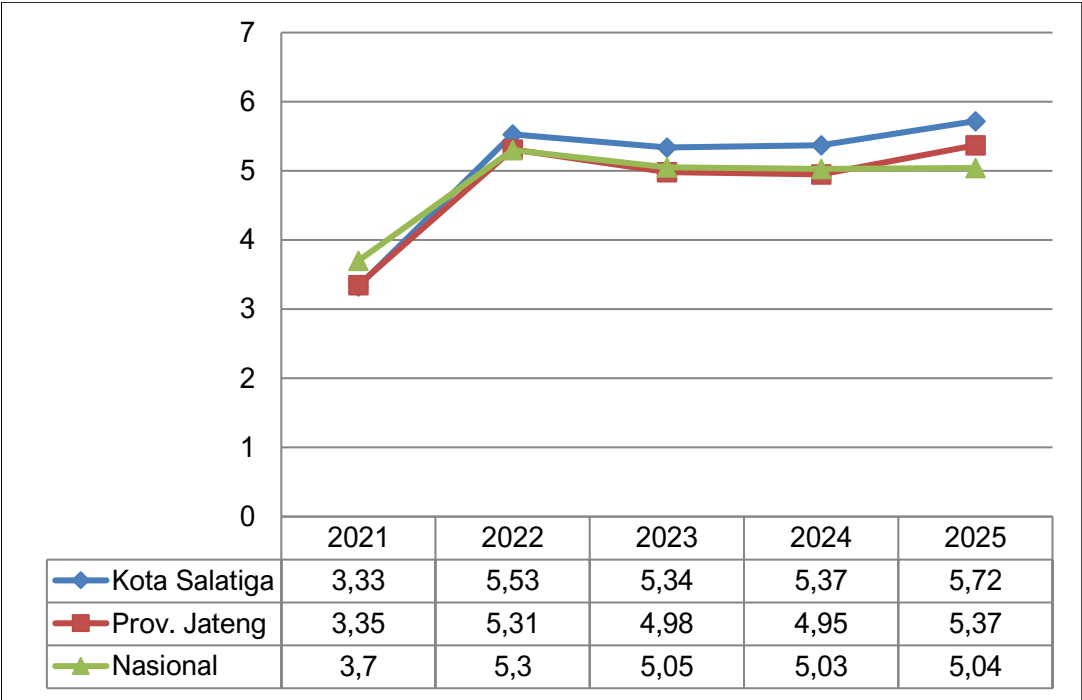
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Keberhasilan pembangunan antara lain dapat dilihat pada beberapa indikator utama ekonomi, antara lain, pertumbuhan ekonomi, gini rasio, TPT, TPAK, angka kemiskinan dan rasio penduduk miskin.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga dapat dianalisis melalui nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap sektor produksi yang tercermin dalam nilai PDRB ADHK. Selama periode 2021 - 2025, terjadi fluktuasi cenderung meningkat dalam nilai laju pertumbuhan ekonomi. Dari tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga sebesar 3,33% menjadi 5,72% di Triwulan 3 tahun 2025. Kemudian jika dibandingkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pergerakan laju ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sama dengan laju pertumbuhan ekonomu Kota Salatiga memiliki tren fluktuatif cenderung meningkat. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi Kota Salatiga Tahun 2021-2025(Tw III)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2025

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Namun, tidak jarang ada barang dan jasa yang harganya justru turun. Kenaikan harga satu atau dua sejumlah barang dan jasa saja tidak dapat disebut inflasi, terkecuali bila kenaikan itu meluas yang mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Dampak dari inflasi salah satunya adalah menurunnya daya beli masyarakat, yang dapat diartikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat terganggu karena ketidakmampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

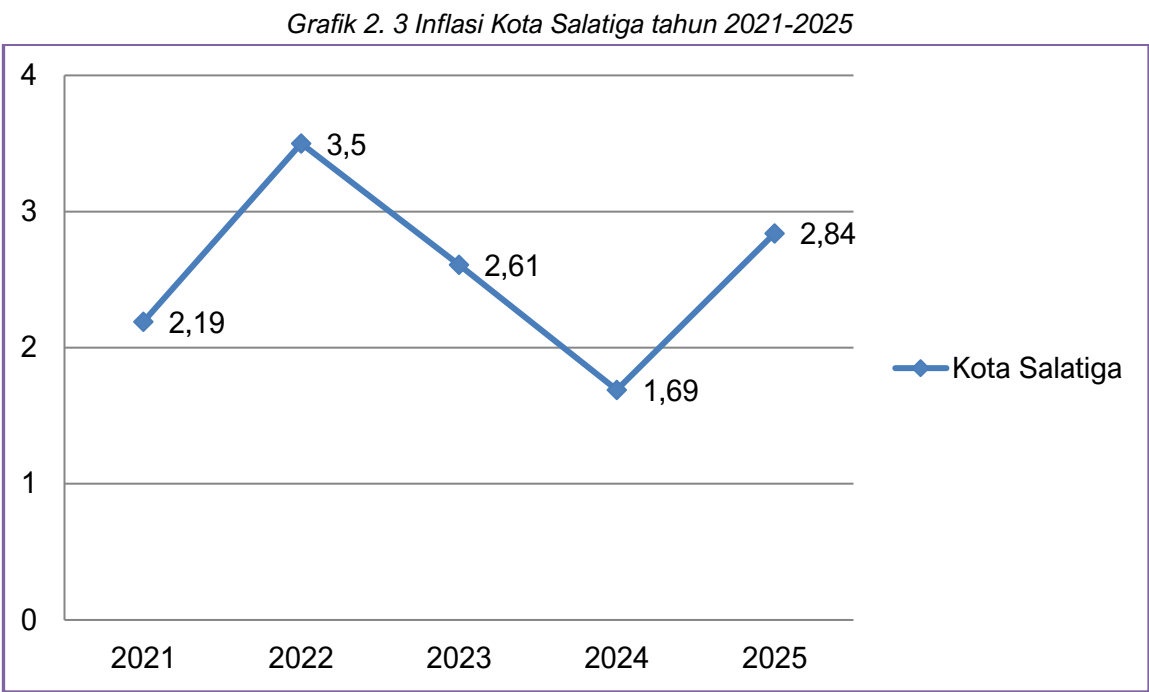
Inflasi Kota Salatiga pada tahun 2025 cenderung mengikuti pola inflasi Kota Semarang sebagai kota acuan Indeks Harga Konsumen (IHK) di Provinsi Jawa Tengah. Keterkaitan tersebut dipengaruhi oleh hubungan distribusi barang dan jasa, kesamaan pola konsumsi masyarakat, serta mobilitas ekonomi antarwilayah yang cukup tinggi. Sebagian besar pasokan kebutuhan pokok dan barang strategis di Kota Salatiga berasal dari wilayah Semarang dan sekitarnya, sehingga perubahan harga di Kota Semarang relatif cepat ditransmisikan ke tingkat harga di Salatiga.

Kota Salatiga memiliki industri yang kuat dan konsumsi rumah tangga sebagai komponen besar PDRB. Indeks harga umum mencerminkan perilaku harga lokal terkait makanan, energi, transportasi, dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor nasional/regional. Karena itu, tren inflasi Jawa Tengah memberikan gambaran yang cukup representatif bagi Salatiga dalam banyak kasus.

Inflasi di Kota Semarang Tahun 2025 sebesar 2,84%, sehingga angka ini digunakan oleh Kota Salatiga sebagai angka inflasi yang mengalami peningkatan sebesar 1,15 % tahun 2024 sebesar 1,69%. Jika mengikuti pola ekonomi regional (Jawa Tengah), maka inflasi tahunan di Salatiga kemungkinan menguat dari awal tahun ke akhir tahun, seperti

yang terlihat di provinsi. Inflasi pada 2025 cenderung masih berada dalam target inflasi yang sehat menurut standar Bank Indonesia (sekitar 2–3 %).

Tidak ada bukti deflasi atau inflasi ekstrem di wilayah sekitar, sehingga tekanan harga di Salatiga kemungkinan moderat dan mencerminkan tren regional. Faktor pendorong utama kemungkinan serupa seperti provinsi: harga pangan dan energi, dinamika permintaan musiman, serta kebijakan fiskal/moneter yang mempengaruhi harga barang dan jasa konsumsi. Laju inflasi Kota Salatiga selama kurun waktu tahun 2021-2025 terlihat dalam grafik berikut.

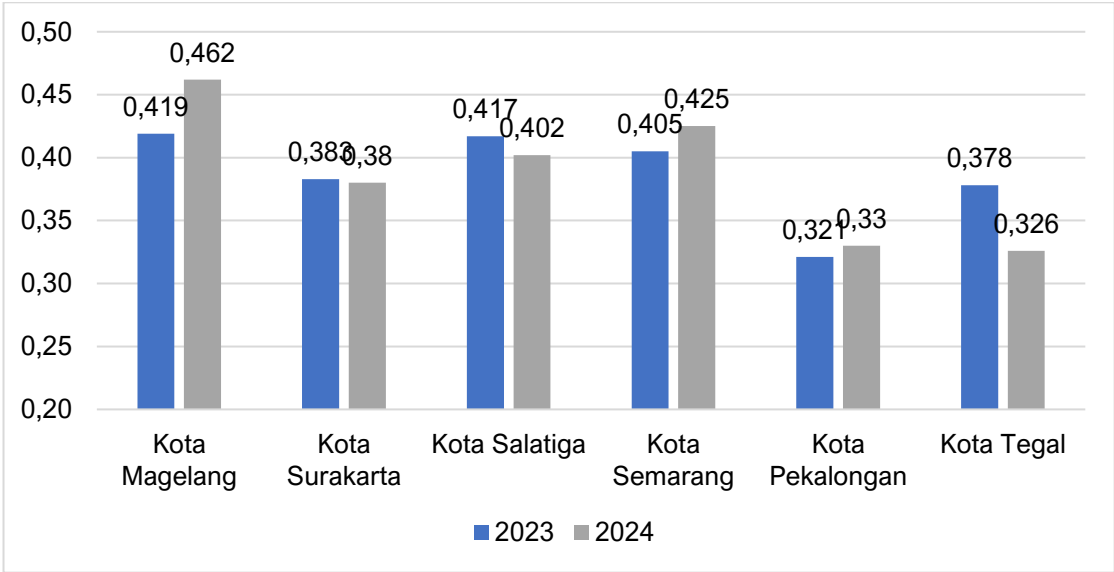


c. Ketimpangan Pendapatan (Gini Rasio)

Salah satu indikator yang dipergunakan untuk menilai ketimpangan pemerataan pendapatan di suatu wilayah adalah dengan menggunakan Indeks Gini. Koefisien Indeks Gini adalah 0 (nol) hingga 1 (satu) yang mengandung arti bahwa sama sekali tidak terjadi ketimpangan ketika capaian indeks Gini ketika bernilai 0 (nol) dan ketimpangan dapat dikatakan tinggi apabila capaian Indeks Gini ketika bernilai 1 (satu). Ketimpangan pemerataan pendapatan menggunakan Indeks Gini dapat diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu rendah, sedang dan tinggi. Indeks Gini dikategorikan rendah apabila capaiannya dibawah 0,3. Capaian Indeks Gini dikatakan sedang apabila capaiannya berada diantara 0,3 hingga 0,4 dan dikategorikan tinggi apabila capaiannya diatas 0,4 hingga 1.

Tingkat ketimpangan pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2024 ini menurun yaitu pada tahun 2023 sebesar 0,417 dan pada tahun 2024 menjadi sebesar 0,402. Ini berarti bahwa ketimpangan pemerataan pendapatan Kota Salatiga cenderung semakin menurun tetapi masih tergolong tinggi. Grafik ketimpangan pendapatan menurut Indeks Gini beberapa kota di Jawa Tengah ditunjukkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 4 Indeks Gini Tahun 2023-2024



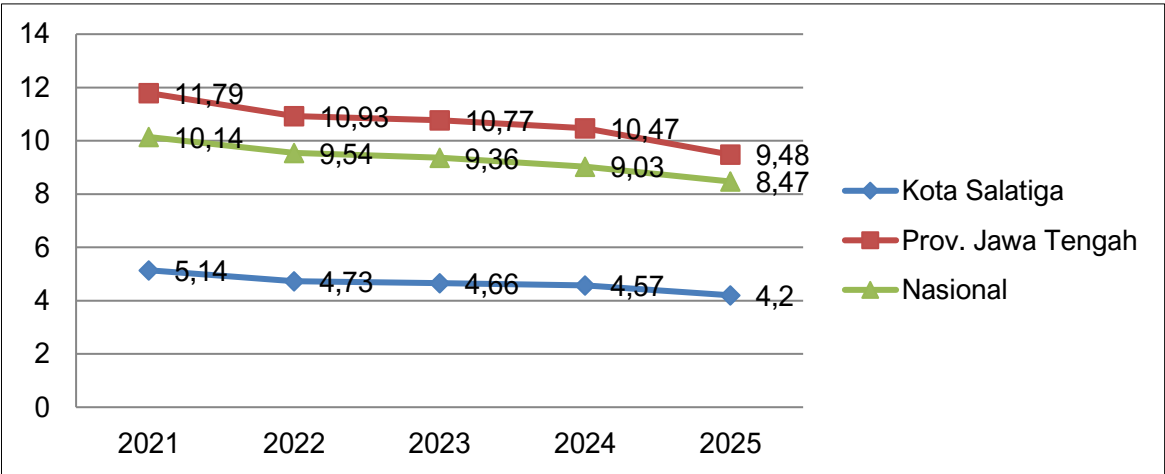
Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2024

d. Angka Kemiskinan

Pada Tahun 2025 jumlah penduduk miskin di Kota Salatiga mencapai 8.660 jiwa. Dibandingkan tahun 2024 jumlah penduduk miskin menurun 0,67 ribu orang, dari sebelumnya 9.330 jiwa. Kemiskinan Kota Salatiga 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin Kota Salatiga pada tahun 2025 sebesar 4,20% menurun 0,37% dibanding dengan tahun 2024 sebesar 4,57%. Kota Salatiga memiliki persentase penduduk miskin nomor 2 (dua) terendah se - Jawa Tengah setelah Kota Semarang.

Meskipun demikian, capaian penurunan angka kemiskinan Kota Salatiga berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 9,48% dan capaian rata-rata nasional sebesar 8,47% semester pertama. Kondisi tersebut bisa dilihat pada Grafik berikut ini.

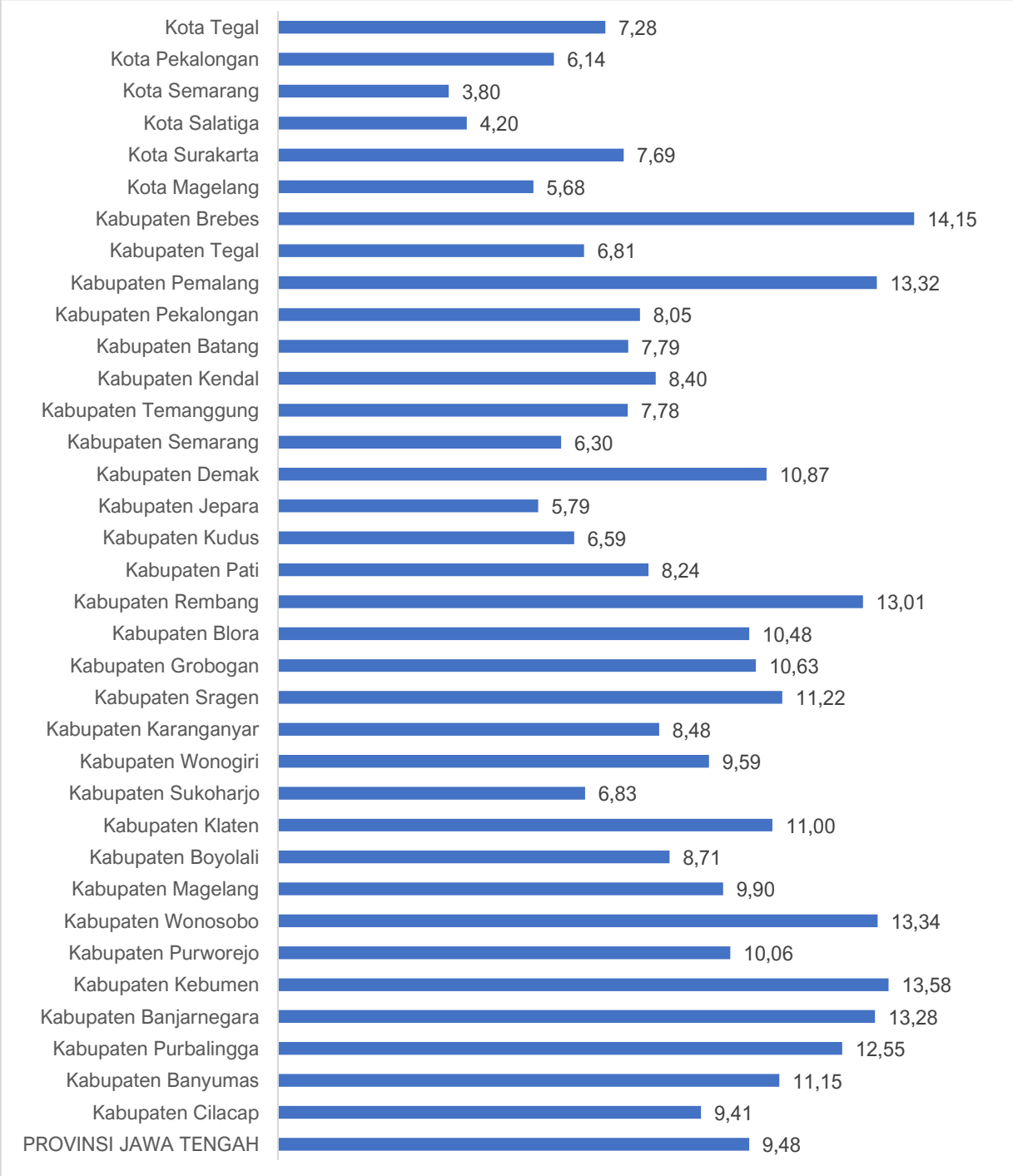
Grafik 2. 5 Perkembangan Tingkat Kemiskinan (%) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Capaian Persentase Penduduk Miskin Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 4,20%. Adapun persentase penduduk miskin terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Brebes dengan persentase penduduk miskin sebesar 14,15%, sedangkan kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin paling sedikit adalah Kota Semarang dengan persentase penduduk miskin sebesar 3,30%. Adapaun data posisi relative persentase penduduk miskin Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah adalah sebagaimana tersaji pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 6 Posisi Relative Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025

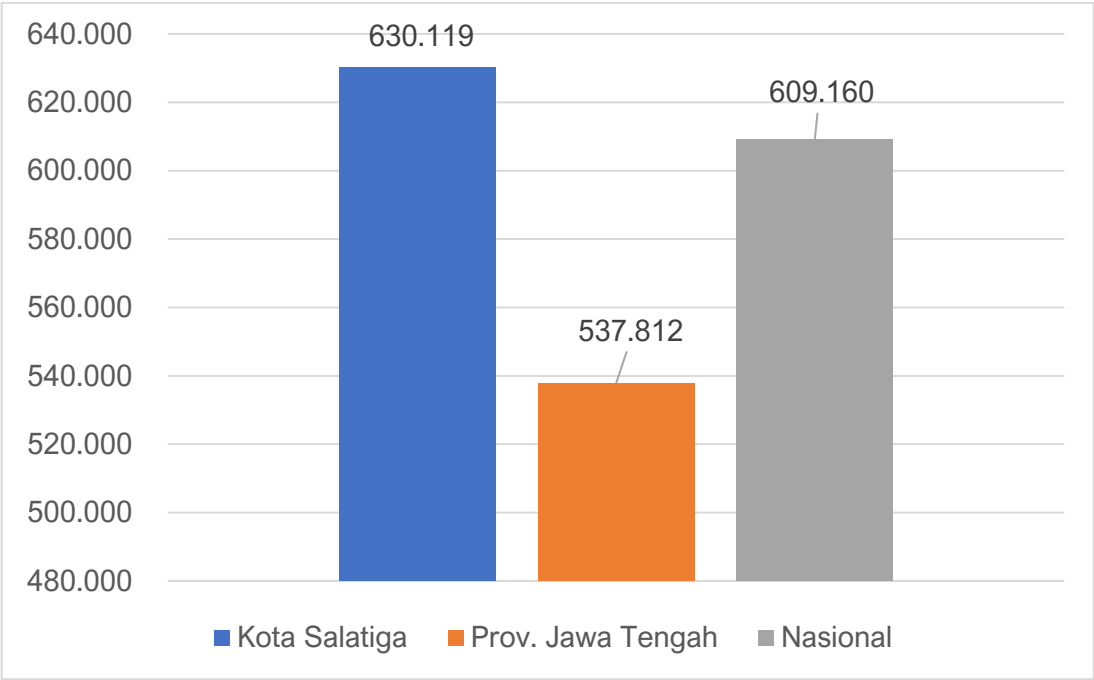


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Penduduk dikatakan miskin apabila memiliki rata-rata pengeluaran per-kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK). Dalam menghitung GK, BPS melihat dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Dalam menghitung GKM, BPS memberikan definisi bahwa GKM adalah merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKBM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan.

Tahun 2025 garis kemiskinan Kota Salatiga sebesar Rp. 630.119,- dengan demikian lebih tinggi dari rata-rata garis kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar Rp.537.812,- dan relatif sama dengan garis kemiskinan nasional yaitu Rp.609.160,- . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 7. Garis Kemiskinan (Rp) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025

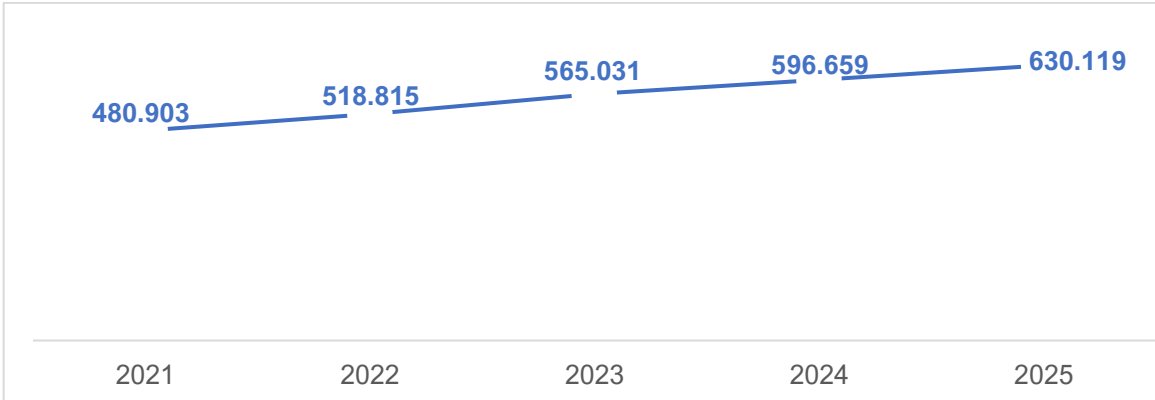


Sumber: Bappeda Kota Salatiga, 2025

Garis kemiskinan menjadi ukuran yang paling berpengaruh terhadap perubahan jumlah penduduk miskin. Kenaikan garis kemiskinan jika tidak diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat maka akan berdampak pada kenaikan jumlah penduduk miskin. Untuk itu perlu ada penekanan dalam menghadapi tren atau kenaikan garis kemiskinan dengan mendorong program dan kegiatan sektor riil yang menyentuh langsung kepada masyarakat dengan kategori berpenghasilan rendah.

Garis Kemiskinan Tahun 2025 tercatat naik Rp. 630.119,- jika dibandingkan pada Tahun 2024 Rp. 596.659,- mengalami kenaikan Rp. 33.460,-. Tren garis kemiskinan Kota Salatiga dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

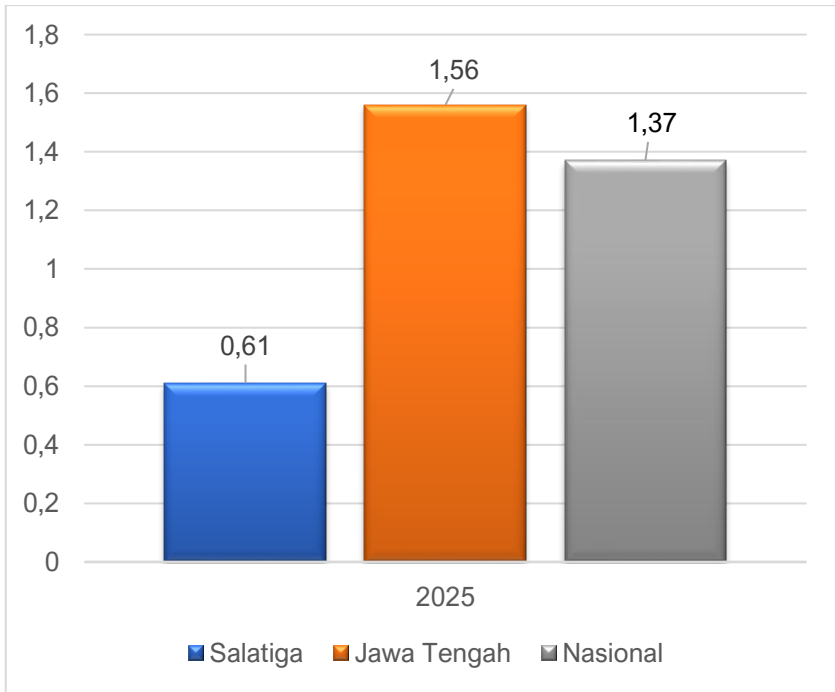
Grafik 2. 8. Perkembangan Garis Kemiskinan Kota Salatiga Tahun 2021 – 2025



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Untuk mengukur kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinannya. Semakin kecil nilai Poverty Gap önden, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebagai rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan di Kota Salatiga pada tahun 2025 adalah sebesar 0,61. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut ini:

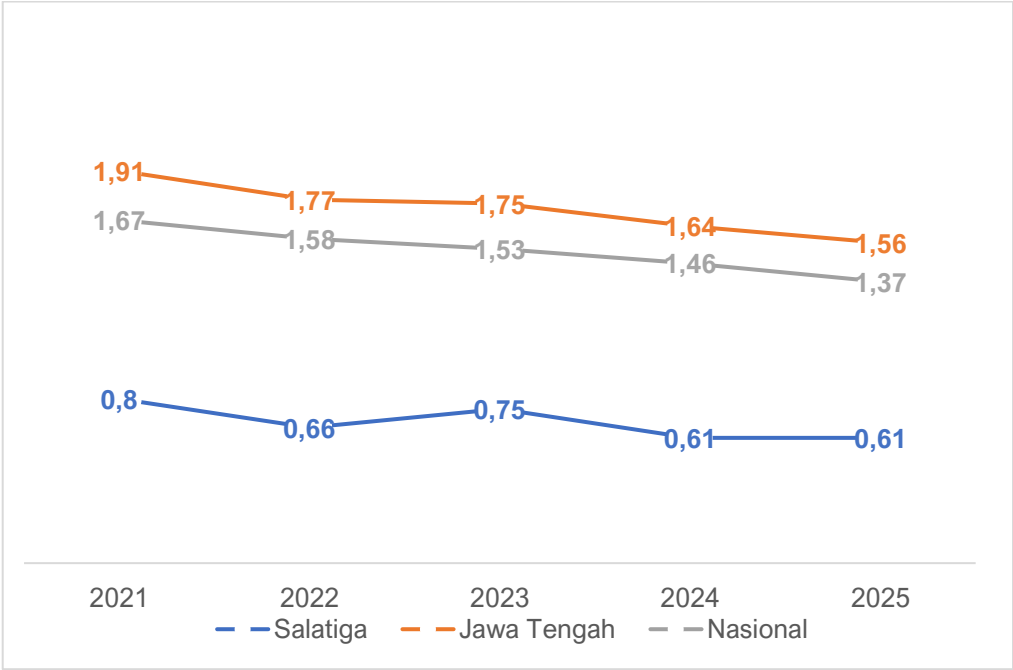
Grafik 2. 9. Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2025



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Pencapaian P1 Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2021-2025 terlihat fluktuatif, namun pada tahun 2025 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,61. Untuk mengetahui perkembangan P1 Kota Salatiga tahun 2021-2025 serta perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

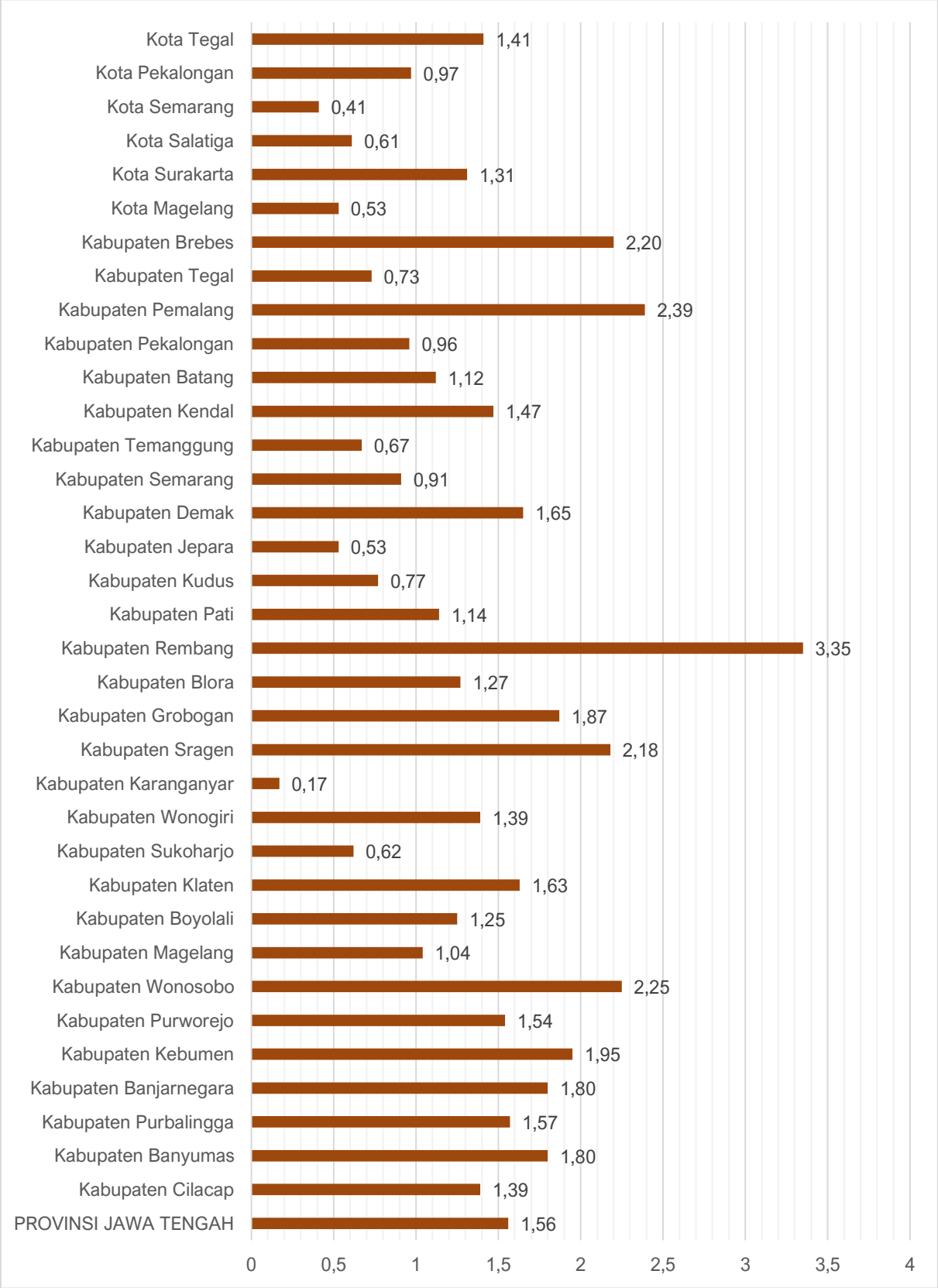
Grafik 2. 10. Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga dan Perbandingannya dengan Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2021– 2025



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 0,61%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 3,35%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) paling sedikit adalah Kota Karanganyar dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,17%.

Grafik 2. 11. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025

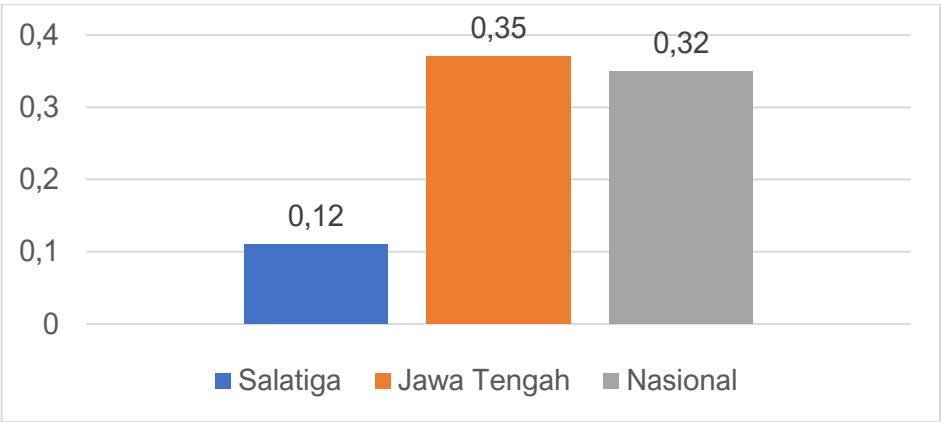


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kondisi tahun 2025 indeks keparahan kemiskinan (P2) Kota Salatiga sebesar 0,12 Provinsi Jawa Tengah 0,35 dan nasional sebesar 0,32. Jika disandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional,

capaian Kota Salatiga pada tahun 2025 masih lebih baik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

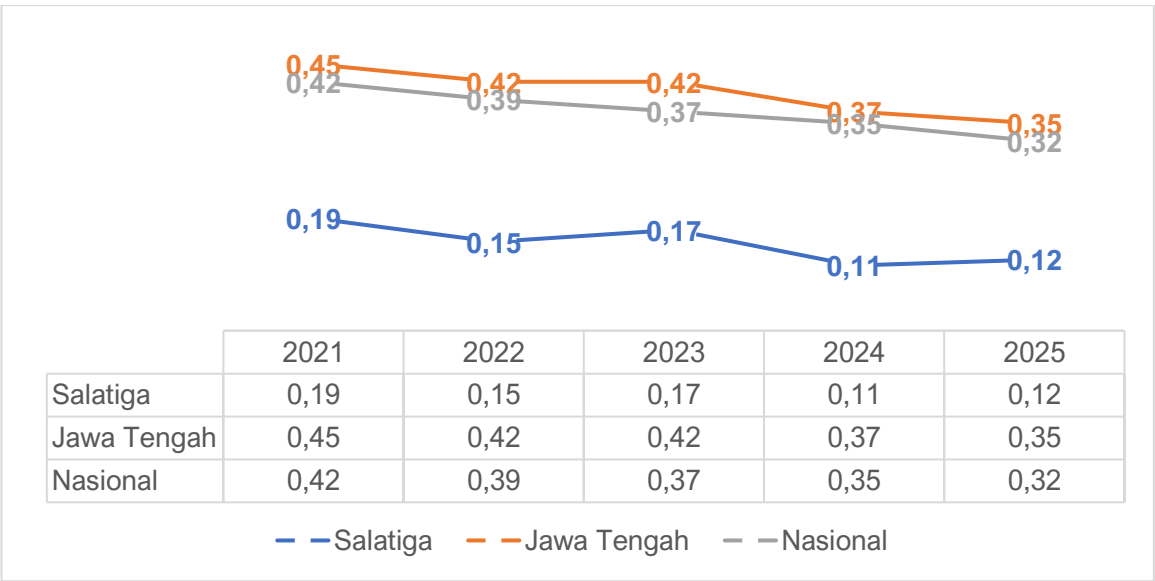
Grafik 2. 12. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2025



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Dalam kurun waktu tahun 2021-2025, capaian indeks keparahan kemiskinan Kota Salatiga mengalami fluktuasi. Hal tersebut dapat dilihat dari P2 Kota Salatiga pada tahun 2021 naik menjadi 0,19 lalu menjadi 0,15 pada tahun 2022 0,17 pada tahun 2023 dan pada tahun 2024 0,11. Pada tahun 2025 mengalami penurunan menjadi 0,12. Perkembangan Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga dan perbandingannya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2021-2025 dapat dilihat pada gambar grafik berikut:

Grafik 2. 13. Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Salatiga, Prov. Jateng dan Nasional Tahun 2022- 2025

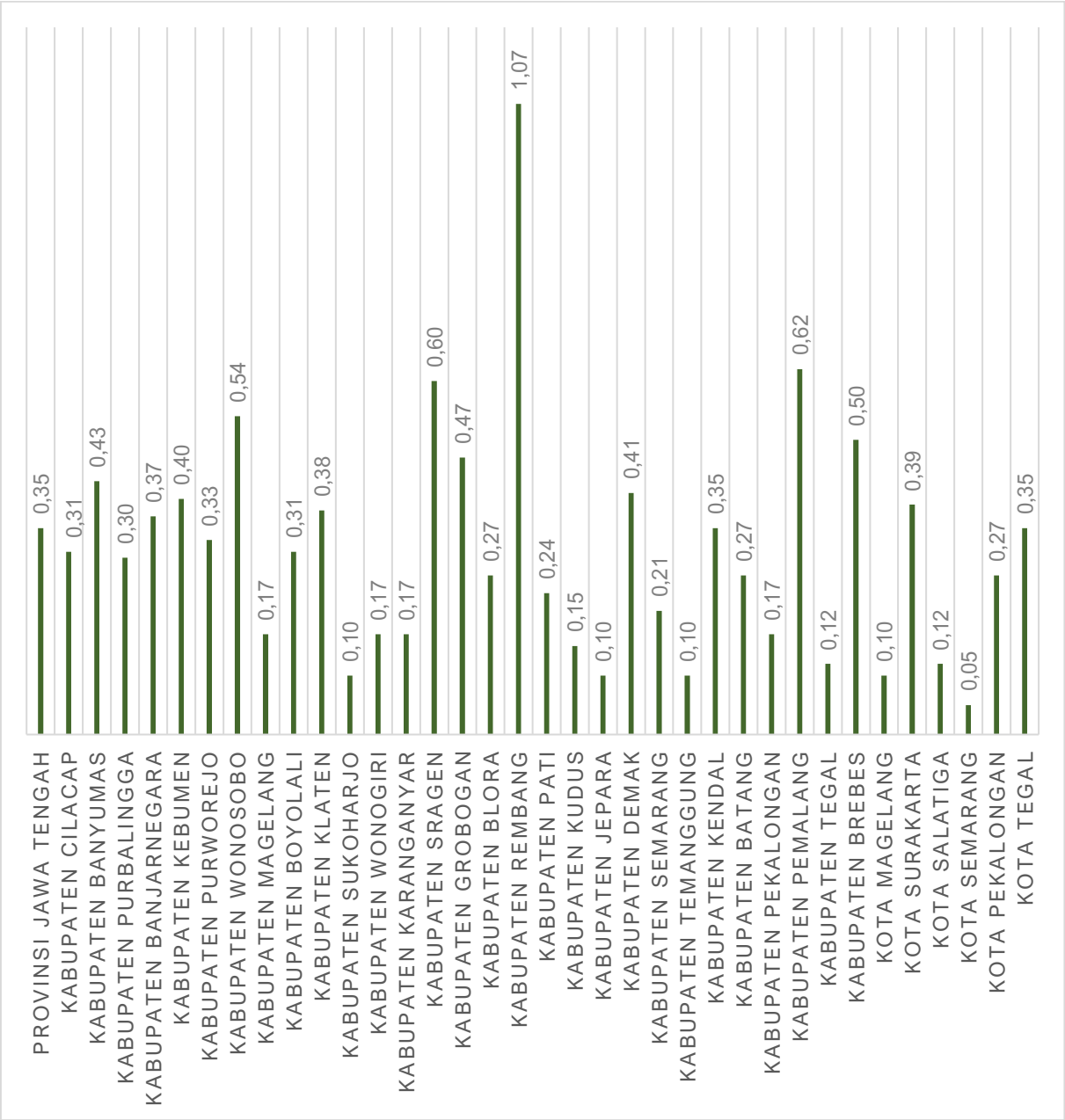


Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Berdasarkan data posisi relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025 seperti pada tabel, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kota Salatiga jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi

Jawa Tengah, Kota Salatiga menduduki peringkat 2 terbawah sebesar 0,12%. Adapun Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) terbanyak di Provinsi Jawa Tengah adalah Kabupaten Rembang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 1,07%, sedangkan kabupaten/kota dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) paling sedikit adalah Kota Semarang dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) sebesar 0,05%.

Grafik 2. 14. Posisi Relative Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk menopang kelangsungan hidupnya (BPS, 2024). Ini meliputi kebutuhan akan makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, serta akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial. Pengukuran kemiskinan ekstrem umumnya menggunakan ukuran kemiskinan absolut yang konsisten antar negara dan antar waktu. Bank Dunia merevisi garis kemiskinan ekstrem dari US1,90

menjadi US2,15 per kapita per hari (menggunakan *Purchasing Power Parity*/PPP tahun 2017) (World Bank, 2024). Badan Pusat Statistik (BPS) menghitung jumlah dan angka kemiskinan ekstrem setiap tahunnya berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (BPS, 2024).

Tabel 3. 1 Tingkat dan Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem Tiap Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2021-2023

No	Kode	Nama Daerah	Estimasi Jumlah Kemiskinan (ribu jiwa)			Estimasi Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)		
			2021*	2022*	2023**	2021*	2022*	2023**
1	3300	Provinsi Jawa Tengah	795,51	689,71	391,92	2,28	1,97	1,11
2	3301	Cilacap	20,7	37,96	21,79	1,2	2,19	1,25
3	3302	Banyumas	63,53	23,91	13,07	3,72	1,39	0,76
4	3303	Purbalingga	17,23	20,84	11,25	1,83	2,19	1,18
5	3304	Banjarnegara	36,59	14,23	14,01	3,95	1,53	1,5
6	3305	Kebumen	52,84	65,86	29,74	4,42	5,51	2,49
7	3306	Purworejo	9,08	7,74	9,75	1,27	1,08	1,36
8	3307	Wonosobo	26,54	38,73	12,58	3,36	4,89	1,59
9	3308	Magelang	28,5	29,95	18,11	2,19	2,29	1,37
10	3309	Boyolali	18,42	5,36	1,96	1,87	0,54	0,2
11	3310	Klaten	24,3	26,19	14,77	2,07	2,23	1,26
12	3311	Sukoharjo	10,51	3,26	6,74	1,17	0,36	0,74
13	3312	Wonogiri	19,35	16,15	3,04	2,02	1,69	0,32
14	3313	Karanganyar	13,99	17,53	2,85	1,57	1,95	0,31
15	3314	Sragen	25,96	20,96	13,85	2,92	2,36	1,55
16	3315	Grobogan	25,54	31,74	3,16	1,85	2,29	0,23
17	3316	Blora	11,29	23,91	1,98	1,31	2,76	0,23
18	3317	Rembang	23,86	24,48	11,22	3,72	3,79	1,73
19	3318	Pati	29,5	10,86	15,61	2,34	0,86	1,23
20	3319	Kudus	8,84	5,64	3,91	1	0,63	0,43
21	3320	Jepara	8,84	23,59	17,12	0,69	1,82	1,31
22	3321	Demak	37,73	25,59	16,82	3,21	2,16	1,41
23	3322	Semarang	7,43	12,88	4,16	0,69	1,19	0,38
24	3323	Temanggung	16,1	7,51	2,58	2,07	0,96	0,33
25	3324	Kendal	17,8	22,59	6,28	1,82	2,3	0,64
26	3325	Batang	23	12,09	16,16	2,97	1,55	2,06
27	3326	Pekalongan	20,49	18,75	10,86	2,27	2,07	1,19
28	3327	Pemalang	59,88	36,17	23,9	4,61	2,78	1,84
29	3328	Tegal	12,87	10,56	3,48	0,9	0,73	0,24
30	3329	Brebes	82,43	72,22	75,59	4,56	3,99	4,17
31	3371	Kota Magelang	1,22	0,16	0	1	0,13	0
32	3372	Kota Surakarta	18,33	4,19	0,73	3,53	0,81	0,14
33	3373	Kota Salatiga	3,05	2,11	0,76	1,55	1,06	0,37
34	3374	Kota Semarang	7,8	11,55	0	0,42	0,61	0
35	3375	Kota Pekalongan	7,18	2,07	3,56	2,32	0,67	1,13
36	3376	Kota Tegal	4,81	2,39	0,56	1,93	0,95	0,22

Keterangan
* : Estimasi dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
** : Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE

Sumber: Kemenko PMK, 2024

Penentuan persentase dan jumlah penduduk miskin Kota Salatiga merujuk pada metode perhitungan dari BPS pada tahun 2021, 2022, dan 2024, dan Satgas P3KE pada tahun 2023. Pada tahun 2024, BPS kembali mengeluarkan estimasi angka kemiskinan ekstrem sebagaimana tabel 3.2 berikut:

Tabel 3. 2 Persentase Kemiskinan Eskترم Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah per Maret 2024

Kabupaten/ Kota	Nilai Estimasi PO Ekstrem	Kabupaten/Kota	Nilai Estimasi PO Ekstrem
Cilacap	1,28	Kudus	0,28
Banyumas	1,02	Jepara	0,84
Purbalingga	1,17	Demak	1,22
Banjarnegara	1,09	Semarang	0,32
Kebumen	1,26	Temanggung	0,44
Purworejo	1,4	Kendal	0,49
Wonosobo	1,26	Batang	0,4
Magelang	1,28	Pekalongan	0,51
Boyolali	0,84	Pemalang	0,92
Klaten	0,67	Tegal	0,87
Sukoharjo	0,42	Brebes	0,75
Wonogiri	0,81	Kota Magelang	0,61
Karanganyar	0,39	Kota Surakarta	0,81
Sragen	2,27	Kota Salatiga	0,34
Grobogan	0,89	Kota Semarang	0,31
Blora	0,89	Kota Pekalongan	0,38
Rembang	3,18	Kota Tegal	0,68
Pati	0,61		

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Angka kemiskinan tersebut sifatnya estimasi, dan bukan merupakan angka resmi statistik kemiskinan. Angka tersebut dihitung khusus sebagai rujukan internal bagi pemerintah daerah, terutama sebagai alat bantu dalam melakukan identifikasi dan evaluasi capaian upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) tingkat Kabupaten/Kota. Estimasi angka kemiskinan ekstrem tingkat Kabupaten/Kota dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran PPKE berdasar wilayah kabupaten/kota

Data Kemiskinan telah di tetapkan melalui Surat Keputusan Wali Kota Salatiga Nomor 000.7.2/270/2024 tanggal 29 Oktober 2024 berjumlah 4.815 kepala rumah tangga miskin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 5. Jumlah Rumah Tangga Miskin Kota Salatiga

No	Kecamatan	Kelurahan	KRT Aktif
1	Argomulyo	Cebongan	163
2	Argomulyo	Kumpulrejo	319
3	Argomulyo	Ledok	240
4	Argomulyo	Noborejo	359
5	Argomulyo	Randuacir	196
6	Argomulyo	Tegalrejo	159

No	Kecamatan	Kelurahan	KRT Aktif
7	Sidomukti	Dukuh	231
8	Sidomukti	Kalicacing	89
9	Sidomukti	Kecandran	273
10	Sidomukti	Mangunsari	409
11	Sidorejo	Blotongan	278
12	Sidorejo	Bugel	44
13	Sidorejo	Kauman Kidul	54
14	Sidorejo	Pulutan	217
15	Sidorejo	Salatiga	172
16	Sidorejo	Sidorejo Lor	244
17	Tingkir	Gendongan	51
18	Tingkir	Kalibening	123
19	Tingkir	Kutowinangun Kidul	217
20	Tingkir	Kutowinangun Lor	361
21	Tingkir	Sidorejo Kidul	360
22	Tingkir	Tingkir Lor	201
23	Tingkir	Tingkir Tengah	55

Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2024

Beberapa Indikator Intervensi Penghapusan Kemiskinan diantaranya: jamban/sanitasi layak, sumber air minum layak, sambungan listrik, rumah tidak layak huni, disabilitas, anak tidak sekolah usia 7-18 tahun, individu tidak bekerja dan rumah tangga berisiko stunting.

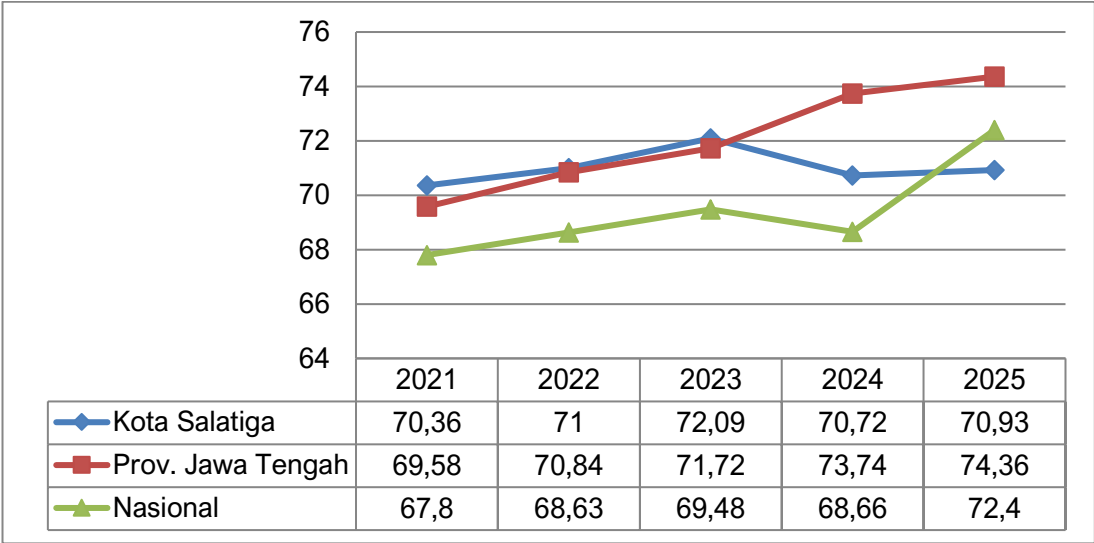
e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. TPAK sendiri merupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. Jumlah TPAK digunakan untuk mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Capaian TPAK Kota Salatiga Agustus Tahun 2025 sebesar 70,93% mengalami kenaikan 0,21% dari tahun 2024 sebesar 70,72%. Angka ini diperoleh dari jumlah angkatan kerja sebesar 114.52 ribu orang dibagi jumlah penduduk usia kerja sebanyak 161.45 ribu orang dikalikan 100% (sumber data dari Berita Resmi Stastistik Kota Salatiga No 17/12/3373/Th.XVII, tanggal 11 Desember 2025). Target indikator TPAK sampai dengan tahun terakhir RPD (tahun 2023-2026) yaitu tahun 2026 sebesar 70,10% sedangkan realisasi kinerja tahun 2025 adalah 70,93% maka realiasi sudah mencapai lebih dari yang ditargetkan. Faktor – faktor keberhasilan diantaranya bertambahnya jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk usia kerja dan berkurangnya jumlah pengangguran.

Pada tahun 2025, capaian TPAK Kota Salatiga berada di bawah capaian TPAK Provinsi Jawa Tengah bulan Agustus yang tercatat sebesar 74,36 persen, namun lebih tinggi dibandingkan capaian TPAK nasional sebesar 72,40 persen. Perbandingan perkembangan TPAK Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional selama periode 2021–2025 tersaji pada grafik di bawah ini.

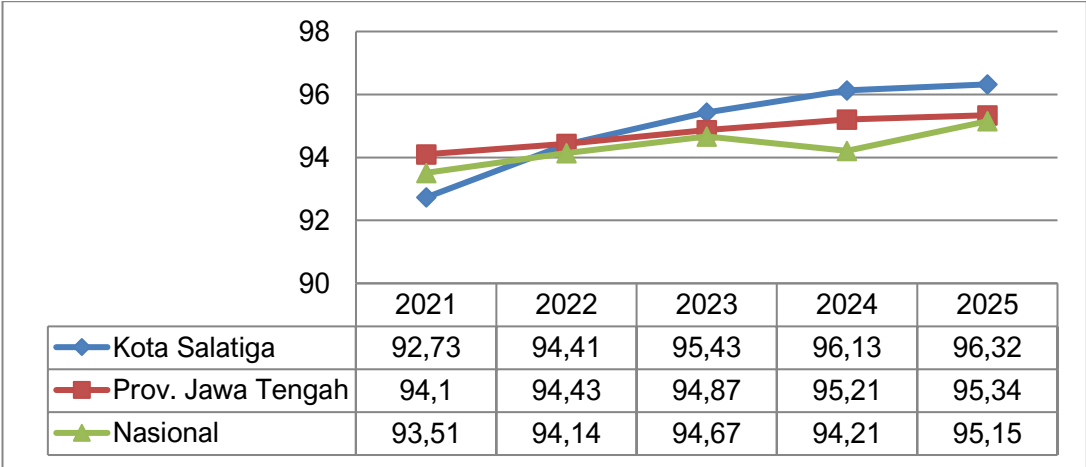
Grafik 2. 15. Perkembangan TPAK Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Kondisi setelah adanya pandemi Covid-19 rasio penduduk yang bekerja di Kota Salatiga menunjukkan tren yang cenderung membaik. Lapangan pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah sektor manufaktur, sedangkan yang mengalami penurunan jumlah yang cukup besar adalah sektor jasa-jasa. Gambaran perkembangan rasio penduduk yang bekerja Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagai berikut:

Grafik 2. 16. Perkembangan Rasio Penduduk Yang Bekerja Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025 (%)



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Rasio penduduk bekerja di Kota Salatiga selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 92,73 persen pada tahun 2021 menjadi 96,32 persen pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kota Salatiga telah terserap dalam kegiatan ekonomi, serta mencerminkan membaiknya kondisi pasar kerja pascapandemi.

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan nasional, rasio penduduk bekerja Kota Salatiga secara konsisten berada pada level yang relatif tinggi, khususnya sejak tahun 2023. Pada tahun 2025, rasio penduduk bekerja Kota Salatiga tercatat lebih tinggi dibandingkan Provinsi Jawa Tengah (95,34 persen) maupun nasional (95,15 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyerapan tenaga kerja di Kota Salatiga relatif lebih baik, serta pasar kerja lokal mampu menyerap angkatan kerja secara optimal.

Peningkatan rasio penduduk bekerja ini juga mencerminkan stabilitas aktivitas ekonomi daerah, terutama pada sektor-sektor jasa, perdagangan, dan industri pengolahan yang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Salatiga. Namun demikian, kenaikan rasio yang mulai melambat pada tahun 2025 mengindikasikan bahwa ruang peningkatan penyerapan tenaga kerja mulai terbatas, sehingga tantangan ke depan tidak hanya pada penciptaan lapangan kerja baru, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

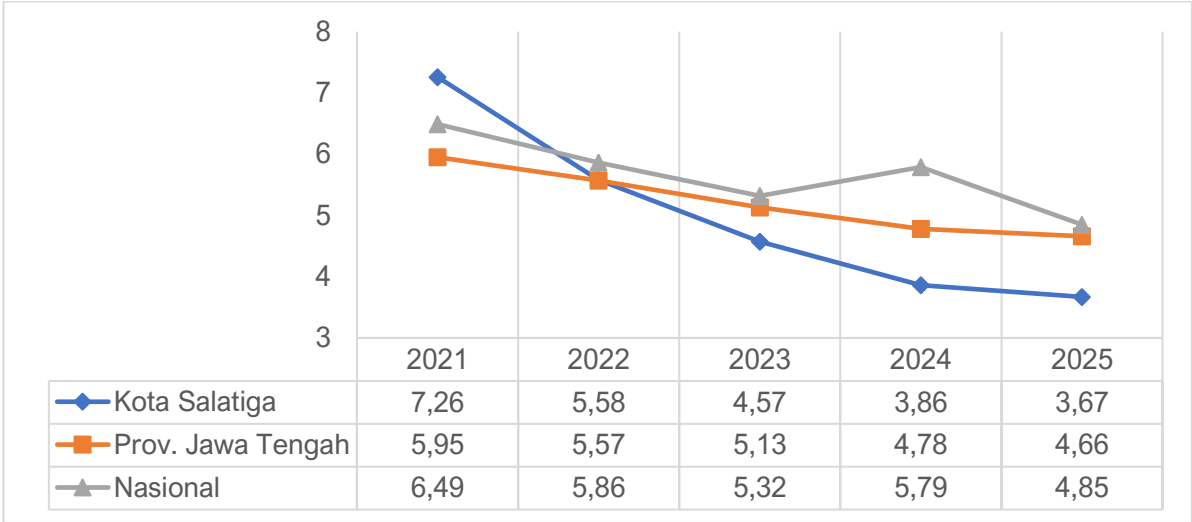
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator ketenagakerjaan yang ditunjukkan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di suatu wilayah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran terbuka meliputi :

- penduduk yang sedang mencari pekerjaan;
- penduduk yang sedang mempersiapkan suatu usaha;
- penduduk yang merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
- penduduk yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai

Indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Salatiga Agustus Tahun 2025 yaitu 3,67% mengalami penurunan sebesar 0,19% dari Agustus Tahun 2024 sebesar 3,86%. Berarti di antara 100 orang angkatan kerja ditemukan sekitar 3 sampai 4 orang penganggur. Perkembangan tingkat pengangguran terbuka terlihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 17. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025(%)



Sumber : Bappeda Kota Salatiga, Tahun 2025

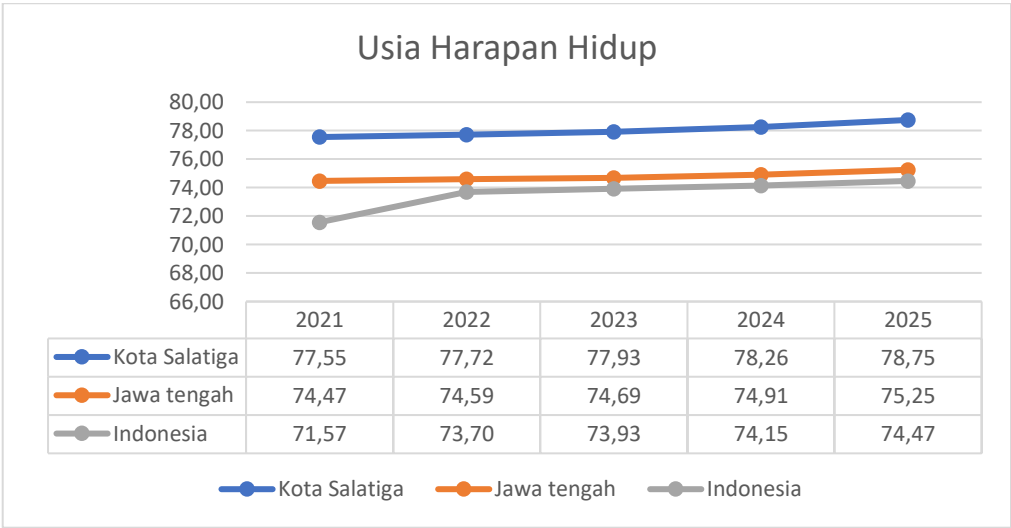
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Angka Harapan Hidup

Definisi Usia Harapan Hidup adalah rata- rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x pada suatu tahun tertentu dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Angka Harapan Hidup yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun.

Usia harapan hidup saat lahir tahun 2025 Kota Salatiga sebesar 78,75 tahun berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 75,24 dan capaian Nasional sebesar 74,47. Hal ini berarti dari tahun 2021 sampai tahun 2025, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup pada usia 78 tahun. Perkembangan Usia harapan hidup dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.18. Perkembangan Usia Harapan Hidup Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2025(angka)



Sumber : BPS Kota Salatiga, Tahun 2025

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan dinamika kependudukan yang berpengaruh terhadap kebutuhan pelayanan dasar dan arah kebijakan pembangunan daerah. Berdasarkan data Tahun 2021–2025, laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga menunjukkan kondisi fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada dua tahun terakhir.

Pada Tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga tercatat sebesar 0,83 persen. Selanjutnya pada Tahun 2022 dan 2023 terjadi perlambatan pertumbuhan masing-masing menjadi 0,8 persen dan 0,57 persen. Penurunan laju pertumbuhan yang mengindikasikan melambatnya dinamika pertumbuhan penduduk. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain perubahan struktur demografi, dinamika kelahiran dan kematian, serta mobilitas penduduk.

Pada Tahun 2024 dan 2025, laju pertumbuhan penduduk kembali mengalami peningkatan masing-masing menjadi 1,18 persen dan 1,20 persen. Peningkatan ini mencerminkan mulai pulihnya pertumbuhan penduduk yang sejalan dengan membaiknya kondisi sosial ekonomi daerah serta meningkatnya mobilitas dan migrasi penduduk ke Kota Salatiga.

Secara umum, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga selama periode 2021–2025 berada pada kisaran $\pm 0,91$ persen per tahun, yang menunjukkan pertumbuhan penduduk relatif terkendali. Namun demikian, kecenderungan peningkatan pada dua tahun terakhir perlu menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar, perumahan dan permukiman, serta penciptaan lapangan kerja, guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan kependudukan.

Grafik 2.19 Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : BAPPEDA, Tahun 2025

c. Cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS

Indikator kinerja Cakupan Penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS dapat dihitung dengan membagi jumlah penduduk terdata dalam DTKS dibagi dengan jumlah seluruh penduduk yang memenuhi. Indikator tersebut merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Pada tahun 2024 angka kemiskinan ditargetkan 4,67- 4,59 dan terealisasi 4,57 di akhir RPD ditargetkan 4,67-4,59, sehingga capaian kinerja mencapai 100,21% dengan status Tercapai. Faktor yang menyebabkan tercapainya kinerja ini diantaranya melaksanakan koordinasi intensif secara vertikal dan horisontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan masalah kesejahteraan sosial. Adapun kegiatannya meliputi :

- 1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
- 2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
- 3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
- 4) verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/penerima bansos).

Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani ditargetkan 75% terealisasi 92,72% dan di akhir RPD target 70 persen dengan capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 123,62% dengan status Tercapai. (Data 2025?) Faktor- faktor yang mendukung diantaranya :

- 1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
- 2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
- 3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
- 4) verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan/ penerima bansos)

d. Pola Pangan Harapan

Indikator kualitas konsumsi pangan ditunjukkan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang dipengaruhi oleh keragaman dan keseimbangan konsumsi antar kelompok pangan. PPH biasanya digunakan untuk perencanaan konsumsi, kebutuhan dan penyediaan pangan yang ideal di suatu wilayah. Semakin beragam bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat, maka semakin rendah tingkat ketergantungan masyarakat terhadap jenis bahan pangan tertentu. Hal ini akan mendorong terwujudnya ketahanan pangan di tengah masyarakat.

Indikator kinerja Pola Pangan Harapan merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Jika skor PPH semakin mendekati 100, konsumsi pangan masyarakat semakin beragam dan bergizi seimbang.

Realisasi Skor Pola Pangan Harapan tahun 2021 sebesar 90 tahun 2022 sebesar 95,51 tahun 2023 sebesar 92,2 dan realisasi tahun 2024 adalah 94,4 realisasi tahun 2025 adalah 92,73 dengan target 96,90 Jika dibandingkan Target Skor PPh pada Tahun 2025 tidak tercapai.

Demikian Skor Pola Pangan Harapan mengalami fluktuasi naik turun dalam beberapa tahun terakhir

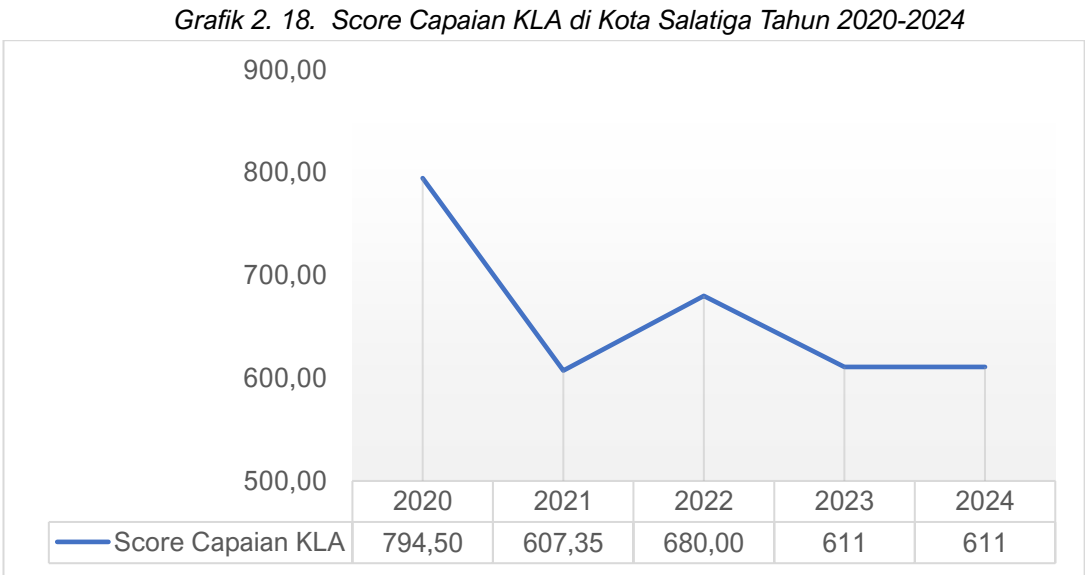
Dasar perhitungan Skor Pola Pangan Harapan untuk tahun ini menggunakan Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan, adapun Realisasi Skor PPH sejak Tahun 2021 menggunakan perhitungan Susenas Tahun 2020.

Terdapat 9 komoditas kelompok pangan yang mempengaruhi skor PPH berupa padi-padian; umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah, dan lain-lain. komoditas padi-padian. Dari kesembilan kelompok pangan diatas, diperoleh 5 kelompok pangan yang memiliki nilai dibawah skor maksimal, yaitu padi-padian, umbi-umbian, buah/ biji berminyak, kacang-kacangan, dan gula.

Jika dibandingkan dengan realisasi kinerja sebelumnya, maka terdapat realisasi penurunan sebesar 2,6 point. Penurunan angka ini banyak terdapat di komoditas padi dan umbi–umbian. jika dilihat dari penurunan angka komoditas padi dan umbi–umbian ini, sebagai kesuksesan pemerintah dalam mendorong bahan pangan non beras dan diversifikasi produk lokal.

e. Score Capaian Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah suatu pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk pemenuhan hak-hak anak. Indikator kinerja Capaian Kota Layak Anak (KLA) merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

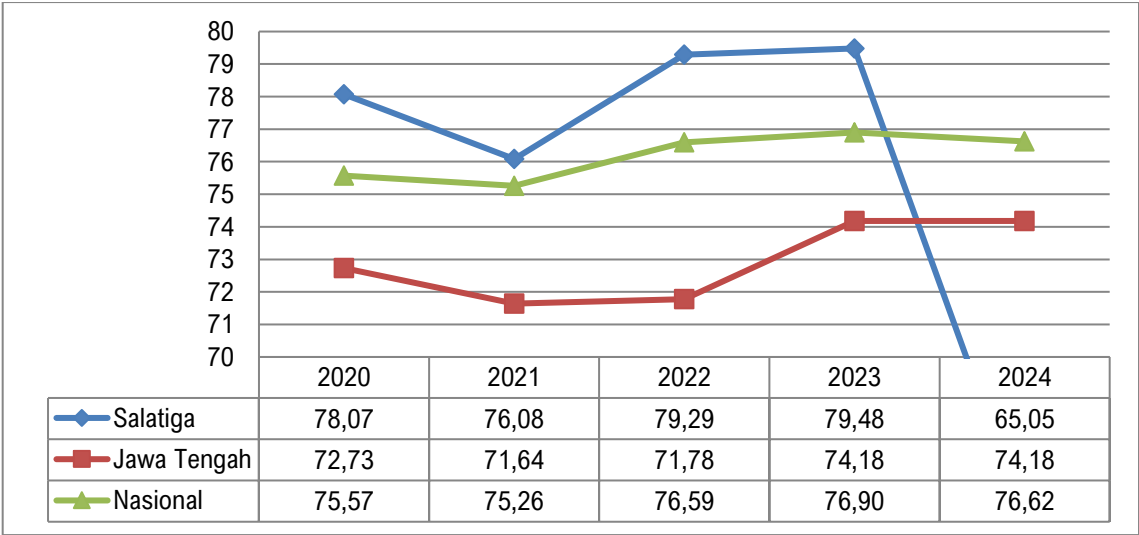
Target kinerja capaian kota layak anak tahun 2024 sebesar 620 dapat tercapai sebesar 611 sehingga realisasi capaian sebesar 98,55%. Tingkatan Kota Layak Anak Kota Salatiga berada pada kategori Madya dengan kriteria score 500 sampai dengan 800. Angka capaian kinerja untuk capaian kota layak anak didapatkan dari hasil penilaian evalusai kota layak anak dari

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nilai untuk KLA didapatkan dari penilaian pada tahun berjalan dengan menilai kinerja pada tahun sebelumnya. Hasil penilaian pada tahun 2024 belum keluar nilai yang didapatkan, sehingga masih menggunakan nilai pada tahun 2023. Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2013, standar nasional skor kota layak anak adalah 1000, maka jika dibandingkan dengan skor capaian tahun 2023 sebesar 611, Kota Salatiga masih perlu meningkatkan kinerjanya untuk mencapai standar nasional yang telah ditetapkan.

f. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender atau disingkat IDG merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Tiga indikator yang dipakai dalam IDG, antara lain keterlibatan di parlemen, partisipasi sebagai tenaga profesional, dan sumbangan dalam pendapatan pekerjaan. Pada Tahun 2024 target IDG Kota Salatiga ditetapkan sebesar 80,5 terealisasi 65,05 sehingga capaian kinerjanya sebesar 80,80% sedangkan untuk Tahun 2023 target yang ditetapkan sebesar 80 terealisasi sebesar 79,48 mengalami kenaikan 0,19 dari tahun 2022 dengan indeks 79,29. Capaian IDG Kota Salatiga berada dibawah Provinsi Jawa Tengah dengan indeks 74,18 dan Nasional dengan indeks 76,62. Perbandingan capaian IDG tersebut dapat terlihat pada grafik berikut.

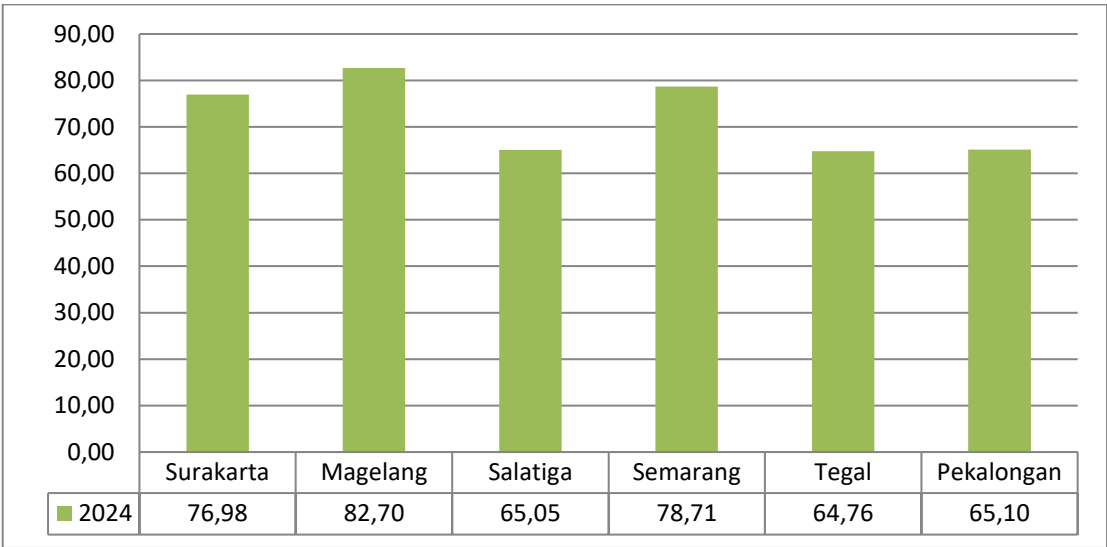
Grafik 2. 19. Perbandingan IDG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 berada pada peringkat keenam. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 20. Perbandingan IDG Kota Salatiga dengan Kota-Kota Lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

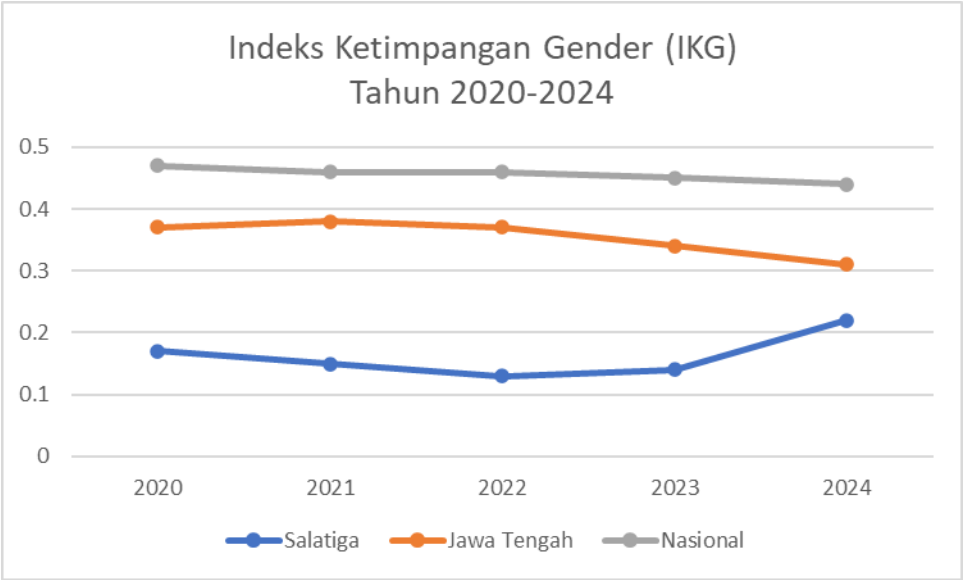
g. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Salatiga selama periode 2020–2024 menunjukkan dinamika capaian kesetaraan gender yang perlu dicermati dalam perencanaan pembangunan daerah. Pada tahun 2020, nilai IKG Kota Salatiga tercatat sebesar 0,17 dan mengalami penurunan secara bertahap hingga mencapai 0,13 pada tahun 2022. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kondisi kesetaraan gender yang mencerminkan dampak positif dari implementasi kebijakan dan program pengarusutamaan gender di Kota Salatiga. Namun demikian, pada tahun 2023 nilai IKG kembali meningkat menjadi 0,14, dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan yang cukup signifikan menjadi 0,22. Peningkatan nilai IKG ini menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya ketimpangan gender, yang mengindikasikan belum optimalnya keberlanjutan capaian pembangunan responsif gender, khususnya dalam aspek partisipasi ekonomi, akses terhadap kesempatan kerja, serta keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan.

Jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan nasional, nilai IKG Kota Salatiga selama periode 2020–2024 secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi dan nasional, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan gender di Kota Salatiga relatif lebih rendah. Pada tahun 2024, nilai IKG Kota Salatiga tercatat sebesar 0,22, lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah sebesar 0,31 dan nasional sebesar 0,44. Meskipun demikian, tren peningkatan IKG Kota Salatiga pada dua tahun terakhir berlawanan dengan tren penurunan IKG di tingkat provinsi dan nasional, sehingga menjadi sinyal peringatan terhadap potensi perlambatan capaian kesetaraan gender di tingkat daerah. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan kebijakan dan program Pengarusutamaan Gender (PUG) secara terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan lintas perangkat daerah. Arah kebijakan difokuskan pada peningkatan partisipasi ekonomi perempuan, penguatan akses terhadap layanan dasar yang responsif gender, serta peningkatan keterwakilan

perempuan dalam proses pengambilan keputusan pembangunan, guna menurunkan nilai IKG dan mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan gender.

Nilai IKG Kota Salatiga lebih baik dari pada nilai IKG Provinsi Jawa Tengah maupun Nasional sebagaimana terlihat pada grafik berikut:



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun Mei 2025

Keterangan : Data 2025 baru rilis sampai dengan Bulan Mei 2025

h. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan keluarga dari tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. Berdasarkan data yang tersedia, nilai i-Bangga Kota Salatiga mengalami fluktuasi dalam periode tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, nilai i-Bangga tercatat sebesar 60,1 dan mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 56,1. Data untuk tahun 2022 dan 2023 tidak tersedia, namun pada tahun 2024 nilai i-Bangga meningkat signifikan menjadi 67,3. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam kualitas kehidupan keluarga di Kota Salatiga, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti peningkatan layanan sosial, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta keberhasilan program pembinaan keluarga yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Nilai i-Bangga yang terus ditingkatkan dapat menjadi landasan kuat dalam merumuskan kebijakan pembangunan berbasis keluarga, guna mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya. Suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. Indeks pembangunan kualitas keluarga mencerminkan seberapa tinggi kualitas suatu keluarga. Daerah yang memiliki indeks pembangunan yang tinggi mengindikasikan memiliki ketahanan yang baik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial ekonomi. Indeks pembangunan keluarga Kota Salatiga Kota Salatiga menunjukkan angka sebesar 67,3. Angka ini ditargetkan semakin meningkat setiap tahunnya. Angka indeks pembangunan keluarga yang tinggi artinya keluarga tersebut telah berhasil menciptakan kondisi lingkungan yang harmonis.

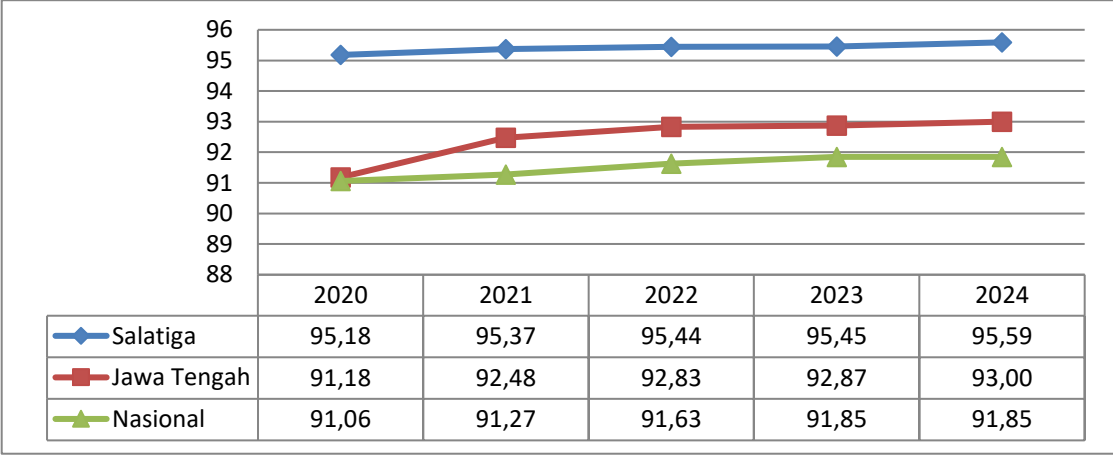
i. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender atau disingkat IPG adalah angka pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia (sama seperti definisi IPM), namun terpilih berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. IPG dapat digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender terjadi apabila nilai IPG mendekati/sama dengan angka 100.

Tahun 2024 target yang ditetapkan untuk Indeks Pembangunan Gender sebesar 95,5 terealisasi dengan nilai 95,59 sehingga tingkat capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan pada tahun 2023 target IPG untuk tahun 2023 dengan nilai 95 dapat terealisasi sebesar 95,45 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100,47%.

Capaian IPG Kota Salatiga berada diatas capaian IPG Provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 93,00 dan Nasional sebesar 91,85 sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

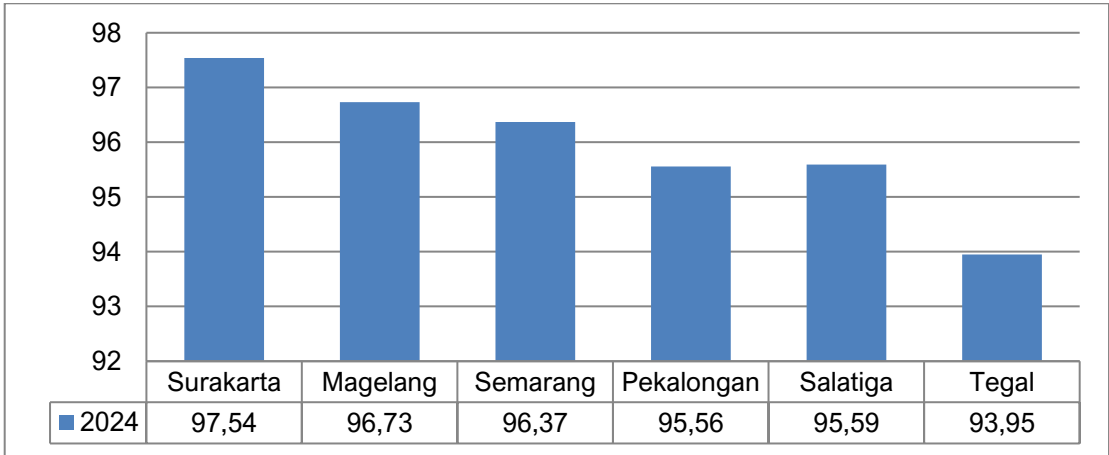
Grafik 2. 21. Perbandingan IPG Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun April 2025

Perbandingan capaian IPG Kota Salatiga dengan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat ke 7 sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini.

Grafik 2. 22. Perbandingan IPG Kota Salatiga dengan Kota-kota lain di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

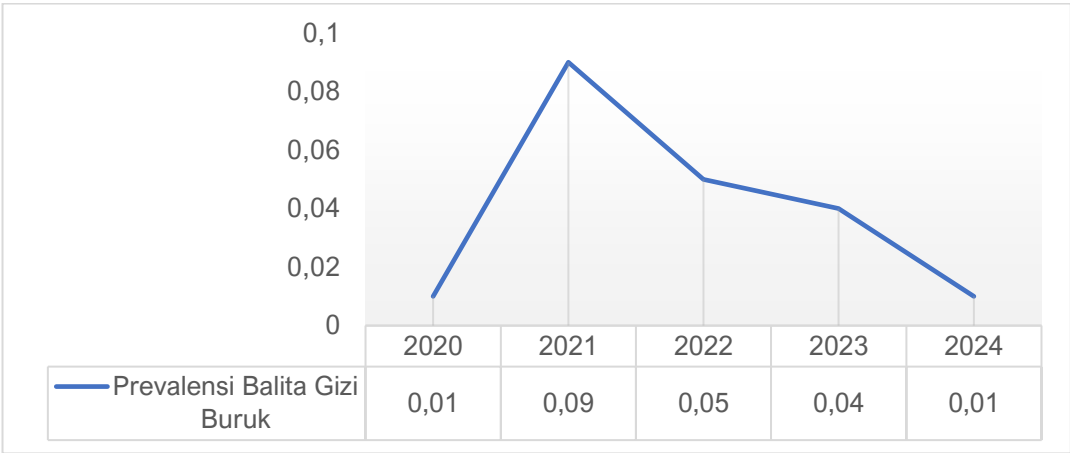


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun April 2025

j. **Prevalensi Balita Gizi Buruk**

Pada tahun 2024 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,01%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2020-2024 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Walaupun masih munculnya kasus gizi buruk berulang dengan balita yang sama karena adanya kelainan pada balita tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan KIE, Sosialisasi terkait gizi seimbang dan bahayanya balita dengan gizi buruk serta dengan memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin.

Grafik 2. 23. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 7,01 persen atau sebanyak 605 Balita Stunting pada tahun 2024 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. Stunting akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2. 6. Data Stunting Kota Salatiga 2020-2024

Tahun	BADUTA		BALITA	
2020	329/4.649	7,07%	1099/11.462	9,58%
2021	286/3.431	8,34%	856/9.480	9,03%
2022	204/3.746	5,44%	647/10.418	6,21%
2023	135/2927	4,61%	484/8.177	5,92%
2024	181/2698	6,71%	605/8627	7,01%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

a. Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian suatu daerah dalam suatu periode dapat digambarkan dari Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Analisis Pertumbuhan PDRB merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan masyarakat dari sudut pandang ekonomi. Melalui dinamika dari berbagai kegiatan ekonomi yang ada, akan dapat diidentifikasi karakteristik wilayah berikut potensi-potensi dan kelemahan yang memerlukan perhatian demi kemajuan wilayah yang semakin baik dimasa mendatang.

Pada tahun 2024, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2010 sebesar Rp.11.505,05 (dalam miliar) mengalami kenaikan sebesar Rp.586,32 (dalam miliar) atau 5,37% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp.10.918,73 (dalam miliar) .

Kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 3.364,87 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 2,18 (dalam miliar).

Pada tahun 2025, angka sangat sementara PDRB triwulan II 2025 atas dasar harga berlaku tercatat sekitar **Rp 4.810,77 miliar** dan ADHK konstan sekitar **Rp 3.031,75 miliar dengan diperkirakan** kontribusi tertinggi PDRB ADHK menurut lapangan usaha masih pada sektor industri pengolahan berada **±33% – 34%**.

Data PDRB ADHK tahun dasar 2010 menurut lapangan usaha Kota Salatiga Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 7. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	419,10	430,02	445,45	453,68	477,82
B	Pertambangan dan Penggalian	3,36	3,27	2,94	2,99	2,18
C	Industri Pengolahan	2.831,44	2.955,35	3.092,87	3.242,60	3.364,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,96	23,08	24,56	25,26	26,76
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,77	7,87	8,15	8,46	8,70
F	Konstruksi	1.288,95	1.299,23	1.312,76	1.377,88	1.475,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.310,22	1.380,39	1.436,36	1.500,64	1.574,03
H	Transportasi dan Pergudangan	251,54	259,35	391,62	419,69	447,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	730,71	762,77	872,57	972,29	1.034,99
J	Informasi dan Komunikasi	514,41	546,88	558,13	594,27	648,42

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	333,74	337,29	339,17	346,27	353,48
L	Real Estate	508,42	519,27	544,72	579,00	600,50
M, N	Jasa Perusahaan	115,67	119,39	126,15	133,41	144,30
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	467,89	476,44	487,32	499,82	535,25
P	Jasa Pendidikan	436,68	436,81	443,50	468,26	498,21
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	161,98	162,41	167,56	176,63	188,51
R, S, T, U	Jasa lainnya	99,88	100,49	111,47	117,54	124,20
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	9.503,71	9.822,00	10.365,44	10.918,73	11.505,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

PDRB ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB ADHK menggunakan harga pada tahun tertentu dan saat ini yang digunakan yaitu tahun dasar 2010. PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi.

Pada tahun 2024, jumlah PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 18.079.27 (dalam miliar) mengalami peningkatan sebesar Rp1.308,84 (dalam miliar) atau 7,80% jika dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 16.770,34 (dalam miliar) Kontribusi tertinggi PDRB ADHB menurut lapangan usaha pada sektor industri pengolahan sebesar Rp. 5.992,10 (dalam miliar). Sedangkan kontribusi terendah pada sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp.3,82 (dalam miliar).

Data Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut lapangan usaha tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 8. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	602,19	631,75	683,29	727,26	791,94
B	Pertambangan dan Penggalian	5,44	5,34	4,95	5,16	3,82
C	Industri Pengolahan	4.272,67	4.586,93	5.042,85	5.551,83	5.992,10
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,71	25,76	27,66	28,74	30,57
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	90,60	9,31	9,85	10,32	11,15
F	Konstruksi	1.850,35	1.929,82	2.086,17	2.282,64	2.456,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	1.704,86	1.823,95	1.973,25	2.136,25	2.285,99

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	Mobil dan Sepeda Motor					
H	Transportasi dan Pergudangan	304,90	324,56	517,84	600,04	649,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	944,91	1.002,97	1.196,13	1.317,09	1.431,13
J	Informasi dan Komunikasi	510,45	542,72	555,04	593,00	649,02
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,77	498,68	543,54	567,51	693,65
L	Real Estate	612,78	631,73	675,21	725,01	755,84
M,N	Jasa Perusahaan	167,00	174,33	192,12	210,37	232,41
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	690,22	705,65	741,13	806,63	853,08
P	Jasa Pendidikan	733,79	741,66	757,28	806,63	871,84
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	239,51	242,33	252,67	272,01	295,90
R, S, T, U	Jasa lainnya	127,24	129,09	148,68	161,50	174,86
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,09	19.079,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 6 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori dan net ekspor barang dan jasa.

Tabel 2. 9. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2040 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	8.539,32	8.824,97	9.692,95	10.533,34	11.412,78
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	136,71	143,12	161,69	180,22	202.48
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.251,53	1.307,85	1.321,27	1.391,99	1.484,97
Pembentukan Modal tetap Bruto	6.284,91	6.384,00	6.761,85	7.143,45	7.672,15
Perubahan Inventori	126,24	111,89	146,33	168,40	125.97
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(3.066,87)	(2.762,91)	(2.676,44)	(2.647,15)	-2.819,08

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Produk Domestik Regional Bruto	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,34	18.079,27

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

Selain dinilai dengan Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020-2024, dan terjadi fluktuasi penurunan dan kenaikan di beberapa komponen. Sedangkan pada tahun 2020 dan tahun 2024 terjadi kenaikan di beberapa komponen dengan nilai akhir PDRB 11,505,05 milyar rupiah.

Tabel 2. 10. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (dalam miliar rupiah)

Jenis Pengeluaran	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.040,15	6.152,12	6.493,80	6.814,96	7.188,09
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	85,89	87,15	91,43	98,08	108,25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	776,65	795,55	796,20	812,57	838,42
Pembentukan Modal tetap Bruto	4.150,35	4.182,73	4.263,74	4.408,81	4.610,58
Perubahan Inventori	122,13	90,51	118,27	124,83	88,49
Net Ekspor Barang dan Jasa/Net	(1.671,46)	(1.486,07)	(1.398,12)	(1.340,56)	(1.328,77)
Produk Domestik Regional Bruto	9.503,71	9.822,00	10.365,31	10.918,69	11.505,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

Laju Pertumbuhan PDRB tahun 2024 yang dipengaruhi oleh berbagai jenis pengeluaran yang mengalami pertumbuhan PDRB pada Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga dengan angka 10,37%. Besarnya PK-LNPRT sama dengan output atau biaya produksi yang dikeluarkan dalam rangka melakukan aktivitas pelayanan pada masyarakat, anggota organisasi, atau kelompok masyarakat tertentu. Biaya produksi LNPRT sama dengan nilai konsumsi antara ditambah biaya primer (kompensasi pegawai, penyusutan, dan pajak atas produksi lainnya). Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan lembaga atas penggunaan barang dan jasa (antara) dan faktor produksi, ditambah nilai barang dan jasa yang berasal dari produksi sendiri atau pemberian pihak lain (transfer). LNPRT dibedakan atas 6 jenis lembaga, yaitu:

- Organisasi kemasyarakatan
- Organisasi sosial

- Organisasi profesi dan serikat buruh
- Organisasi kebudayaan, olahraga, dan rekreasi
- Partai Politik
- Lembaga keagamaan

Tabel 2. 11. Laju Pertumbuhan PDRB menurut Pengeluaran Kota Salatiga Tahun 2020-2024 (persen)

Jenis Pengeluaran PDRB	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga	(1,14)	1,85	5,55	4,95	5,48
Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga	(1,99)	1,47	4,90	7,28	10,37
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	(1,54)	2,43	0,08	2,11	3,23
Pembentukan Modal Tetap Bruto	(6,92)	0,74	1,94	3,35	4,61
Perubahan Inventori	86,97	(25,89)			
Net Ekspor Barang dan Jasa	9,36	11,09		0	
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	(1,68)	3,33	5,53	5,34	5,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

PDRB per kapita Kota Salatiga menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 dan terjadi pertumbuhan positif dengan nilai 5.37%. Pertumbuhan PDRB per kapita setiap tahunnya yang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan jumlah penduduk, menunjukkan tingkat kemakmuran dari penduduk yang lebih tinggi pada setiap tahunnya, hanya saja di tahun 2020 dampak pandemi menyebabkan pertumbuhan PDRB per kapita berada dibawah pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 12. Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Per Kapita Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai PDRB (Miliar RP)					
-ADHB	13.271,84	14.008,91	15.407,64	16.773,09	18.079,27
-ADHK 2010	9.503,71	9.822,00	10.365,31	10.918,69	11.505,05
Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 (%)	-1,68	3,35	5,53	5,34	5,37
PDRB perkapita (Juta Rp)					
-ADHB	69,14	72,39	78,26	76,51	
-ADHK 2010	49,51	50,75	53,14	54,89	
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010 (%)	(1,03)	2,71	4,70	3,29	
Jumlah Penduduk (Orang)	191.950	193.525	196,54	201,37	198,971
Pertumbuhan (%)	(0,66)	0,83	0,80	1,21	0,03

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Salatiga, 2024

b. Pengeluaran Riil Per Kapita

Besarnya pengeluaran konsumsi per kapita digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakat. Pengeluaran

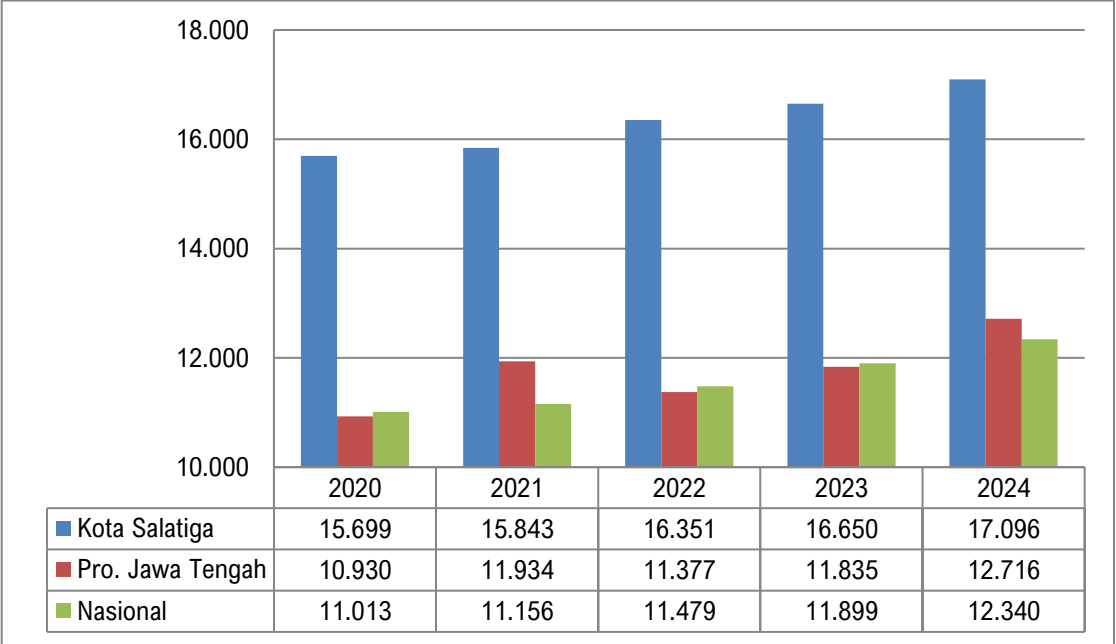
rumah tangga ini terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya.

Pengeluaran per kapita Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar Rp.16.650.000,- sama dengan tahun 2023 ,-

Capaian pengeluaran per kapita Kota Salatiga tahun 2023 berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp11.835.000,-dan Nasional sebesar Rp.11.899.000,-, secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut.

Data resmi pengeluaran per kapita di Kota Salatiga untuk tahun 2025 secara lengkap belum dipublikasikan secara resmi oleh BPS Kota Salatiga dalam rilis statistik yang tersedia saat ini. Namun, dari dokumen Statistik Daerah Kota Salatiga 2025 (yang mencakup gambaran kondisi ekonomi dan kesejahteraan daerah), disebutkan bahwa Pengeluaran per kapita per tahun mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Indikator ini biasanya mencerminkan pengeluaran konsumsi rumah tangga rata-rata per orang dalam setahun, dan meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

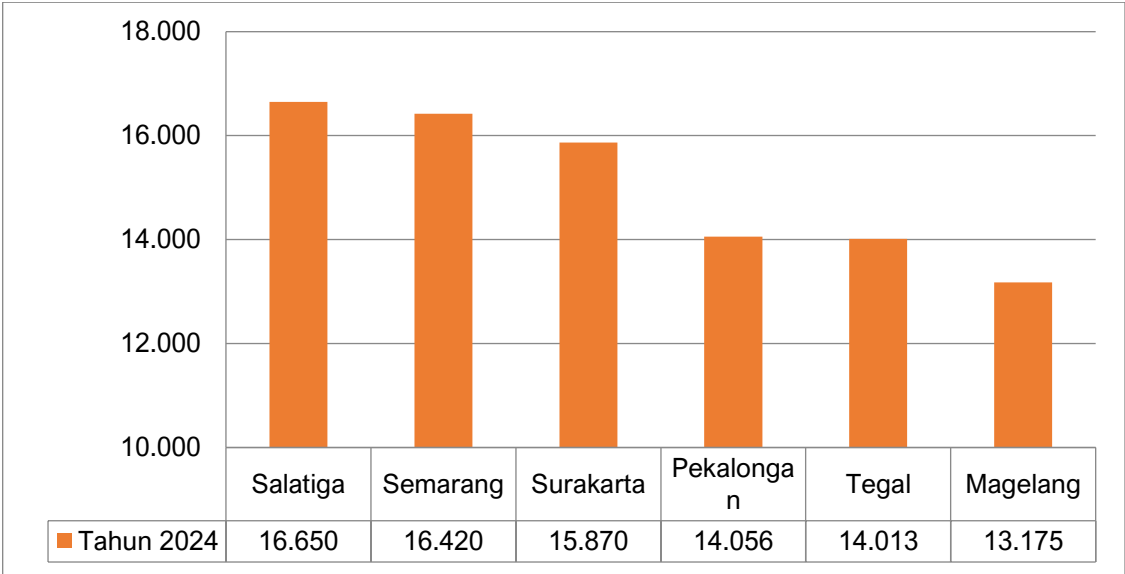
Grafik 2. 24. Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga, Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2020-2024 (Ribu Rupiah)



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perbandingan pengeluaran per kapita Kota Salatiga dengan kota-kota di Provinsi Jawa Tengah berada pada peringkat pertama sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 25. Perbandingan Pengeluaran Perkapita Kota Salatiga diantara Kota-kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 (Ribu Rupiah)

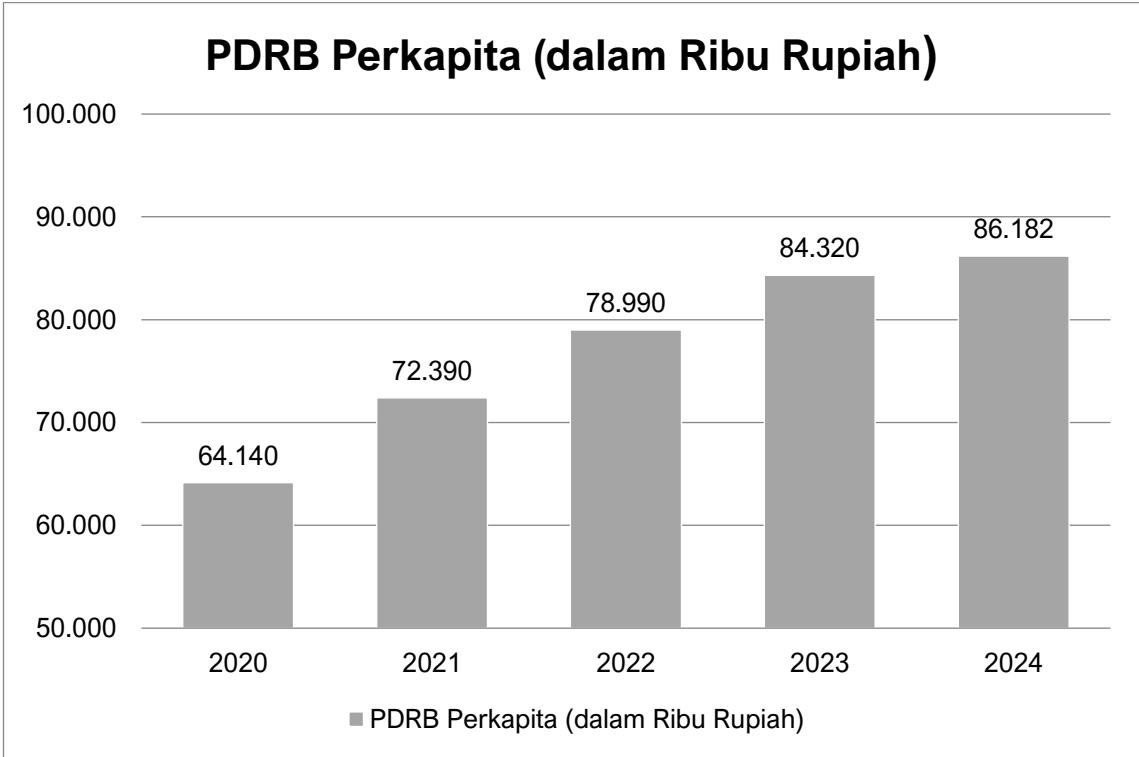


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

c. Pendapatan Riil Per Kapita

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) merupakan jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah. Nominal PDRB bila dibagi dengan jumlah penduduk suatu wilayah akan menghasilkan PDRB per kapita. Hasil perhitungan ini digunakan sebagai pendekatan untuk menghitung pendapatan per kapita penduduk suatu wilayah. PDRB perkapita di Kota Salatiga setiap tahunnya cenderung meningkat, yaitu pada tahun 2020 di angka Rp. 64.140.000,00 dan pada 2023 sebesar Rp. 84.320.000,00. Selanjutnya pada tahun 2024 di angka 86.182.000,00 Data PDRB perkapita di Kota Salatiga disajikan pada Grafik di bawah ini.

Grafik 2. 26. Grafik PDRB Perkapita Tahun 2020-2024 (Tw III)



Sumber : Badan Pusat Statistik, Tahun 2024

2.3.2. Daya Saing SDM

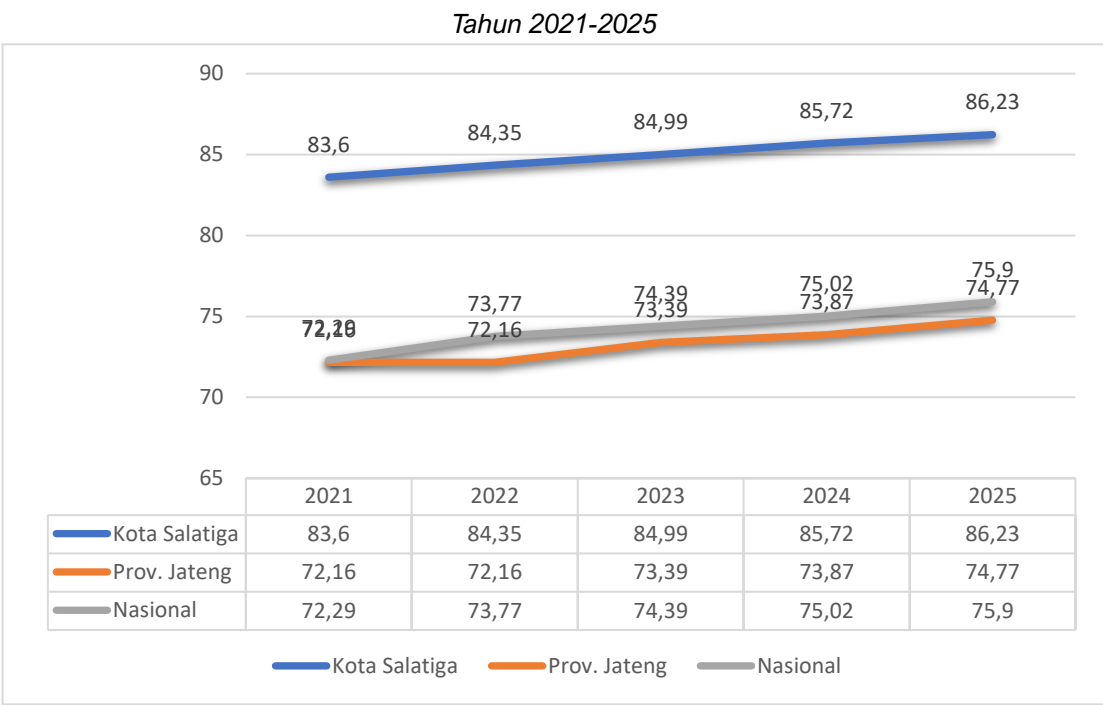
a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kota Salatiga yang berada pada kategori sangat tinggi dan menunjukkan tren peningkatan selama periode Tahun 2021–2025 mencerminkan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia, khususnya pada dimensi kesehatan dan pendidikan. Kondisi tersebut sejalan dengan arah pembangunan daerah yang menitikberatkan pada pengembangan SDM yang sehat dan cerdas sebagai fondasi utama peningkatan daya saing dan produktivitas masyarakat. Dalam konteks pengembangan perekonomian daerah yang unggul, peningkatan IPM berperan strategis dalam mendukung tersedianya tenaga kerja yang berkualitas, adaptif, dan berdaya saing. SDM yang memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik akan mendorong peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan sektor unggulan daerah, serta penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.

Selanjutnya, peningkatan IPM juga berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik bermutu, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, yang merupakan komponen utama dalam pembentukan kualitas pembangunan manusia. Penguatan akses, mutu, dan pemerataan layanan dasar menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan capaian IPM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pengembangan infrastruktur wilayah yang sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup turut mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Penyediaan infrastruktur dasar yang memadai, ramah lingkungan, dan berwawasan kesehatan akan berkontribusi pada peningkatan standar hidup layak, yang merupakan salah satu dimensi utama IPM.

Dengan demikian, IPM menjadi indikator kunci dalam mendukung pencapaian Tema RKPD Tahun 2027, serta menjadi dasar dalam penajaman arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang berorientasi pada pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pelayanan publik yang berkualitas, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Jawa Tengah, maka IPM Kota Salatiga selama enam tahun terakhir selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 27. Capaian IPM Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Ketiga dimensi dasar tersebut diukur dengan empat komponen IPM yaitu Umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita. Capaian komponen IPM selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2021-2025. Data capaian masing-masing komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2021-2025 disajikan pada Tabel di bawah ini.

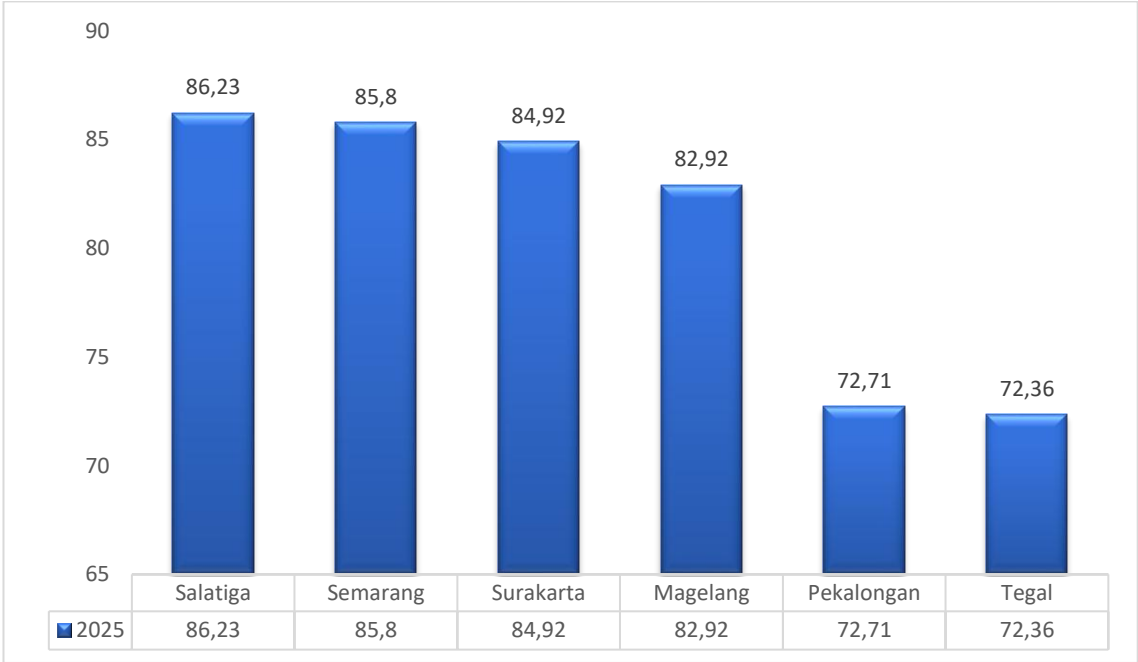
Tabel 2. 13. Komponen IPM Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No.	Komponen	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Umur Harapan Hidup (UHH)	77,55	77,72	77,93	78,27	78,75
2.	Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,42	15,43	15,44	15,46	15,47
3.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,66	10,95	11,24	11,48	11,49
4.	Pengeluaran Riil Perkapita (ribu Rp)	15.843	16.351	16.650	17.096	17.523
IPM Kota Salatiga		83,14	84,35	84,99	85,72	86,23
Jawa Tengah		69,98	69,98	70,52	73,87	74,77
Nasional		71,94	73,77	74,39	75,02	75,9

Sumber : BPS Jawa Tengah Tahun 2025

Pada tahun 2025 tidak terjadi perubahan peringkat di antara 6 (enam) Kabupaten/Kota dibandingkan tahun sebelumnya. Kota Salatiga masih menempati peringkat pertama, diikuti Kota Semarang di peringkat kedua, dan Kota Surakarta di peringkat ketiga. Perbandingan posisi capaian IPM Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 sebagaimana terlihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 28. Perbandingan Posisi IPM Kota Salatiga dengan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



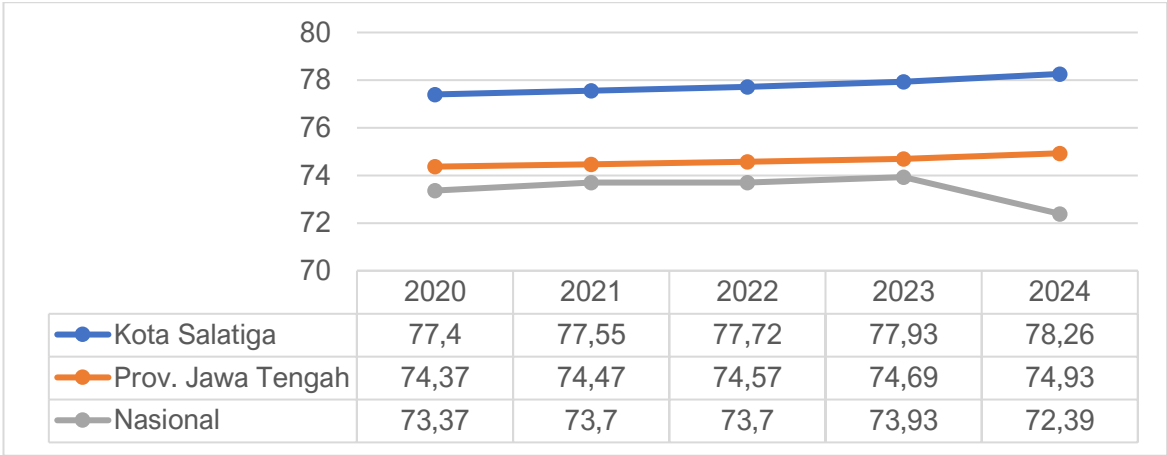
Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

1) Usia Harapan Hidup saat Lahir

Usia harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal. Data ini berguna untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan dampaknya pada kesejahteraan masyarakat. Semakin lama harapan hidup yang mampu dicapai maka semakin tinggi derajat kesehatannya. Usia harapan hidup saat lahir menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yang mencerminkan “lamanya hidup” sekaligus “hidup sehat” suatu masyarakat.

Usia harapan hidup saat lahir tahun 2024 Kota Salatiga sebesar 78,26 tahun berada diatas capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 74,69 dan capaian Nasional sebesar 73,39. Hal ini berarti dari tahun 2020 sampai tahun 2024, rata-rata penduduk Kota Salatiga dapat bertahan hidup pada usia 78 tahun. Tren perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga selama kurun waktu 2020 hingga 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

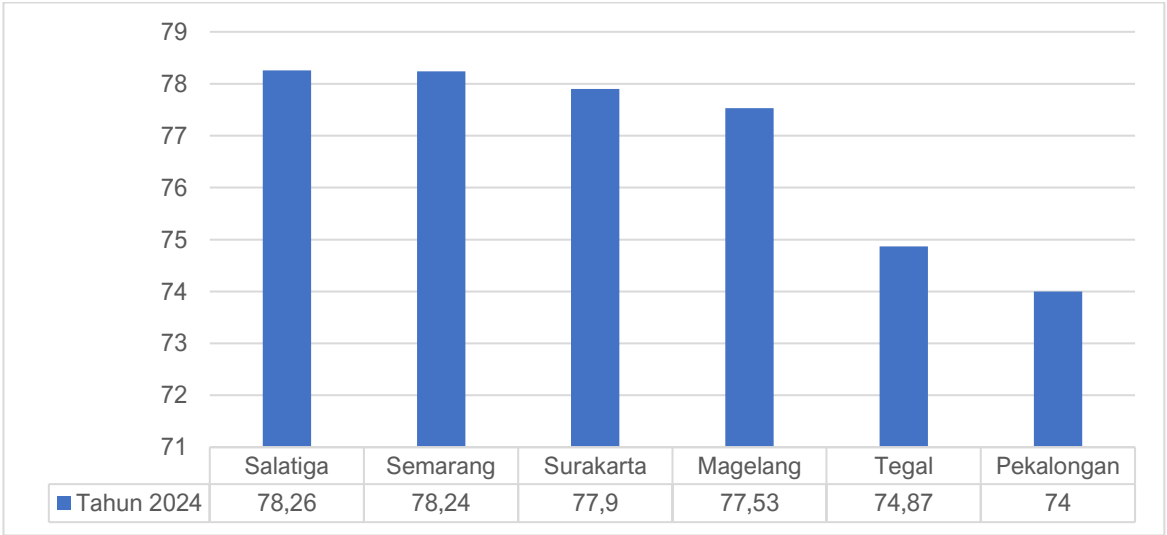
Grafik 2. 29. Perkembangan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga dengan kota-kota di Jawa Tengah berada pada peringkat pertama di ikuti oleh Kota Semarang sebagaimana terlihat dalam grafik dibawah ini:

Grafik 2. 30. Perbandingan Usia Harapan Hidup saat Lahir Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah 2024

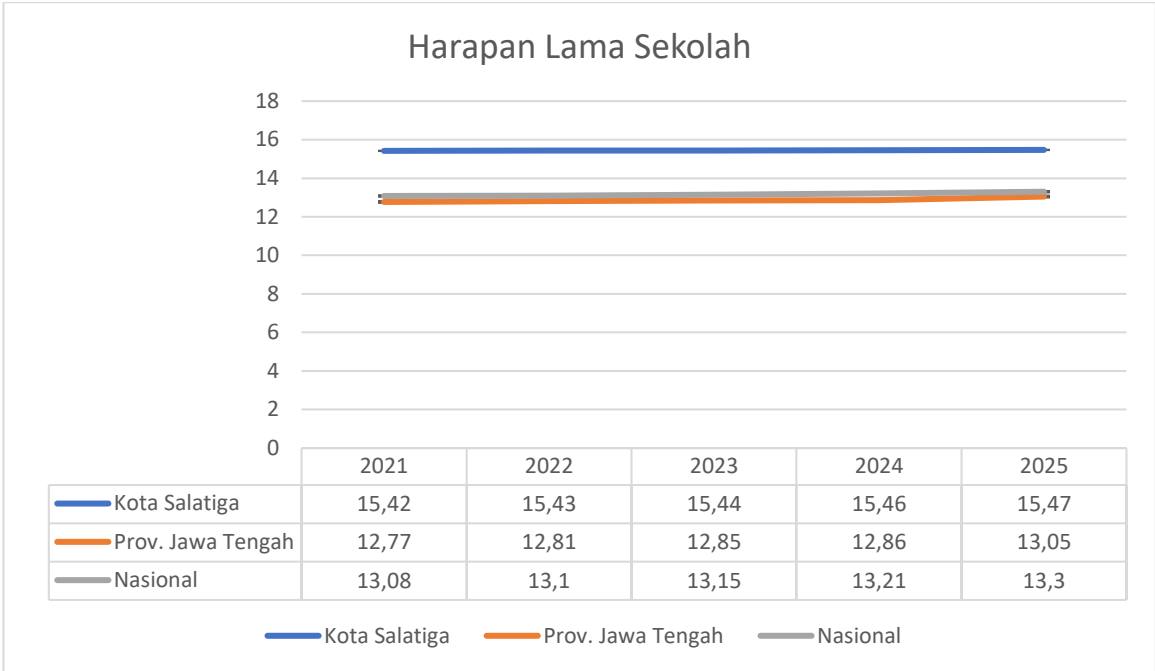


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2024

2) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah atau disingkat HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Grafik 2. 31. Perkembangan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021-2025

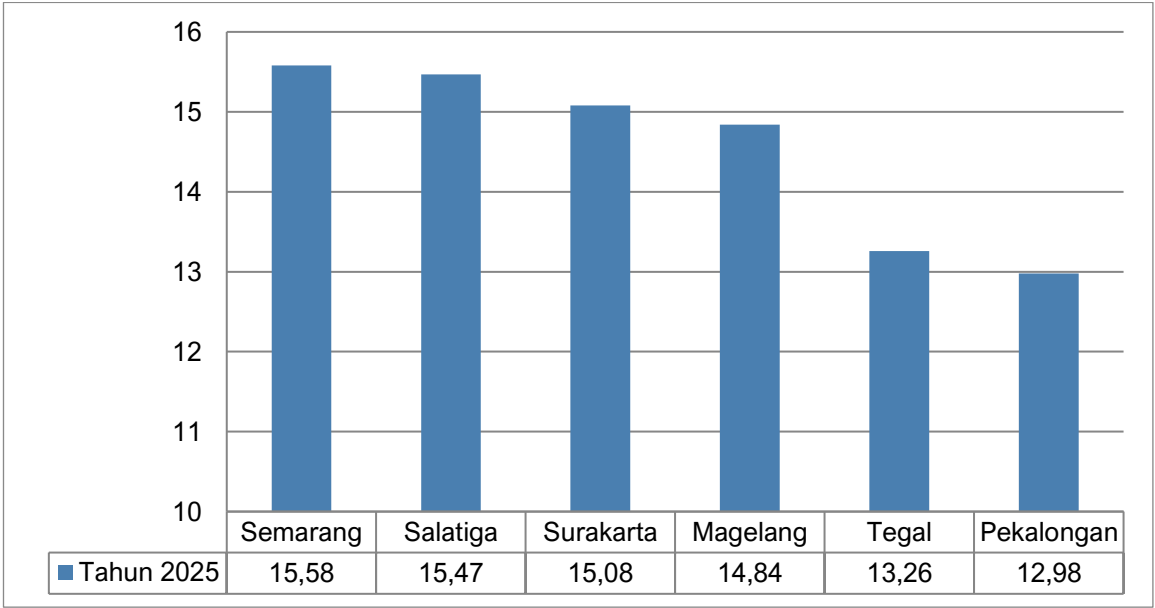


Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS Kota Salatiga pada tahun 2025 yaitu 15,47 tahun mengalami kenaikan 0,01 tahun dari tahun 2024 sebesar 15,46 tahun. Angka capaian Kota Salatiga berada diatas Provinsi Jawa Tengah sebesar 13,05 tahun dan Nasional sebesar 13,3 tahun.

Dibandingkan dengan kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, Kota Salatiga berada di posisi kedua tertinggi 15,47 setelah Kota Semarang sebesar 15,58 tahun, secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

Grafik 2. 32. Perbandingan Harapan Lama Sekolah Kota Salatiga diantara kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

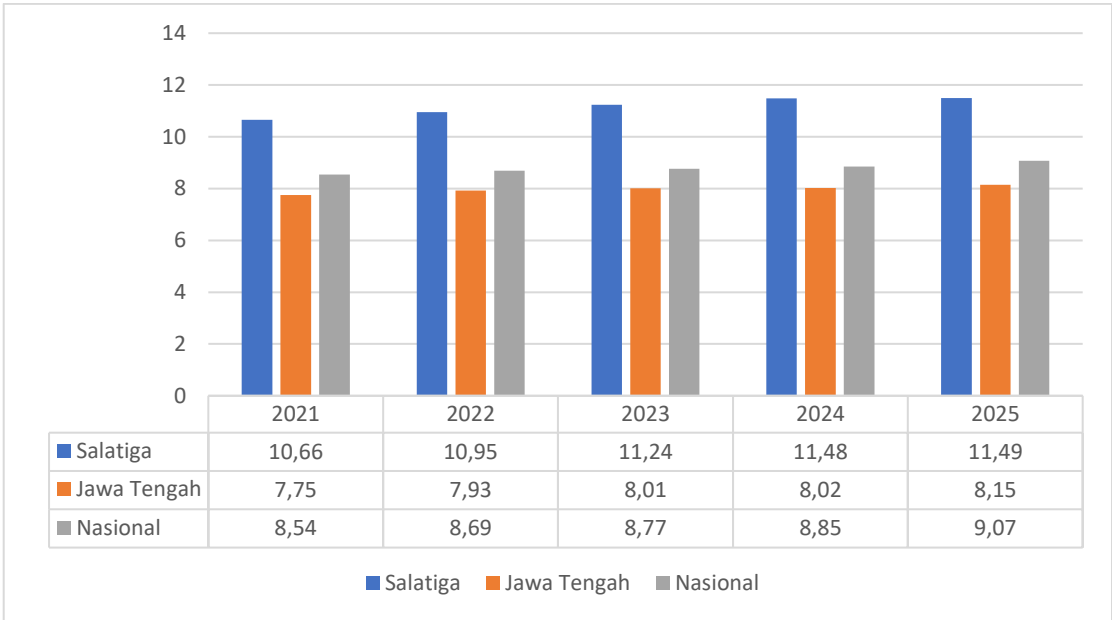
3) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah atau disingkat RLS didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam

kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standard internasional yang digunakan oleh UNDP.

Perkembangan RLS Kota Salatiga Tahun 2025 sebesar 11,49 tahun, mengalami peningkatan 0,01 dibanding tahun 2024 sebesar 11,48 tahun. Peningkatan RLS juga terjadi di Provinsi Jawa Tengah dan secara Nasional, namun angka capaian Kota Salatiga berada di atas capaian Provinsi Jawa Tengah Sebesar 8,15 tahun dan Nasional sebesar 9.07 tahun. Secara rinci dapat dilihat pada Grafik berikut.

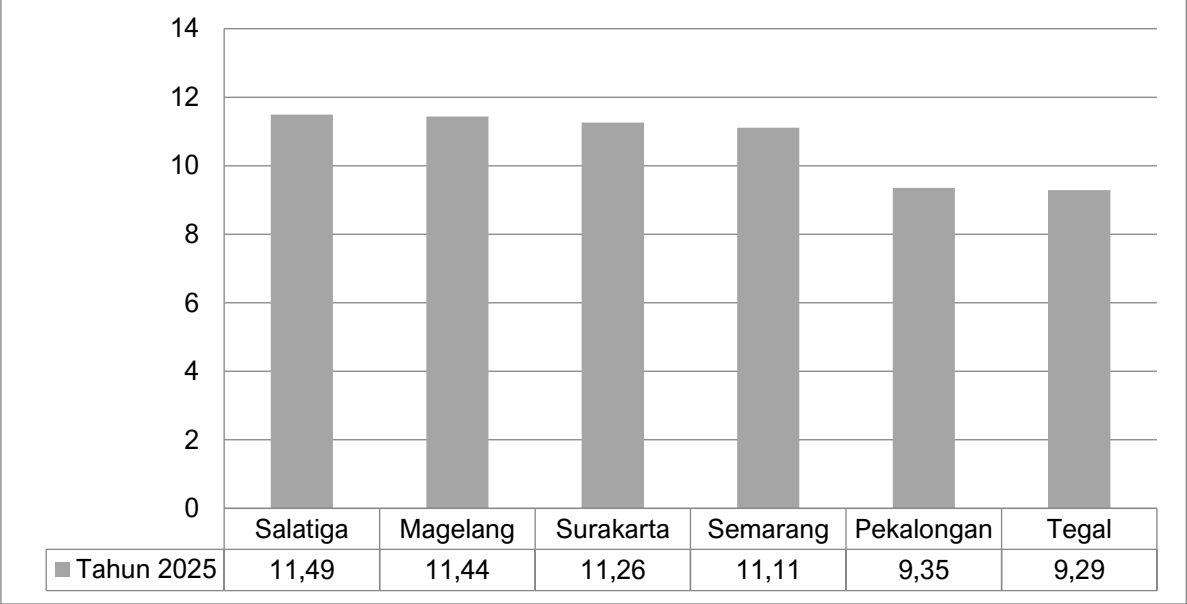
Grafik 2. 33. Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

Perbandingan RLS Kota Salatiga dengan kota lainnya di Jawa Tengah tahun 2025 masih sama seperti tahun 2024 yaitu berada pada peringkat pertama diikuti Kota Magelang, Kota Surakarta, Kota Semarang, Kota Pekalongan dan terakhir Kota Tegal, sebagaimana terlihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 34. Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Salatiga dengan Kota Lainnya Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber : BPS Jawa Tengah, Tahun 2025

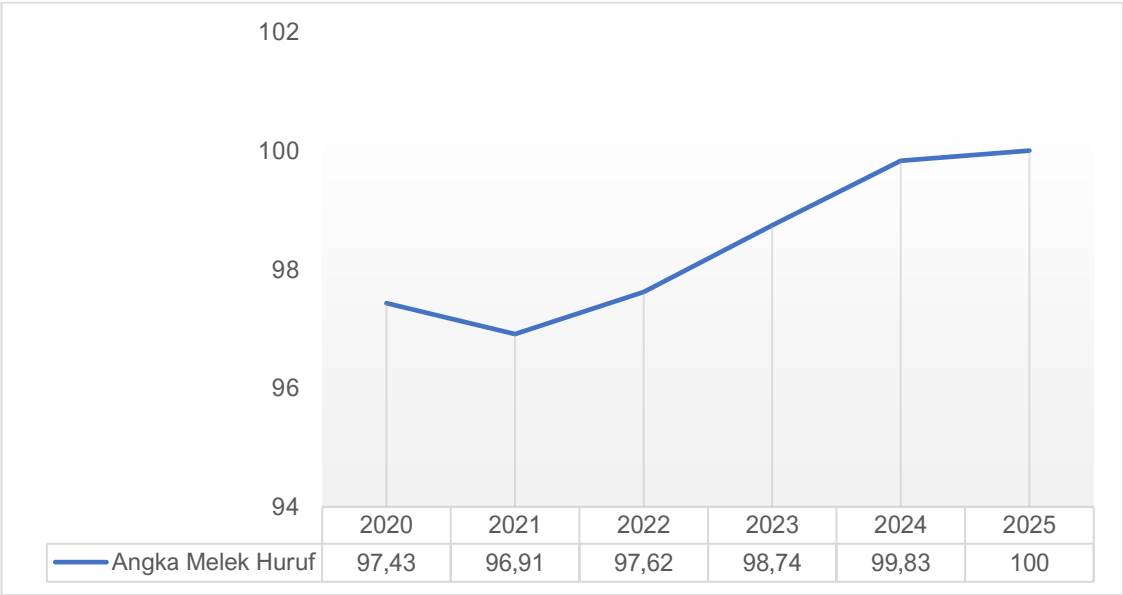
b. Indeks Literasi Masyarakat

Indeks Literasi Masyarakat dapat diukur dari kemampuan antara lain: membaca, menulis, memahami bacaan, eksplorasi pengetahuan, transformasi menjadi pengetahuan dan transformasi menjadi produk/jasa. Realisasi kinerja ILM pada tahun 2024 adalah 63,14.
Keterangan : Data dan narasi belum update

c. Angka Melek huruf

Angka melek huruf merupakan salah satu indikator yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Angka melek huruf yang tinggi menunjukkan bahwa sistem pendidikan dasar dan program keaksaraan yang ada efektif.

Grafik 2. 35. Angka Melek Huruf (usia 15-59) Tahun 2021-2025



Sumber : BPS, Tahun 2025

Perkembangan AMH Kota Salatiga tahun 2020 – 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, walaupun sempat menurun pada tahun 2021. Nilainya terus meningkat setiap tahun berkisar 0,02-1. Kondisi ini menunjukkan bahwa 100 orang dewasa di Kota Salatiga mampu untuk membaca dan menulis.

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

a. Persentase Kawasan Wajah Kota yang Tertata Dengan Baik

Indikator Persentase Kawasan Wajah Kota Yang Tertata dengan baik merupakan indikator kinerja positif yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Target kawasan wajah kota yang menjadi target sasaran antara lain

- 1) Jl. Diponegoro-Fatmawati, (100%)
- 2) Jl. Jenderal Sudirman
- 3) Jl. W. Mongonsidi, (100%)
- 4) Jl. Soekarno Hatta, (100%)
- 5) Tamansari,
- 6) Lap Pancasila dan sekitarnya, (100%)
- 7) Jl. Sukowati-Jl,Tentara Pelajar (100%, ruas Sukowati)
- 8) Jl. Brigjen Sudiarto, (100%)
- 9) Jl. Hasanudin, (100%)
- 10) Jl. A. Yani, (50%)
- 11) Jl. Pattimura, (100%)
- 12) Tingkir – Barukan,
- 13) Jl. Kartini, (100%)
- 14) Jl. Osamaliki, (100%)
- 15) Jl. Veteran,
- 16) Jl. Pemuda,
- 17) Jl. Muh Yamin,

Dari 17 target diatas yang terealisasi pada tahun 2025 sebanyak 10 ruas dan 0.5 ruas jalan (yaitu jalan A.Yani) sehingga realisasi presentase kawasan wajah kota yang tertat dengan baik pada tahun 2025 adalah 61,8%.

b. Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik

Indikator kinerja Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik dapat di hitung dengan rata rata dari (jalan, drainase kondisi baik dan rasio luas irigasi yang terlayani jaringan irigasi) secara lebih detail akan di bahas di bawah ini.

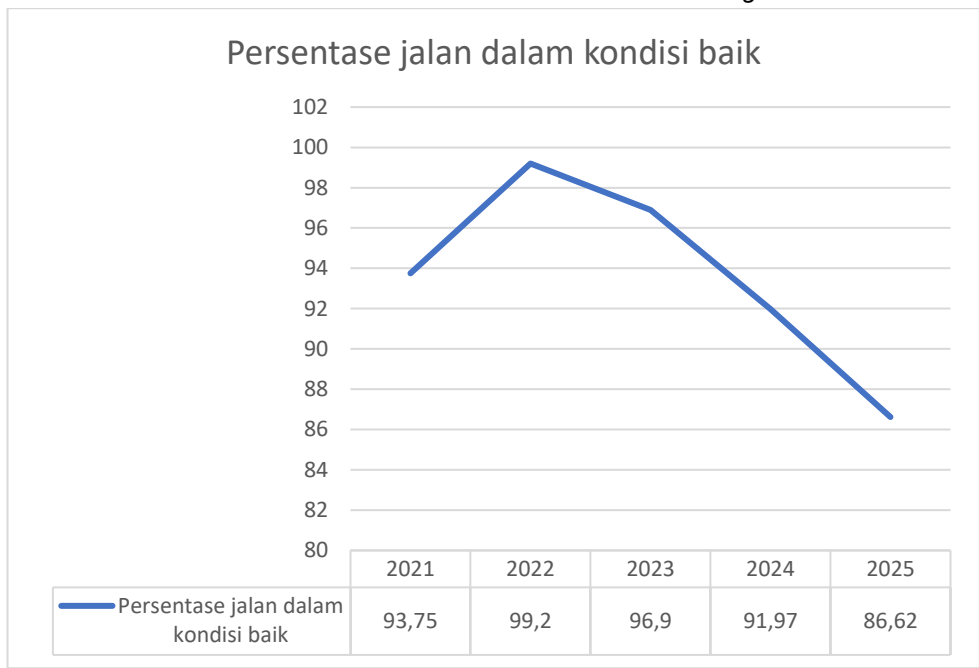
Tabel 2. 14. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPJMD 2025 2029	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPJMD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s.d Tahun 2025(%)	Kategori Status	Status
1)	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	70,29	83	87,31	87,31	105,2	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Tahun 2025 persentase jalan dalam kondisi baik sebesar 86,62% dari total jalan berdasarkan SK Jalan tahun 2017 sepanjang 337,471 km yang berada dalam kondisi mantap sepanjang 292,324 km dan 45,147 Km dengan kondisi tidak mantap

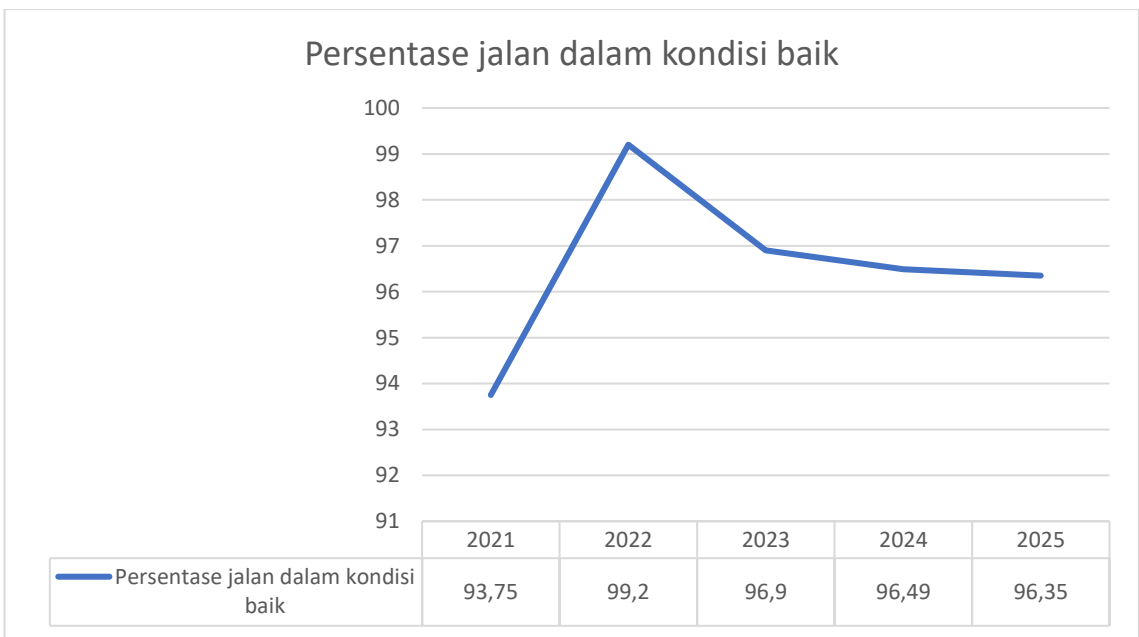
Grafik 2. 36. Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Jaringan drainase dalam kondisi baik di Kota Salatiga mengalami perkembangan dengan tren meningkat dalam kurun waktu 2021-2025 walaupun pada tahun 2025 jaringan drainase dalam kondisi baik mengalami sedikit penurunan dibanding tahun 2024. Sampai dengan tahun 2025 panjang saluran drainase terbangun adalah 378,48 KM. Pada tahun 2025 ini panjang drainase kondisi baik adalah 96.35% atau sepanjang 364,65 KM. Kondisi lainnya adalah 12,7 KM kondisi rusak ringan 1,13 KM kondisi rusak berat.

Grafik 2. 37. Persentase Jaringan Drainase Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



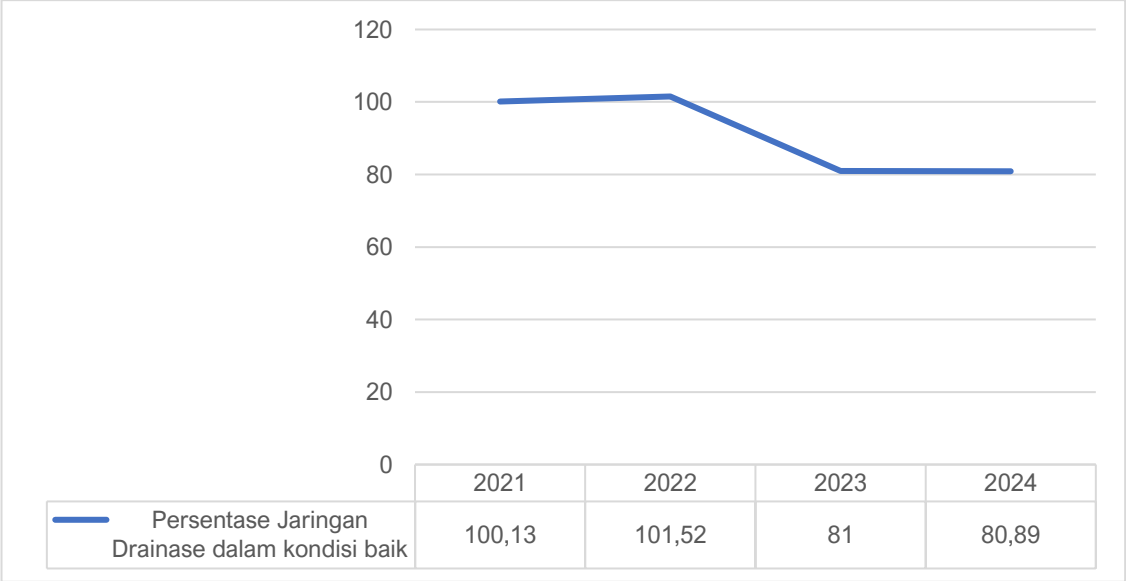
Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Sampai dengan tahun 2025 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 11.875 m dan kondisi sedang adalah 12.013 m, sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.888 m. Tahun 2025 jaringan irigasi dengan kondisi baik sebesar 78,95%. Dibandingkan capaian tahun 2024 yang terealisasi sebesar 80,89%, capaian tahun 2025 adalah mengalami penurunan sebesar 1,94%.

Untuk mengukur kinerja sistem irigasi secara komprehensif untuk mendukung ketahanan pangan menggunakan Indeks Kinerja Sistem Irigasi. Indeks ini tidak hanya mengukur sarana prasarana fisik jaringan, tetapi juga termasuk produktivitas tanam, sarana penunjang jaringan utama dan kelembagaannya berdasarkan pada Peraturan Menteri PUPR No.12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi mengamanatkan bahwa evaluasi kinerja sistem irigasi di Kota Salatiga sebesar 12 DI.

Dari 12 daerah irigasi di Kota Salatiga yang ada semuanya terlayani meskipun dengan kondisi jaringan irigasi yang tidak semuanya baik.

Grafik 2. 38. Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

c. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nilai IKLH merupakan penggabungan analisis dari 3 indikator yang meliputi Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara, Indeks Tutupan Lahan. Sedangkan Persentase kendaraan angkutan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan merupakan bagian yang mendukung capaian indikator Indeks Pencemaran Udara.

Berikut rumus perhitungan IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021:

IKLH

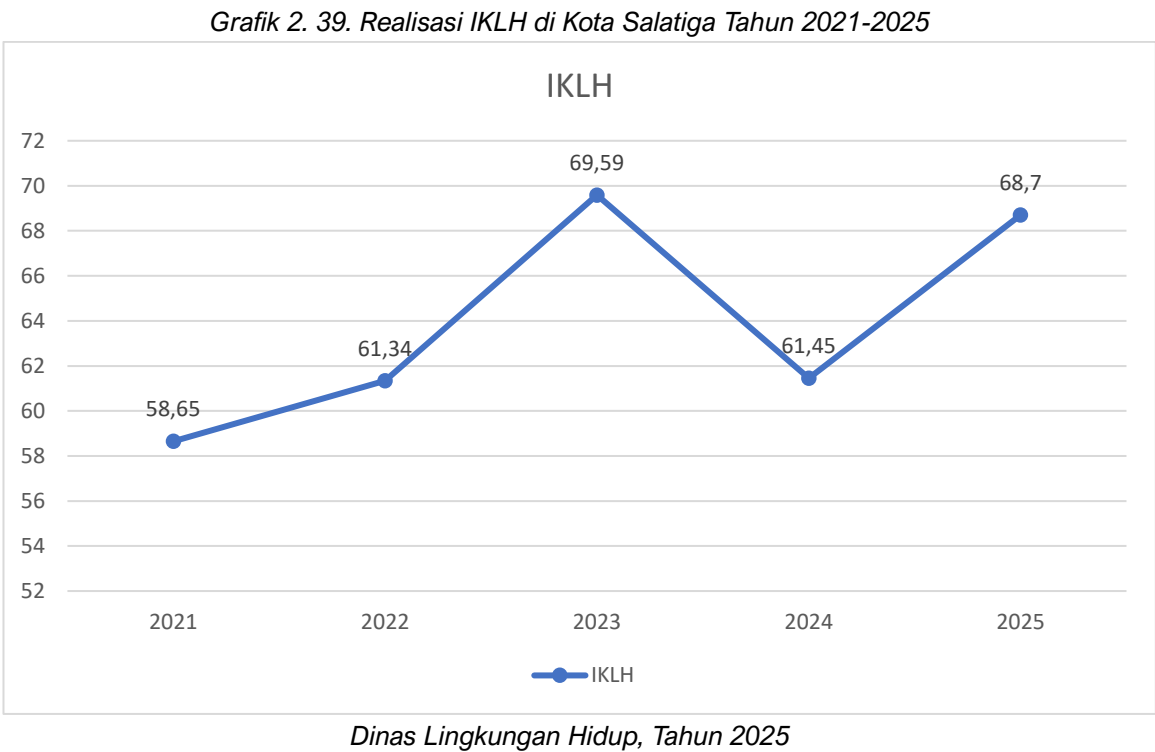
=

$$(0,376 \times \text{Realisasi Indeks Pencemaran Air}) + (0,405 \times \text{Realisasi Indeks Pencemaran Udara}) + (0,219 \times \text{Realisasi Indeks Tutupan Lahan})$$

Berdasarkan rumus di atas maka realisasi kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut:

Realisasi IKLH	$= \frac{(0,376 \times 73,76) + (0,405 \times 75,97) + (0,219 \times 46,58)}{1}$	$= 68,70$

Indikator kinerja indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.



d. Rasio Konektivitas Kota

Indikator Rasio Konektivitas Kota merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Rasio Konektivitas Kota Tahun 2025 sebesar 0,88 dan terealisasi sebesar 0,88 sehingga capaian kinerja indikator Rasio Konektivitas Kota adalah 100% dengan kategori sangat tinggi. Perhitungan di dapatkan dari 15 jumlah trayek di bagi dengan 17 kebutuhan trayek di Kota Salatiga. Target Nasional atas kinerja Konektivitas dan Aksesibilitas Nasional adalah tidak ada sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, namun pada penentuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adalah 1, dengan realisasi sebesar 0,88 atas target 0,88, capaian ini sangat baik dikarenakan jumlah trayek lebih banyak dengan jumlah trayek yang dibutuhkan.

e. Kinerja Lalu Lintas Kota

Indikator Kinerja Lalu Lintas Kota merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin kecil realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Kinerja Lalu Lintas Kota Tahun 2025 sebesar 0,31 dan terealisasi sebesar 0,23 sehingga capaian kinerja indikator Kinerja Lalu Lintas Kota adalah 125,81% dengan kategori sangat tinggi. Perhitungan indikator diperoleh dari rata rata VCR (Volume, Capacity, Ratio) 40 jalan yang telah disurvey di Kota Salatiga.

Standar nasional untuk kinerja lalu lintas tidak ada sehingga tidak bisa ditampilkan perbandingan realisasi kinerja dengan standar nasional, Namun oada penentuan target dibatasi bahwa tingkat capaian maksimal adlah 1, dengan realiasi sebesar 0,31 atas target sebesar 0,4 capaian ini terkategori sangat baik dikarenakan berada pada nilai yang lebih kecil dari target.

f. Persentase Rumah yang di dukung oleh PSU

Indikator Kinerja Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut dihitung dengan rumus:

Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	=	$\frac{\text{Jumlah rumah yang sudah dan sedang dibangun terfasilitasi PSU}}{\text{Jumlah Rumah yang terfasilitasi PSU di Perumahan}} \times 100\%$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Luasan Kawasan Kumuh Perkotaan tahun 2024 sebagai berikut:

Prosentase Rumah yang di dukung oleh PSU	=	$\frac{6.502}{8.719} \times 100\%$	= 74,57%

g. Pemukiman yang Tertata

Indikator Kinerja Permukiman yang Tertata merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Adapun analisa terhadap capaian indikator Kinerja Utama Kinerja Permukiman yang Tertata Tahun 2025 pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan sebagai berikut dihitung dengan rumus:

Permukiman yang Tertata	=	$\frac{\text{Luasan Permukiman yang sudah di tata}}{\text{Luas Permukiman se Kota Salatiga}} \times 100\%$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi kinerja Permukiman yang Tertata tahun 2024 sebagai berikut:

Permukiman yang Tertata	=	$\frac{181,17}{2636,45} \times 100\%$	= 6,87%

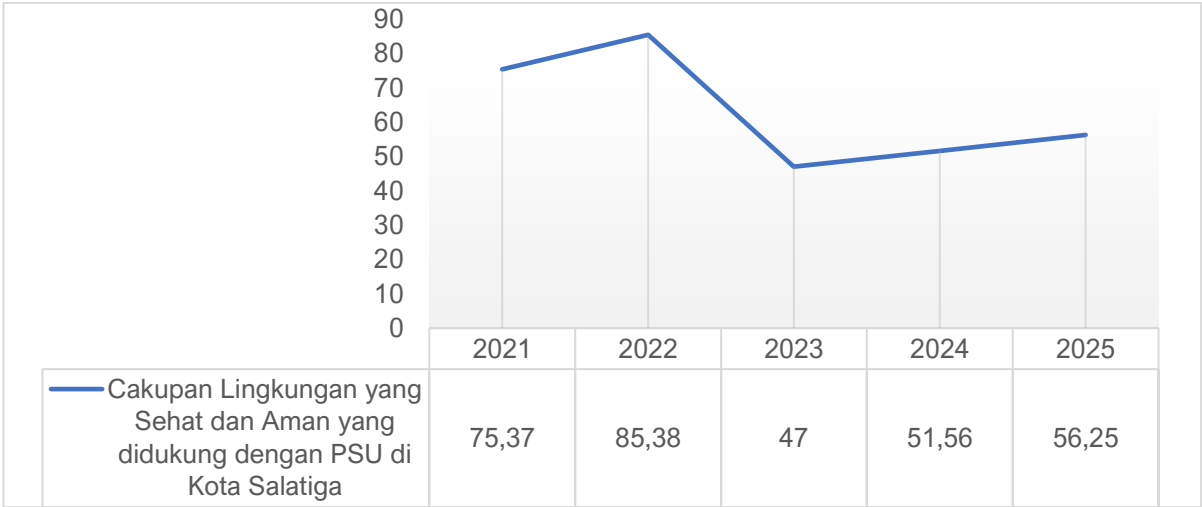
h. Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU

Indikator Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU dapat dihitung dengan jumlah PSU Perumahan yang sudah diserahterimakan di bagi jumlah perumahan di Kota Salatiga, indikator ini merupakan indikator positif yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2025 ditargetkan 55% mencapai realisasi 56,25%. Persentase ini dicapai dari jumlah perumahan yang sudah dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 36 perumahan dibagi jumlah perumahan yang sudah diserahkan sebanyak 64 perumahan dikalikan 100%. Apabila dibandingkan dengan realisasi di tahun 2024 yaitu sebesar 51,56 %, realisasi kinerja mengalami peningkatan karena berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pelaksanaan Program Pengembangan Perumahan didukung oleh 4 (empat) kegiatan, yaitu:

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota
- 3) Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus
- 4) Kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
- 5) Program-program tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas PSU serta memelihara PSU dalam keadaan baik, sehingga jumlah perumahan yang menyerahkan PSU kepada Pemerintah Kota Salatiga mengalami peningkatan.

Grafik 2. 40. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi adalah istilah yang dijadikan mantra untuk segala yang berbau ekonomi. Lewat investasi, pemerintah berusaha mencapai target pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan mengalokasikan anggaran untuk membangun infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Untuk menghitung pertumbuhan nilai investasi digunakan rumus sebagai berikut:

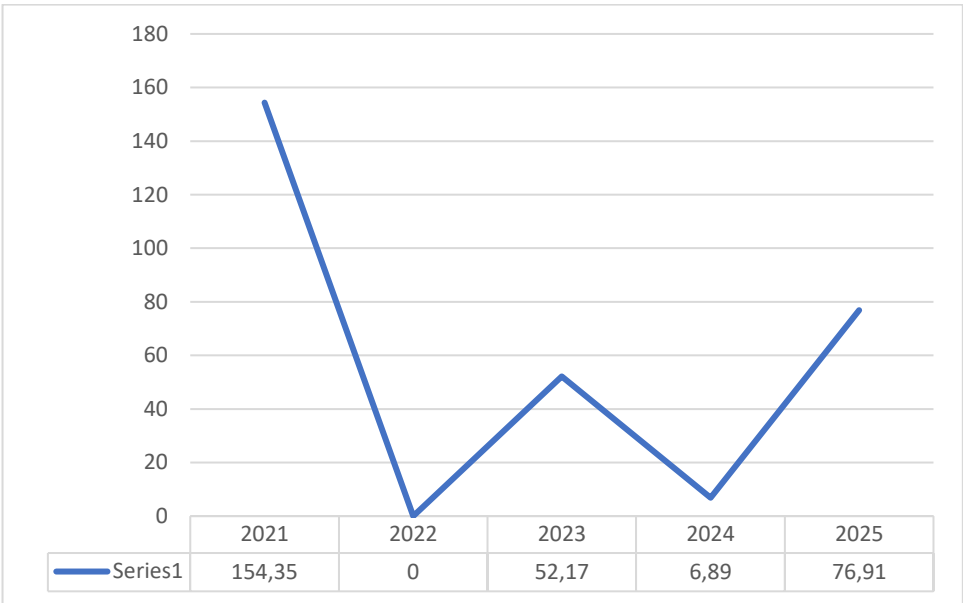
$$= \frac{\text{Realisasi investasi tahun } n - \text{Realisasi investasi tahun } (n-1)}{\text{Realisasi investasi tahun } (n-1)} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus di atas, realisasi pertumbuhan nilai investasi tahun 2024 sebagai berikut:

76,91	=	$\frac{1.123.128.465.959 - 634.853.695.566}{634.853.695.566} \times 100\%$

Indikator kinerja indeks Pertumbuhan Nilai Investasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Grafik 2. 41. Realisasi Pertumbuhan Investasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



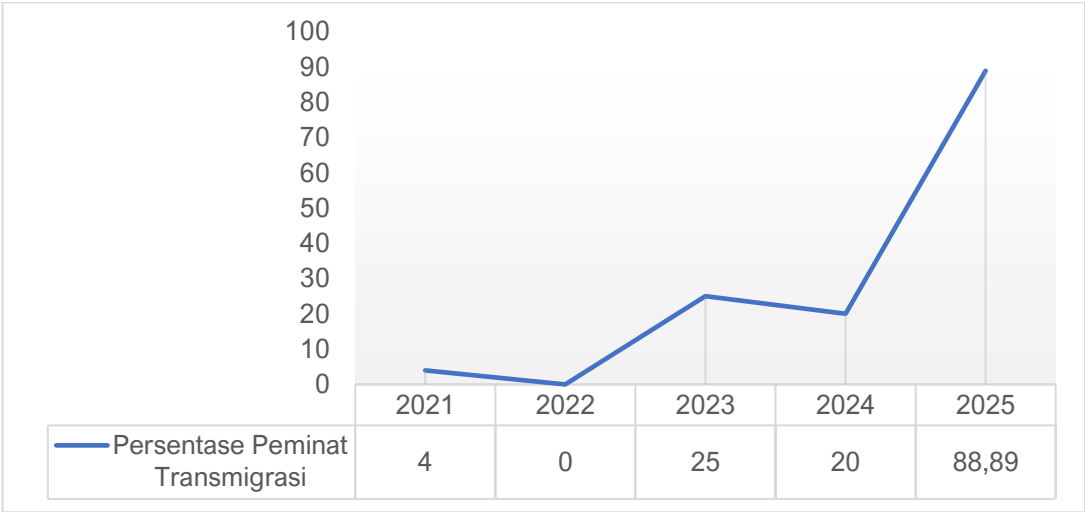
Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

Dengan demikian realisasi kinerja indikator pertumbuhan nilai investasi terus flukiasi naik turun realisasinya dalam beberapa tahun terakhir.

b. Persentase Peminat Transmigrasi

Persentase Peminat Transmigrasi adalah dihitung dengan cara membagi jumlah calon transmigran yang berminat dibagi dengan peserta penyuluhan calon transmigran di kalikan 100%. Indikator kinerja Persentase Peminat Transmigrasi merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin tinggi realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya. Pada Tahun 2025 peminat transmigrasi sejumlah 8 orang dengan jumlah peserta penyuluhan sejumlah 9 orang. Dengan demikian prosentase peminat transmigrasi sebesar 88,89%.

Grafik 2. 42. Persentase Peminat Transmigrasi di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

c. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya.

Indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana merupakan indikator kinerja positif, yang artinya semakin besar realisasi semakin baik capaian kinerjanya. Target Indeks Ketahanan Daerah (IKD) terhadap Bencana Tahun 2024 sebesar 3,86 dan terealisasi sebesar 3,9 sehingga capaian kinerja indikator Penanggulangan Potensi Konflik adalah 101,04% dengan kategori sangat tinggi.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Indikator variabel aspek pelayanan umum terdiri dari fokus layanan urusan wajib pelayanan dasar dan fokus layanan urusan pemerintah pilihan.

Integrasi target pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengarusutamaan pencapaian TPB/SDGs, pengarusutamaan gender serta mewujudkan perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah sesuai urusannya.

a. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah ukuran untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur terhadap penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Untuk mendapatkan IKM,

dilakukan kegiatan pengukuran secara komprehensif yang disebut Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Indeks Kepuasan masyarakat dengan target sebesar 84.75% dan realisasi 86,32% dan realisasi target sebesar 101,85% dan target RPD tahun 2026 sebesar 85.00% maka status tercapai.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Penerapan SPBE sebagai key driver transformasi digital bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis elektronik menuju puncak tertinggi kepuasan masyarakat pengguna SPBE sehingga ketika masyarakat mengingat SPBE yang terlintas adalah pemerintah yang akuntabel dan layanan yang berkualitas. Presiden telah menetapkan Arsitektur SPBE Nasional melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 132/2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk mengakselerasi implementasi integrasi penerapan SPBE yang bermuara pada cita-cita utama, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pada Tahun 2024 target Indeks SPBE sebesar 2,50% terealisasi 3,64% dengan predikat sangat baik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024 tentang Hasil Evaluasi Ssstem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan capaian kinerjanya sebesar 145,6% dengan target RPD sebesar 2.7% serta status tercapai.

c. Indeks Reformasi Birokrasi

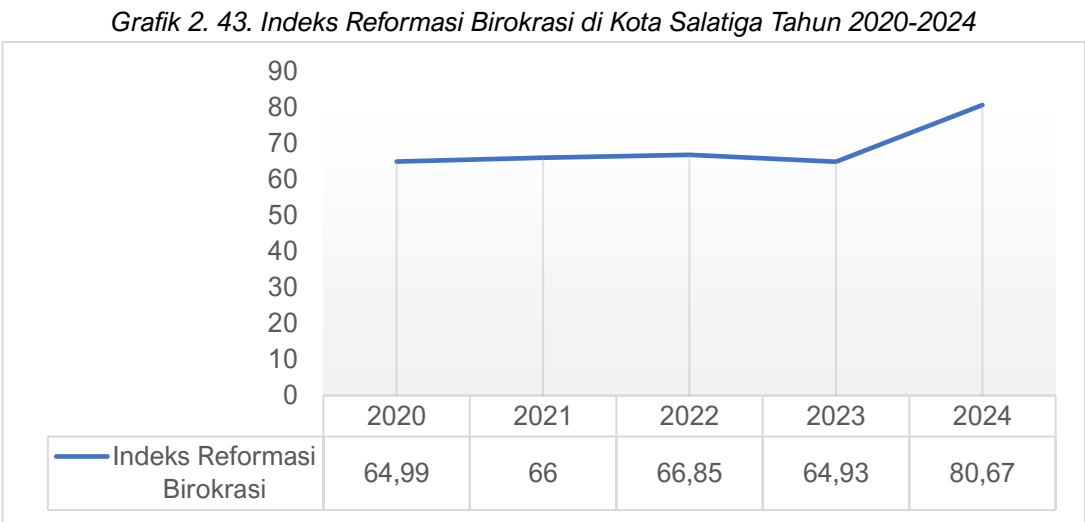
Indeks Reformasi Birokrasi adalah indikator yang menunjukkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan oleh instansi pemerintah. Indeks ini menggambarkan upaya pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan serta menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilaksanakan oleh instansi pemerintah, yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Berdasarkan Surat dari Kementerian PAN dan RB Nomor 8/260//RB.06/2025 tanggal 25 April tahun 2025 dengan nilai 80,67 kategori Sangat Baik (A-) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 15. Indeks Reformasi Birokrasi Kota Salatiga Tahun 2024

No	Komponen Penilaian	Bobot	Nilai
A	RB General	100	73,63
B	RB Tematik	20	7,04
C	Indeks RB	120	80,67

Sumber Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga, LHE RB 2024

Di bawah ini merupakan realisasi kinerja nilai indeks reformasi birokrasi yang cenderung fluktuatif dalam lima tahun terakhir dengan capaian tertinggi ada pada tahun 2024.



Sumber : Sekretariat Daerah, Tahun 2024

2.4.1 Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Strategi yang dilakukan bertujuan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pembangunan pendidikan di Kota Salatiga menunjukkan kondisi yang sangat baik ditunjukan dengan meningkatnya angka rata-rata lama sekolah 11,48 tahun dan harapan lama sekolah 15,46 tahun, serta Prosentase Melek Huruf Usia 15 Tahun ke atas (usia 15-59) sebesar 99,62%. Perkembangan capaian pembangunan pendidikan di Kota Salatiga dalam kurun tahun 2020-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 16. Perkembangan Capaian Pembangunan Pendidikan di Kota Salatiga tahun 2020-2025

Capaian Pembangunan	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10,42	10,66	10,95	11,24	11,48	11
Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,41	15,42	15,43	15,44	15,46	15
Prosentase Melek Huruf Usia 15	%	97,43	96,91	97,62	98,74	99,62	100

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar yang memadai dan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan ditunjukan dengan ruang kelas dalam kondisi baik. Tahun 2025 persentase ruang kelas dalam kondisi baik untuk jenjang PAUD sebesar 89.42%, namum jenjang SD dan jenjang SMP mengalami penurunan sebesar 3.33%. Hal ini menjadikan perhatian pemerintah daerah dalam rangka menjaga mutu pendidikan yang

lebih baik. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga kurun waktu 2020-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 17. Perkembangan Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik di Kota Salatiga Tahun 2020-2025

Prosentase Ruang Kelas Dalam	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PAUD	%	82,22	87,33	80,17	92,45	87,43	89,42
SD	%	80,68	87,28	88,4	91,98	88,44	85,11
SMP	%	97,38	97,70	98,62	97,10	87,78	84,45

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Rasio murid-guru adalah perbandingan antara jumlah murid pada suatu jenjang sekolah dengan jumlah guru di sekolah yang bersangkutan. Rasio ini menggambarkan beban kerja guru dalam mengajar serta melihat mutu pengajaran di kelas. Semakin rendah nilai rasio ini berarti semakin bertambah tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid sehingga mutu pengajaran semakin tinggi. Rasio murid-guru di Kota Salatiga tahun 2025 yaitu 13,13. Perkembangan rasio murid-guru di Kota Salatiga Tahun 2020-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 18. Perkembangan Rasio Murid-Guru di Kota Salatiga Tahun 2020-2025

Tahun	SEKOLAH	MURID	GURU	RATA-RATA PER SEKOLAH		RASIO MURID GURU
				MURID	GURU	
2020	89	16473	1023	185,09	11,49	16,1
2021	81	15900	1074	196,3	13,26	14,08
2022	80	15621	1056	195,26	13,2	14,79
2023	80	15069	1096	188,36	13,70	13,74
2024	80	14953	1136	186,91	14,2	13,16
2025	80	15009	1143	187.61	14.29	13.13

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Prosentase Guru Layak Mengajar pada tahun 2025 di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD sebanyak 91.86%, jenjang SD 95.72% dan jenjang SMP 99.33%.

Tabel 2. 19. Perkembangan Prosentase Guru Layak Mengajar di Kota Salatiga Tahun 2020--2025

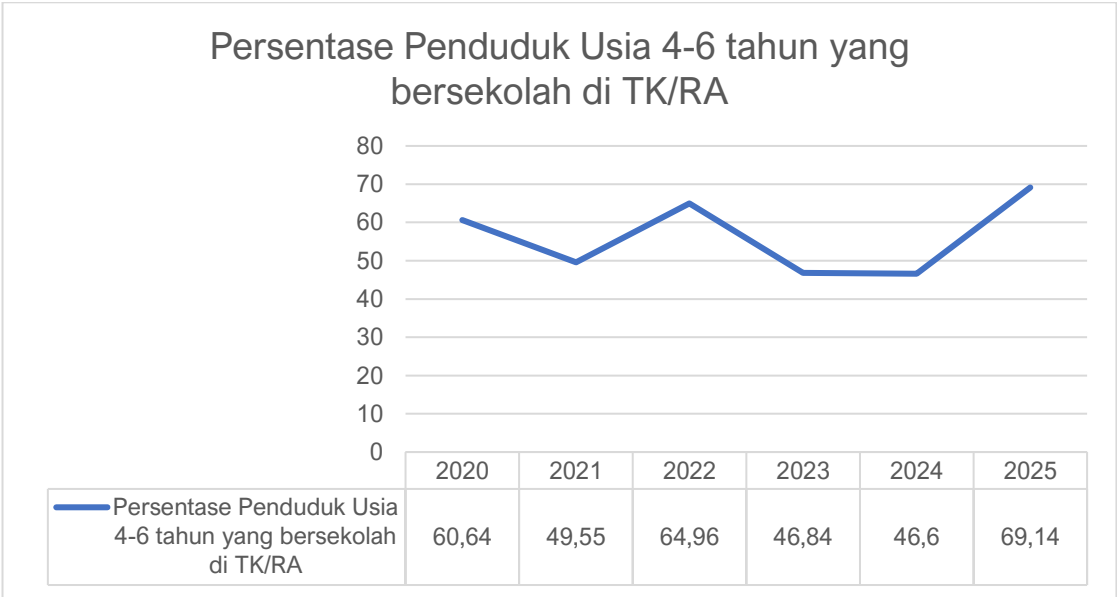
Prosentase Guru Layak Mengajar	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PAUD	%	80,43	84,95	86,91	88,15	87,80	91,86
SD	%	94,52	97,30	97,39	97,95	97,15	95,72
SMP	%	94,47	96,43	97,63	98,19	99,10	99,33

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Pemerataan pendidikan di Kota Salatiga dimulai dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini cenderung meningkat dalam kurun waktu 2020-2025, hal ini ditunjukkan dengan Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA. Target sebesar 46.6% realisasi sebesar 69.14% dengan capaian 121,51%. Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 sebesar 46,84%

terdapat penurunan sebesar 0,24% ., terdapat 2 lembaga PAUD yang tidak beroperasi lagi yaitu TK Pelangi Nusantara, TK Tabita dan 1 kelompok belajar yang tidak melakukan proses pembelajaran yaitu KB Permata.

Grafik 2. 44. Prosentase Penduduk Usia 4-6 tahun yang bersekolah di TK/RA di Kota Salatiga Tahun 2020-2025



Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Angka Partisipasi Kasar adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dengan jumlah penduduk kelompok usia di jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan seberapa tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan. Tahun 2025 APK di Kota Salatiga untuk jenjang PAUD sebesar 50.97%, jenjang SD sebesar 117.02%, dan jenjang SMP 135.55%. Perkembangan APK di Kota salatiga dalam kurun waktu 2020-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 20. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar di Kota Salatiga Tahun 2020-2025

Angka Partisipasi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
PAUD	%	42,64	38,33	40,10	46,84	46,60	50,97
SD	%	110,37	113,46	114,07	113,81	115,85	117,02
SMP	%	127,66	130,81	130,59	130,92	133,63	135,55

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dengan jenjangnya. Persentase APS menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga mulai Tahun 2023 ada penambahan indikator yaitu APS Kesetaraan. Perkembangan APS di Kota Salatiga dalam kurun waktu tahun 2020-2025 sebagai berikut.

Tabel 2. 21. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah di Kota Salatiga Tahun 2020-2025

Angka Partisipasi	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Usia 5-6 tahun	%	95,5	84,81	89,61	96,88	97,88	81,90
Usia 7-12 tahun	%	116,45	99,22	99,23	99,30	99,34	87,40
Usia 13-15 tahun	%	131,07	96,72	90,56	96,80	96,82	91,79
Pendidikan Kesetaraan	%	n/a	n/a	n/a	65,56	71,05	71,79

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

Berdasarkan data Angka Partisipasi Sekolah (APS), capaian partisipasi pendidikan pada berbagai kelompok usia menunjukkan hasil yang beragam. Pada kelompok usia 5–6 tahun (PAUD), realisasi APS tahun 2025 tercatat sebesar 81,90 persen, masih berada jauh di bawah target tahun 2024 sebesar 97,88 persen. Kondisi ini mengindikasikan masih perlunya penguatan akses dan partisipasi pendidikan anak usia dini. Pada kelompok usia 7–12 tahun (SD/MI), realisasi APS tahun 2025 mencapai 87,40 persen, belum memenuhi target tahun 2024 sebesar 99,34 persen. Demikian pula pada kelompok usia 13–15 tahun (SMP/MTs), realisasi APS tahun 2025 sebesar 91,79 persen, masih berada di bawah target tahun 2024 yang ditetapkan sebesar 96,82 persen. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama masih memerlukan upaya peningkatan yang berkelanjutan. Sementara itu, pada Pendidikan Kesetaraan, realisasi APS tahun 2025 mencapai 71,79 persen, sedikit melampaui target tahun 2024 sebesar 71,05 persen. Capaian ini menunjukkan kinerja yang relatif stabil dan positif dalam menjangkau masyarakat yang belum terlayani pendidikan formal.

Berdasarkan capaian tersebut, penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2027 perlu memprioritaskan peningkatan APS terutama pada kelompok usia PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs, melalui perluasan akses layanan pendidikan, penguatan peran satuan pendidikan dan masyarakat, serta peningkatan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Di sisi lain, capaian pada Pendidikan Kesetaraan perlu dipertahankan dan ditingkatkan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu indikator keberhasilan urusan pendidikan juga dapat dilihat dari Capaian Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi. Namun laporan Raport Pendidikan Kota Salatiga 2025 belum keluar, untuk sementara menggunakan laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024.

Tabel 2. 22. Laporan Rapor Pendidikan Kota Salatiga Tahun 2024

Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	No	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2025	Definisi Capaian	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Skor Rapor 2024	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
SMP Umum	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	94,84	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik 0,08	94,76	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Umum	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		84,87		Naik 1,03	83,84	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Kemenag	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	89,67	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik 1.47	88,2	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Kemenag	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		80,04		Naik 3,34	76,7	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	92,54	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Turun 1,25	93,79	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		74,42		Naik 0,11	74,31	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.1	Kemampuan literasi	Baik	81,62	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk literasi membaca.	Naik 4,45	77,17	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.1.skor	Kemampuan literasi		65,81		Naik 3,56	62,25	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Umum	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Baik	91,62	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	Naik 0.69	90,93	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Umum	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		71,98		Naik 0.44	71,54	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SMP Kemenag	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Baik	85,87	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas ompetensi minimum untuk numerasi	Naik 4,50	81,37	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024

Jenis Satuan Pendidikan	Status Satuan Pendidikan	No	Indikator	Capaian	Skor Rapor 2025	Definisi Capaian	Perubahan Skor dari Tahun Lalu	Skor Rapor 2024	Peringkat di Provinsi	Sumber Data
SMP Kemenag	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		67,68		Naik 1,65	66,03	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Baik	88,65	Sebagian besar peserta didik telah mencapai batas kompetensi minimum untuk numerasi	Naik 3,58	85,07	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Umum	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		61,2		Naik 7,17	54,92	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.2	Kemampuan numerasi	Sedang	70	40% - 70% peserta didik telah mencapai kompetensi inimum untuk numerasi namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum.	Naik 10	60.00	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024
SD Kemenag	Semua	A.2.skor	Kemampuan numerasi		54,03		Naik 7,58	46,45	Peringkat atas (1-20%)	Asesmen Nasional 2024

Laporan ini berisi capaian seluruh indikator yang mempengaruhi indeks SPM Anda berdasarkan hasil agregat per jenjang di kabupaten/kota Anda.
Laporan ini dapat memberi gambaran kualitas satuan pendidikan Anda seperti yang tertuang di Permendikbudristek Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Laporan diperbarui 17 Maret 2025

Tabel 2. 23. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pendidikan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Kesenjangan	151,83	61,95	69,74	65,56	65,56
2	Pendidikan Anak Usia Dini	149,23	84,81	88,38	96,06	98,76
3	Pendidikan pada Sekolah Dasar	128,35	90,90	87,75	98,42	98,46

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2024

Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dinilai berdasarkan Angka Partisipasi Sekolah pada Kesenjangan, PAUD dan Pendidikan Dasar. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, mengenai target dan indikator penerima layanan SPM Pendidikan bahwa pengumpulan data sesuai dengan Standar Teknis SPM ditujukan untuk pencapaian 100% (seratus persen) dari Target dan Indikator Kinerja pencapaian SPM setiap tahun.

Rata-rata Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan pada tahun 2023 sesuai dengan penerapan Indikator sesuai Permendagri Nomor 59 tahun 2021, yaitu Tuntas Madya dengan Pendidikan Kesenjangan, 65,56 (Tuntas Pratama) , Anak Usia Dini 96,76 (Tuntas Utama) dan Pendidikan pada Sekolah Dasar 98,46 (Tuntas Utama). Namun untuk tahun 2025 Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal, dikarenakan kurangnya anggaran pendidikan khususnya untuk pemenuhan SPM. Sebagai bahan RKPD tahun 2027 berikut kami sampaikan data capaian SDGs Urusan Pendidikan.

Indikator SDGs Tujuan 4: Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua

Tabel 2. 24. Capaian SDGs Urusan Pendidikan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat	Angka	98,69	99,05	90,53	99,97	97,15	
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat	Angka	74,03	75,43	75,90	81,72	78,76	
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/ sederajat	Angka	62,14	63,54	64,08	67,64	70,74	
4	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Persen	99,2	98,9	95,70	95,7		
5	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Persen	97	100	96,88	88,6		
6	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persentase SMA/MA berakreditasi minimal B	Persen	100	86,2	81,82	86,2		
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat	Angka Komposit	108,35	107,03	106,58	106,05	115,85	
8	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	Angka Komposit	83,85	84,12	84,62	84,15	133,63	
9	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat.	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Komposit	119,10	118,12	119,89	112,30	95,92	
10	Rata-rata lama sekolah penduduk umur lebih dari 15 tahun	Rata-rata lama sekolah	Tahun	10,42	10,66	10,95	11,24	11,48	
11	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Komposit	42,6	38,3	40,10	46,84	46,60	
12	Persentase APK SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/ sederajat	Angka Komposit	119,10	118,12	119,89	112,30	95,92	
13	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat dan (4) Rasio	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/ sederajat	Rasio	1 : 0,99	01:00,8	98,13	98,1		
14	Persentase penduduk umur ≥ 15 tahun	Persentase penduduk melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun	Persen	99,1	99,2	99,6	99,63	98,7	
15	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 dan umur 15-59 tahun.	Persentase angka melek aksara penduduk umur lebih dari 15 tahun	Persen		97,4	96,9	99,63	100	
16	Persentase Penduduk Melek Huruf	Persentase Penduduk Melek Huruf	persen					99,6	
17	Persentase Kelas dalam Kondisi Baik (SD/MI)	Persentase Kelas dalam Kondisi Baik (SD/MI)	Persen	82,4	78,7	87,3	91,98	88,44	
18	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Persentase Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	persen					92	
19	Persentase guru layak mengajar SMP/ MTs	Persentase guru layak mengajar SMP/ MTs	Persen	97	97,5	96,4	98,19	99,1	99,33
20	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	Persentase guru SMP yang bersertifikat pendidik	persen				57,53	58,65	66,85

Sumber : Dinas Pendidikan, Tahun 2025

b. Urusan Kesehatan

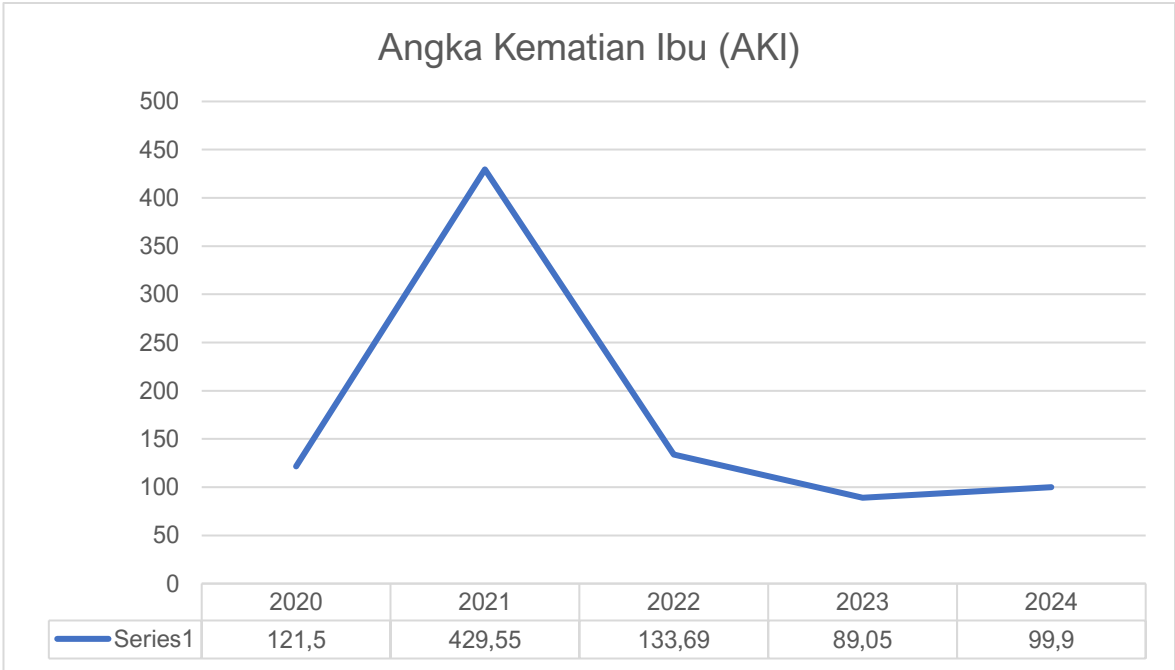
Tujuan dari pembangunan manusia dibidang kesehatan adalah untuk mencapai umur panjang yang sehat. Peningkatan derajat kesehatan dipengaruhi oleh empat faktor penentu, antara lain : Faktor lingkungan, Perilaku kesehatan, Pelayanan kesehatan dan Kependudukan/keturunan. Dari empat faktor tersebut yang dapat diintervensi dengan cepat yaitu Faktor kesehatan lingkungan dan faktor Pelayanan kesehatan. Kinerja daerah urusan kesehatan mendukung

pencapaian tujuan ke 4 RPD tahun 2023-2026 yaitu “Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pengendalian pertumbuhan penduduk”.

Target Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Salatiga tahun 2024 ditetapkan 172/100.000KH atau 2 kasus kematian ibu, sedangkan realisasi AKI pada tahun 2024 sebesar 99,9/100.000 KH atau 2 kasus kematian ibu. Dengan demikian capaian kinerja AKI pada tahun 2024 sudah memenuhi target ditetapkan. Karena indikator negative berarti kinerja AKI telah mencapai 141,92% dengan predikat tercapai.

Penyebab dari kematian ibu pada tahun 2024 karena Pre eklamasi dan pendarahan. Sehingga untuk evaluasi ke depannya harus dilakukan deteksi dini terhadap resiko yang berkaitan dengan penyakit-penyakit penyerta. Selain itu ibu hamil yang memiliki resiko tinggi dalam persalinan harus mendapatkan perhatian lebih dan pendampingan dari tenaga medis.

Grafik 2. 45. Angka Kematian Ibu (AKI) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

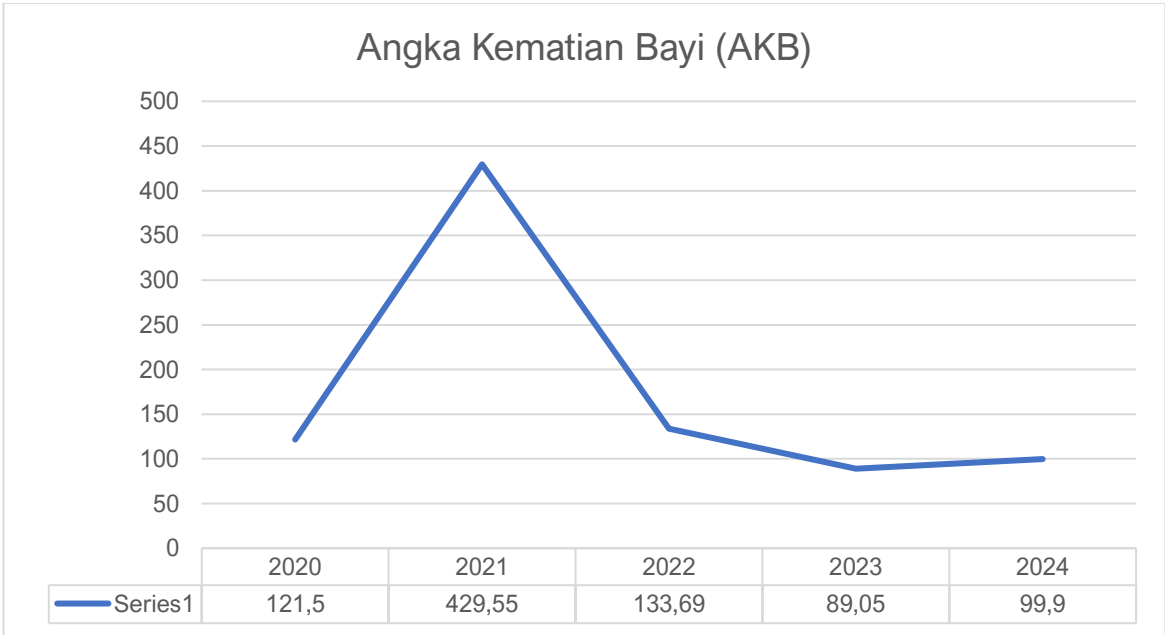
Angka Kematian Bayi (AKB) menjadi sasaran strategis pembangunan di bidang kesehatan di Kota Salatiga. Kasus kematian bayi yang dilahirkan berkaitan erat dengan riwayat dan kondisi ibu sejak hamil, penatalaksanaan persalinan atau bahkan penyakit penyerta/kelainan bawaan pada bayi.

Berbagai upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya kematian pada bayi lahir terutama karena masih adanya ibu hamil dengan KEK dan anemia. Upaya yang dilakukan adalah Optimalisasi SHK (screening hipotiroid kongenital) dan meningkatkan cakupan ANC (antenal care) yaitu pemeriksaan ibu hamil secara optimal, hingga mampu menghadapi masa persalinan, nifas, menghadapi persiapan pemberian ASI secara eksklusif, serta kembalinya kesehatan alat reproduksi dengan wajar.

AKB di Kota Salatiga pada tahun 2024 sebesar 12,03/1.000 KH. Angka tersebut berada di bawah target yang telah ditentukan yaitu 12,89/1000 KH. Secara absolute dari target 31 kasus

kematian bayi, terdapat 28 kasus kematian bayi di Kota Salatiga pada tahun 2024 Hasil penilaian kinerja pada indikator ini mencapai 104.49%, masuk dalam kategori tercapai. Perkembangan capaian AKB dari tahun 2019-2023 cenderung fluktuatif, dengan capaian 2024 sebesar 12,03% per 1000 kelahiran bayi.

Grafik 2. 46. Angka Kematian Bayi (AKB) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Pada tahun 2024 prevalensi gizi buruk di Kota Salatiga sebesar 0,01%. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pemenuhan gizi balita sehingga dalam kurun waktu 2020-2024 prevalensi balita gizi buruk mengalami tren menurun. Walaupun masih munculnya kasus gizi buruk berulang dengan balita yang sama karena adanya kelainan pada balita tersebut. Upaya yang dilakukan diantaranya meningkatkan KIE, Sosialisasi terkait gizi seimbang dan bahayanya balita dengan gizi buruk serta dengan memanfaatkan rumah pemulihan gizi secara maksimal bekerjasama dengan dokter spesialis anak melalui pemeriksaan dan konsultasi kesehatan serta dengan memberikan makanan tambahan bagi balita gizi kurang dan keluarga miskin.

Grafik 2. 47. Prevalensi Balita Gizi Buruk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Permasalahan status gizi salah satunya adalah kejadian stunting (Gizi kronis), dimana Kota Salatiga saat ini masih memiliki angka prevalensi stunting sebesar 7,01 persen atau sebanyak 605 Balita Stunting pada tahun 2024 dan tersebar pada semua kecamatan dan kelurahan di Kota Salatiga. Masih adanya kejadian Stunting ini karena kurangnya kesadaran orang tua balita dalam pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita, kurangnya pengetahuan ibu dalam pemberian makanan pada bayi dan balita, adanya penyakit infeksi pada balita, masih ada kasus anemi dan KEK pada ibu hamil, dan kondisi sanitasi yang kurang baik. Stunting akan mempengaruhi secara nyata pada kualitas sumber daya manusia Kota Salatiga pada tahun-tahun mendatang.

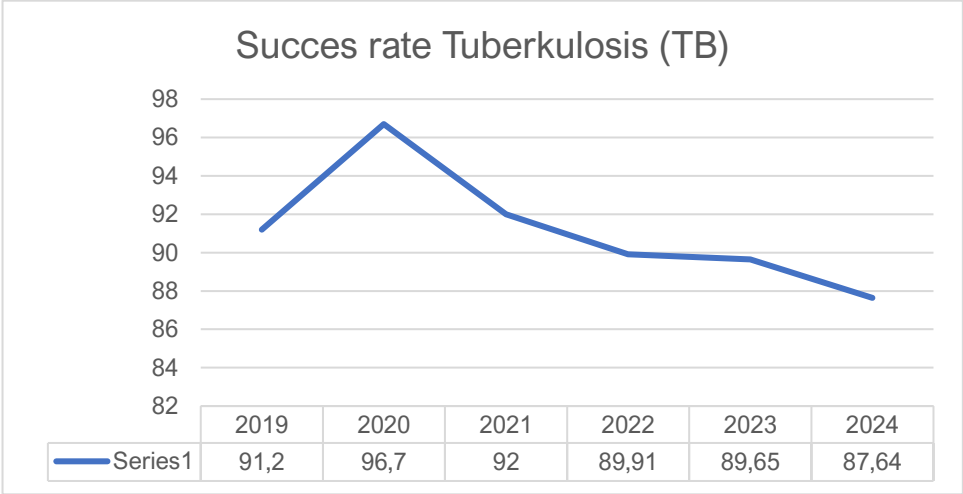
Tabel 2. 25. Data Stunting Kota Salatiga 2020-2024

Tahun	BADUTA		BALITA	
2020	329/4.649	7,07%	1099/11.462	9,58%
2021	286/3.431	8,34%	856/9.480	9,03%
2022	204/3.746	5,44%	647/10.418	6,21%
2023	135/2927	4,61%	484/8.177	5,92%
2024	181/2698	6,71%	605/8627	7,01%

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Salah satu sasaran strategis dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yaitu menurunkan penyakit menular dan tidak menular. Keberhasilan menurunkan penyakit menular terlihat dari Success Rate Tuberkulosis (TB) Kota Salatiga yang capaiannya pada Tahun 2024 sebesar 87,64% dari target 2024 sebesar 93%. Pelayanan program TB di fasilitas dalam tatalaksana pengobatan TB secara keseluruhan sudah sesuai standar, angka keberhasilan pengobatan belum bisa mencapai target dikarenakan ada kasus kematian pada penderita TB sebesar 2% sehingga mempengaruhi capaian succes rate. Perkembangan penanganan Tuberkulosis (TB) cenderung fluktuatif dari tahun 2020-2024.

Grafik 2. 48. Succes Rate Tuberkulosis (TB) di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

-Persentase HIV/AIDS yang ditangani.

Sesuai kebijakan program pencegahan dan pemberantasan penyakit HIV/AIDS seluruh penderita HIV/AIDS harus mendapatkan pelayanan sesuai standar. Tata laksana penderita HIV/AIDS meliputi *Voluntary Counseling Testing* (VCT) yaitu tes konseling secara sukarela, perawatan orang sakit dengan HIV/AIDS, pengobatan Anti Retroviral (ARV), pengobatan infeksi oportunistik, dan rujukan kasus spesifik.

Pada tahun 2020 ditemukan 15 kasus , tahun 2021 ditemukan sebanyak 12 kasus tahun 2022 ditemukan sebanyak 24 kasus, tahun 2023 ditemukan sebanyak 28 kasus dan seluruhnya sudah 100% mendapatkan pengobatan ARV. Sedangkan pada tahun 2024 sebanyak 37 kasus dan 81,08% telah mendapatkan pengobatan ARV.

-Angka Kesakitan Malaria per 1.000 Penduduk

Malaria merupakan salah satu salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia. Di Kota Salatiga terdapat 160 kasus malaria di tahun 2024 (API: 0,8/1.000 penduduk). Jumlah ini meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2023 dimana kasus malaria terdapat 13 kasus (API: 0,06/1.000 penduduk). Sedangkan pada tahun 2022 terdapat 10 kasus (API: 0,05/1.000 penduduk).

Terdapat 38 kasus malaria di tahun 2021, meningkat jika dibandingkan Tahun 2020 yang berjumlah 35 kasus (API: 0,18/1.000 penduduk). Kasus malaria yang ditemukan sebagian besar merupakan kasus yang di bawa dari daerah endemis. Oleh karena itu perlu diwaspadai sumber penularan dan peta wilayah kasusnya, sehingga penularan di wilayah Salatiga dapat dicegah sedini mungkin.

Menurunnya penyakit tidak menular untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terlihat dari perkembangan prevalensi hipertensi penduduk usia diatas 18 tahun. Pada tahun 2024 Prevalensi Hipertensi penduduk usia diatas 15 tahun dengan target 36,97%, terealisasi sebesar 38,61%.

Dari data di atas menunjukkan bahwa hipertensi sudah banyak diderita oleh masyarakat usia 15-18 tahun dengan prevalensi di atas target. Dalam hal ini Dinas Kesehatan harus meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang PTM, memaksimalkan skrining pada masyarakat usia produktif secara berkala agar status kesehatan masyarakat dengan hipertensi dapat terkontrol.

Tabel 2. 26. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Kesehatan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD 20023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2004 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama	%	82	66	100	100	151.52	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Peringkat Kelulusan Akreditasi RSUD	Predikat	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Sangat Tinggi	Tercapai

Pada Tahun 2024 Persentase Akreditasi Puskesmas Strata Utama ditetapkan target sebesar 66% Puskesmas terakreditasi minimal strata utama, dan berdasarkan hasil reakreditasi semua puskesmas mendapatkan hasil paripurna. Sehingga target tahun 2024 tercapai karena capaian kinerja sebesar 100 %.

No.	Nama Puskesmas	Akreditasi
1	Sidorejo Lor	Paripurna
2	Sidorejo Kidul	Paripurna
3	Kalicacing	Paripurna
4	Cebongan	Paripurna
5	Tegalrejo	Paripurna
6	Mangunsari	Paripurna

Pada tahun 2024 peringkat kelulusan akreditasi RSUD ditetapkan Paripurna dan sampai akhir tahun 2024 ini statusnya adalah paripurna sehingga target tercapai. Tercapainya target ini tidak lepas dari dukungan sumber daya yang memadai serta kelengkapan administrasi yang mendukung RSUD mendapat predikat akreditasi paripurna.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), kondisi pelayanan dasar Urusan Kesehatan dapat dilihat dari SPM yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Salatiga dengan capaian tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. 27. SPM Pelayanan Dasar Urusan Kesehatan

No.	Pelayanan Dasar/ Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96,73	97,53	100	100	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	100	100	100	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	98,06	98,20	100	100	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	75,52	93,79	97,06	100	100
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	32,11	25,14	100	100	100
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	20,13	26,62	93,08	100	100
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	85,34	70,88	93,34	100	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	27,11	33,71	93,17	97,69	98,16
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	48,73	67,71	93,84	100	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	59,18	73,52	100	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	13,99	33,43	100	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV)	50,60	50,60	100	100	100

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

Pencapaian Indikator SPM Bidang Kesehatan pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan capaian pada tahun 2023. Pencapaian telah mencapai kategori Tuntas Paripurna (100%) yaitu Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, Usia lanjut, Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus sedangkan capaian cakupan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita, Penderita Hipertensi dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat mencapai kategori Tuntas Utama. . Oleh karena itu IP SPM Bidang Kesehatan Kota Salatiga Tahun 2024 berkategori TUNTAS UTAMA.

Walaupun ada Indikator SPM Bidang Kesehatan belum mencapai target yang telah ditetapkan, akan tetapi upaya pemecahan masalah telah dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan koordinasi dengan PKK, tokoh masyarakat dan lintas sektor terkait
- 2) Mendekatkan Posbindu hingga ke tingkat RW di semua wilayah

- 3) Menetapkan posyandu terintegrasi percontohan sebagai bentuk pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di setiap wilayah puskesmas
- 4) Meningkatkan edukasi ke masyarakat

Dengan upaya-upaya pemenuhan penerapan SPM tersebut diharapkan progress capaian indikator SPM Kesehatan akan sesuai dengan target pada tahun berikutnya.

Pencapaian target 12 (dua belas) indikator SPM bidang kesehatan di Kota Salatiga, pada tahun 2023 ada 11 (sebelas) indikator yang telah mencapai kategori Tuntas Paripurna (100%) yaitu Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Pelayanan Kesehatan Balita, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif, Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis, dan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). Sedangkan capaian yang terendah adalah cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi yang hanya mencapai 98,16% (Tuntas Utama).

Indikator SDGs TUJUAN :2 - Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Tabel 2. 28. Capaian SDGs Urusan Kesehatan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan	Persen	88,4	92,2	95,92 (BPS)	97,9	98,55
2	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang prosesnya melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persen	119	116	100	100	100
4	Persentase rumah tangga yang memilki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak	Persen	100%	100%	97,72	98,2	
5	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Persentase Kasus Stunting	Persen	9,58	9,03	6,21	5,92	
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat	Persentase Kasus Stunting	Persen	9,58	9,03	6,21	4,61	

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
	pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.							
7	Prevalensi anemia pada ibu hamil	Persentase Ibu Hamil yang Anemia	NA	NA	12,3	11,18	11	
8	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eks.	Persen	70	73,7	78,59	82,4	
9	Angka Kematian Ibu (AKI)	Angka Kematian Ibu (AKI).	/100.00 KH	122	430	133,69	89,05	99,9
10	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Persen	100	100	100	100	100
11	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses kelahiran terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Persen	100	100	100	100	100
12	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	10,9	12,3	11,59	13,8	
13	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	per 1000 KH	8,10	8,91	6,24	9,35	
14	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	per 1000 KH	10,5	13,8	10,25	12,5	11,49
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Persentase bayi (0-12 bln) yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap	Persen	119	116	####	131	100
16	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	Prevalensi HIV pada Populasi Dewasa	%	0,01	0,01	0,02	0,02	
17	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Angka	162	35	####		
18	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar					167	167
19	Persentase Kab/Kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	Persentase puskesmas yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B	%	NA	NA	####	100	100
20	Jumlah Orang Yang Memerlukan Intervensi Terhadap Penyakit Tropis Yang Terabaikan (Filiariasis dan Kusta)	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang	Orang	2	1	1	0 kasus/tidak ada kasus	0 kasus/tidak ada kasus

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		terabaikan (Filariasis dan Kusta).						
21	Prevalensi tekanan darah tinggi	Prevalensi Hipertensi Penduduk Usai >18 tahun	Persen	0,6	0,72	0,81		
22	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Jumlah puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa	Unit			6	6	6
23	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Persentase cakupan kepesertaan JKN	Persen	88,4	92,2	95,92	97,9	99,55
24	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	Persentase cakupan kepesertaan JKN	Persen	13,8	92,2	95,92	97,9	
25	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	NA	9,35	NA	25,36	23,15	33,39
26	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	%	12,5		####	100	100
27	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persentase penduduk berakses air minum layak	%	NA	98,78	98,04	98,71	93,95
28	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	%	98,44	98,82	98,04	98,71	98,44
29	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air	%		96,3	97,4	95,7	95,7
30	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Jumlah Kelurahan yang melaksanakan STBM	Kelurahan	167	23	23	23	23
31	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	Kelurahan	100	23	23	23	23

Sumber : Dinas Kesehatan, Tahun 2024

c. **Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Dalam meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan sasaran strategis meningkatkan kualitas sarana

prasarana jalan dan jembatan yang memadai untuk kenyamanan dan kelancaran transportasi serta meningkatkan kualitas penataan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 2. 29. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1)	Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	%	98	98	96,21	98,17	98,17	Sangat tinggi	Tercapai
2)	Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik	%	91	83	87,31	87,31	105,2	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Pencapaian Indikator Pekerjaan Umum dalam hal ini Prosentase Tingkat Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada tahun 2025 dengan Berkas permohonan KKPR yang masuk sejumlah 375 permohonan, diizinkan sejumlah 257 permohonan, diizinkan bersyarat sejumlah 21 permohonan, diizinkan terbatas sejumlah 80 permohonan, dan tidak diijinkan sejumlah 3 permohonan, sehingga pada tahun 2025 ini prosentase Tingkat Ketaatan Terhadap RencanaTata Ruang Wilayah terealisasi 96,21%.

Tahun 2025 Wilayah dengan infrastruktur kondisi baik target 83 % dan realisasi sebesar 87,31%. Realisasi kinerja RPJMD s.d Tahun 2025 adalah sebesar 87,31% sedangkan realisasi capaian kinerja RPJMD s.d tahun 2025 adalah sebesar 105,2%, sehingga kategori status sangat tinggi. Total panjang jalan sesuai SK Jalan tahun 2017 adalah sepanjang 337,471 km. Dari panjang jalan tersebut pada tahun 2025 kondisinya 86,62% dalam kondisi mantab, yang terdiri dari 292,324 km dalam kondisi baik dan 45,147 Km dengan kondisi tidak mantap. Faktor pendukung diantaranya ketersediaan anggaran baik untuk pemeliharaan maupun untuk peningkatan kondisi jalan.

Pada Tahun 2025 panjang jaringan irigasi kondisi baik adalah 11.875 m dan kondisi sedang adalah 12.013 m sedangkan panjang jaringan irigasi keseluruhan adalah 23.888 m, dari data tersebut maka capaian persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 78,95% dengan 12 daerah irigasi yang ada semuanya terlayani. Penyebab keberhasilan ini karena ketersediaan anggaran dan dukungan OP irigasi yang turut mendukung pemeliharaan jaringan irigasi.

SPM urusan Pekerjaan Umum di tingkat kabupaten/kota mencakup pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari, dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Realisasi SPM tahun 2021-2025 sebagai berikut:

Tabel 2. 30. SPM Pelayanan Dasar Urusan Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari	131,82	99,09	99.28	88,45	97,31
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	100	82,28	86.89	98,06	92,32

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Pencapaian Indikator Standar Minimal Bidang Pekerjaan Umum berupa Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terhadap kuantitas. Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air bersih melalui SPAM Jaringan Perpipaan terhadap kualitas air.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berupa sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) terhadap kuantitas akses pengolahan air limbah domestik. Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat terhadap kualitas pelayanan air limbah domestik.

Jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kabupaten/Kota dan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk, lumpur tinja diolah di IPLT, dan memiliki sambungan rumah dan air limbah nya diolah di IPAL.

Permasalahan yang dihadapi bidang pekerjaan Umum pada Pencapaian SPM antara lain:

- 1) belum adanya data rumah tangga akses air minum dan sanitasi yang akurat;
- 2) kesulitan mencari lahan untuk pembngunan IPLT baru karena adanya penolakan di rencana lokasi Gunungsari
- 3) keterbatasan lahan di masyarakat untuk pembangunan IPAL komunal (SPALD-T)

Solusi yang dilakukan diantaranya adalah perlunya survey/sensus BNBA bagi rumah tangga yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi juga pengoptimaan IPLT yang lama untuk 10 tahun ke depan dengan meningkatkan kapasitas perlu kajian penggunaan alat mekanis.

Indeks Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari- hari berada pada kategori Tuntas Madya, sedangkan pada jenis pelayanan dasar penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik berkategori Tuntas Utama, sehingga IP SPM Bidang Pekerjaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2025 dikategorikan Tuntas Madya.

Tabel 2. 31. SPM Pelayanan Dasar Air Minum

No.	Air Minum	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Air Minum Layak	81,87	91,55	98,44	93,20	97,31

No.	Air Minum	2021	2022	2023	2024	2025
2.	Persentase Air Minum Jaringan Perpipaan	75,05	95,00	91,30	91,30	90,20
3.	Persentase Air Minum Bukan Jaringan Perpipaan	24,95	2,98	8,7	6,16	7,11
4.	Persentase Air Minum Aman	72,15	82,65	91,71	87,04	90,20

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Tahun 2025

Tabel 2. 32. SPM Pelayanan Dasar Air Limbah Domestik

No.	Air Minum	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Air Limbah Domestik Layak	93,75	94,37	94,67	96,67	80,25
2.	Persentase Air Limbah Domestik Belum Layak	6,25	5,63	5,33	5,92	2,64
3.	Persentase Air Limbah Domestik Aman	7,75	8,37	12,12	10,93	12,07

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

Tabel 2. 33. Capaian SDGs Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga,perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Persentase Pemenuhan Air Baku	Persen	97	98,19	99,3	82,51	
2	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak	Persen	98,6	98,04	98,7		97,31
3	Persentase rumah angga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak	Persen	93,75	94,37	94,61	92.00	80,25
4	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusatskala	Jumlah kecamatan yang terbangun infrastruktur airlimbah dengan sistem terpusat skala	Kecamatan	2	4,00	4	4	4

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
	kota, kawasan dan komunal	kawasan dan komunal						
5	Jumlah Kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kecamatan yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kecamatan	PM	4,00	4	4	4
6	Kondisi mantap jalan nasional	Persentase Jalan kota dalam Kondisi baik	Persen	96.45	99,20	91.00	91,97	86,62

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025

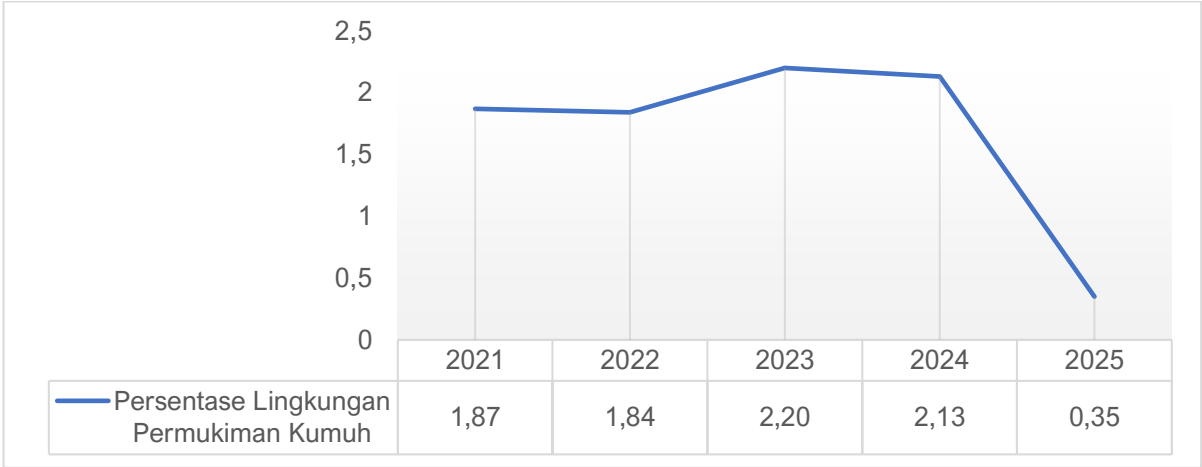
d. **Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Salah satu isu yang masih berkembang saat ini adalah semakin menurunnya kualitas kawasan permukiman. Beberapa faktor penyebab kekumuhan antara lain meningkatnya arus urbanisasi di perkotaan, kemampuan ekonomi khususnya untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta pertumbuhan penduduk itu sendiri. Hal ini mendorong tumbuhnya kawasan kumuh permukiman.

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Salatiga Nomor 600.2/127/2024 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Salatiga, Total luasan Kawasan kumuh Kota Salatiga tingkat kumuh ringan dan sedang pada akhir 2024 adalah 28,77 Ha. Luasan ini menjadi awal perhitungan untuk periode 2025 setelah sebelumnya menggunakan SK Kumuh 2020 dengan total luasan kumuh 128,59 .

Pada tahun 2025 luasan kawasan kumuh yang tertangani bertambah 6,92 Ha. Sehingga luasan kawasan kumuh Salatiga saat ini menjadi 18,97 Ha atau 0,35 % dari total luas Kota Salatiga yaitu 5.498 Ha.

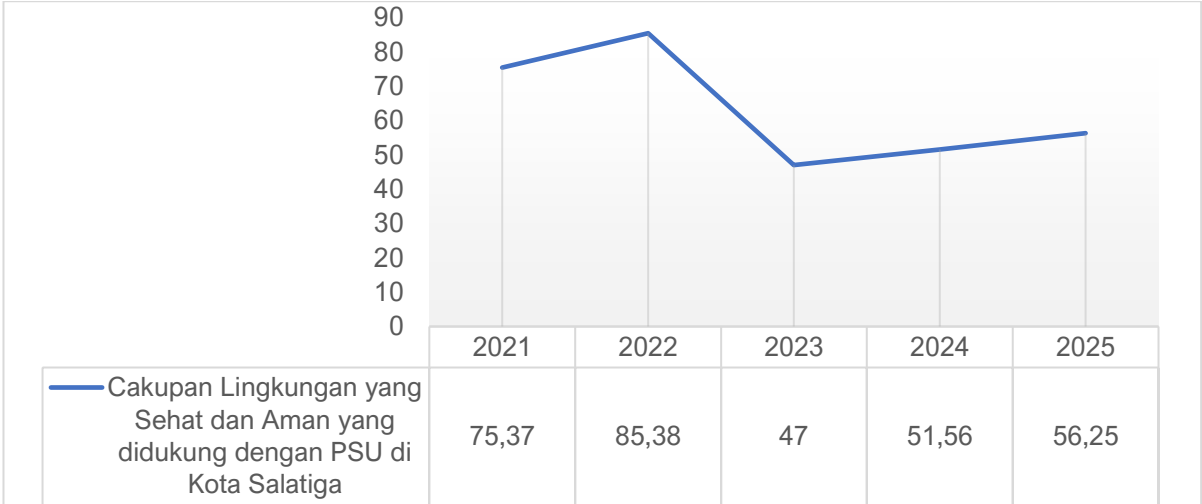
Grafik 2. 49. Prosentase Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan PSU pada tahun 2025 ditargetkan 55% mencapai realisasi 56,25%. Persentase ini dicapai dari jumlah perumahan yang sudah dibangun terfasilitasi PSU sebanyak 36 perumahan dibagi jumlah perumahan yang sudah diserahkan sebanyak 64 perumahan dikalikan 100%.

Grafik 2. 50. Cakupan Lingkungan yang Sehat dan Aman di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Tabel 2. 34. Luas PSU berdasarka nBA/SK

NO	NAMA PERUMAHAN	PERUNTUKAN	LUAS BA	NO HGB	LUAS BIDANG
A	GRIYO KECANDRAN	1. Jalan dan drainase	542,69	3300	542,69
B	PURI KARANG PADANG TAHAP 3	1.Jalan Dan Drainase	887,2	2457 &3275	887
		2.RTH 1	481,05		481,05
C	PESONA MERBABU 5	1. Jalan dan Drainase 1	1650,71	118	1650,71
		2.Jalan dan Drainase 2	105,77	184	105,77
		3. sumur Resapan	369,07	1303	369,07

NO	NAMA PERUMAHAN	PERUNTUKAN	LUAS BA	NO HGB	LUAS BIDANG
D	GRAND VISARA	1.Jalan dan Drainase	1008,8		885,95
		2.RTH 1	102,66		122,85
		3.RTH 2	83,15		235,48
		4. Ruang Terbuka	115,17		115,17
E	AMAYA TOWN HOUSE				
	Ngemplak rt 01 rw 02	1.Lalan dan Drainase	586,44	713	586,44
	Kel. Dukuh	2. Ruang terbuka	25		25
F	TAMAN ASRI REGENCY				
	Rt 01 Rw 01	1. Jalan dan Drainase 1	191,34		191,34
	Kel. Cebongan	2. Jalan dan Drainase 2	134,3		134,3
G	Griya Dukuh Asri	1.Balai rt 01	250		250
		2.Balai Rw, Balai Rt 02, Lapangan Voli, Masjid,dan RTH	1304		1304
		3.Balai Rt 03 dan Lapangan Voli	400		400
		4.Balai Rt 04	120		120
		5.Jalan, Drainase dan RTH	350		350
I	RTH Benoyo	1.RTH Benoyo	594		594

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Salatiga, 2025

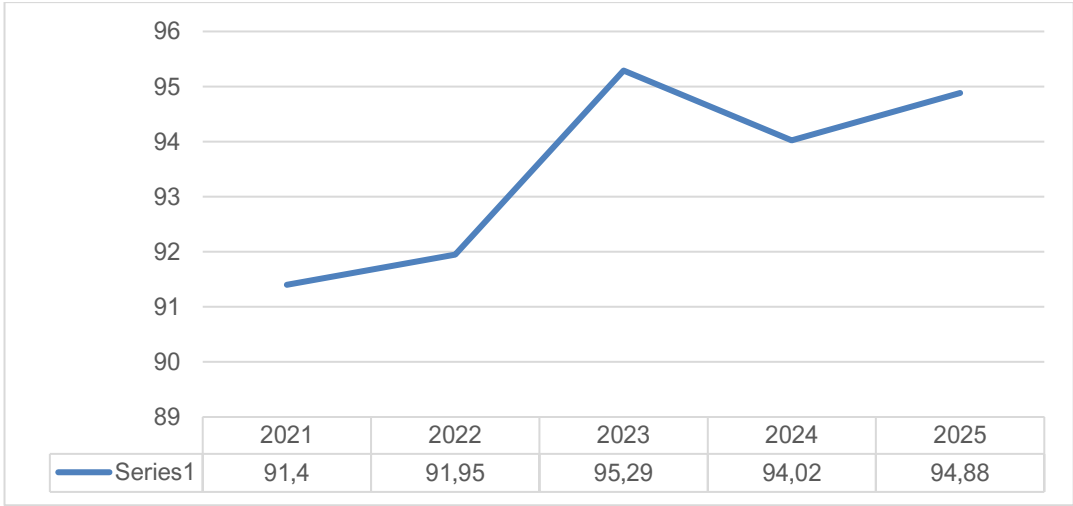
Rumah tangga dengan akses hunian layak yang ditargetkan 95% terealisasi 95,57 %, dengan capaian kinerja sebesar 100,61%. Realisasi peningkatan kualitas RTLH yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, sampai dengan tahun 2025 adalah sebanyak 2.674 unit, dengan rincian penambahan sebagai berikut:

- a) Tahun 2017 sebanyak 411 unit;
- b) Tahun 2018 sebanyak 58 unit;
- c) Tahun 2019 sebanyak 415 unit;
- d) Tahun 2020 sebanyak 340 unit;
- e) Tahun 2021 sebanyak 226 unit;
- f) Tahun 2022 sebanyak 211 unit;
- g) Tahun 2023 sebanyak 416 unit;
- h) Tahun 2024 sebanyak 241 unit dan
- i) Tahun 2025 sebanyak 356 unit.

Pada tahun 2025 target RPD untuk peningkatan kualitas RTLH tahun 2025 sejumlah 88 unit, terealisasi 356 unit, hal ini mengalami peningkatan 47% dibanding 2024 yang hanya 241

unit. Rumah tangga dengan akses hunian layak (ketersediaan rumah layak huni) yang ditargetkan 95% di tahun 2025, terealisasi sebesar 94,88 %, yang dihitung berdasarkan prosentase perbandingan antara jumlah rumah layak huni tahun 2025 sejumlah 45551 rumah dan jumlah rumah sekota Salatiga pada tahun 2025 sejumlah 48008 rumah, dengan capaian kinerja sebesar 99,87%.

Grafik 2. 51. Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kota Salatiga pada sektor perumahan menggunakan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak. Indikator tersebut menjadi salah satu kebijakan RKPD Kota Salatiga tahun 2027 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja mendukung Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045. Capaian Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak pada tahun 2025 sebesar 99,87% yang dijadikan dasar untuk penetapan target pada tahun 2027.

Indikator SPM Bidang Perumahan rakyat berupa Presentase jumlah Warga Negara korban bencana kota yang memperoleh rumah layak huni dan Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni untuk Kota Salatiga sampai saat ini masih belum terdata secara lengkap. Hal ini dikarenakan masih belum adanya inventarisasi obyek penerima layanan SPM bidang Perumahan Rakyat, Data Program Pemerintah yang berkaitan dengan relokasi penduduk serta integrasi informasi kebencanaan Kota Salatiga.

Walaupun capaian indikator SPM Bidang Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2025 belum bisa dihitung karena tidak adanya realisasi kegiatan, tetapi program-program pendukung penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat telah difasilitasi oleh Pemerintah Kota Salatiga berupa pengalokasian anggaran untuk mewujudkan kebutuhan dasar masyarakat atas perumahan.

Pengalokasian anggaran tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota serta fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kota. Pada tahun 2025, realisasi capaian indikator program kegiatan yang mendukung indikator tersebut mencapai target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian 100%.

Tabel 2. 35. SPM Pelayanan Dasar Urusan Perumahan Rakyat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kota	0	100	100	100	100

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Pada Tahun 2026 di Kota Salatiga tidak terdapat bencana, sehingga Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota tidak ada pemenuhan penerima layanan dasar dan tidak terdapat pencapaian mutu minimal layanan dasar dan Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota.

Tabel 2. 36. Capaian SDGs Perumahan Rakyat

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Proporsi rumah tangga yang memiliki hunian yang layak dan terjangkau	Rumah tangga dengan akses hunian layak	Persen	96,3	93,94	89,2	94,02	94,88

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

e. **Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**

Dalam meningkatkan ketenteraman, ketertiban dan kondusifitas wilayah di Kota Salatiga ditunjang dengan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada. Rasio Linmas dibanding penduduk kota salatiga yaitu 73 orang Linmas per 10.000 penduduk. Perkembangan rasio pertugas Linmas dalam kurun waktu 2020-2022sebagaimana dalam tabel berikut:

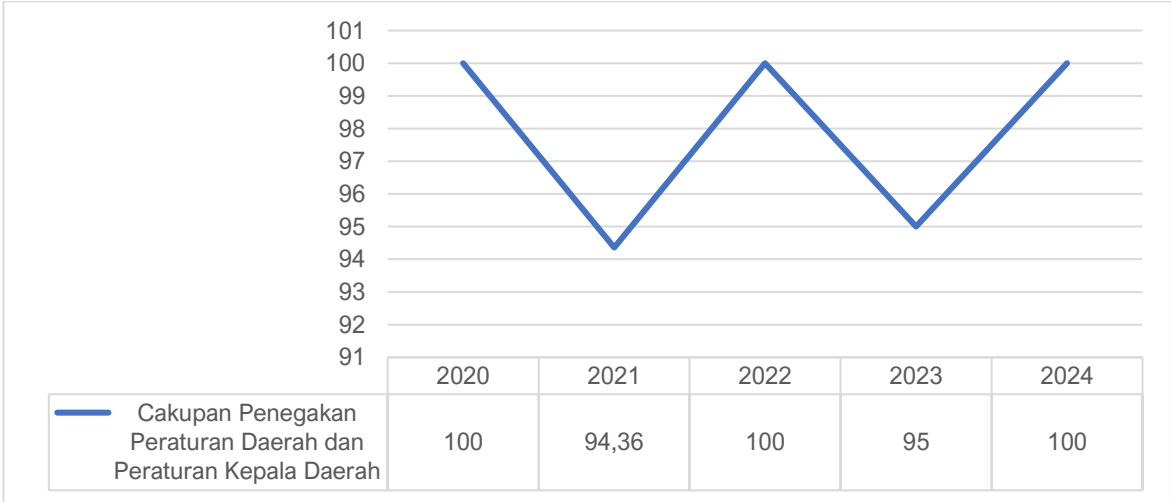
Tabel 2. 37. Rasio Linmas Dibanding Jumlah Penduduk Kota Salatiga Tahun 2020-2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Jml linmas	1.298	1.264	1258	1312	1467
Jml Penduduk	196.082	196.440	200.220	201.369	198.971
Rasio 1 : x	151	155	159	153	135
rasio per 10.000	66	64	62	65	73

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Kondusifitas wilayah tergambar dari penegakan PERDA di Kota Salatiga relatif stabil dalam kurun waktu 2020-2024. Cakupan penegakan perda pada tahun 2024 sebesar 100% Dengan penyelesaian sejumlah 31 kasus dari 274 kasus pelanggaran PERDA dan PERKADA sedangkan yang lainnya sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan tetapi masih ada yang dalam proses administrasi APIP.

Grafik 2. 52. Cakupan Penegakan PERDA dan PERKADA di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Tabel 2. 38. Capaian Indikator Kinerja Daerah Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Penegakan Perda dan Gangguan Trantibum yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai
2)	Cakupan pelayanan kebakaran kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba	%	1.70	1.71	1.66	1.66	102,92	Sangat Tinggi	Tercapai
4)	Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbangpol, BPDB Tahun 2024

Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditargetkan 100% pada tahun 2024 terealisasi sebanyak 100% dikarenakan dengan kategori sangat berhasil,

dikarenakan setiap pelanggaran yang dilaporkan masyarakat ke Satpol PP sudah ditindaklanjuti dan diselesaikan tetapi masih ada yang dalam proses administrasi.

Prevalensi penyalahgunaan narkoba yang ditargetkan 1.71 per 10.000 penduduk ditangani oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Salatiga, terealisasi 1.66. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa masih ada kasus penyalahgunaan Narkoba sebanyak 1.71 orang per 10.000 penduduk atau di tahun 2024, atau masih ada 33 kasus penyalahgunaan narkoba.

Capaian Prevalensi penyalahgunaan narkoba untuk akhir RPD ditargetkan 1,70, sedangkan realisasi pada tahun 2024 tercapai 1,66, sehingga capaian kinerja mencapai 102.92% dengan status Tercapai.

Terselesainya kasus konflik horisontal secara damai dan adil baik terkait sosial, budaya maupun politik target 100% dan realisasi 100% serta capaian realisasi 100% dan target RPD tahun 2026 sebesar 100% maka status tercapai. Faktor keberhasilan diantaranya :

- 1) Adanya koordinasi rutin pada Tim Penanganan Konflik Sosial, Tim Cipta Kondusifitas dan FKDM serta Foeum Komunikasi Pimpina Daerah.
- 2) Sinergitas dan komunikasi antara Pemerintah Kota , TNI, Polri , FKDM dan masyarakat sehingga mampu menciptakan kondusifitas wilayah

Pada tahun 2024 target yang ditetapkan untuk Kelurahan Tangguh Bencana sebesar 19,00% dan terealisasi 26,08% dengan capaian 137,26% yang diperoleh dari perbandingan antar target 17,00% dengan realisasi 26,08% sehingga capaiannya 137,26 %, dengan status tercapai. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini karena pada tahun 2024 BPBD Kota Salatiga telah membentuk 2 (dua) kelurahan Tangguh Bencana yaitu di Kelurahan Blotongan dan Kelurahan Kauman Kidul.

Target yang ditetapkan untuk Indeks Resiko Bencana Pada tahun 2024 sebesar 90,45% dan terealisasi 90,89% dengan capaian 100,10% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 90.00% maka status tercapai. Penyebab keberhasilan ini karena terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang baik antar perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan indeks Ketahanan daerah.

Tabel 2. 39. SPM Pelayanan Dasar Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	100	100	100	100
2	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100
3	Pelayanan informasi rawan bencana	100	100	100	100	100
4	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	100	100	100
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	100	100	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Tahun 2024

Seluruh Indeks Penerapan SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sampai dengan 2024 telah mencapai 100% dengan kategori Tuntas Paripurna.

Walaupun demikian, jika dilihat dari permasalahan masih ada beberapa hal yang menjadi kendala dari Satpol PP dan BPBD dalam pencapaian SPM tahun 2024 diantaranya:

- 1) Masih adanya SDM PNS Pemadam kebakaran yang belum bersertikat.
- 2) Mobil pemadam kenakaran hanya ada 3 yang sudah uzue semua paling muda tahun 2009
- 3) Belum tersedianya gedung BPBD yang berfungsi untuk penyimpan logistik dan peralatan bencana.

Tabel 2. 40. Capaian SDGs Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2222	2023	2024
1	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	orang			0	0,00	1
2	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi	Indeks	91,2	91,2	90,89	94	
3	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana				NA	NA	
4	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB)	Dokumen	Belum	Belum	ada	ada	ada
5	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	kecamatan				4	4 kecamatan
6	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen	Belum	Belum	1	1,00	1,00
7	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	91,2	91,2	90,89	84	76,52

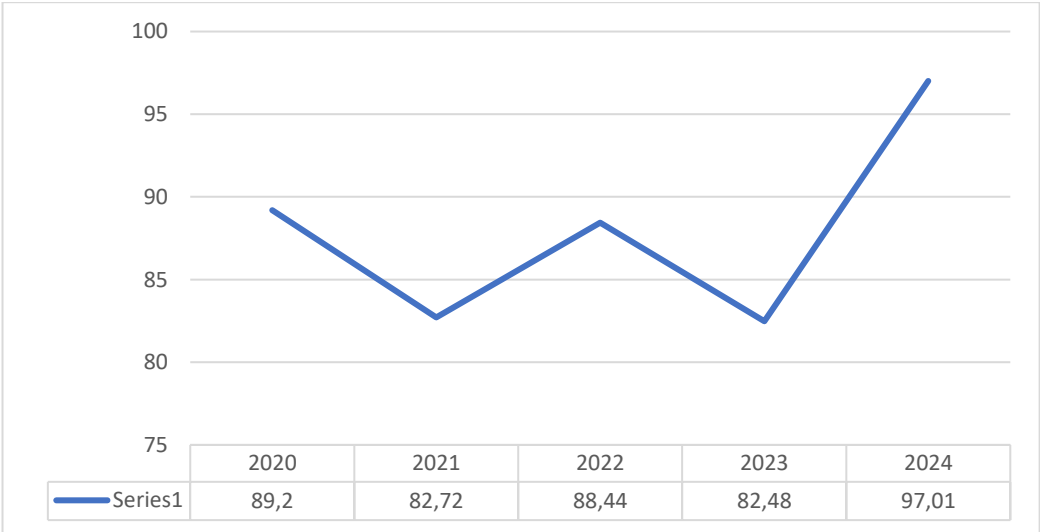
NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2222	2023	2024
8	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) daerah	Dokumen	Belum	Belum	1	1,00	1,00
9	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir	Kasus	0	0	0	1,00	0 kasus
10	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk	NA	NA	NA	NA	0	0 kasus
11	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan dalam 12 bulan terakhir	Jumlah kasus kejahatan pada satu tahun terakhir	Kasus	1	129	94	3 kasus	3 Kasus

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja dan Bakesbangpol, BPDB Tahun 2024

f. Urusan Sosial

Pada tahun 2024 penduduk Salatiga yang terdata DTKS sebanyak 52.298 orang yang sudah diverifikasi dan validasi (Verval) yang memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS sehingga cakupan penduduk memenuhi kreteria yang terdata dalam DTKS mencapai 97,01.

Grafik 2. 53. Cakupan Penanganan PMKS di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani ditargetkan 95% terealisasi 97.01% dan di akhir RPD target 70 persen dengan capaian kinerja di Tahun 2024 sebesar 102,11% dengan status Tercapai.

Faktor yang menyebabkan tercapainya capaian indikator cakupan penduduk memenuhi kriteria yang terdata dalam DTKS adalah melaksanakan koordinasi yang intensif secara vertikal dan horisontal dengan stakeholder dan mitra lembaga pemberdayaan sosial dalam pelaksanaan penanganan masalah kesejahteraan sosial antara lain :

- 1) pemberian perlindungan dan jaminan sosial termasuk penyaluran bantuan sosial
- 2) penanganan rehabilitasi sosial Pemerlu Kesejahteraan sosial yaitu antara lain anak terlantar, anak jalanan/gelandangan pengemis, Anak Berhadapan dengan Hukum, Lanjut usia terlantar, difabel, kelompok rentan;
- 3) penanganan layanan kedaruratan sosial termasuk bencana alam dan non alam
- 4) verifikasi dan validasi DTKS (data kemiskinan /penerima bansos)

Tabel 2. 41. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Sosial

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
Cakupan penduduk terdata DTKS yang ditangani	%	70	95	97.01	97.01	102,11	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

Standar pelayanan minimal urusan sosial yang menjadi kewenangan kabupaten/kota berdasarkan PP 2 Tahun 2018 terdiri atas rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti, rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti, perlindungan dan jaminan sosial ada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota. Realisasi SPM tahun 2020-2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 42. SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti	100	100	98,73	100	100
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti	100	70	100	100	100
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti	100	100	100	100	100

No.	Jenis Pelayanan Dasar	2020	2021	2022	2023	2024
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti	100	100	99,72	100	100
5.	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Ada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial sebagaimana diamanahkan pada Permendagri 59 Tahun 2021 untuk Kota Salatiga sampai dengan tahun 2023 untuk semua jenis pelayanan telah berada pada Kategori Tuntas Paripurna, sehingga IP SPM Bidang Sosial di Kota Salatiga dikategorikan Tuntas Paripurna.

Tabel 2. 43. Capaian SDGs Urusan Sosial

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Angka	4,94	5,14	4,73	4,66	
2	Presentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	Persen	53,24	53,20	55,60		
3	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang memperoleh Rehabilitasi Sosial dasar di luar panti					100	100
4	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Jumlah	4491	4491	5.093	4470	
5	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial	Jiwa			0	0 (tidak pernah terjadi kasus bencana sosial)	0 (tidak pernah terjadi kasus bencana sosial)
6	Koefisien Gini	Indeks Gini (Gini Ratio)	Angka Komposit	0,40	0,41	0,45	0,42	
7	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan	Angka	4,94	5,14	4,73	1,06 (angka Kemiskinan ekstrem)	

Sumber : Dinas Sosial, Tahun 2024

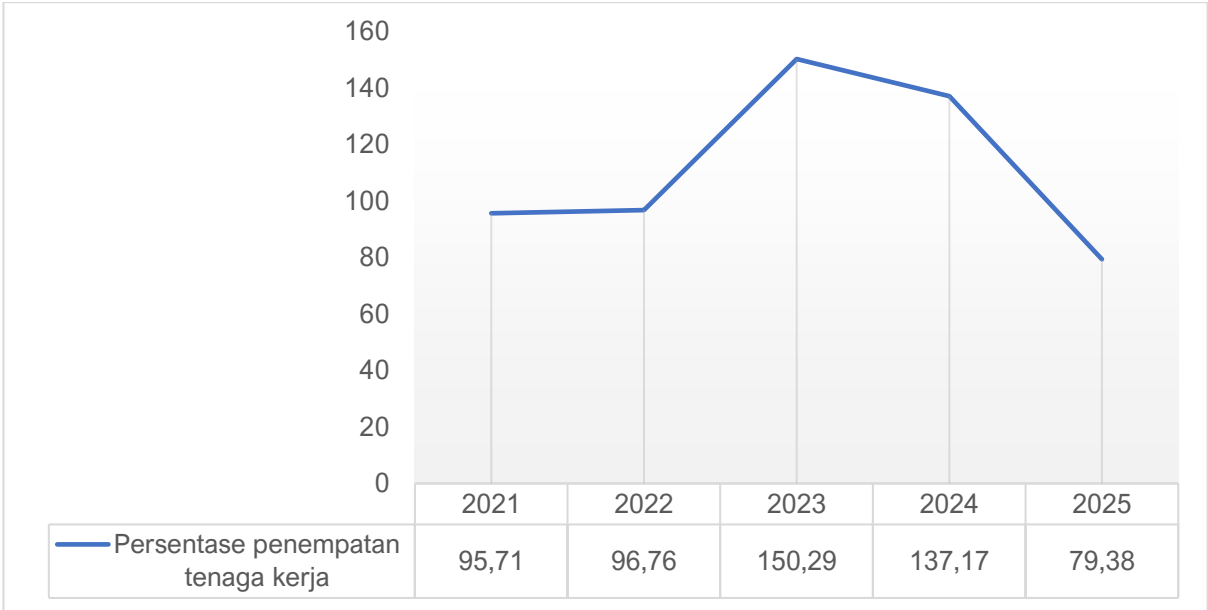
2.4.2 Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Gambaran aspek pelayanan umum pada fokus urusan wajib non pelayanan dasar terlihat pada capaian indikator kinerja masing-masing urusan sebagai berikut:

a. Tenaga kerja

Persentase penempatan tenaga kerja pada tahun 2024 mencapai 137,17% yang mengalami penurunan dari tahun 2023 yaitu150,29%. Hal ini di sebabkan karena para pencari kerja masih pilih-pilih dalam mencari pekerjaan oleh pemulihan ekonomi yang di tandai oleh penyerapan tenaga kerja.

Grafik 2. 54. Persentase Penempatan Tenaga Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2023

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Pada tahun 2025 jumlah penduduk lulusan S1/S2/S3 di Kota Salatiga sebanyak 21.511 jiwa, sedangkan total jumlah penduduk 199.350 jiwa atau 10,79%. Pada Agustus 2025, penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Kejuruan yaitu sebanyak 25,69 persen.

Tabel 2. 44. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase Lembaga Pelatihan Kerja	%	100	90	68	68	75,56	Tinggi	Akan tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
	Swasta yang memiliki ijin								
2)	Persentase Pencari Kerja yang ditempatkan	%	50	74,92	79,38	79,38	105,96	Sangat Tinggi	Tercapai
3)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta%	99.72	110,18	104,297	104,297	94,66	Sangat Tinggi	Tercapai
4)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja	%	76.9	100	100	100	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

Capaian Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang memiliki ijin yang ditargetkan 90% terealisasi 68% dengan capaian kinerja sebesar 75,56% dengan status akan tercapai.

Faktor yang melatarbelakangi belum tercapainya ini disebabkan kurangnya perhatian dan kesadaran Lembaga Pelatihan Kerja dalam hal pelaporan, upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan rapat koordinasi dan kunjungan ke Lembaga Pelatihan Kerja.

Capaian prosentase pencari kerja yang ditempatkan yang ditargetkan 74,92% terealisasi melebihi target yaitu mencapai 79,38% dengan target RPD tahun 2026 sebesar 50% dan capaian sebesar 105,96 % dengan status tercapai. Faktor pendukung diantaranya salah satu perusahaan besar di Kota Salatiga mempunyai program perekrutan tenaga kerja. Tingkat produktifitas tenaga kerja yang ditargetkan 110,18% dengan realisasi 104,297% dan capaian sebesar 96,44% dan target RPD sebesar 99.72% dengan status akan tercapai.

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga kerja ditargetkan 100% terealisasi sebesar 100% dengan capaian 100% dan target RPD tahun 2026 sebesar 76.9% dengan status tercapai.

- 1) Faktor keberhasilan ini karena Perencanaan kegiatan sejalan dan mengacu pada dokumen rencana tenaga kerja daerah.
- 2) Perencanaan kegiatan mempertimbangkan kebutuhan di lapangan yang diinventarisir pada saat melakukan tugas dan fungsi pengawasan dan pembinaan

Tabel 2. 45. Capaian SDGs Urusan Tenaga Kerja

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase Tenaga kerja formal	Presentase Tenaga kerja formal	Persen		50,5	60,67	68	
2	Presentase Tenaga kerja informal sektor pertanian	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja di sektor pertanian	Persen			2,82	3,27	
3	Upah rata-rata per jam pekerja.	Rata-rata Upah Buruh/Karyawan/Pegawai	Rupiah			3.032.318	2.952.582	
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	7,44	7,26	5,58	4,57	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Pada tahun 2025 persentase perempuan dalam parlemen di Kota Salatiga sebanyak 8 % atau sebanyak 2 orang perempuan dari 25 orang jumlah keseluruhan Anggota DPRD Salatiga hasil Pemilu 2025.

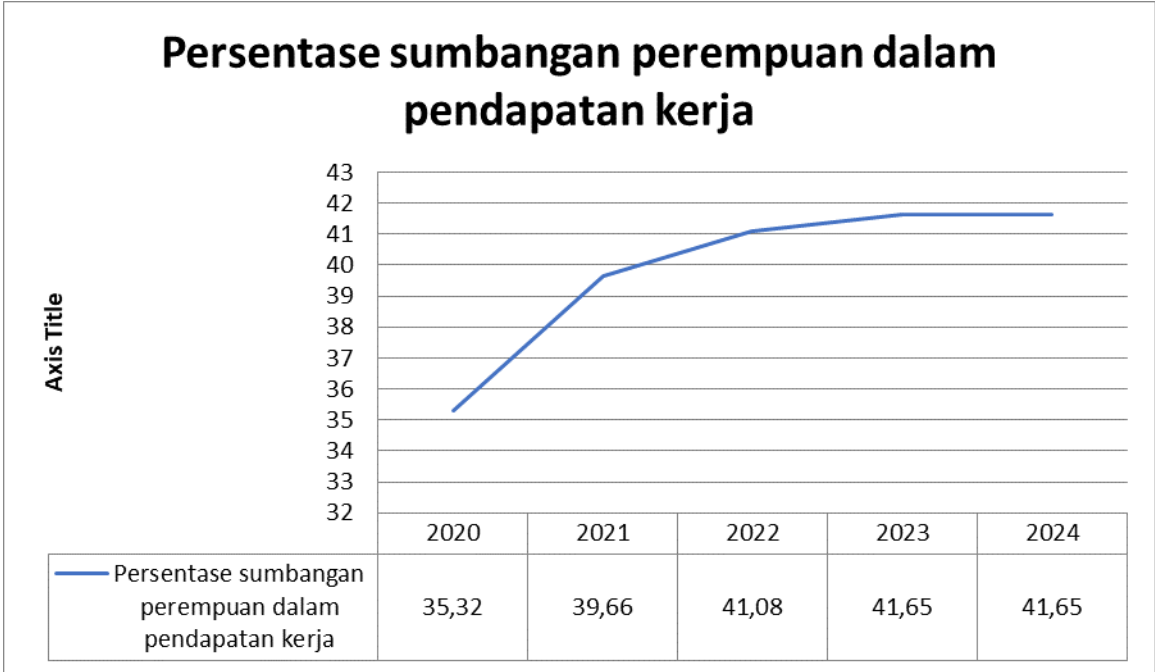
Grafik 2. 55. Cakupan Presentase Perempuan dalam Parlemen di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Tahun 2025 sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja, belum dirilis oleh BPS Kota Salatiga, namun sebagai bahan penyusunan RKPD tahun 2027, untuk sementara kita menggunakan capaian sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja pada tahun 2024. Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja tahun 2024 mencapai 41.65% dari target yang ditetapkan sebesar 40% sehingga capaian kinerjanya 1.65%.

Angka tersebut sama dengan capaian kinerja pada tahun 2023 dengan target yang ditetapkan sebesar 40% terealisasi sebesar 41,65%. Faktor pendukungnya diantaranya adanya pelatihan – pelatihan yang mendorong upaya peningkatan peran serta gender dan peningkatan ekonomi rumah tangga terhadap masyarakat khususnya perempuan di Kota Salatiga juga semakin mudahnya akses bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal.

Grafik 2. 56. Cakupan Presentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 7 Mei 2025

Pada tahun 2024 masih terdapat banyak kasus kekerasan, jumlah kekerasan pada anak sebanyak 33 kasus sedangkan kasus kekerasan pada perempuan sebanyak 23 kasus. Hal tersebut mengalami peningkatan pada tahun 2023 kasus kekerasan pada anak sebanyak 32 kasus, sedangkan kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 20 kasus. Melihat dari kenaikan kasus kekerasan setiap tahunnya menunjukkan bahwa kasus kekerasan menjadi isu penting yang harus segera ditangani. Di sisi lain juga menunjukkan bahwa korban kekerasan sudah mulai berani untuk mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya, terlebih dengan kemajuan teknologi maka kasus pengaduan kekerasan bisa dilakukan secara online

Tabel 2. 46. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1)	Persentase kelembagaan	%	39.29	32,14	100.00	100.00	311,4	Sangat Tinggi	tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
	forum anak tingkat Kota, Kecamatan dan Kelurahan								

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Persentase kelembagaan forum anak tingkat kota, kecamatan dan kelurahan yang ditargetkan 32,4% terealisasi 100%. Angka tersebut didapatkan dari perhitungan jumlah kelembagaan forum anak yang sudah terbentuk di Kota Salatiga yaitu mulai dari 1 kelembagaan forum anak tingkat kota, 4 kelembagaan forum anak tingkat kecamatan dan 23 kelembagaan forum anak tingkat kelurahan. Berdasarkan target RPD tahun 2026 sebesar 39,29 % dan tahun 2024 capaian kinerjanya sebesar 311,14% dengan status tercapai.

Faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja tidak terlepas dari semua pihak dan stakeholder terkait, karena komitmen untuk membentuk kelembagan forum anak,khususnya dari Rumanksa selaku Forum Anak Tingkat Kota di Salatiga yang aktif dalam berbagai kegiatan. Tidak terlepas juga dari keanggotan Rumanksa yang diisi oleh anak-anak milenial yang melek akan teknologi, sehingga lebih bisa meningkatkan kinerja untuk mendukung terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada

Tabel 2. 47. Capaian SDGs Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan	Prevalensi kekerasan terhadap anak	Persen	0,01	0,037	0,05	0,02	0,06

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Keterangan : Narasi dan data belum update 2025

c. Pangan

Tabel 2. 48. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1)	Ketersediaan beras	%	70	100	70	267,67	382,34	Sangat Tinggi	tercapai
2)	Ketersediaan energi per kapita	kcal/kapita	2.487	2.487	2.487	2.796	112,26	Sangat Tinggi	tercapai
3)	Ketersediaan protein perkapita	gram/kapita	111	110	110	78,06	70,96	Tinggi	Akan Tercapai
4)	Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan	%	1.65	1,63	1,63	1,57	100	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Ketersediaan beras ditargetkan 70% dengan realisasi 267,67% dan capaian realiasi kinerja 382,34% dimana target dalam dokumen RPD tahun 2025 sebesar 70% sehingga status tercapai.

Ketersediaan energi per kapita target sebesar 2.487 kkal/kapita dengan realisasi 2.796 kkal/perkapita dengan capaian realisasi 112,26 % dimana target dalam dokumen RPD tahun 2025 sebesar 2.487 kkal/perkapita sehingga status tercapai.

Capaian yang melebihi target ini dikarenakan terjaminnya pasokan bahan makanan dari luar Kota Salatiga, khususnya kelompok bahan makanan penghasil energi seperti beras, jagung, tepung gandum, ubi kayu, ubi jalar, dan gula. Pasokan dari luar kota menjadi sangat strategis karena Kota Salatiga bukan merupakan daerah penghasil bahan pangan pokok.

Ketersedian protein per kapita adalah komponen dalam perhitungan ketersediaan pangan per hari. Angka ini diperoleh dari komponen bahan makanan produk hewani dan kacang-kacangan. Pada Tahun 2025 ketersediaan protein perkapita dengan target 110 gram/kapita dan realisasi 78,06 gram/kapita , capaian kinerja sebesar 70.06 gram/kapita serta target RPD Tahun 2026 sebesar 111 gram/kapta maka status akan tercapai. Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2 point. Jika mengacu pada ketersediaan protein yang ditetapkan oleh Widya Karya Pangan Nasionaldan Gizi X Tahun 2012 yaitu 63 gr/kapita/hari untuk protein. Kelompok bahan makanan buah/biji berminyak dan kacang-kacangan memiliki skor dibawah skor maksimal, sehingga ketersediaan pada kelompok bahan makanan ini perlu ditingkatkan melalui peningkatan produksi maupun ekspor dari daerah lain.

Rasio ketersediaan pangan sesuai kebutuhan dengan target 1,42% dan realisasi sebesar 1.42% dengan capaian kinerja 100% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 1,64% sehingga status tercapai.

Faktor yang mendorong keberhasilan dalam indikator Ketersediaan Pangan Sesuai Kebutuhan adalah ketersediaan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan yang ada di Kota Salatiga. Meskipun Salatiga bukan kota pertanian, akan tetapi kebutuhan pangan di Masyarakat

Tabel 2. 49. Capaian SDGs Urusan Pangan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan	Penguatan cadangan pangan	Persen	70,00	100,00	100	267,67	267,67
2	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	nilai	90	95,51	92,4	94,4	92,73

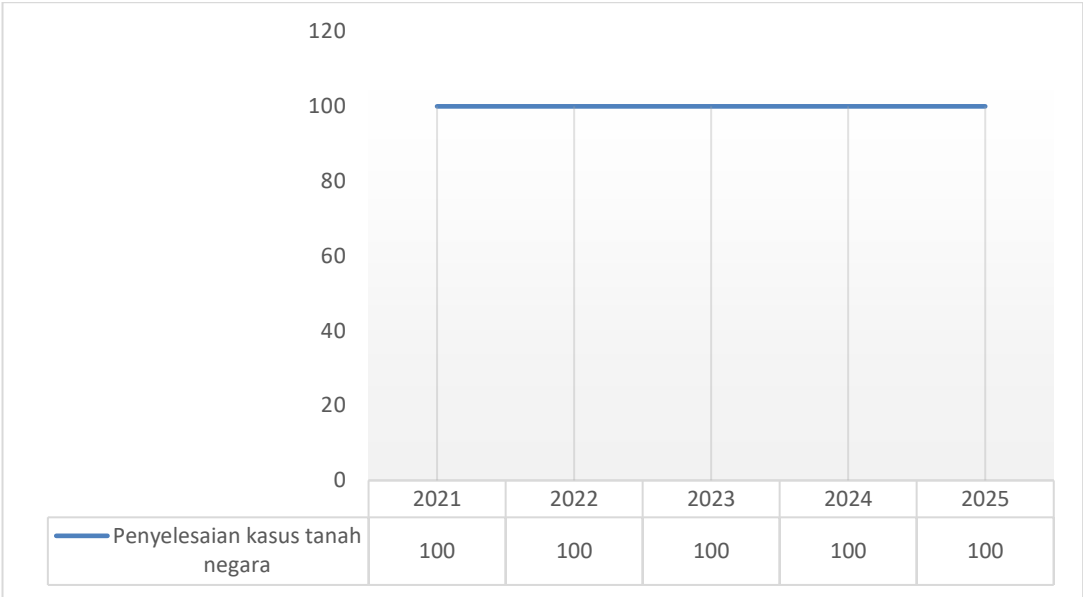
Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

d. Pertanian

Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi khususnya Persentase penyelesaian kasus tanah negara tahun 2025 ditargetkan sebesar 25% dan terealisasi sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 400%. Pada Tahun 2025 tidak ada kasus sengketa tanah yang terjadi di Kota Salatiga.

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di tahun 2024, realisasi kinerjanya sudah mencapai 100% dan menunjukkan bahwa realisasi kinerja telah mencapai target akhir RPJMD. Keberhasilan pencapaian kinerja ini didukung oleh terlaksananya koordinasi yang baik dengan OPD terkait yang mendukung dan bekerja sama dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan pertanahan. Selain itu, capaian kinerja ini juga didukung dengan adanya pelaksanaan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan anggaran sebesar Rp12.506.000.00 dan terealisasi sebesar Rp0,00.

Grafik 2. 57. Penyelesaian Kasus Tanah Negara di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Tabel 2. 50. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025(%)	Kategori Status	Status
1)	Prosentase luas lahan bersertifikat	%	100	100	71,95	71,95	89,93	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tahun 2025

Persentase luas lahan bersertifikat ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 71,95%. Angka ini diperoleh dari luas PSU yang bersertifikat yaitu seluas 8.177,48 m² dibagi luas PSU yang telah diserahkan ke Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2025 yaitu seluas 11.365,25m² dikalikan 100%.

e. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu (*Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025*), yang merupakan nilai komposit dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks kualitas lahan. Dari hasil pemantauan, inventarisasi data dan perhitungan yang telah dilaksanakan di Kota Salatiga untuk tahun 2025 telah diperoleh nilai IKA, IKU, dan IKL sebagai berikut :

Tabel 2. 51. Indikator Kinerja Daerah Lingkungan Hidup

No	Indikator	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1)	Indeks pencemaran air	Nilai	42,50	45,00	-	-	-
2)	Indeks Kualitas Air (IKA)	nilai	-	-	44.29	48,67	73,76

No	Indikator	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3)	Indeks pencemaran udara	Nilai	79,82	84,11	-	-	-
4)	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Nilai	-	-	84.84	87,80	75,97
5)	Indeks tutupan lahan	Nilai	47,21	47,28	-	-	-
6)	Indeks Kualitas lahan (IKL)	nilai	-	-	33.62	34,67	46,58

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu air di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Realisasi Indeks Kualitas Air Tahun 2025 sebesar 73,76 meningkat dibanding tahun 2024 yang hanya sebesar 48,67.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2025 sebesar 75,97, lebih rendah dibandingkan tahun 2024 yang bernilai sebesar 87,90.

Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan di lokasi tertentu pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah adalah nilai yang menggambarkan status dan kondisi tutupan lahan dengan menambahkan faktor koreksi pada ekosistem gambut di lokasi tertentu pada waktu tertentu.

Indeks Kualitas Lahan Kota Salatiga Tahun 2025 sebesar 46,58, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang bernilai sebesar 34,67.

Dari hasil indeks IKA, IKU dan IKL, dapat diperoleh capaian nilai IKLH di tahun 2025 sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{IKLH} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 73,76) + (0,405 \times 75,97) + (0,219 \times 46,58) \\
 &= 68,70
 \end{aligned}$$

Capaian IKLH tahun 2025 sebesar 68,70 ini naik 7,25 point dari capaian IKLH tahun 2024 yang hanya sebesar 61,45. Hal ini menandakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kota Salatiga tahun 2024 semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Upaya Peningkatan Kualitas Udara, Kualitas Air dan Tutupan Lahan serta pengelolaan sampah yang dilakukan Kota Salatiga di tahun 2025 semakin baik, sehingga berpengaruh signifikan terhadap kualitas Lingkungan Hidup tahun 2025 di Kota Salatiga.

Sedangkan untuk data Potensi Energi Baru Terbarukan di Kota Salatiga adalah sebagaimana disajikan dalam bentuk tabel berikut ini.

Tabel 2. 52. Data Potensi Energi Baru Terbarukan Kota Salatiga

No	Infrastruktur EBT	2025	Jumlah Unit	Kapasitas	Keterangan
1.	Biogas	-	81	M3	63 unit biogas 7-8 m3, dan 18 unit biogas 12-15 m3
2.	PLTA	-	--	kW	
3.	PLTM	-	-	kW	
4.	PLTMH	-	-	kVa	
5.	PLTS SHS	-	-	kWp	
6.	PLTS Ground Mounted	-	-	kWp	
7.	PLTS Rooftop	4	36	kWp	
8.	PJUTS	-	-	-	
9.	Panas Bumi	-	-	-	
10.	PLTSA	-	-	-	PLTSa belum punya, adanya pirolis 2 unit di TP3R Bulu, Tegalrejo, Kec Argomulyo, Salatiga

Berikut ini merupakan data dukung terkait Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Tabel 2. 53. Data Peningkatan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan

No	Uraian	TAHUN					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
1.	Total Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan (dokumen)	159	49	34	13	18	SPPL yang dihitung adalah pengajuan SPPL manual bukan dengan system
2	Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi thd IL dan Izin PPLH (perusahaan)	65	53	52	73	130	
3	ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau	41,54	5,66	7.69	17,81	9,23	ketaatan yang dimaksud adalah usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin

No	Uraian	TAHUN					Keterangan
		2021	2022	2023	2024	2025	
	kegiatan thd IL dan Izin PPLH (persen)						lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten /Kota

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun 2020-2024 mengalami tren naik sebesar 28,36% atau 77,76 Gg CO2eq. Tren peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sektor pengadaan dan penggunaan energi, yaitu mengalami peningkatan emisi sebesar 34,70% atau setara 71,33 Gg CO2eq. Peningkatan emisi juga dipengaruhi oleh sektor limbah yang mengalami peningkatan emisi sebesar 11,13% atau setara dengan 5,07 Gg CO2eq. Peningkatan emisi juga terjadi pada sektor IPPU yang mengalami peningkatan emisi di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020 yaitu sebesar 38,52% atau setara dengan 3,55 Gg CO2eq. Sedangkan untuk sektor AFOLU mengalami penurunan emisi sebesar 15,89% atau setara dengan 2,19 Gg CO2eq di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Besaran emisi Gas Rumah Kaca Kota Salatiga tahun 2020-2024 tidak menghitung emisi dari sumber bangkitan Listrik dikarenakan tidak ada industri energi atau pembangkit listrik di Kota Salatiga, hal ini berdasarkan Pedoman Penyusunan Data Aktivitas IGRK (Inventarisasi Gas Rumah Kaca) Pemerintah Daerah Sektor Energi Tahun 2020. Dalam kurun waktu 2020-2024, emisi tertinggi dihasilkan pada tahun 2024 sebesar 351,92 Gg CO2eq. Berikut ini merupakan besaran tren emisi GRK pada setiap sektor di Kota Salatiga dalam kurun waktu 5 tahun (2020-2024):

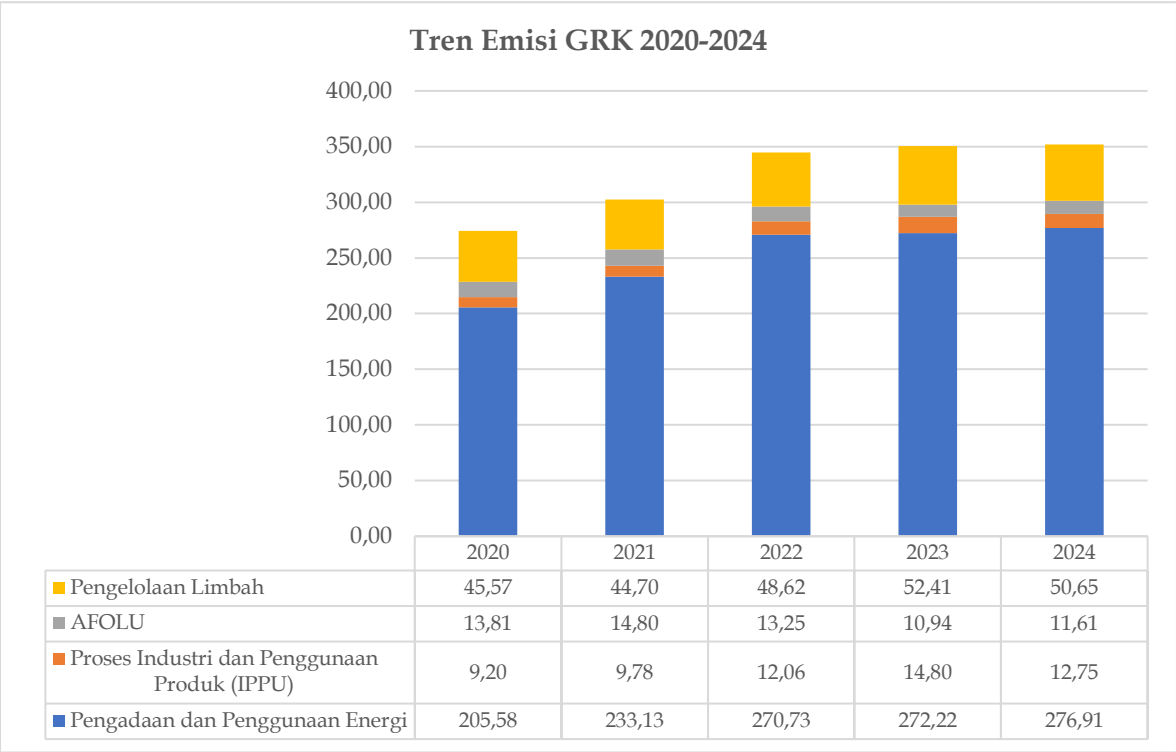
Tabel 2. 54. Total Emisi GRK Berdasarkan Sektor

Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
Pengadaan dan Penggunaan Energi	205,58	233,13	270,73	272,22	276,91
Proses Industri dan Penggunaan Produk (IPPU)	9,20	9,78	12,06	14,80	12,75
AFOLU	13,81	14,80	13,25	10,94	11,61
Pengelolaan Limbah	45,57	44,70	48,62	52,41	50,65
Total	274,17	302,41	344,66	350,37	351,92

Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

Tren emisi masing masing sektor digambarkan sebagai berikut :

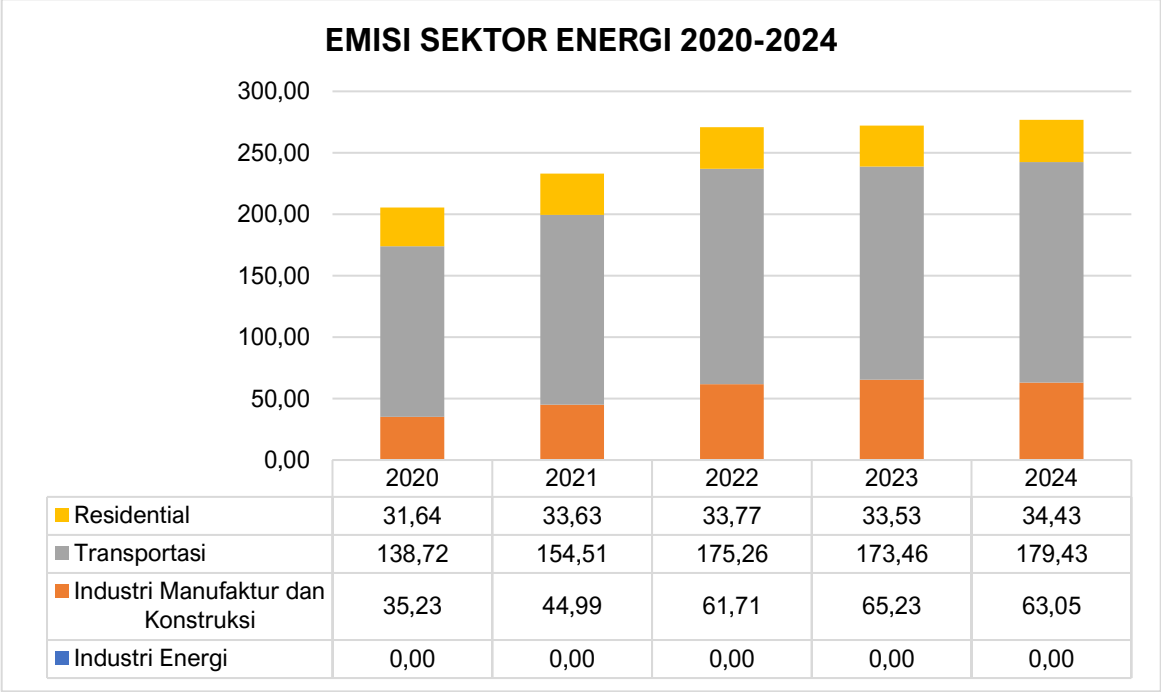
Grafik 2. 58. Tren Emisi dan Serapan GRK



Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihasilkan selama 2020-2024 untuk masing-masing sektor dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berbeda. Pada tahun 2024 sumber emisi yang berkontribusi terhadap emisi GRK paling tinggi yaitu: (1) sektor pengadaan dan penggunaan energi; (2) sektor pengelolaan limbah; (3) sektor IPPU; (4) sektor AFOLU dengan penjabaran sebagai berikut.

Grafik 2. 59. Tren Emisi GRK Sektor Pengadaan dan Penggunaan Energi 2020-2024



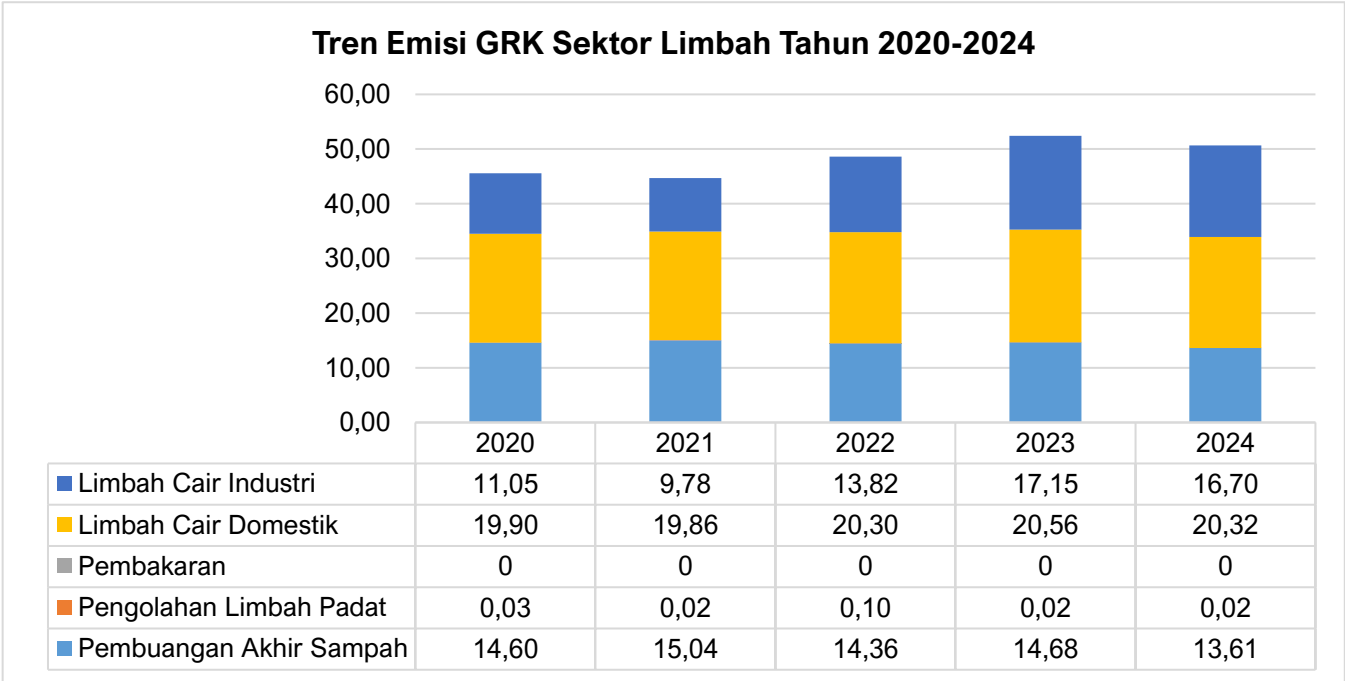
Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

Kegiatan yang paling berkontribusi terhadap emisi GRK di sektor pengadaan dan penggunaan energi yaitu kegiatan transportasi dengan menyumbang emisi 64,80% dari total emisi di sektor energi atau setara dengan 179,43 Gg CO₂eq di tahun 2024. Pada tahun 2020-2024 sub sektor transportasi mengalami peningkatan emisi sebesar 29,35% atau setara 40,72 Gg CO₂eq, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan konsumsi BBM jenis Pertalite (6.360 kilo liter), Pertamina (3.632 kilo liter), bio solar (7.578 kilo liter), dan dex (474 kilo liter).

Kontributor kedua di sektor pengadaan dan penggunaan energi yaitu kegiatan industri dengan menyumbang emisi 22,77% dari total emisi di sektor energi atau setara dengan 63,05 Gg CO₂eq di tahun 2024. Hal ini didukung dari komposisi PDRB yang menampilkan bahwa industri pengolahan di Kota Salatiga merupakan kontributor utama, dengan komposisi mencapai 33,14% di tahun 2024. Data industri riil yang terkumpul sebanyak 18 perusahaan yang menggunakan BBM dalam proses produksinya, namun jika ketersediaan data industri di Kota Salatiga terinventarisasi dengan lebih baik maka akan memunculkan hasil yang lebih akurat.

Sub sektor residential dalam inventarisasi gas rumah kaca kota Salatiga menduduki posisi ketiga kontributor emisi pada sektor energi, yaitu sebesar 34,43 Gg CO₂eq atau 12,43% dari total emisi sektor energi pada tahun 2024. Sub sekor residensial mengalami peningkatan emisi sebesar 2,79 Gg CO₂eq di tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2020. Peningkatan emisi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan jumlah konsumsi LPG penduduk Kota Salatiga pada periode tersebut.

Grafik 2. 60. Tren Emisi GRK Sektor Limbah 2020-2024

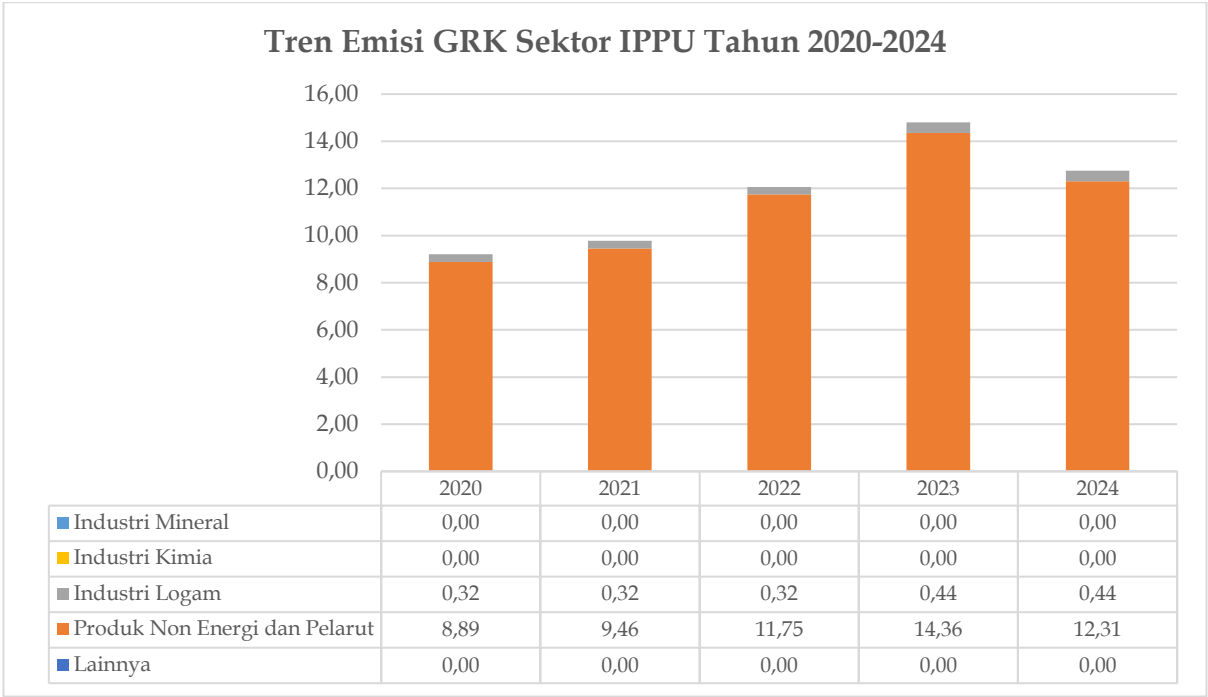


Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga 2025

Sektor limbah sangat ditentukan oleh jumlah penduduk dan sistem pengelolaan limbah padat maupun limbah cair. Laju pertumbuhan penduduk Kota Salatiga dari tahun 2020-2024 sebesar 3,46%. Sistem pengelolaan limbah padat yang diterapkan di Kota Salatiga yaitu Pengangkutan ke TPA, ditimbun dalam tanah, dibuang ke lahan kosong, dibuat kompos, dan didaur ulang. Selain itu untuk sistem pengelolaan limbah cair di Kota Salatiga berupa penggunaan septic tank, cubluk dan IPAL. Dalam kurun waktu 2020-2024 tren emisi untuk pengelolaan limbah di Kota Salatiga mengalami peningkatan sebesar 5,07 Gg CO₂eq (11,13%). Peningkatan emisi tersebut disebabkan oleh peningkatan emisi dari limbah cair domestik, dan limbah cair industri.

Berdasarkan kategori pengelolaan limbah tahun 2024 maka, proporsi pengelolaan limbah cair domestik sebesar 20,32 Gg CO₂eq (40,11%), limbah cair industri sebesar 16,70 Gg CO₂eq (32,97%), pembuangan akhir sampah padat 13,61 Gg CO₂eq (26,88%) sedangkan untuk pengolahan limbah padat dengan proses biologi berkontribusi kecil yaitu 0,02 (0,04%). Berikut ditampilkan proporsi sumber emisi sektor limbah.

Grafik 2. 61. Tren Emisi GRK Sektor IPPU (Proses dan penggunaan Produk Industri) 2020-2024

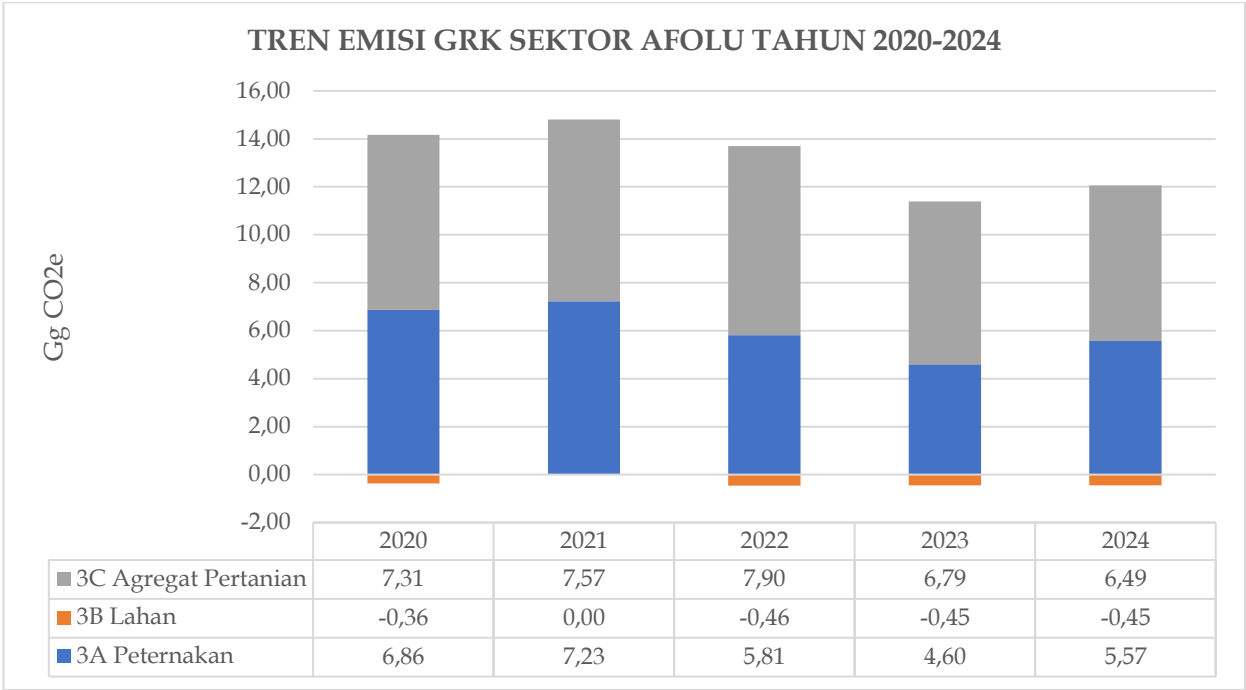


Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

Emisi dari sektor proses industri dan penggunaan produk hasil dari inventarisasi GRK Kota Salatiga dihasilkan dari aktivitas produk non energi dan pelarut dan industri logam PT Metica Prima Industrial Works. Sedangkan untuk kategori lainnya tidak ada kegiatan industri sesuai dengan kategori yang menghasilkan emisi GRK dalam prosesnya. Kegiatan di sektor ini mengalami perubahan yang fluktuatif namun cenderung mengalami tren naik. Emisi pada tahun 2020 sebesar 9,20 Gg CO₂eq meningkat di tahun 2024 menjadi 12,31 Gg CO₂eq, emisi tertinggi terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 14,80 Gg CO₂eq. Emisi dari penggunaan pelumas dihasilkan dari kegiatan transportasi dan kegiatan industri yang ada di Kota Salatiga. Berikut ditampilkan tabel emisi GRK untuk sektor proses industri dan penggunaan produk di Kota Salatiga.

Berdasarkan kategori proses industri dan penggunaan produk di Kota Salatiga data yang dapat digunakan adalah data dari sub sektor produk non energi dan pelarut dan industri logam, dimana pada tahun 2020 hingga 2024 emisi yang dihasilkan fluktuatif. Emisi GRK tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 14,80 Gg CO₂eq, emisi pada tahun 2020 yaitu sebesar 9,20 Gg CO₂eq dan meningkat di tahun 2024 menjadi 12,75 Gg CO₂eq. Peningkatan emisi pada sub sektor produk non energi dan pelarut dikarenakan meningkatnya jumlah penggunaan pelumas baik disektor transportasi maupun di sektor industri sebesar 233,75 Kilo Liter.

Grafik 2. 62. Tren Emisi GRK Sektor AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) 2020-2025



Sumber: Laporan GRK Kota Salatiga, 2025

Emisi dari sektor pertanian, kehutanan dan penggunaan lahan atau biasa dikenal dengan AFOLU (Agriculture, Forestry and Land Use) Kota Salatiga periode 2020-2024 mengalami tren penurunan emisi sebesar 15,89% (2,19 Gg CO₂eq). Kegiatan peternakan mengalami penurunan sebesar 1,30 Gg CO₂eq atau 18,87%, dan pada perubahan lahan terjadi penyerapan emisi di tahun 2020, dan tahun 2022-2024. Sub sektor agregat pertanian juga mengalami penurunan emisi, yaitu sebesar 11,15% atau setara 0,82 Gg CO₂eq.

Berdasarkan sektor AFOLU maka kontribusi emisi tertinggi tahun 2024 dihasilkan dari kegiatan pertanian sebesar 0,39 Gg CO₂eq (61,9%), dan kegiatan peternakan 0,23 Gg CO₂eq (36,5%). Implementasi Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK dan RAD-GRK) yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor yang sangat penting guna mewujudkan target penurunan emisi GRK Indonesia pada tahun 2030. Efektivitas implementasi tersebut perlu didukung dengan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) guna meningkatkan kinerja berbagai aksi mitigasi emisi GRK secara berkelanjutan. Kegiatan PEP yang dimaksud yaitu kegiatan memantau, mengevaluasi dan melaporkan pencapaian aksi-aksi mitigasi dan penurunan emisi GRK-nya yang terdapat pada RAD GRK yang terdiri dari:

- Kegiatan Inti, yaitu aksi-aksi yang berdampak langsung terhadap penurunan dan penyerapan emisi GRK; dan
- Kegiatan Pendukung, yaitu aksi-aksi yang tidak berdampak langsung kepada penurunan emisi GRK tapi mendukung pelaksanaan kegiatan inti atau prasyarat untuk pelaksanaan kegiatan inti.

Berdasarkan kegiatan mitigasi pada berbagai sektor yang telah dilaksanakan di Kota Salatiga baik oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha ataupun masyarakat yang telah dilaporkan dalam aplikasi AKSARA, maka kontribusi penurunan emisi GRK di Kota Salatiga sebesar 19.134,02 Ton CO₂eq. Penurunan emisi tersebut diperoleh dari sektor energi sebesar 3.894,03 Ton

CO₂eq , sektor Lahan sebesar 394,83 Ton CO₂eq, sektor transportasi 1.097,12 Ton CO₂eq, sektor air limbah sebesar 239,88 Ton CO₂eq, sektor persampahan 8.490,61 Ton CO₂eq, sektor pertanian 5.017,54 Ton CO₂eq.

Dengan target penurunan Emisi GRK Kumulatif dalam RPJMD pada tahun 2025 adalah 71.295 TonCo2EQ, sedangkan realisasi 2025 sebesar 19.134,02 TonCo2EQ, didapatkan realisasi capaian kinerja RPJMD sampai dengan tahun 2025 adalah sebesar 26,83%, artinya target penurunan emisi GRK di Salatiga ini tidak tercapai dengan kategori status sangat rendah.

Berdasarkan data profil emisi Kota Salatiga, rendahnya laju penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis yang saling berkaitan antara sektor energi, limbah, dan karakteristik wilayah perkotaan.

Penurunan emisi GRK di Kota Salatiga sangat rendah hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain :

1. Dominasi Emisi dari Sektor Energi dan Transportasi

Salatiga merupakan kota transit dengan mobilitas kendaraan yang sangat tinggi. Sektor energi (terutama transportasi) menyumbang porsi emisi terbesar, peningkatan jumlah kendaraan , serta pertumbuhan kepemilikan kendaraan pribadi berbahan bakar fosil terus meningkat setiap tahunnya. Disisi lain karakteristik Kota Salatiga Sebagai kota yang menghubungkan Semarang dan Solo, volume kendaraan yang melintas (beban emisi dari luar) menambah beban polusi yang sulit dikendalikan secara lokal.

2. Tantangan Pengelolaan Limbah

Sektor limbah menjadi penyumbang emisi terbesar kedua. Hal ini dipicu oleh Limbah Domestik & Industri, seiring pertumbuhan penduduk, volume limbah cair dan padat dari rumah tangga serta industri pengolahan terus naik, disisi lain Metode Pembuangan Sampah masih sangat bergantung pada pembuangan sampah padat ke TPA yang menghasilkan gas metana (CH₄) dalam jumlah signifikan jika tidak dikelola dengan sistem sanitary landfill yang optimal.

3. Keterbatasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Penyerap

Kemampuan alam dalam menyerap emisi di Salatiga tidak sebanding dengan produksinya. Atau dengan kata lain daya serap rendah, sebagai contoh, di salah satu kecamatan (Argomulyo), RTH dan tutupan lahan dilaporkan hanya mampu menyerap sekitar 15,9% dari total emisi domestik yang dihasilkan, disisi lain adanya alih fungsi lahan, pembangunan fisik dan pemukiman akibat peningkatan jumlah penduduk mengurangi area yang seharusnya berfungsi sebagai penyerap karbon.

Ketersediaan RTH di Kota Salatiga pada tahun 2025 meningkat sebesar 0,4% menjadi 17,41% atau seluas 957,08 hektar, dibandingkan dari ketersediaan RTH 2024 yang hanya 17,01% atau seluas 935,29 hektar.

Tabel 2. 55. Ketersediaan RTH di Kota Salatiga 2021-2025

Tahun	Luas RTH (Ha)	Luas Wilayah (Ha)	Persentase terhadap luas Wilayah (%)
2021	824,77	5.498,47	15
2022	896,81	5.498,47	16,31
2023	928,60	5.498,57	16,89
2024	935,29	5.498,57	17,01
2025	957,08	5.498,57	17,41

Sumber Dinas Lingkungan Hidup 2025

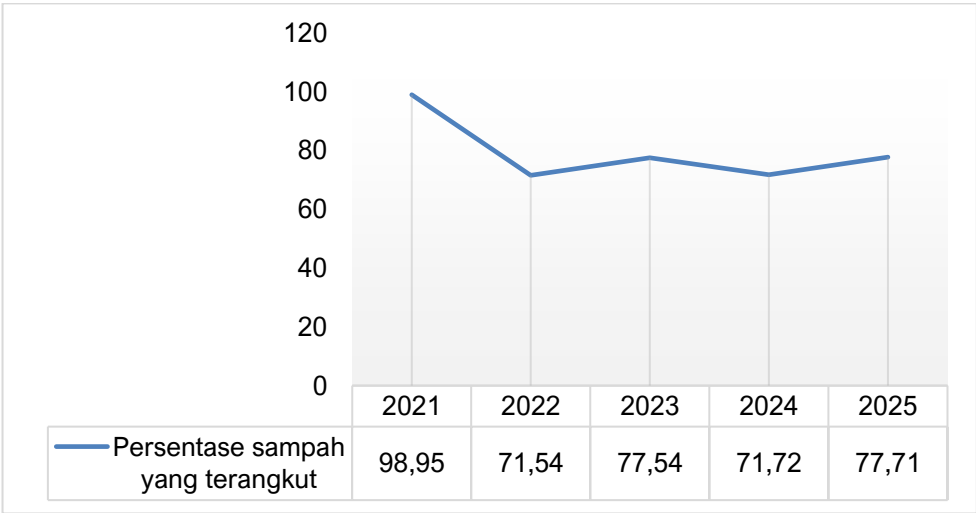
Dalam pengelolaan persampahan di Kota Salatiga volume sampah yang terangkut pada tahun 2025 mencapai 324,07 m³ per hari atau 77,71% dari total volume sampah per hari 451,84 m³. Prosentase sampah yang terangkut tren naik capaiannya dikarenakan sampah sudah terpilah dan terolah di TPS3R maupun dikelola oleh Bank Sampah yang ada di Kota Salatiga yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas serta menjamin semakin sedikitnya kebutuhan lahan untuk penyediaan TPA sampah di perkotaan.

Tabel 2. 56. Persentase Sampah yang Terangkut Tahun 2021 sd 2025

Tahun	VOLUME (M³/HARI)	TERANGKUT (M³/HARI)	Persentase sampah yang terangkut (%)
2021	387.05	383	98,95
2022	448.9	321.16	71,54
2023	424.96	329.51	77,54
2024	450.99	323.46	71,72
2025	451.84	324.07	77,71

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Grafik 2. 63. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Tabel 2. 57. Persentase Sampah yang Terangkut di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	jumlah	%	Jumlah	%
1.	Timbunan Sampah	40.969		41.668		40.969		41.668		42.202,39	
2.	Pengurangan Sampah	7.274	17,76	7.877	18,9	7.274	17,76	7.877	18,9	9.782.51	23,18
3.	Penanganan Sampah	29.510	72,03	32.307	77,53	29.510	72,03	32.307	77,53	31.761,51	75,26
4.	Pengelolaan Sampah	36.784	89,78	40.184	96,44	36.784	89,78	40.184	96,44	41.544,03	98,44
5.	Sampah tidak terkelola	4.185	10,22	1.484	3,56	4.185	10,22	1.484	3,56	658.35	1,56

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

Pada tahun 2025 timbunan sampah naik sebesar 0,493% persen menjadi 42.202,39 ton/tahun dibandingkan tahun 2024 yaitu 41.995,45 ton/tahun. Prosentase sampah terkelola tahun 2025 sebesar 98,44%, sedangkan yang belum terkelola sebanyak 1,56%.

Tabel 2. 58. Capaian SDGs Urusan Lingkungan Hidup

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air	Indeks Kualitas Air	Nilai	42,5	47,87	44,29	48,67	73,76
2	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persentase Penanganan Sampah	Persen	72	77,53	77,54	76,51	75,26
3	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	27,7	17,00	17,00	17,01	17,41

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
4	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau dikawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	27,7	17,00	17,00	17,01	17,41
5	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU	Perusahaan	Data Belum Tersedia	3,00	3	3	4
6	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Ton/Tahun	5.593,014 ton per tahun	5.593,725 ton per tahun	5.593,014 ton per tahun	5.602,884 ton per tahun	5.635,418 ton per tahun
7		Persentase penataan /penaatan limbah B3				75	100	100
8	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).	Dokumen	ada	ada	ada	ada	ada
9	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Indeks Kualitas Lahan	Angka Komposit	47,21	47,28	33,62	34,67	46,58

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup, Tahun 2025

f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Data dan Narasi Belum update

Persentase target cakupan akta kelahiran (0-18 th) pada tahun 2024 yaitu 98.80% meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu sebesar 99.70%. Hal ini dikarenakan :

- 1) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta adanya kegiatan sosialisasi melalui media cetak (harian Suara Merdeka dan harian Jawa Pos 1 (satu) kali dalam setahun dan sosialisasi melalui media eletronik melalui siaran Radio Suara Salatiga yang disiarkan 5 (lima) kali sehari dalam 1 (satu) tahun;
- 2) pelayanan Paket Kelahiran 3 in 1 yaitu untuk pengajuan akta kelahiran anak usia sampai dengan 60 hari akan diterbitkan Kartu Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Target kinerja persentase penduduk ber KTP eletronik tahun 2024 sebesar 95,90% dan terealisasi sebesar 97,95% sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,14% meningkat dibandingkan tahun 2023 yaitu 99,22%. Faktor yang melatarbelakangi peningkatan ini diantaranya:

- 1) meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepemilikan Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipl;
- 2) semua lembaga layanan publik mewajibkan adanya Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Pendudukan (KTP) untuk pengurusan administrasi;
- 3) sosialisasi melalui media cetak (harian Suara Merdeka dan harian Jawa Pos 1 (satu) kali dalam setahun dan sosialisasi melalui media eletronik melalui siaran Radio Suara Salatiga yang disiarkan 5 (lima) kali sehari dalam 1 (satu) tahun;

Pada Tahun 2024 Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang memiliki Kartu Indentitas Anak (KIA) dengan target 79,50 % dan terealisasi sebesar 85,86% dan capaian realisasinya sebesar 108,00%. Faktor-faktor keberhasilannya :

- 1) kesadaran masyarakat akan pentingnya terhadap kepemilikan dokumen kependudukan;
- 2) perjanjian kerja sama pelayanan terintegrasi dengan beberapa Rumah Sakit dengan memberikan Paket Pelayanan 3 in 1 yaitu bagi penduduk Kota Salatiga yang melahirkan di rumah sakit langsung mendapatkan Dokumen Kependudukan (Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Identitas Anak);
- 3) pelayanan paket kelahiran 2 in 1 untuk pengajuan akta kelahiran anak usia 60 hari sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun akan diterbitkan Akta Kelahiran dan KIA.

Tabel 2. 59. Indikator Kinerja Daerah Administrasi Kependudukan Sipil

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cakupan akta kelahiran	%	98,51	98,67	99,07	99,08	99,44
2	Persentase penduduk ber KTP elektronik	%	97,56	95,53	96,26	99,22	97,95
3	Persentase anak 0-17 th kurang 1 hari yang	%	n/a	n/a	n/a	83.84	85,86

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
	memiliki Kartu Indentitas Anak (KIA)						

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Banyaknya pelayanan permohonan Akta-Akta di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

Tabel 2. 60. Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Banyaknya Pelayanan Permohonan Akta-Akta pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga				
Tahun	Kelahiran	Kematian	Perkawinan	Perceraian
2020	3.286	1.531	257	63
2021	3.650	2.503	290	46
2022	3.207	1790	246	40
2023	2.919	1617	216	35
2024	2513	1574	218	41

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

Tabel 2. 61. Capaian SDGs Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah	Persentase kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah					98,03	
2		Persentase anak yang memiliki akte kelahiran						99,08
3	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran	Persentase Penduduk Berumur 0-17 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran	Persen	93,61	94		98,44	
4		Persentase anak yang memiliki akte kelahiran						99,08
5	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada/tidak	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tahun 2024

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Keterangan : Data dan Narasi belum update

Pada tahun 2024 target laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,32 % dan terealisasi sebesar 1,18% sehingga capaian kinerja sebesar 110.61%, sedangkan pada tahun 2023 dengan target kinerja sebesar 1,34% terealisasi sebesar 1,25% sehingga tingkat capaian kinerja sebesar 106,72%.

Indikator kinerja laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator kinerja negatif, yang artinya semakin rendah realisasi akan semakin baik capaian kinerjanya.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi keberhasilan ini diantaranya :

- 1) tersedianya sarana dan prasarana untuk pelayanan pemasangan kontrasepsi baik bagi pemberi pelayanan KB maupun akseptor KB;
- 2) meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi bagi kelompok kegiatan dan penyuluh keluarga berencana dengan penyediaan Genre Kit, BKB Kit,BKL.Kit dan KIE Kit;
- 3) sosialisasi melalui media cetak (harian Suara Merdeka dan harian Jawa Pos 1 (satu) kali dalam setahun dan sosialisasi melalui media eletronik melalui siaran Radio Suara Salatiga yang disiarkan 5 (lima) kali sehari dalam 1 (satu) tahun;
- 4) pemberian penghargaan bagi akseptor Modus Operasi Pria (MOP) dan Mi=odus Operasi Wanita (MOW);
- 5) melakukan monitoring program KKBK oleh PLKB di tingkat Kelurahan;
- 6) meningkatkan kualitas dan kuantitas IMP (Institusi Masyarakat Pedesaan).

Grafik 2. 64. Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Salatiga Tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Total Ferility Rate (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya. Target TFR Kota Salatiga tahun 2024 sebesar 2,3% dan realisasi sebesar 1.71% dengan capaian realisasi sebesar 125,65%. Angka tersebut dihitung dengan rumus 5 x

ASFR per 1000 kelahiran. Age Specific Fertility Rates (ASFR) adalah angka kelahiran menurut umur. ASFR Kota Salatiga menurut jumlah kelompok wanita usia subur (usia 15-19 tahun) pada tahun 2024 sebesar 6,33/1000. Maka perhitungan TFR = 5 x 0,342 = 1,71%. Dengan capaian 1,71 bisa dikatakan bahwa untuk PUS rata-rata memiliki 1-2 anak.

Tabel 2. 62. Indikator Kinerja Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	TFR (Total Fertility Rate)	%	1,55	1,90	1,84	1,81	1,71

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

Cakupan akseptor KB aktif yaitu perbandingan jumlah akseptor KB aktif (PA) dengan jumlah pasangan usia subur (PUS). Pada tahun 2024 jumlah akseptor KB Aktif sebanyak 17.988 dan jumlah PUS sebanyak 26.571 sehingga cakupan akseptor KB aktif 67,7%. Cakupan ini naik dibanding tahun 2023 yaitu 67,46%, hal ini dikarenakan beberapa pendukung yaitu :

- 1) Meningkatnya besaran Reward bagi peserta KB Pria yaitu sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) dan pengganti tidak bekerja;
- 2) Meningkatnya KIE;
- 3) Meningkatnya peran kader dan penyuluh KB di daerah.

Tabel 2. 63. Capaian SDGs Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) umur 15-49 tahun yang berstatus kawin	CPR/ Peserta KB Aktif	Persen	71,27	71,9	64,65	67,46	67,70
2	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Persen			26,06	26,28	
3	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	per 1000 penduduk	10,5 /1000	0,92	9,02	8,26	
4	Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (TFR)	Persen	1,55	1,9	1,84	2,2	1,71

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
5	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KByang tidak terpenuhi)	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	Persen	15,34	14,2	20,54	14,9	

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tahun 2024

h. Perhubungan

Tabel 2. 64. Indikator Kinerja Daerah Perhubungan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rasio Ijin Trayek	%	n/a	n/a	23.31	23,52	22,26
2	Rasio Panjang Jalan per Jumlah kendaraan	%	n/a	n/a	21.41	19,49	18,97
3	Persentase Kepemilikan KIR angkutan	%	n/a	n/a	92.23	75,44	62,72

Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2025

Pada tahun 2025 target rasio ijin trayek sebesar 23,59%, terealisasi sebesar 22,26% dengan tingkat capaian sebesar 94,36% dibandingkan realisasi tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 1,26%

Target pada tahun 2025 untuk target rasio panjang jalan per jumlah kendaraan sebesar 22,79% dan terealisasi 18,97% sehingga capaian realisasi sebesar 83,24% dibandingkan tahun 2024 terjadi penurunan sebesar 0,52% dimana tahun 2024 realisasi 19,49%. Faktor- faktornya adalah panjang jalan cenderung tetap sedangkan jumlah kendaraan semakin bertambah seiring dengan meningkatnya pergerakan orang dan barang disamping itu meningkatnya jumlah penduduk memicu peningkatan pergerakan orang dan barang sehingga memicu pertumbuhan alat transportasi terutama angkutan orang.

Persentase Kepemilikan KIR angkutan target 2025 sebesar 83% dan realisasi 62,72% maka capaian realisasi sebesar 75,51% dibandingkan tahun 2024 terealisasi sebesar 75,44% sehingga terjadi penurunan sebesar 12,72%.

Hal -hal yang melatarbelakangi ini di antaranya persyaratan Pemerintah Kota Salatiga melalui Dinas Perhubungan yang memberikan subsidi BBM ke pengemudi angkota dan mewajibkan kendaraan tersebut memiliki persyaratan administrasi yang lengkap dan persyaratan teknis, antara lain melakukan uji KIR secara rutin.

i. Komunikasi dan Informatika

Dalam menyediakan layanan data dan statistik, Pemerintah Kota Salatiga memiliki system data yang terintegrasi dalam website yang memberikan informasi daerah kepada

masyarakat. Seiring dengan perubahan dan penyelarasan Indikator Kinerja Daerah sesuai Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029, indikator kinerja pada periode sebelumnya yaitu Indeks SPBE dan tingkat pengembangan layanan e-government dan smarcity tidak lagi disajikan karena telah mengalami perubahan substansi, definisi, dan metode pengukuran, sehingga tidak dapat diperbandingkan secara langsung dan untuk tingkat pengembangan layanan e-government dan smarcity tidak lagi dilakukan penilaian.

Tingkat ketersediaan informasi publik pada tahun 2025 dengan target nilai 90,5 meraih predikat Informatif dengan nilai 94,78 dan terealisasi 100% dengan capaian realisasi kinerja sebesar 104,73%. Capaian ini menurun 5,22% dibandingkan tahun 2024 yaitu 100%. Faktor-faktor di antaranya:

- 1) Dilaksanakannya kegiatan Workshop Forum PPID, monev PPID dan monev website kepada seluruh OPD, sebagai sarana untuk koordinasi, monitoring serta evaluasi dalam penyediaan, pengelolaan serta pelayanan informasi publik.
- 2) Dokumen DIP dari OPD dilakukan digitalisasi, disimpan dan dipublikasi kepada masyarakat melalui website resmi PPID yaitu ppid.salatiga.go.id dan medsos yang lengkap sesuai dengan peraturan yang ada serta terupdate.
- 3) Melaksanakan workshop Forum Admin PPID dengan peserta seluruh admin/tenaga teknis OPD dengan materi penyusunan DIP.

Pada Tahun 2025 target RPD indeks SPBE sebesar 2,6 terealisasi 4,11 dengan predikat sangat baik, nilai indeks ini meningkat 12,91% dibanding tahun 2024 yang hanya 3,64 dan capaian kinerjanya sebesar 158,2%.

Faktor yang mendukung keberhasilan ini diantaranya layanan pengembangan aplikasi , layanan in frastruktur dasar data center, disaster recover sudah berjalan dengan baik.

Tabel 2. 65. Indikator Kinerja Daerah Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat keterbukaan informasi publik	skor	87.00	100	100	100	94,78
2	Tingkat pengembangan layanan e-Government dan smart city	Skor	87.00	na	n/a	n/a	n/a
3	Indeks SPBE	Skor	n/a	n/a	3,26	3,64	4,11

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, Tahun 2025

Rumah tangga dengan akses internet merupakan indikator untuk mengukur semakin baik kondisi akses internet di masyarakat menjadi salah satu kebijakan pada RKPD tahun 2027 yang selanjutnya ditetapkan dalam target kinerja untuk mendukung Indikator utama pembangunan RPJPD tahun 2025-2045 sesuai dengan Indikator utama pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah yang diturunkan ke Kabupaten/Kota.

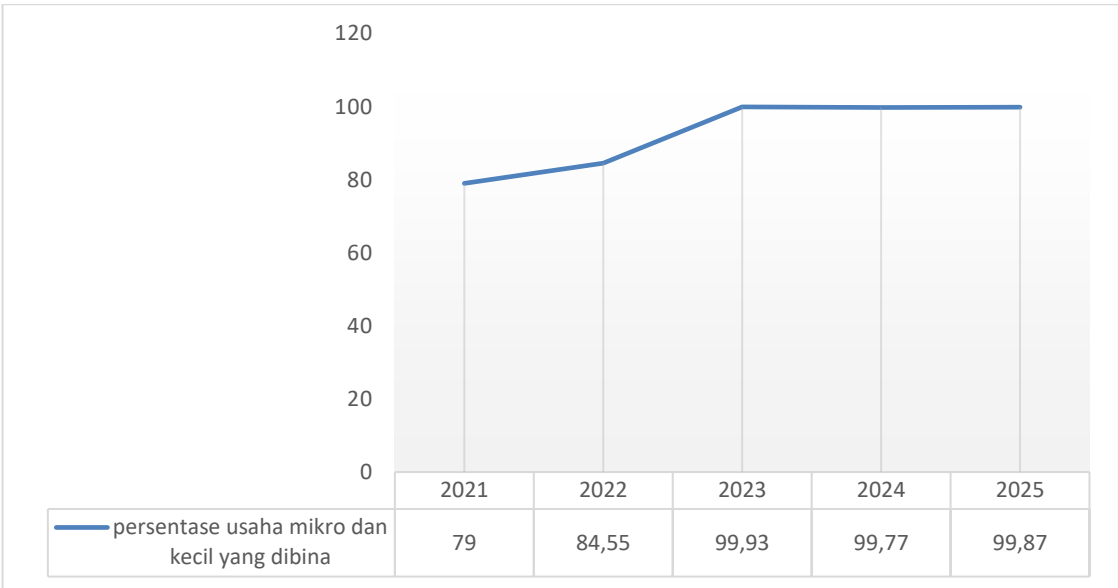
j. **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Pengembangan sektor usaha mikro dan kecil mendorong peningkatan perekonomian daerah. Pengembangan sektor ini akan berdampak pada peningkatan jumlah tenaga kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan keberdayaan usaha mikro dan kecil, pemerintah melakukan pembinaan baik dengan memberikan bantuan modal ataupun dengan memberikan pelatihan yang menunjang pengembangan usaha mikro dan kecil.

Pada tahun 2025 target usaha mikro dan kecil yang dibina sebesar 99,78% dan realisasi sebesar 99,87%. Realisasi tahun 2025 dibandingkan realisasi 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,10%. Hitungan ini berasal dari perbandingan antara jumlah usaha mikro sebanyak banyaknya UMKM yang dibina sebanyak 26.566 unit usaha dibagi dengan jumlah usaha mikro kecil dan menengah sebanyak 26,601 unit usaha

Prosentase usaha mikro dan kecil ini meningkat di dukung oleh keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang cepat, responsif dan akuntabel melalui media sosial dan media online serta animo pelaku UKM untuk mengikuti pelatihan yang tinggi. Pembinaan dilakukan melalui pelatihan, fasilitasi sertifikasi halal dan badan hukum kelompok UMKM, fasilitasi aplikasi pintar umkm, broadcast dan konsultasi baik melalui tatap muka maupun melalui media online.

Grafik 2. 65. *Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang Dibina di Kota Salatiga Tahun 2021-2025*



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Mengah, Tahun 2024

Persentase koperasi aktif target sebesar 71,67% dan realisasi sebesar 63,57% dan capaian 88,71%. Realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, terjadi kenaikan angka sebesar 10,5. Pada 2025 target koperasi aktif 71,67% dari total 151 koperasi, atau ada 108 koperasi di Salatiga yang ditargetkan aktif. Realisasinya terdapat 96 koperasi aktif dari 151 keseluruhan koperasi yang ada (63,57%). Ini berarti (8,1%) di bawah target.

Capaian yang belum maksimal juga di sebabkan banyak koperasi yang mengalami permasalahan likuiditas, adanya permasalahan internal pengurus koperasi sendiri, permasalahan kredit macet, koperasi bermasalah hukum, sehingga beberapa koperasi tidak melaksanakan RAT dan ada yang menutup usahanya. Semakin banyak indikator yang harus

dipenuhi untuk memperoleh status koperasi aktif, juga menjadi sebab jumlah koperasi aktif menurun.

k. Penanaman Modal

Target persentase kenaikan nilai investasi berskala nasional (PMA) tahun 2025 adalah 10,5% dan terealisasi sebesar 5,59%. Capaian indikator kinerja dibandingkan antar target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja untuk persentase kenaikan nilai investasi berskala nasional (PMA) tidak tercapai dan mengalami penurunan kinerja sebesar 4,91%. Capaian kinerja tersebut tidak bisa dicapai karena sebagian besar pelaku usaha modal asing tidak dapat melakukan penambahan investasi yang terkendala dengan aturan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Selain itu kepindahan kepemilikan perusahaan dari PMDN ke PMA atau sebaliknya dapat menyebabkan ketidakberhasilan atas capaian kinerja.

Target persentase kenaikan jumlah berskala nasional (PMA/PMDN) tahun 2025 adalah sebesar 4,00% dan terealisasi sebesar 10,53%. Capaian kinerja tersebut dapat tercapai karena kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya meningkat. Capaian indikator kinerja ini bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja persentase kenaikan jumlah berskala nasional (PMA/PMDN) tercapai dan mengalami peningkatan kinerja sebesar 6,53%.

Capaian kinerja tahun 2025 sebesar 10,53% dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 41,02% mengalami penurunan sebesar 30,49%. Namun capaian kinerja tahun 2025 sebesar 10,53 % melebihi target 4%.

Penyebab ketidak berhasilan kenaikan nilai investasi PMA di antaranya adalah

- a. Perluasan kegiatan usaha terkendala zonasi lahan
- b. Penambahan realisasi investasi yang tidak signifikan

Pada tahun 2023 target investasi PMDN sebesar 10% dan realisasi 76,62%. Capaian indikator kinerja bila dibandingkan antara target dan realisasi kinerja menunjukkan bahwa capaian indikator kinerja tersebut belum sudah tercapai. Namun dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 9,29% mengalami kenaikan sebesar 67,33%. Capaian kinerja nilai investasi PMDN tahun 2022 sebesar Rp101,195 miliar, sedangkan capaian nilai investasi tahun 2023 sebesar Rp178,729 miliar mengalami kenaikan sebesar Rp77,53 miliar.

Penyebab belum tercapainya capaian ini dikarenakan:

- ✓ Realisasi Investasi yang diakui sebagai realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) merupakan realisasi dari pelaku usaha yang usahanya menengah keatas. Sehingga untuk usaha menengah kebawah belum diakui sebagai realisasi investasi PMDN, padahal sebenarnya dapat menambah nilai realisasi investasi PMDN.
- ✓ Ancaman resesi yang melanda Indonesia juga menjadi pengaruh turunnya nilai investasi PMDN di Kota Salatiga -Selain itu juga kesadaran pelaku usaha dalam melaporkan laporan kegiatan penanaman modalnya masih rendah.

Tabel 2. 66. Indikator Kinerja Daerah Penanaman Modal di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Kenaikan nilai investasi PMA	Milyar Rupiah	887,89	(931,90)	415,192	(72.306)	19,183
2	Persentase kenaikan nilai investasi PMA	%	n/a	n/a	43,61	-17,42	5,59
3	Kenaikan nilai investasi PMDN	Milyar Rupiah	92.592	8,603	n/a	113.237	469,091
4	Persentase kenaikan nilai investasi PMDN	%	n/a	n/a	76.62	63,36	160,67
5	Persentase Kenaikan Jumlah investor berskala nasional (PMA)/PMDN)	%	n/a	n/a	166.22	3.13	23,84

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tahun 2025

I. **Kepemudaan dan olah raga**

Berdasarkan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) bidang Kepemudaan dan Olahraga Kota Salatiga Tahun 2021–2025, kinerja pembangunan menunjukkan hasil yang beragam pada masing-masing indikator. Pada indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri, capaian yang mulai terukur sejak tahun 2023 sebesar 2,5 persen mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 1,96 persen dan kembali menurun pada tahun 2025 menjadi 1,03 persen. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya keterlibatan pemuda dalam aktivitas ekonomi produktif serta perlunya penguatan kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi pemuda.

Selanjutnya, indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Kemasyarakatan menunjukkan capaian sebesar 43,61 persen pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 43,95 persen pada tahun 2024, namun mengalami penurunan cukup signifikan pada tahun 2025 menjadi 36,03 persen. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi dan keberlanjutan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Sementara itu, indikator Cakupan Pembinaan Olahraga menunjukkan kinerja yang sangat baik dan stabil. Sejak tahun 2023 hingga 2025, capaian indikator ini tercatat 100 persen, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan olahraga telah menjangkau seluruh sasaran secara optimal dan berkelanjutan.

Berdasarkan capaian tersebut, penyusunan Ranwal RKPD Tahun 2027 perlu diarahkan pada penguatan peran dan kapasitas pemuda, khususnya melalui peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri dan organisasi kepemudaan, dengan dukungan program yang lebih inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap kebutuhan pemuda. Di sisi lain, capaian positif pada bidang pembinaan olahraga perlu dipertahankan serta ditingkatkan kualitas

dan keberlanjutannya guna mendukung peningkatan prestasi olahraga dan penguatan budaya hidup sehat masyarakat.

Tabel 2. 67. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kepemudaan dan Olahraga di Kota Salatiga Tahun 2020-2025

Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Tingkat Partisipasi Pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	n/a	n/a	2.5	1,96	1,03
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	n/a	n/a	43,61	43,95	36,03
Cakupan pembinaan olah raga	%	n/a	n/a	100	100	100

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, Tahun 2025

m. Statistik dan Persandian

Perubahan Indikator Kinerja Daerah pada urusan Statistik dan Persandian dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap arah kebijakan dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025–2029. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan indikator yang digunakan lebih relevan, terukur, dan selaras dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan statistik sektoral serta penguatan keamanan informasi daerah. Melalui perubahan indikator tersebut, diharapkan pengukuran kinerja tidak hanya berfokus pada output kegiatan, tetapi juga pada kualitas tata kelola data, pemanfaatan statistik dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan tingkat kematangan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi. Dengan demikian, Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan mampu mencerminkan capaian kinerja secara lebih akurat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai Renstra Dinas Kominfo 2025–2029.

Tabel 2. 68. Indikator Kinerja Daerah Statistik dan Persandian di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	84.29	100	94	100	100
2	Tingkat pengamanan informasi daerah	%	92.30	70.85	80	100	70,85
3.	Indeks Kematangan pembangunan Statistik	Angka	-	-	-	-	2,61

Sumber Dinas Kominfo, 2025

Persentase ketersediaan data statistik sektoral target RPD pada tahun 2025 adalah 95%, terealisasi 100%, sama dengan pencapaian di tahun 2024 yaitu sebesar 100%, sedangkan

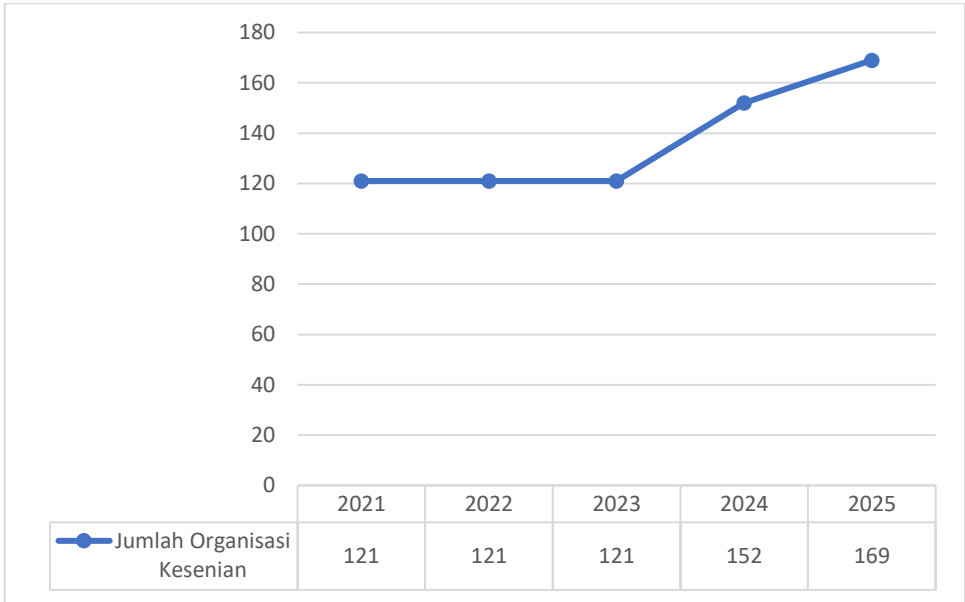
Persentase pengamanan informasi daerah target RPD 85%, terealisasi 70,85%, turun 29,15% dibanding tahun 2024 yang mencapai 100%.

Baseline Indeks Kematangan Pembangunan Statistik di tahun 2025 adalah 2,61. Indeks ini diharapkan menunjukkan peningkatan dari 2,61 pada 2025 menjadi proyeksi 2,63 di tahun 2026 sesuai target renstra. Angka ini menunjukkan kestabilan dalam pengelolaan dan pengembangan data statistik yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Keberlanjutan pada aspek ini sangat krusial untuk mendukung transparansi dan peningkatan kualitas layanan publik berbasis data. Peningkatan ini mengindikasikan upaya perangkat daerah dalam membangun statistik di perangkat daerah.

n. Kebudayaan Data dan Narasi Belum update

Kota Salatiga yang disebut sebagai Indonesia mini terdiri dari beragam etnis sehingga menumbuhkan keragaman seni dan budaya yang ada. Jenis organisasi yang ada di antaranya Drumblek, Rebana, Tari, Kuda Lumping/Jaranan, Keroncong, Dangdut, Reog, Band dan lain-lain. Jumlah Organisasi Kesenian di Kota Salatiga cenderung meningkat pada tiga tahun terakhir dengan jumlah 169 organisasi kesenian. Berikut gambaran perkembangan organisasi kesenian di Kota Salatiga dalam kurun waktu 2021-2024.

Grafik 2. 66. Perkembangan Banyaknya Organisasi Kesenian di Kota Salatiga Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

Pada Tahun 2025 persentase obyek pemajuan yang dilindungi , dikembangkan dan dimanfaatkan dengan target capaian sebesar 44.12% kemudian disesuaikan target nya menjadi 57,97% dan terealisasi sebesar 76,81%, sehingga capaiannya sebesar 132,5%. Persentase cagar budaya yang dilestarikan terealisasi sebanyak 46,38% dari target awal 38% yang disesuaikan menjadi 38,57%, sehingga capaian nya sebesar 120,25%.

Tabel 2. 69. Indikator Kinerja Daerah Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1)	Persentase obyek pemajuan yang ilindungi,dikembangkan dan dimanfaatkan	%	n/a	n/a	41,18	57,97	76,81
2)	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	14,18	22,86	28,57	38,57	46,38

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

Tabel 2. 70. Data Dukung Kebudayaan di Kota Salatiga Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	2021	2022	2023	2024	2025
1)	Jumlah Karya Budaya Tercatat	0	0	3	1	2
2)	Jumlah Cagar Budaya (CB)	141	140	140	140	138
3)	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan	n/a	n/a	68	69	69

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

Keterangan :

- Karya Budaya Tercatat : Warisan Budaya Tak Benda
- Cagar Budaya : Cagar Budaya yang Terdata
- Obyek Pemajuan Kebudayaan : Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan penyelamatan dan publikasi)

o. Perpustakaan dan Kearsipan Data dan Narasi belum update 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2024 target 6,45% terealisasi 21,07% dengan capaian 326,67% dan target RPD 2026 sebesar 7,45% sehingga status tercapai.

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja , alat bukti yang sah dengan target di tahun 2024 sebesar 76% terealisasi 88,67% dengan capaian kinerja 116,67% dan target RPD tahun 2026 sebesar 77% maka status tercapai.

Tabel 2. 71. Capaian Indikator Kinerja Daerah Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024 (%)	Kategori Status	Status
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	7,45	6,45	21,07	6.34	326,67	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah)	%	77	76	88,67	88,67	116,67	Sangat tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2024

Jumlah perpustakaan di Kota Salatiga pada tahun 2024 sebanyak 284 perpustakaan dengan jumlah kunjungan rata- rata harian sebanyak pengunjung 59914 orang mengalami peningkatan dari tahun 2023 dikarenakan sudah dibukanya kembali layanan perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu.

Berikut data perkembangan jumlah pengunjung, anggota dan jumlah koleksi Perpustakaan Umum Kota Salatiga dalam kurun waktu 2020-2024.

Tabel 2. 72. Jumlah Pengunjung, Anggota dan Koleksi Perpustakaan Umum di Kota Salatiga Tahun 2020-2024

Tahun	PENGUNJUNG	ANGGOTA	KOLEKSI BUKU	KOLEKSI NON BUKU / AV
2020	75.098	38.276	60.643	686
2021	35.870	38.764	61.016	686
2022	18.007	39.667	64.692	686
2023	23608	41036	66.226	686
2024	59914	41.909	66.642	686

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2024

Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan pada tahun 2024 sebanyak 66.642, meningkat sebesar 0,62% dari tahun 2023. Koleksi ini merupakan penambahan dari belanja koleksi yang terdiri dari koleksi buku dan non buku/audio visual.

Indikator kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Perpustakaan mengalami perubahan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026, dengan indikatornya sebagai berikut :

- 1) Indeks Literasi Masyarakat pada tahun 2023 tercapai sebesar 63,14 dari target 52,06, sehingga capaian kinerjanya sebesar 82,45%.
- 2) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat pada tahun 2023 tercapai sebesar 17,06 dari target 5,95, sehingga capaian kinerjanya sebesar 286,72%.
- 3) Nilai Tingkat kegemaran membaca pada tahun 2023 tercapai sebesar 64,50 dari target 81,83, sehingga capaiannya 78,82%

Indikator kinerja Penyelenggaraan pemerintahan daerah Urusan Kearsipan juga mengalami perubahan pada Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2023-2026, dengan indikatornya Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional, pada tahun 2023 tercapai sebesar 68,70 dari target 75,5, sehingga capaiannya 89.22%.

2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

a. Kelautan dan Perikanan

Tabel 2. 73. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kelautan dan Perikanan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Peningkatan produksi perikanan (ikan konsumsi)	%	6	6	6	9	150	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Peningkatan Produksi Perikanan (benih)	%	5	5	6	1	16,67	Tidak Tercapai	Tidak Tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Peningkatan Produksi perikanan budidaya (ikan konsumsi) yang ditargetkan 6% dan terealisasi 9% dengan realisasi capaian kinerja 150 % dan target RPD tahun 2026 sebesar 6 persen sehingga status tercapai.

Peningkatan produksi perikanan (benih) ditargetkan 5% dan realisasi 1% dengan capaian kinerja 16,67% dan target RPD tahun 2026 sebesar 5% sehingga status Tidak akan tercapai. Permasalahan tidak tercapainya indikator tersebut adalah karena Penurunan Produksi Benih Nila Dikarenakan Adanya Peremajaan Indukan (Afkir), sementara Induk Baru Belum Optimal Produksinya. Upaya mengatasi permasalahan dengan Memperbaiki Jadwal (Waktu) Perencanaan Dalam Peremajaan Indukan, sehingga saat akhir tahun, indukan sudah produktif

b. Pariwisata

Pariwisata di Kota Salatiga menunjukkan perkembangan yang cukup positif dengan meningkatnya aktivitas wisatawan nusantara, terutama pada wisata kuliner, rekreasi keluarga, dan kegiatan berbasis komunitas. Berbagai kegiatan promosi dan event lokal mampu menjaga keberlangsungan aktivitas pariwisata.

Tabel 2. 74. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pariwisata

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara	%	110.13	109,71	113	113,52	113,52	100,46	Sangat tinggi
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	79	70	100	123,45	123,45	123,45	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
3	Tingkat hunian akomodasi	%	28	25	51,42	52,2	52,2	101,52	Sangat Tinggi
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0.16	9,5	9,5	7,92	7.92	83,37	Tinggi
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0.16	0,14	0.16	0.18	0.18	114,15	Sangat Tinggi

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2025

Pada Tahun 2025 target persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara sebesar 109,71% yang kemudian disesuaikan menjadi 113% dan terealisasi sebesar 113,52% dan target RPD tahun 2026 sebesar 110.13% sehingga status tercapai. Penyebab berhasilnya capaian kinerja disebabkan karena :

- a. Adanya koordinasi antar stakeholder pelaku pariwisata, pokdarwis, PHRI, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sektoral terkait dalam pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif;
- b. Penggunaan berbagai motode dan media untuk mempromosikan pariwisata baik di dalam dan luar daerah.

Pada tahun 2025 persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara target 70% yang kemudian disesuaikan menjadi 100% dan realisasi 123,45% dan capaian kinerja 123,45% target RPD Tahun 2026 adalah 79% sehingga status tercapai. Hal- hal yang mendukung keberhasilan antara lain :

- a) Kegiatan promosi melalui pameran promosi dan berbagai media serta event/ gelar pentas seni yang dilaksanakan baik di dalam kota maupun di luar kota Salatiga
- b) Daya Tarik Kota Salatiga sebagai kota MICE dan kota tertoleran.
- c) Peningkatan kelengkapan sarana prasarana dan pelayanan akomodasi hotel/penginapan/home stay di Kota Salatiga
- d) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder pelaku pariwisata, Pokdarwis, PHRI, pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sector terkait dalam pengembangan pariwisata.

Pada tahun 2025 tingkat hunian akomodasi target sebesar 25% dengan penyesuaian target sebesar 51,42% dan realisasi sebesar 52,2% dan capaian kinerja sebesar 101,52%. Target RPD tahun 2026 sebesar 28% maka status tercapai maka status tercapai. Penyebab keberhasilan ini disebabkan:

- a) Kegiatan promosi melalui pameran promosi dan berbagai media dan event/pentas gelar seni yang dilaksanakan di dalam / luar kota Salatiga.

- b) Peningkatan kelengkapan sarpras dan pelayanan akomodasi horel/penginapan/home stay di Kota Salatiga
- c) Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antar stakeholder pelaku pariwisata, Pokdarwis , PHRI , pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat serta OPD lintas sektor terkait pengembangan pariwisata.

Pada Tahun 2025 target kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku adalah 9,5% dengan realisasi 7,92% dan capaian kinerja sebesar 83,37% dan target RPD tahun 2026 sebesar 10% sehingga status akan tercapai.

Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata yang dikelola Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga meliputi retribusi kolam renang Pemandian Kalitaman, sewa kafetaria, parkir Kalitaman, bilas air panas Kalitaman, retribusi penyewaan tanah insidentil, sewa Taman Wisata Sejarah Salatiga (TWSS) dan sewa Gedung Pemerintah Daerah (GPD).

Pada Tahun 2025 target kontribusi PAD Sektor pariwisata terhadap PAD Kota adalah 0,14% dengan penyesuaian target sebesar 0,16% terealisasi 0,18% dan capaian kinerjanya adalah 114,15%.

Tabel 2. 75. Capaian SDGs Urusan Pariwisata

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah wisatawan mancanegara	Jumlah wisatawan mancanegara	orang	467	1.318	1367	4.481	10.013
2	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara	orang	182.743	286.916	253.312	1.225.681	2.617.085

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Tahun 2024

c. Pertanian

Kinerja sektor pertanian di Kota Salatiga tahun 2025 menunjukkan peran dalam mendukung ketahanan pangan lokal dan pengendalian inflasi pangan serta sebagai sektor penyangga stabilitas ekonomi dan sosial.

Tabel 2. 76. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Produktivitas padi	%	6.15	6.15	6.30	6.30	102,55	Sangat Tinggi	Tercapai
2	Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura	%	10	10	-0,4	-0,4	-4	Rendah	Tidak tercapai

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
3	Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi	%	6,90	0,03	0,12	0,12	133,33	Sangat Tinggi	Tercapai
4	Produktivitas Sapi Perah	%	0,52	0.80	3,00	3,00	165,15	Sangat tinggi	tercapai
5	Penurunan kejadian kematian hewan akibat penyakit zoonosis	%	100	100	100	100	100	Sangat Tinggi	tercapai

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Produktivitas padi yang ditargetkan Tahun 2025 sebesar 6.15 % terealisasi 6.30% dengan capaian kinerja 102,55% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 6.15% dengan status tercapai. Penyebab keberhasilan peningkatan produktivitas padi adalah :

- ✓ Memberikan pelatihan dan pendampingan teknik budidaya yang tepat serta sesuai rekomendasi kepada petani seperti bimbingan teknik pembuatan Nitrobacter,
- ✓ Melakukan identifikasi potensi kerusakan saluran irigasi serta usulan pembangunan jalan usaha tani;
- ✓ Penyediaan stok pestisida dan agensi hayati yang diberikan ke petani serta melakukan gerakan pengendalian OPT secara masif.

Tabel 2. 77. Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Kota Salatiga 2021-2025

No	Produksi Ternak	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Daging (kg)	20.477.043	30.012.661	2.823.078.324	2.799.665.456	33.579.752
2.	Sapi	1.395.800	1.701.880	1.372.200	130.657.372	1.436.241
3.	Kambing	7.830	13.440	35.805	4.156.208	61.910,16
4.	Domba	9.195	9.510	8.580	1.967.336	12.793,19
5.	Babi	23.530	28.275	35.165	5.128.290	51.685,71
6.	Ayam Ras	19.026.758	28.244.356	2.818.266.154	2.660.230.365	31.984.739,48
7.	Ayam Buras	13.930	15.200	2.455.830	2.130.436	21.419,86
8.	Entog	-	-	904.590	10.849	10.963,00
9.	Telur (kg)	200.793	204.605	16.817.460	4.806.604	228.696

No	Produksi Ternak	2021	2022	2023	2024	2025
10.	Ayam Ras	136.443	128.086	16.817.460	4.806.604	25.356
11.	Ayam Buras	51.650	40.994	-	-	119.871,55
12.	Itik	8.600	24.371	-	-	54.035,38
13.	Puyuh	4.100	11.154	-	-	3.037,47
14.	Entog	-	-	-	-	26.395,69
15.	Susu (liter)	4.688.280	3.796.200	246.384.438	303.209.154	3.114.481,56
15.	Susu	4.688.280	3.796.200	246.384.438	303.209.154	3.114.481,56

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Tabel 2. 78. Populasi Ternak Ruminansia dan Non Ruminansia Kota Salatiga 2021-2025

No	Jenis Ternak	Tahun (Ekor)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Sapi Perah	3.998	2.520	720	720	3.063
2.	Sapi Potong	1.388	499	257	257	960
3.	Kambing	3.171	3.384	612	612	4.035
4.	Domba	818	897	182	182	650
5.	Kerbau	64	35	15(potong)	15(potong)	25
6.	Kuda	50	51	27	27	11
7.	Babi	-	294	1	1	284
8.	Ayam Petelur	20.000	20.600	7	7	2.950
9.	Ayam Buras	89.023	32.601	10	10	54.585
10.	Ayam Broiler	305.000	465.000	4.500	4.500	448.500
11.	Itik	3.604	3.341	153	153	6.350
12.	Puyuh	7.200	12.132	6	6	8.385
13.	Kelinci	929	1.261	54	54	190
14.	Entog	4.772	4.663	545	545	3.003
15.	Angsa	-	-	75	75	110
16.	Merpati	-	-	285	285	1.796
17.	Kambing Perah	-	-	14	7	289

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Secara umum, kondisi penggunaan lahan pertanian tahun 2021-2025, sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 2. 79. Luas Penggunaan Lahan Pertanian Kota Salatiga 2021-2025

No	Tahun	Lahan Sawah (ha)	Bukan Sawah (ha)	Total Lahan Pertanian (ha)	Kenaikan /Penurunan (ha)
1	2021	626,70	1.737,00	2.363,70	(24,97)
2	2022	626,70	1.742,00	2.368,70	5,00
3	2023	514,75	1.843,00	2.357,75	(10,95)
4	2024	514,75	1.843,00	2.357,75	(10,95)

No	Tahun	Lahan Sawah (ha)	Bukan Sawah (ha)	Total Lahan Pertanian (ha)	Kenaikan /Penurunan (ha)
5	2025	503,90	1.842,4,00	2.346,25	(11,5)

Sumber : Dinas Pangan dan Pertanian, Tahun 2025

Peningkatan produktivitas tanaman hortikultura dengan target 10% dan realisasi -19,10% dengan capaian kinerja 1,91% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 10% dengan status Belum tercapai. Kegagalan ini dikarenakan beberapa hal, yaitu :

1. Kurangnya keterampilan petani dalam melakukan budidaya vanili terutama pemeliharaan tanaman;
2. Anomali iklim, kemarau kering 2 tahun terakhir menyebabkan tanaman kering;
3. Adanya jamur penyebab penyakit busuk batang yang cepat menular;
4. Petani mengganti tanaman vanili menjadi komoditas lain;
5. Alih fungsi lahan.

Peningkatan produktivitas peternakan daging sapi yang ditargetkan 0.03% dan terealisasi 0,12% dan realisasi capaian 133,3% dan target terhadap RPD s.d tahun 2026 sebesar 0.04% dengan status tercapai. Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adanya Penyediaan sarana prasarana yang memadai, RPH telah bersertifikasi halal dan NKV.

Produktivitas sapi perah ditargetkan 0,80% dan realisasi 3% dan capaian kinerja 375 % dan target RPD Tahun 2026 sebesar 0.52% dengan status tercapai . Faktor penyebab keberhasilan diantaranya adanya Dilaksanakan pelatihan pembuatan pakan konsentrat, pelatihan hijauan makanan ternak, pelatihan manajemen budidaya pedet, vaksinasi PMK, Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui surveilens secara masif.

Penurunan kejadian kematian hewan akibat zoonosis ditargetkan 100 % dan terealisasi 100% sehingga capaian kinerjanya 100% dan target RPD Tahun 2026 sebesar 100% sehingga status tercapai.

d. Perdagangan

Tabel 2. 80. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perdagangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	4.89	4,81	4.89 (2024)	4.89 (2024)	101.66	101.66	Tercapai

Sumber : Dinas Perdagangan, Tahun 2025

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB target 4.81% dan realisasi tahun 2025 sebesar 4.89% (tahun 2025 belum dirilis BPS) dan capaian realisasi 101,66% dan target RPD tahun 2026 sebesar 4.89% dengan status tercapai.

Tabel 2. 81. Capaian SDGs Urusan Perdagangan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Laju pertumbuhan PDRB perkapita	Persen	3,33	4,70	5,34	5,37	
2	PDRB perkapita	PDRB perkapita	juta rupiah		78,99	54,89	89,93	
3	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun	Laju pertumbuhan PDRB	Persen	3,33	5,53	5,34	5,37	

Sumber : Dinas Perdagangan, Tahun 2025

e. Perindustrian

Tabel 2. 82. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Perindustrian

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD- 2023 2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Persentase Pertumbuhan IKM (Industri Kecil Menengah)	%	0.49	0.43	0.55	0.55	120.33	Sangat tinggi	tercapai
2	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	%	31.15	31.10	33.10	33.10	98.80	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2025

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan untuk persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah sebesar 0,43% dan terealisasi 0.55% dimana capaian kinerja sebesar 120.33 % dan target RPD tahun 2026 sebesar 0.46% tercapai. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB target yang ditetapkan di Tahun 2025 sebesar 31.10% terealisasi 33.10% dimana capaian kinerja sebesar 98.80% dan target RPD tahun 2026 sebesar 31.15%.

f. Transmigrasi

Tabel 2. 83. Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Transmigrasi

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2024	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2024(%)	Kategori Status	Status
1	Prosentase Peningkatan Peminat Transmigrasi	%	4.60	3.70	0,00	0,00	0,00	Sangat Rendah	Upaya keras

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Tahun 2024

Pada tahun 2024 target persentase peminat transmigrasi sebesar 0.00 % dengan realisasi kinerja sebesar 0.00 dimana capaian kinerja sebesar 0% dan target RPD tahun 2026 sebesar 4.60 % maka status upaya keras. Kendala dalam capaian kinerja ini karena :

- a) Ketidaksesuaian minat calon transmigran (Catran) dengan lokasi/ destinasi transmigrasi yang sediakan sehingga persentase peminat transmigrasi yang merupakan indikator keberhasilan kinerja urusan transmigrasi belum mencapai target yang telah ditetapkan.
- b) Penentuan lokasi transmigrasi dan jumlah kuota oleh Pemerintah Pusat setelah Kegiatan penyuluhan/sosialisasi transmigrasi sehingga pada saat sosialisasi belum diketahui lokasinya dan jumlah kuotanya.

Solusinya dalam pencapaian kinerja adalah mengoptimalkan kegiatan fasilitasi program transmigrasi.

2.4.4 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; Keuangan; Kepegawaian dan Pengawasan.

a. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

Tabel 2. 84. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Target RPD-2023-2026	Target Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	Realisasi Kinerja RPD s.d Tahun 2025	Realisasi Capaian Kinerja RPD s.d Tahun 2025 (%)	Kategori Status	Status
1	Indeks Inovasi	%	46.36	46.34	48,88	48,88	105,43	Sangat Tinggi	tercapai
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan	%	46.67	42,86	73,68	73,68	157,87	Sangat Tinggi	tercapai
2	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	%	90	85	97,67	96,67	107,41	Sangat Tinggi	Tercapai

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tahun 2025

Pada tahun 2025 indeks inovasi target 46.34 dengan realisasi 48,88 dan capaian kinerja 105,43 serta target RPD tahun 2026 sebesar 46.34 dengan status tercapai, dengan ditetapkannya Perwali no 10 Tahun 2023 tentang penyelenggaraan inovasi daerah menjadi salah satu landasan hukum dalam upaya meningkatkan indeks inovasi melalui tahapan – tahapan yang telah ditentukan sesuai peraturan.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan dengan target tahun 2025 sebesar 42,86% dan realisasi sebesar 73,68% dan capaian kinerja 157,87% serta target RPD Tahun 2026 sebesar 46.67% maka status tercapai.

Pemanfaatan kelitbangan menjadi salah satu pertimbangan awal dalam menentukan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, serta penyusunan dokumen kelitbangan juga mengacu pada kebijakan nasional sebagai salah satu landasan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Terekamnya data usulan masyarakat dalam sistem maka pemantauan usulan menjadi lebih valid dan terukur. Selain itu dengan semakin sadarnya masyarakat dalam mengusulkan kegiatan yang disesuaikan dengan prioritas pembangunan tahun yang berkenaan menjadikan tingginya usulan yang terakomodasi dalam dokumen perencanaan.

Penjabaran konsistensi program RPD ke dalam RKPD target pada Tahun 2025 sebesar 85% terealisasi 96,67% dan capaian kinerja 107,41% dan target RPD tahun 2026 sebesar 90% maka status tercapai.

Berdasarkan capaian indikator daerah tersebut dapat disimpulkan bahwa semua target yang dituangkan dalam Perwali Nomor 10 Tahun 2022 tentang RPD Kota Salatiga 2023-2026 dapat dicapai sebelum tahun 2026.

Tabel 2. 85. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
A.	Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan						
1	Presentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan	%	72,76	51,20	-	-	-
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	73,33	80,00	-	-	-
3	Persentase kesesuaian dokumen RPJMD dengan RKPD	%	100	100	-	-	-
4	Persentase kesesuaian Dokumen RKPD dengan APBD	%	100	100	-	-	-
5	Indeks Inovasi	n/a	n/a	n/a	44.55	51,10	48,88
6	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	n/a	n/a	n/a	20.00	58,33	73,68
7	Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD	n/a	n/a	n/a	98.84	98.84	96,67

Berdasarkan Indikator Kinerja Daerah tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2017-2022, sedangkan Indikator Kinerja Daerah Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2025 mempergunakan dasar Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2022 tentang RPD Kota Salatiga Tahun 2022-2026.

Capaian Indikator Kinerja Daerah dari Tahun 2023-2025 mengalami peningkatan cukup signifikan. Terkait dengan Indeks Inovasi dapat ditingkatkan karena telah ditetapkan Perwali no 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah, mana pada peraturan Wali Kota tersebut diamanatkan seluruh perangkat daerah dan masyarakat untuk mengembangkan inovasi baik dalam rangka peningkatan pelayanan publik bagi inovasi perangkat daerah dan pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat bagi inovasi yang dikembangkan oleh masyarakat. Regulasi tersebut juga mendorong capaian Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan karena dalam proses perencanaan saat ini harus berbasis pada riset dan kajian akademis baik dari sisi perencanaan maupun implementasinya.

Terkait dengan capaian Indikator Kinerja Daerah Penjabaran Konsistensi Program RPD ke dalam RKPD justru mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2025, dimana capaian pada tahun 2024 sebesar 98,84% sedangkan Tahun 2025 sebesar 96,67%. Hal ini disebabkan karena terdapat pemutakhiran nomenklatur program kegiatan yang diwajibkan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sementara itu pada saat penyusunan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 belum berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri tersebut sehingga terdapat ketidak sesuai dengan nomenklatur yang baru. Langkah yang dilakukan untuk menyesuaikan regulasi yang baru adalah dengan penyusunan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

b. Keuangan

Target Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah pada tahun 2025 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan capaian kinerja untuk tahun 2025 masih dalam proses penilaian dan diharapkan memperoleh Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) karena sebelumnya memperoleh keempat kalinya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sebelumnya di raih di tahun 2020, 2021, 2022 , 2023 dan 2024.

Tabel 2. 86. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Keuangan Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
B.	Keuangan						
1	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	Dalam Proses penilaian
2	Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan	%	n/a	n/a	2,57	1,42	1,23

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	nilai				73,517	58.8
4	Indeks Kondisi Keuangan Daerah					5.23	8
5	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah					30.24	31.47
6	Persentase BMD yang dimanfaatkan/digunakan secara optimal (Utilisasi aset					100%	100

Sumber BPKPD Kota Salatiga, Tahun 2025

Pada Tahun 2024 Persentase peningkatan PAD terhadap pendapatan target 5.00 dan realisasi 1.42% dengan capaian realisasi 28,4 dan target RPD sebesar 10.00 maka status belum tercapai.Karena pendapatan lain- lain yang syah mengalami penurunan.

Tabel 2. 87. Capaian SDGs Urusan Keuangan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Rupiah			639.492.055.476	502.920.730.466	
2	Prosentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber BPKPD Kota Salatiga, Tahun 2024

c. Kepegawaian

Indeks Profesionalitas ASN mengalami peningkatan pada tahun 2025 dengan nilai 82,14% dibandingkan tahun 2024 sebesar 78,84%.

Tabel 2. 88. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Kepegawaian Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
C.	Kepegawaian						
1)	Indeks Profesionalitas ASN	%	52,04	54,74	74,01	78,84	82,14
2)	Nilai Sistem Merit	%	n/a	n/a	274.5	274.5	274.50

Sumber BKPSDM Kota Salatiga, Tahun 2025

Indeks Profesionalitas ASN yang ditargetkan 79.00 terealisasi sebesar 82.14. Target capaian kinerja RPD Tahun 2026 adalah 61.00 dan capaian kinerja sebesar 134.66 dengan status tercapai. Faktor-faktor yang mempengaruhi adalah adanya peningkatan jumlah pelatihan pegawai dan perbaikan pelaporan setelah pelatihan.

Nilai sistem merit ditargetkan 275% dan realisasi 274.5% dan capain kinerja 99.82 dan target RPD tahun 2026 sebesar 326%.

Tabel 2. 89. Capaian SDGs Kepegawaian

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II)	Persentase perempuan pada jabatan eselon II,III, dan IV	%	44,87	44,24	44,24	43,06	42,17
2		Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon II)	%			23.2		21.43

Sumber BKPSDM Kota Salatiga, Tahun 2025

d. Pengawasan Data dan Narasi belum update 2025

Indikator QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi) target 2.96 terealisasi 2.802 sesuai dengan QA dari Kepala BPKP Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan

Daerah Nomor PE.09.03/LHP-672/PW11/3.1/2024 Tanggal 24 Desember 2024 sehingga capaian target adalah 94,66% dengan kategori berhasil tetapi kurang memenuhi target nilai yang ditetapkan.

Realisasi capaian QA IEPK Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan nilai 2,802 (level2) menunjukkan belum adanya peningkatan dari capaian nilai dari tahun 2023 dengan nilai 2,80 yang masih berada di level 2.

Tabel 2. 90. Capaian Indikator Kinerja Daerah Fungsi Pengawasan Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
A.	Pengawasan						
1	Meningkatnya level kapabilitas Inspektorat	level	3	3	3	3.04	-
2	Kapabilitas APIP	level	-	-	-	-	3.00
3	Tingkat Maturitas SPIP	level	3	3	3	3.00	-
4	QA SPIP	nilai	-	-	-	2.80	3.00
5	QA IEPK (Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi)	nilai	-	-	-	2.87	2.802
6	QA MRI (Manajemen Resiko Indeks)	nilai	-	-	-	-	2.80

Sumber Irda Kota Salatiga , Tahun 2024

Kapabilitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi sumber daya manusia yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan perannya secara efektif.

APIP yang meningkat kapasitas dan kompetensi diukur dengan nilai Kapasitas APIP yang direalisasi dengan Level 3 , menunjukkan bahwa praktik profesional dan audit internal telah ditetapkan secara seragam dan telah selaras dengan standar outcome APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu program / kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen resiko serta pengendalian intern.

Target capaian level kapabilitas APIP pada level 3 dan terealisasi sesuai target yaitu level 3 sesuai hasil QA BPKP berdasarkan Surat Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor PE.09.03/LHP-351/PW11/6/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 sehingga capaian target adalah 100% dengan kategori sangat berhasil memenuhi target yang ditetapkan.

Realisasi capaian Level Kapasitas APIP Inspektorat Daerah tahun 2024 pada level 3 adalah sama dengan capaian pada tahun 2023, 2022,2021,2020 dan tahun 2019 dengan hasil level 3 dimana capaian tahun 2018 dan 2017, Inspektorat masih berada di level 2. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil level Kapabilitas APIP yang semula di Level 2 menjadi level 3.

QA Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan target nilai 2,86 terealisasi dengan nilai 2,897 sesuai dengan QA dari Kepala BPKP Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor PE.09.03/LHP-672/PW11/3.1/2024 Tanggal 24 Desember 2024 sehingga

capaian target adalah 01,28% dengan kategori sangat berhasil sesuai target nilai yang ditetapkan.

Realisasi capaian QA MRI Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan nilai 2,897 (level 2) menunjukkan adanya peningkatan capaian pada tahun 2023 dengan nilai 2,87, namun belum ada peningkatan hasil QA MRI yang masih di level 2.

Quality Assurance (QA) SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah tingkat kematangan / kesempurnaan penyelenggaraan sisten pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

QA SPIP terintegrasi digunakan sebagai instrumen evaluatif, penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern pemerintah.

QA SPIP Terintregrasi Inspektorat Daerah Kota Salatiga dapat dicapai dengan nilai 3.00 (Level 3) pada tahun 2024 dengan kategori berhasil tetapi kurang memenuhi target nilai yang ditetapkan.

Realisasi capaian QA SPIP Inspektorat Daerah Tahun 2024 dengan nilai 3,00 (level 3) adalah sama dengan capaian [ada tahun 2023,2022,2021, 2020, 2019 dan 2018 untuk capaian tahun 2017 Inspektorat masih berada di Level 2. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil QA Maturitas SPIP yang semula di level 2 menjadi level 3.

2.4.5 Fokus Layanan Fungsi Penunjang Lainnya

Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri dari Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dan Kecamatan.

a. Sekretariat DPRD Data dan Narasi belum update 2025

Tabel 2. 91. Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prosentase jumlah produk yang didampingi oleh tenaga ahli DPRD	%	100	88	100		-
2	Prosentase fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	-	-	-	97.86	94,54

Sumber : Sekretariat DPRD, Tahun 2024

Prosentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD tahun 2024 dengan target 100 dan realisasi 94.54% dan target RP tahun 2026 sebesar 100 dengan status akan tercapai. Penyebab belum tercapainya ini karena ada 2 pekerjaan yang tidak dilaksanakan yaitu Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pengadaan Peralatan dan Mesin karena permintaan jenis kendaraan tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2027 dan dilaksanakan oleh OPD teknis terkait

Tabel 2. 92. Capaian SDGs Setwan

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota	%	30	24	24	24,00	25

Sumber Setwan Kota Salatiga , Tahun 2024

b. Sekretariat Daerah Data dan Narasi blm update

Pada Tahun 2024 nilai Kepatuhan standar pelayanan publik target 81.25 realisasi 98.15. Indeks Kematangan Organisasi daerah target 34.67 realisasi 36.16, Indeks PMPRB target 72.00. terealisasi 73,63 , Nilai Sakip target 66% terealisasi 66.54 dan Indeks Kepuasan Masyarakat target 84.75 terealisasi 86,32 .

Tabel 2. 93. Capaian Indikator Kinerja Daerah Sekretariat Daerah Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-rata SKM (Skor Kepuasan Masyarakat)	%	83,23	84,61	84,95	-	-
2	Nilai Kepatuhan Standar Pelayanan Publik	Nilai	-	-	-	90.09	98.15
3	Indeks Kematangan Organisasi Daerah	Nilai	-	-	-	32.93	36.16
4	Indeks PMPRB	Nilai	-	-	-	74.98	73,63
5	Nilai SAKIP	Angka	-	-	-	65.81	66.54
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	-	-	-	85.55	86.32

Sumber : SETDA, Tahun 2024

Target tahun 2024 untuk nilai kepatuhan standar pelayanan publik dengan target 81.25 dan realisasi 98.15 dan capaian kinerja sebesar 120.8 dan target RPD tahun 2026 sebesar 81.75 maka status tercapai. Indeks kematangan organisasi daerah dengan target 34.67 dan realisasi 36.16 dan capaian kinerja sebesar 104.30 , dan target RPD tahun 2026 sebesar 35.00% maka status tercapai.

Indeks PMPRB dengan target 72 dan realisasi 74.98 (Tahun 2023) dan target pada RPD tahun 2026 sebesar 74 maka status tercapai. Nilai SAKIP dengan target sebesar 66.00 dan realisasi sebesar 66.54 dan realisasi capaian kinerja sebesar 100.82 dan target RPD Tahun 2026 sebesar 74 maka status tercapai.

Indeks Kepuasan masyarakat dengan target sebesar 84.75 dan realisasi 86.32 dan realisasi target sebesar 101.85 dan target RPD tahun 2026 sebesar 85.00 maka status tercapai.

Tabel 2. 94. Capaian SDGs Setda

NO	INDIKATOR NASIONAL	INDIKATOR KOTA SALATIGA	SATUAN	TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)	Nilai SAKIP	Kategori	B	B	B	B	A-
2	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan	Persen	100	100	100	100	100
3	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Zona	Zona Hijau	Tidak dilakukan penghitungan	Zona Kuning	Zona Hijau	A-

Sumber Setda Kota Salatiga , Tahun 2024

c. Kecamatan Sidomukti

Tabel 2. 95. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidomukti Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kecamatan Sidomukti						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	84,96	90,14	-	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	59.00	63.41	59,54
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	79,91	78,78	97.94	97.01	96,10
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	89,11	89,15	-	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-			90.28	90,40
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%		-	76.24	100	100

Sumber : Kecamatan Sidomukti, Tahun 2025

Persentase realisasi wajib pajak pada tahun 2025 yang membayar PBB P2 adalah sebesar 59,54%, dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 63,41% mengalami penurunan sebesar 3,87%. Salah satu faktor penyebab turunnya realisasi pajak adalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB berkurang.

Presentase realisasi usulan hasil musrenbang Tahun 2025 sebesar 96,10%, dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 97,01% mengalami penurunan sebesar 0,91%. Realisasi usulan hasil musrenbang turun dibanding tahun 2024 adalah dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran untuk efisiensi di tahun 2025

Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 terealisasi 90.40 sehingga dibandingkan dengan target pada tahun 2025 adalah 90,285, sehingga realisasi capaian sebesar 100.13%, maka dengan ini status tercapai. Nilai indeks ini meningkat 0,12 dibandingkan pada tahun 2024. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tingkat capaian kinerja antara lain adanya koordinasi yang baik antara Ketua RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan dan pelayanan prima yang dilakukan dengan setulus hati oleh petugas.

Presentase PKK aktif pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100 % Pelaksanaan berhasil dengan baik karena ada partisipasi dan swadaya dari masyarakat dari tingkat RT sampai dengan RW terutama pada saat pelaksanaan pra musrenbang di tingkat RT dan RW.

d. Kecamatan Sidorejo

Tabel 2. 96. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Sidorejo Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kecamatan Sidorejo						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	93,51	91.97	-	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	91.84	88.97	68,56
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	41,23	53.83	53.49	64.96	94,34
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	85,83	91.25	-	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	88.73	88.67	89,25
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	72.46	84,06	100

Sumber : Kecamatan Sidorejo, Tahun 2025

Persentase realisasi wajib pajak pada tahun 2025 yang membayar PBB P2 adalah sebesar 68,56% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 88,97% mengalami penurunan sebesar 20,41% Salah satu faktor penyebab turunnya realisasi pajak adalah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak PBB berkurang, SPPT PBB belum tersampaikan semua ke Wajib Pajak dikarenakan alamat dan data Wajib pajak belum sesuai dengan SPPT mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat membayarkan kewajiban pajaknya tepat waktu Presentase realisasi usulan hasil musrenbang Tahun 2025 sebesar 94,34%, dibandingkan dengan tahun 2024 yang sebesar 64,96% mengalami kenaikan sebesar 29,38%.

Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 terealisasi 89.25 sehingga dibandingkan dengan target pada tahun 2025 adalah 88, sehingga realisasi capaian sebesar 101.4%, maka dengan ini status tercapai. Nilai indeks ini meningkat 1,25 dibandingkan pada tahun 2024. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan tingkat capaian kinerja antara lain adanya koordinasi

yang baik antara Ketua RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan dan pelayanan prima yang dilakukan dengan setulus hati oleh petugas.

Presentase PKK aktif pada tahun 2025 terealisasi sebesar 100 % lebih baik daripada tahun 2024 yang hanya sebesar 84,06%. Pelaksanaan berhasil dengan baik karena ada partisipasi dan swadaya dari masyarakat dari tingkat RT sampai dengan RW terutama pada saat pelaksanaan pra musrenbang di tingkat RT dan RW.

e. Kecamatan Tingkir

Tabel 2. 97. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Tingkir Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kecamatan Tingkir						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	95,62	91,76	-	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	65,33	68,82	64,76
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	42,5	36,73	65,99	68,18	70,5
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	85	85,94	-	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	91,72	91,45	91,64
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	100	100	100

Sumber : Kecamatan Tingkir, Tahun 2025

Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 pada tahun 2025 adalah 64,76% , dibanding tahun 2024 sebesar 68,82%, realisasi wajib pajak di tahun 2025 ini mengalami penurunan sebesar 4,06%. Hal- hal yang melatarbelakangi diantaranya adalah adanya SPPT yang beralamatkan tidak sesuai dengan pemiliknya atau kosong, WP yang mempunyai tanah dan bangunan di wilayah Kecamatan Tingkir tetapi tinggal di luar wilayah Kecamatan Tingkir sehingga tidak semua SPPT PBB dapat tersampaikan ke WP dan mengakibatkan tidak semua wajib pajak dapat membayarkan kewajiban pajaknya tepat waktu. Upaya yang akan dilakukan untuk mendukung tercapai di tahun mendatang dengan menyebarkan informasi ke media sosial yang ada dan dengan melakukan pelayanan terpadu (pelayanan dengan mendatangi masyarakat lebih dekat ke tingkat RT/RW).

Pada Tahun 2025 persentase realisasi usulan hasil musrenbang adalah 70,5% hal ini mengalami peningkatan sebesar 2,32% dibanding tahun 2024 yang hanya sebesar 68,18%. Nilai indeks kepuasan masyarakat dengan target di tahun 2025 sebesar 91,46% terealisasi 91,64% dengan demikian realisasi capaian sebesar 100,2% dan status tercapai.

Prosentase PKK Aktif pada tahun 2025 terealisasi 100%.

Faktor -faktor yang menyebabkan keberhasilan capaian Persentase PKK Aktif adalah

- o seluruh unsur yang masuk dalam PKK di kecamatan Tingkir aktif melakukan kegiatan rutin dalam rangka pemberdayaan masyarakat,

- Tim Penggerak PKK Kecamatan Tingkir rutin melakukan pembinaan rutin ke PKK yang ada di wilayah Kecamatan Tingkir,
- Sering diadakan lomba-lomba yang melibatkan PKK sehingga PKK menjadi lebih aktif dalam mendukung kegiatan tersebut.

f. Kecamatan Argomulyo

Tabel 2. 98. Capaian Indikator Kinerja Daerah Kecamatan Argomulyo Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Daerah	satuan	2021	2022	2023	2024	2025
	Kecamatan Argomulyo						
1	Tingkat ketepatan waktu penyampaian SPPT ke WP	%	60	59	-	-	-
2	Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2	%	-	-	60,00	63,55	60,76
3	Presentase realisasi usulan hasil Musrenbang	%	77,97	93,32	90,48	90,60	72,75
4	Nilai survei kepuasan masyarakat	%	80,60	81,38	-	-	-
5	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	%	-	-	84,02	85,26	90,56
6	Persentase PKK Aktif Kecamatan	%	-	-	100	100	100

Sumber : Kecamatan Argomulyo, Tahun 2025

Tahun 2025 persentase realisasi wajib pajak yang membayar PBB P2 sebesar 60,76% hal ini lebih menurun 2,79% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 63,55%.

Faktor penyebab turunnya realisasi wajib pajak ini karena :

- ✓ kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak,
- ✓ kurangnya pengetahuan wajib pajak akan pentingnya membayar pajak
- ✓ tingkat penghasilan wajib pajak, kualitas pelayanan dan persepsi wajib pajak akan sanksi tidak taat pajak. Dalam usaha meraih keberhasilan pencapaian target, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intens untuk mengedukasi wajib pajak yang belum membayar pajak supaya menjadi wajib pajak yang taat membayar pajak.

Persentase usulan hasil musrenbang Kecamatan tahun 2025 terealisasi sebesar 72,75%, dibandingkan tahun 2024 mengalami penurunan 17,85 %.

Persentase PKK aktif tahun 2025 terealisasi 100%. Kegiatan pendukung indikator kinerja terlaksana dikarenakan adanya semangat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelaksanaan kegiatan PKK dalam memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Nilai indeks kepuasan masyarakat tahun 2025 terealisasi 90.44 sehingga dibandingkan dengan target pada tahun 2025 sebesar 80, realisasi capaian sebesar 113%, maka dengan ini status tercapai. Nilai indeks ini meningkat 5,18 dibandingkan pada tahun 2024 yang hanya 85,26.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi dan keuangan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027, menggambarkan kebijakan perekonomian daerah sebagai dasar pencapaian sasaran indikator ekonomi makro daerah. Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun global. Sedangkan kerangka pendanaan daerah memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan daerah tahun 2027.

Secara garis besar, bab ini memuat arah kebijakan ekonomi daerah yang menjelaskan tentang perkembangan ekonomi Global, Nasional, kondisi ekonomi Jawa Tengah, serta tantangan dan prospek perekonomian daerah, termasuk di dalamnya asumsi-asumsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan RKPD tahun 2027. Selanjutnya dijelaskan pula arah kebijakan keuangan daerah yang memuat proyeksi keuangan dan kerangka pendanaan daerah, serta arah kebijakan keuangan daerah dari segi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Salatiga yang dipengaruhi oleh perekonomian regional, nasional maupun global. Dalam perumusan arah kebijakan ekonomi daerah perlu dilakukan telaah terhadap kondisi perekonomian berdasarkan perkembangan kebijakan ekonomi Global, nasional dan Provinsi Jawa Tengah yang dapat mempengaruhi kondisi dan kebijakan ekonomi Kota Salatiga. Kerangka ekonomi daerah menguraikan perkembangan ekonomi global dan domestik beberapa tahun serta perkiraan dan prospek ekonomi domestik dan global ke depan, khususnya untuk tahun 2027. Gambaran dan perkiraan ekonomi tersebut selanjutnya dijadikan asumsi dasar ekonomi makro 2027 yang menjadi landasan dalam penyusunan pokok-pokok dan arah kebijakan fiskal ke depan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027..

3.1.1. Kondisi Perekonomian Global

Perkembangan ekonomi dunia pada 2025 menunjukkan gambaran yang kompleks : pertumbuhan mulai melambat, ketidakpastian meningkat, tetapi masih ada ruang harapan terutama di negara berkembang dan kawasan Asia. Dengan kebijakan yang tepat, negara-negara berkembang memiliki kesempatan untuk menjadi pusat pertumbuhan baru. Kolaborasi internasional, reformasi domestik, dan manajemen fiskal yang hati-hati menjadi kunci menghadapi tantangan jangka menengah. Secara keseluruhan, kondisi perekonomian global

saat ini dapat digambarkan sebagai fase pertumbuhan moderat namun rentan, dengan prospek yang sangat bergantung pada stabilitas kebijakan, koordinasi perdagangan internasional, dan kemampuan negara-negara menyesuaikan diri terhadap perubahan struktural pascapandemi.

Perekonomian global pada akhir 2025 berada dalam kondisi tumbuh namun tidak stabil. Menurut *International Monetary Fund* (IMF), laju ekspansi ekonomi dunia diperkirakan sekitar 3,0% pada 2025 dan 3,1% pada 2026, mencerminkan pertumbuhan yang positif tetapi tidak sekuat periode sebelum pandemi. Kebangkitan ekonomi berlangsung tidak merata. Amerika Serikat menghadapi perlambatan, kawasan Eropa bergerak lebih lambat dari rata-rata global, sementara Tiongkok dan negara-negara berkembang masih menjadi motor pertumbuhan meskipun juga mengalami tekanan struktural dan penurunan momentum investasi.

Memasuki 2026, ekonomi global diproyeksikan bergerak dalam jalur moderasi. Secara umum, inflasi global diperkirakan menurun. Perdagangan global menghadapi tekanan dari fragmentasi. Kenaikan tarif efektif dan hambatan non-tarif mengurangi efisiensi rantai pasok, sehingga menekan volume perdagangan dan investasi lintas negara. Selain itu, proteksionisme yang meningkat bukan hanya berdampak pada ekspor, tetapi juga pada aliran modal dan biaya produksi, terutama bagi negara berkembang yang bergantung pada integrasi global. Prospek regional menunjukkan pola moderasi yang berbeda antar zona. Risiko global tetap signifikan dan perlu diwaspadai. Indonesia diproyeksikan akan melanjutkan pertumbuhan positif, namun tetap perlu mewaspadai risiko global.

3.1.2. Proyeksi dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Pada Q3-2025, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,04% (yoy), lebih tinggi dibandingkan *peer countries* seperti Singapura (4,3%), Arab Saudi (4,4%), dan Malaysia (4,8%). Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 mampu tumbuh sebesar 5,01% melambat dibanding capaian 2024 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,03 persen (*c-to-c*). Capaian ini didorong oleh peningkatan aktivitas investasi dan manufaktur, serta didukung permintaan domestik yang terjaga dan permintaan global yang mulai pulih. Kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan beberapa negara maju maupun berkembang lainnya di tengah ketidakpastian global.

Pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi terutama didorong oleh kinerja **Industri Pengolahan** sebagai kontributor utama PDB yang didukung oleh penguatan permintaan domestik, hilirisasi sumber daya alam, serta peningkatan kapasitas produksi. Selain itu, sektor **Perdagangan Besar dan Eceran** tumbuh seiring membaiknya daya beli masyarakat dan stabilitas harga, sementara sektor **Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan** tetap berperan sebagai penopang ekonomi melalui peningkatan produksi pangan. Pertumbuhan juga ditopang oleh sektor **Konstruksi** melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan, serta sektor **Transportasi dan Pergudangan** yang meningkat sejalan dengan pemulihan mobilitas

masyarakat dan aktivitas logistik, sehingga secara keseluruhan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan pada Tahun 2025.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didorong oleh Konsumsi Rumah Tangga sebagai komponen terbesar PDB yang tumbuh seiring terjaganya daya beli masyarakat, stabilitas inflasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi signifikan melalui peningkatan investasi pemerintah dan swasta, khususnya pada sektor infrastruktur, industri pengolahan, dan properti. Konsumsi Pemerintah turut menopang pertumbuhan melalui realisasi belanja barang, jasa, dan belanja modal, sementara kinerja Ekspor Barang dan Jasa yang tetap positif, meskipun menghadapi dinamika global, serta terkendalinya Impor, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil dan berkelanjutan pada Tahun 2025. Sementara itu, **Konsumsi LNPR (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga)** mengalami **pertumbuhan positif** seiring meningkatnya aktivitas organisasi sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan, serta dukungan pendanaan dan partisipasi masyarakat yang relatif terjaga, sehingga turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 meskipun dengan porsi yang relatif kecil dibandingkan komponen pengeluaran lainnya.

Sepanjang tahun 2025, wilayah **Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua** tumbuh **lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional**, didorong oleh pemulihan dan penguatan sektor pariwisata, peningkatan aktivitas pertambangan dan hilirisasi sumber daya alam, pengembangan industri berbasis kawasan, serta percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, sehingga menjadi motor pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 4,98 persen pada Kuartal IV Tahun 2025 dan secara keseluruhan mencapai 4,94 persen sepanjang tahun 2025, didorong oleh terjaganya daya beli masyarakat, stabilitas inflasi, serta meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, sehingga tetap menjadi kontributor utama dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Peningkatan konsumsi rumah tangga tercermin dari **menguatnya daya beli masyarakat, meningkatnya mobilitas dan aktivitas ekonomi, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, serta stabilnya inflasi dan harga kebutuhan pokok**, yang mendorong belanja masyarakat baik untuk kebutuhan dasar maupun non-primer sepanjang Tahun 2025.

Sepanjang **Tahun 2025, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)** sebagai indikator investasi di Indonesia **mencatat pertumbuhan positif** dan menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi. Menurut **data BPS**, PMTB tumbuh sekitar **5,04 persen secara tahunan (year-on-year)** dalam **Triwulan III 2025**, mencerminkan optimisme dunia usaha dan meningkatnya realisasi belanja modal serta investasi di sektor produksi dan infrastruktur. Stabilitas ekonomi-politik serta dukungan kebijakan fiskal dan moneter, mampu meningkatkan kepercayaan investor dan realisasi investasi di berbagai sektor, termasuk hilirisasi. Hal ini terlihat dari realisasi **PMA (Foreign Direct Investment)** di Indonesia pada Triwulan III 2025 terus menunjukkan kontribusi signifikan di berbagai sektor ekonomi, realisasi PMA sebesar

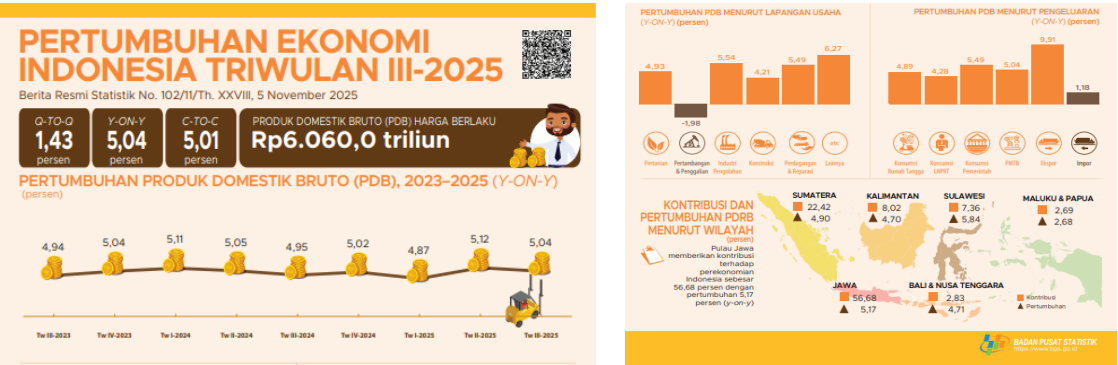
Rp. 644,6 triliun (44,9%) dan PMDN Rp. 789,7 triliun (55,1%) dengan total nilai Rp1.434,3 T, meningkat sekitar 13,7% dibanding periode sama tahun sebelumnya dan mencapai 75,3% dari target tahunan Rp. 1.905,6 triliun. Pertumbuhan impor barang modal dan bahan baku juga memberi indikasi kinerja manufaktur yang terjaga. Melalui APBN, Pemerintah turut mendorong investasi dengan meningkatkan belanja modal untuk konstruksi serta pembangunan infrastruktur konektivitas, bendungan, kawasan industri dan pariwisata.

Kinerja Ekspor pada kuartal III tumbuh 9,91% dan secara tahunan tumbuh 6,96%. Ekspor Indonesia di 2025 menunjukkan **pertumbuhan positif yang konsisten**, terutama didorong oleh ekspor **non-migas** (industri pengolahan, manufaktur, produk olahan). Struktur ekspor yang lebih “diversifikasi” - tidak tergantung hanya pada migas atau komoditas primer - dapat meningkatkan ketahanan ekonomi terhadap fluktuasi harga komoditas global. Dominasi sektor industri pengolahan sebagai penyumbang ekspor menunjukkan bahwa nilai tambah produk ekspor mulai meningkat, bukan sekadar ekspor bahan mentah. Pasar luar negeri (negara tujuan utama) tetap kuat: Tiongkok, AS, dan India — artinya akses pasar dan diversifikasi mitra dagang jadi kunci. Pertumbuhan positif ekspor Indonesia pada Tahun 2025 ditopang oleh **meningkatnya ekspor komoditas unggulan dan produk manufaktur**, khususnya hasil **hilirisasi sumber daya alam** seperti logam dasar, produk nikel, dan turunannya, serta kinerja ekspor **industri pengolahan** termasuk makanan dan minuman. Selain itu, ekspor juga didukung oleh **permintaan global yang relatif terjaga di beberapa negara mitra dagang utama**, perbaikan **kinerja ekspor jasa (terutama pariwisata dan transportasi)**, serta **daya saing produk nasional** yang meningkat seiring dukungan kebijakan perdagangan, investasi, dan penguatan rantai pasok ekspor.

Kinerja perekonomian nasional yang resilien tidak terlepas dari kerja keras APBN. APBN terus dioptimalkan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui keberpihakan program perlindungan sosial (Perlinsos), mendukung perekonomian nasional, serta melaksanakan agenda pembangunan nasional. Guna menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah akan terus memperkuat program Perlinsos, seperti PKH, Kartu Sembako, serta Subsidi dan Kompensasi. Peningkatan kapasitas UMKM akan dilakukan melalui program KUR dan fasilitas perpajakan. Sementara, upaya untuk menjaga stabilitas harga akan dilakukan melalui stabilisasi harga pangan (SPHP). Peran APBN sebagai shock absorber akan terus dioptimalkan melalui berbagai strategi kebijakan Pemerintah. Keberlanjutan upaya penguatan fundamental ekonomi terus dilakukan, antara lain melalui transformasi ekonomi, penguatan ketahanan pangan, pengembangan energi terbarukan, hilirisasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, serta perbaikan iklim investasi dan bisnis. Pemerintah juga terus memperkuat kolaborasi, koordinasi, dan sinergi untuk mengoptimalkan dampak kebijakan bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, melalui kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan

Meski demikian, perekonomian Indonesia masih tetap berada pada jalur yang solid dan menunjukkan resiliensi dengan capaian pertumbuhan ekonomi Triwulan III-2025 sebesar 5,04% (yoy) ditopang oleh masih kuatnya permintaan domestik dan meningkatnya kinerja ekspor. Tingkat pertumbuhan tersebut juga didukung dengan inflasi yang rendah dan

terkendali pada angka 1,82% pada bulan September 2025. Selain itu, angka pertumbuhan ekonomi tersebut juga lebih tinggi dibandingkan sejumlah negara lain, seperti Tiongkok (4,5%), Singapura (2%), Korea Selatan (1,5%), dan Amerika Serikat (2,1%).



Gambar 3. 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III - 2025

Dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, maka kebijakan fiskal akan terus didorong agar lebih sehat, kredibel dan berkesinambungan dalam jangka menengah–panjang. Hal tersebut ditempuh dengan mengakselerasi transformasi ekonomi-sosial antara lain melalui: (i) penguatan SDM; (ii) hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau; (iii) melanjutkan pembangunan infrastruktur; dan (iv) penguatan institusional serta simplifikasi regulasi. Agar transformasi ekonomi-sosial dapat berjalan efektif, perlu disertai reformasi fiskal yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan mendorong pembiayaan inovatif.

Tabel 3. 3. Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) Tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target 2027
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%, (yoy)	5,6 – 6,1
2.	Inflasi	%, (yoy)	1,5 – 3,5
3.	Nilai Tukar Rupiah	Rp/USD	15.700 – 16.900
4.	Yield SBN 10 Tahun	%	6,3 – 7,3
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP	USD/barel	60 – 80
6.	Lifting Minyak	rbph	568 - 696
7.	Lifting Gas	rbsmph	904 – 1.118

Sumber: KEM PPKF tanggal 21 Mei 2025

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah

3.1.3.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2025

Ekonomi Jawa Tengah pada triwulan III-2025 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,37 persen, pertumbuhan ini meningkat dari capaian triwulan III-2024 yang tumbuh sebesar 4,93 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan antara lain Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,79 persen; Jasa lainnya sebesar 8,64 persen dan Informasi dan Komunikasi sebesar 8,50 persen. Selanjutnya, dari empat lapangan usaha yang memiliki peran dominan yang mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Industri

Pengolahan tumbuh sebesar 5,96 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,45 persen dan Konstruksi tumbuh sebesar 7,29 persen. Lapangan usaha lainnya yang tumbuh positif di antaranya Jasa Perusahaan sebesar 7,80 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 6,91 persen dan Jasa Pendidikan sebesar 6,89 persen. Sementara itu, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan satu-satunya lapangan usaha yang berkontraksi dengan pertumbuhan sebesar -0,70 persen

Gambar 3. 2. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah Tahun 2025

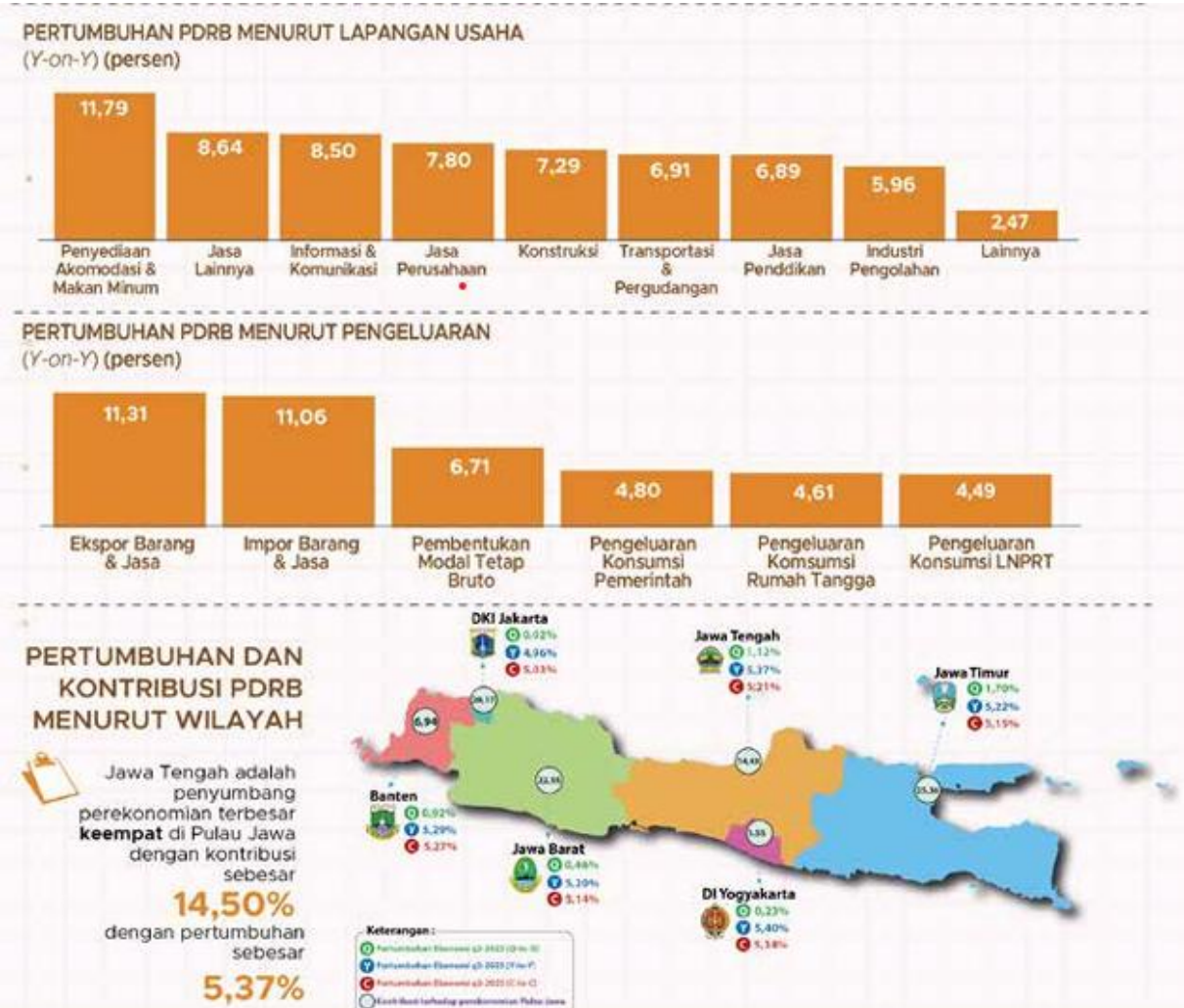


Sumber : Berita Resmi Statistik No. 67/11/33/Th.XIX, BPS

Triwulan III-2025 (c-to-c) tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 5,21 persen, meningkat pesat dibandingkan pencapaian kumulatif sampai dengan Triwulan III-2024 (c-to-c) yang tumbuh sebesar 4,94 persen. Dari total tujuh belas lapangan usaha, lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan signifikan meliputi Informasi dan Komunikasi sebesar 9,69 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,56 persen dan Jasa lainnya sebesar 8,95 persen. Selanjutnya, dari keempat lapangan usaha yang memiliki peran dominan, Industri Pengolahan tumbuh sebesar 3,68 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor tumbuh sebesar 4,36 persen; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh 5,00 persen dan Konstruksi sebesar 6,59 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga tumbuh positif di antaranya Jasa Perusahaan sebesar 8,05 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,94 persen; dan Jasa Pendidikan sebesar 7,26 persen. Struktur PDRB Jawa Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku secara kumulatif sampai dengan Triwulan III-2025 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Jawa Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 33,47 persen; diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,50 persen; Perdagangan Besar Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 13,43 persen; dan Konstruksi sebesar 11,14 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Jawa Tengah mencapai 71,54 persen.

Laju pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada periode yang sama (sekitar 5,04 %), yang menandakan performa ekonomi Jawa Tengah cukup baik dibandingkan rata-rata Indonesia.

Gambar 3. 3. Gambaran Struktur PDRB Jawa Tengah Tahun 2025



Sumber : Berita Resmi Statistik No. 67/11/33/Th.XIX, BPS

Proyeksi Pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2027 diarahkan pada "Mengembangkan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonom". Pembangunan perekonomian Jawa Tengah tahun 2027 diarahkan pada penguatan daya saing dan ketahanan ekonomi daerah, menciptakan pertumbuhan yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata, dengan fokus pada :

- a. **Penguatan sektor unggulan daerah**, terutama **industri pengolahan, pertanian bernilai tambah, perdagangan, dan jasa**, sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi.
- b. **Pengembangan pariwisata berkelanjutan dan ekonomi kreatif** sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berbasis potensi lokal.
- c. **Pemberdayaan dan penguatan UMKM** melalui peningkatan akses pembiayaan, pemasaran, digitalisasi, dan integrasi ke dalam rantai pasok industri.

- d. **Peningkatan investasi dan iklim usaha** dengan mendorong kemudahan berusaha, pengembangan kawasan industri, serta kepastian regulasi.
- e. **Peningkatan nilai tambah dan hilirisasi produk daerah** agar hasil pertanian, industri, dan sumber daya lokal memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.
- f. **Pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah** melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan penguatan konektivitas wilayah.
- g. **Penguatan ekonomi hijau dan ketahanan ekonomi daerah** untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika ekonomi global

3.1.4. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Salatiga

Arah kebijakan ekonomi daerah Kota Salatiga Tahun 2027 difokuskan pada penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan, melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sektor unggulan perkotaan, serta perluasan kesempatan kerja. Kebijakan diarahkan untuk mengoptimalkan peran sektor perdagangan, jasa, UMKM, ekonomi kreatif, dan pariwisata perkotaan, sebagai motor penggerak utama perekonomian daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Salatiga mendorong penguatan iklim investasi dan kemudahan berusaha, khususnya bagi usaha mikro dan kecil, melalui penyederhanaan perizinan, pendampingan usaha, serta penguatan akses pembiayaan dan pemasaran. Pengembangan ekonomi berbasis inovasi dan digitalisasi juga menjadi prioritas untuk meningkatkan produktivitas pelaku usaha dan daya saing ekonomi lokal.

Dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi daerah, kebijakan ekonomi Tahun 2027 juga diarahkan pada pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan perkotaan, serta peningkatan keterpaduan rantai distribusi barang dan jasa. Selanjutnya, arah kebijakan ekonomi diarahkan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat pengangguran, melalui pengembangan kewirausahaan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, dan sinergi dengan dunia usaha dan dunia pendidikan.

Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, serta penguatan kolaborasi antar pemangku kepentingan guna memastikan pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga yang merata dan berkeadilan pada Tahun 2027.

Dengan melihat kondisi perekonomian tahun 2025, dan target pertumbuhan ekonomi Kota Salatiga tahun 2026, maka perekonomian Kota Salatiga Tahun 2027 masih akan menghadapi sejumlah tantangan akibat dari pengaruh melemahnya ekonomi global. Tantangan yang akan dihadapi :

- 1) Kinerja perdagangan dan aktivitas usaha di daerah yang dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk industri dan jasa.
- 2) Ketidakpastian global dan volatilitas harga (energi, pangan, dan komoditas), yang dapat meningkatkan biaya produksi serta menimbulkan tekanan inflasi daerah.

- 3) Terbatasnya arus investasi dan pembiayaan usaha, terutama akibat kondisi keuangan global yang ketat, sehingga dapat menghambat ekspansi usaha dan penciptaan lapangan kerja.
- 4) Ketahanan daya beli masyarakat yang masih rentan, khususnya pada kelompok menengah ke bawah, seiring potensi kenaikan harga kebutuhan pokok.
- 5) Kesenjangan keterampilan tenaga kerja, terutama dalam sektor jasa modern dan ekonomi digital, yang berpotensi menahan peningkatan produktivitas dan daya saing daerah.
- 6) Keterbatasan kapasitas fiskal daerah, yang membatasi ruang fiskal pemerintah daerah dalam memberikan stimulus ekonomi dan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan.
- 7) Persaingan antar daerah yang semakin ketat dalam menarik investasi, wisatawan, dan talenta, khususnya di wilayah perkotaan dan kawasan strategis.
- 8) Kerentanan sektor pertanian dan pangan perkotaan terhadap perubahan iklim, yang berpotensi mengganggu pasokan dan stabilitas harga pangan.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini, serta memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Salatiga dapat digambarkan capaian pada tahun 2022, 2023, 2024, 2025, dan Target 2027 sebagaimana tertuang dalam Tabel 3.3. berikut.

Tabel 3. 4. Capaian Perkembangan Ekonomi tahun 2023, 2024, 2025 dan Target Perkembangan Ekonomi Tahun 2026 dan proyeksi tahun 2027

No	Indikator	CAPAIAN 2023	CAPAIAN 2024	CAPAIAN 2025	PROYEKSI 2026	TARGET 2027
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,34	5,37	5,55	5,56-6,56	6,60 - 7,60
2	Tingkat Kemiskinan (%)	4,66	4,57	4,20	4,34-4,20	4,30 – 3,39
3	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) (%)	4,57	3,86	3,67	3,84-3,54	3,82 – 3,52
4	Indeks Pembangunan Manusia	84,99	85,72	86,23	86,43	86,85

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah adalah pedoman untuk mengelola seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan keuangan untuk mencapai tujuan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kebijakan ini memastikan pengelolaan dana daerah berjalan baik dan bermanfaat maksimal bagi publik sesuai undang-undang yang berlaku. Kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disusun setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Secara umum kebijakan keuangan daerah difokuskan pada pembiayaan pembangunan yang bersifat investasi dan strategis serta pembiayaan pembangunan dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana untuk menunjang program-program yang didasarkan pada kebutuhan riil dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan memegang prinsip-prinsip akuntabilitas, maka arah kebijakan keuangan daerah dijabarkan dalam kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan

3.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang meliputi komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2025 tentang Peta kapasitas Fiskal Daerah, Kota Salatiga masuk kategori kapasitas fiskal daerah tinggi. Sesuai dengan data realisasi APBD, realisasi pendapatan Kota Salatiga pada tahun 2024 (*audited*) sebesar Rp1.038.143.488.453,00 (101,59%); realisasi tahun 2025 sebesar Rp1.057.809.883.405,00 (101,68%); proyeksi pendapatan tahun 2026 sebesar Rp864.794.061.878,00, serta proyeksi pendapatan tahun 2027 adalah sebesar Rp770.264.119.337,00. Berdasarkan realisasi pada tahun 2025, pendapatan daerah Kota Salatiga masih bertumpu pada pendapatan transfer pusat sebesar 60,70%, sedangkan PAD hanya menyumbang sekitar 33,02%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Salatiga masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Oleh karena itu, dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan Pendapatan untuk APBD Tahun Anggaran 2027 perlu benar-benar memperhatikan arah kebijakan Pemerintah pusat berkaitan dengan dana transfer dan upaya-upaya yang akan ditempuh sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.2.1.1 Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam penyusunan RKPD Tahun 2027, perencanaan pendapatan daerah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) PAD dihitung dengan memperhatikan pendapatan selama 2 tahun terakhir dan perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta mempertimbangkan potensi riil.
- b) Kebijakan opsen pajak, menjadi salah satu komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam perencanaan pendapatan;
- c) Asumsi Pendapatan Transfer untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada Dana Perimbangan tidak memproyeksikan DAK dan Insentif Fiskal, sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah tidak memproyeksikan Bantuan Keuangan Provinsi.

Sumber pendapatan daerah yang merupakan cerminan kemandirian daerah dalam melakukan pembiayaan pembangunan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Proporsi target Pendapatan Asli Daerah terhadap total target Pendapatan Daerah Kota Salatiga menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah Kota Salatiga dalam penyelenggaraan otonomi daerah masih belum dapat berjalan optimal dilihat dari sisi pendapatan asli daerah. Oleh karena itu pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah daerah yang dipisahkan harus terus digali potensinya, tanpa harus memberatkan dunia usaha, dengan berbagai regulasi dan kebijakan daerah.

Secara keseluruhan, pada tahun 2025 realisasi pendapatan asli daerah melebihi target yang telah ditetapkan, dengan capaian 104,68%, dengan proporsi terbesar pada Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dengan kontribusi sebesar 114,35%. Gambaran target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Salatiga tahun 2025, Target Pendapatan Asli Daerah tahun 2026 dan Proyeksi Pendapatan Asli Daerah tahun 2027 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut

Tabel 3. 5. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025, Target Pendapatan Tahun 2026 dan Proyeksi Pendapatan Tahun 2027

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Anggaran 2026	Proyeksi Anggaran 2027
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	333.657.921.500	349.261.106.811	104,68%	324.861.630.878	313.422.633.337
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	114.000.000.000	124.494.504.885	109,21%	111.820.000.000	99.270.000.000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	181.688.836.367	183.381.306.904	100,93%	179.031.738.900	184.145.031.052
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.891.948.700	27.320.556.073	114,35%	24.866.077.000	23.055.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	14.077.136.433	14.064.738.949	99,91%	9.143.814.978	6.952.602.285

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

1. Proyeksi pendapatan asli daerah yang bersumber dari pendapatan retribusi daerah direncanakan meningkat pada tahun 2027 seiring dengan naiknya pendapatan BLUD Rumah Sakit yang merupakan komponen utama restribusi pelayanan kesehatan;

2. Proyeksi untuk pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah direncanakan turun, disebabkan oleh :
 - a. Pajak

Pajak Daerah diproyeksikan turun dari APBD 2026 dikarenakan tahun perencanaan blm dapat menganalisa data angka secara utuh disebabkan data proyeksi RKPD 2027 disusun sebelum Pengesahan APBD 2026 dan sebelum capaian dan realisasi pendatan 2025 secara utuh 1 tahun. Serta pada tahun berkenaan perencanaan RKPD 2027 blm terpotret kondisi PDRB Kota Salatiga di tahun 2025. Reposisi atas perhitungan Proyeksi Pajak Daerah pada RKPD 2027 menjadi rancangan akhir nantinya akan menjadi bagian dari perjalanan dan kebijakan anggaran dengan tetap melihat kondisi ekonomi makro maupun mikro disertai dengan data potensi yang ada dengan tetap mempertimbangkan *factor collection ratio* yang ada.
 - b. Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (Deviden) sama halnya dengan kondisi tersebut diatas sehingga Bank Jateng, PDAU dan PDAM belum bisa menganalisa secara utuh akan proyeksi 2027. Adapun hasil perhitungan atas proyeksi 2027 nantinya dituangkan dalam kertas kerja yang akan digunakan pada proses pembahasan rancangan akhir RKPD maupun KUA PPAS.
 - c. Lain-lain PAD

Lain-Lain PAD yang Sah jika dibandingkan dengan APBD 2026 turun ada pada rincian antara lain:

 - 1) Sewa BMD dengan skenario perikatan lebih dari 1 tahun maka perhitungan proyeksi 2027 tdk akan sama dengan 2026 karena pembayaran untuk perikatannya akan terjadi di tahun 2026 dan 2028.
 - 2) Jasa Giro, melihat trend pendapatan transfer yang turun makan di proyeksikan uang yang mengalir di setiap bulannya di daerah pun juga akan mengalami penurunan sehingga mempengaruhi besaran bunga giro kasda yang akan diperoleh
 - 3) Pendapatan Bunga deposito, dengan melihat trend pendapatan transfer yang selalu turun maka akan mempengaruhi arus kas yang idle sebagai bagian atas celah atau sisa dari serapan anggaran di setiap bulannya pada kas daerah, maka posisi perhitungan proyeksi penerimaan bunga deposito pun juga akan memiliki implikasi terhadap penurunan.
 - 4) Pendapatan BLUD yang ada di PUSKESMAS, KPM dan RSUD khususnya pelayanan Kesehatan sekarang sudah menjadi pencatatan pendapatan pada Retribusi Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Kesehatan. Tertinggal sebagai pendapatan BLUD adalah Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain, Pendapatan BLUD dari Jasa Giro, Pendapatan BLUD dari Pendapatan Bunga dan Pendapatan BLUD dari Komisi, Potongan ataupun Bentuk

Lain sebagai Akibat dari Penjualan dan/atau Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh BLUD

Rencana kebijakan pendapatan asli daerah tahun 2027 antara lain sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah dengan memanfaatkan digitalisasi;
- 2) Mengoptimalkan pelayanan pajak melalui digitalisasi dan inovasi, memperbaiki akurasi data wajib pajak, serta memperkuat basis pajak menjadi salah satu kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk optimalisasi PAD
- 3) Optimalisasi pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
- 5) Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- 6) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, yaitu melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Social Responsibility* (CSR);
- 7) Penguatan sinergi pemungutan Opsen PKB dan BBNKB antara Provinsi dan Kabupaten/Kota, hal ini untuk memberikan kepastian penerimaan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan tidak menambah beban Wajib Pajak.
- 8) *Law enforcement*/penegakan hukum dalam proses penagihan piutang dan *cleansing* data piutang pajak daerah.

3.2.1.2 Kebijakan Pendapatan Transfer

Komponen Pendapatan Daerah yang berasal dari Pendapatan transfer antar daerah dari komponen bantuan keuangan provinsi diproyeksikan menurut usulan belanja bantuan keuangan, yang nantinya apabila alokasi bantuan keuangan Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan maka proyeksi pendapatan akan dikoreksi dan disesuaikan dengan ketentuan alokasinya. Demikian halnya untuk komponen dana alokasi khusus, DBHCHT dan dana insentif fiskal akan menyesuaikan dengan ketentuan alokasinya.

Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dalam melaksanakan proyeksi pendapatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran. Namun mengingat belum terdapat penetapan alokasi Transfer Ke Daerah (TKD) untuk tahun anggaran 2027, maka sesuai dengan kaedah penyusunan anggaran seperti halnya dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026, maka dalam merencanakan besaran alokasi pendapatan transfer dengan berdasarkan alokasi dana transfer tahun sebelumnya, dengan tetap memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan Negara tahun sebelumnya.

Tabel 3. 6. Target dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

Kode	Uraian	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Anggaran 2026	Proyeksi Anggaran 2027
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	704.804.248.000	705.334.018.585	100,08%	539.932.431.000	456.841.486.000
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	645.991.430.000	651.030.414.525	100,78%	495.341.491.000	412.250.546.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	8.989.406.000	8.989.406.000	100%	0	0
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	35.089.157.000	34.009.365.300	96,92%	16.519.286.000	16.519.286.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	482.599.097.000	490.663.970.136	101,67%	395.731.260.000	395.731.260.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	119.313.770.000	117.367.673.089	99,37%	83.090.945.000	0
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	58.812.818.000	54.303.604.060	92,33%	44.590.940.000	44.590.940.000
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil	47.886.318.000	44.234.941.060	92,37%	44.590.940.000	44.590.940.000
4.2.01.02	Bantuan Keuangan	10.926.500.000	10.068.663.000	92,15%	0	0

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa :

- Pada rencana atau target pendapatan transfer pemerintah pusat Tahun 2027, disusun dengan mempertimbangkan hal-hal antara lain :
 - Insentif fiskal pada tahapan penyusunan RKPD 2027 tidak direncanakan
 - Dana bagi hasil direncanakan sama dengan alokasi tahun 2026 yaitu sebesar Rp16.519.286.000,00
 - Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan sama dengan tahun 2025 dengan alokasi sebesar Rp395.731.260.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - DAU yang tidak ditentukan penggunaannya Rp380.800.510.000,00
 - DAU yang ditentukan penggunaannya Rp4.600.000.000,00 untuk Pendanaan Kelurahan
 - DAU untuk Dana Kelurahan Rp10.330.750.000,00
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) belum dialokasikan rencana anggarannya
- Pada pendapatan transfer antar daerah sesuai ketentuan yang berlaku hanya menganggarkan Dana Bagi hasil dengan mengacu kepada penganggaran tahun 2026, sedangkan Bantuan Keuangan belum direncanakan.

3.2.1.3 Kebijakan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, terdiri dari pendapatan hibah, Pendapatan Darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Salatiga pada tahun 2027 tidak memproyeksikan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan yang Sah, karena Pemerintah Kota Salatiga belum mendapatkan alokasi pendapatan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan kebijakan pendapatan baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer maupun lain-lain pendapatan yang sah, maka secara keseluruhan Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 sebagaimana tersaji dalam di bawah ini.

Tabel 3. 7. Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027

Kode	Uraian	Proyeksi Anggaran 2027
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	313.422.633.337
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	99.270.000.000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	184.145.031.052
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.055.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.952.602.285
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	456.841.486.000
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	412.250.546.000
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	16.519.286.000
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	395.731.260.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	0
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	44.590.940.000
4.2.02.01	Dana Bagi Hasil	44.590.940.000
4.2.01.02	Bantuan Keuangan	0
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	456.841.486.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	412.250.546.000
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.519.286.000
Jumlah Pendapatan Daerah		770.264.119.337

3.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan (Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat 40). Analisis Belanja Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Klasifikasi belanja daerah berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Kebijakan belanja daerah disusun untuk mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang difokuskan pada program dan kegiatan yang didanai dari penerimaan daerah. Belanja daerah pada tahun anggaran 2027, dialokasikan pada setiap perangkat daerah yang besarnya ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah.

Berdasarkan kemampuan keuangan daerah tahun 2027 serta prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, maka kebijakan belanja daerah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

a) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Peningkatan Belanja Daerah yang Produktif, Efektif dan Efisien dengan memprioritaskan belanja daerah untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki daya ungkit tinggi dalam pencapaian indikator pembangunan daerah. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b) Prioritas

Penggunaan anggaran tahun 2027 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang menjadi isu strategis pembangunan daerah. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat mengacu Standar Pelayanan Minimal, mengalokasikan belanja yang bersifat wajib dan mengikat guna menjamin kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat dan memenuhi alokasi minimal *mandatory spending* yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan diantaranya fungsi pendidikan dan fungsi kesehatan serta memenuhi alokasi minimal untuk belanja infrastruktur daerah.

c) Tolok Ukur dan target Kinerja

Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sehingga alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur

d) Optimalisasi Belanja Modal

Belanja modal diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja modal disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Optimalisasi belanja modal untuk pembangunan infrastruktur publik yang memungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

e) Transparan dan Akuntabel

Setiap pengeluaran belanja dipublikasikan dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dipublikasikan berarti pula masyarakat mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggung jawaban belanja tidak hanya dari aspek administrasi keuangan, tetapi menyangkut pula proses,

keluaran dan hasilnya. Pelaksanaan tertib administrasi pencatatan keuangan yang diatur dalam kebijakan akuntansi untuk memperoleh laporan keuangan yang memenuhi prinsip transparansi dan akuntabel serta sesuai dengan SAP.

f) Kesesuaian Kegiatan dengan Sumber Pembiayaan

Alokasi anggaran belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sudah jelas sumber pembiayaannya seperti dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCHT), Dana Insentif Fiskal dan Dana Hibah harus sudah seimbang dengan target penerimaannya dan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan dana tersebut.

g) Kesesuaian dengan Peraturan perundang-undangan

Mengimplementasikan ketentuan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam mekanisme implementasi belanja daerah memanfaatkan sistem informasi dalam mengimplementasikannya sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja dan /atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Peningkatan sinergitas kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Mengalokasikan belanja daerah yang telah ditentukan penggunaannya, dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

h) Keselarasan dan sinkronisasi

Memperhatikan dan melaksanakan sinkronisasi program prioritas Daerah dengan prioritas provinsi dan prioritas nasional

Selanjutnya, dengan memperhatikan target pendapatan daerah, realisasi belanja tahun 2025, target belanja tahun 2026 serta berpedoman pada prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian target-target kinerja dalam perencanaan, maka proyeksi belanja tahun 2027 sebagaimana tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 8. Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

Kode	Uraian	Tahun 2025			Target Belanja 2026	Proyeksi Belanja 2027
		Anggaran	Realisasi	%		
5.1	BELANJA OPERASI	1.001.171.576.349	914.179.929.481	91,31%	828.631.007.411	740.023.638.399
5.1.01	Belanja Pegawai	468.476.794.553	436.075.782.480	93,08%	435.035.571.465	383.943.502.825
5.1.02	Belanja Barang	505.351.816.580	451.061.630.446	89,26%	364.918.447.730	350.733.087.358
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	0,00%	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	165.000.000	147.815.000	89,58%	150.000.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	26.748.915.216	26.618.601.555	99,51%	28.272.488.216	5.101.548.216
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	429.050.000	276.100.000	64,35%	254.500.000	245.500.000
5.2	BELANJA MODAL	132.677.816.439	114.551.947.840	86,34%	59.163.054.467	27.240.480.938
5.2.01	Belanja Tanah	1.664.899.115	1.299.823.380	78,07%	25.606.000.305	50.000.000
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	44.806.937.280	31.064.296.680	69,33%	15.304.156.640	7.135.219.897
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	38.480.934.733	37.375.988.955	97,13%	3.169.905.422	6.466.300.000
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	44.960.880.888	42.392.857.840	94,29%	12.834.111.500	12.237.500.341
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	2.674.762.071	2.361.563.299	88,29%	1.687.888.300	1.351.460.700
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	89.402.352	57.417.686	64,22%	560.992.300	-
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	1.000.000.000	288.090.000	28,81%	3.000.000.000	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tak Terduga	1.000.000.000	288.090.000	28,81%	3.000.000.000	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	1.134.849.392.788	1.029.019.967.321	90,67%	890.794.061.878	770.264.119.337

3.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah ini terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis objek, dan rincian objek pembiayaan daerah.

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan Penerimaan pembiayaan daerah yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan penerimaan yang bersumber dari :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan/atau;
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Sementara itu, kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pengeluaran untuk pembiayaan :

- a. pembayaran cicilan pokok piutang yang jatuh tempo;
- b. penyertaan modal daerah;
- c. pembentukan dana cadangan;
- d. pemberian pinjaman daerah;
- e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Kebijakan defisit masih menggunakan kebijakan pemberian ruang pengalokasian program dan kegiatan yang diusulkan oleh Masyarakat melalui Musrenbang dan Anggota Dewan melalui Pokir serta alokasi Hibah yang sudah disesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan tahun 2027. Selanjutnya pengalokasian anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam KUA PPAS serta analisis kemampuan fiskal oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah. Untuk SILPA pada Struktur APBD dibuat sama dengan Defisit Belanja.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Adapun Kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah di Kota Salatiga adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga dilakukan sesuai regulasi dan memperhitungkan secara cermat dan rasional dan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan. Perluasan akses terhadap alternatif pembiayaan untuk akselerasi pembangunan, memulai memanfaatkan alternatif pembiayaan seperti Pinjaman Daerah, KPBU, Sukuk Daerah.

Penerimaan Pembiayaan antara lain:

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
- b. Pencairan dana cadangan.
- c. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan.
- d. Pinjaman daerah.
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman.
- f. dan lainnya

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Daerah di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Milik Daerah (BUMD) yang bergerak pada sektor pelayanan kebutuhan dasar masyarakat dalam bentuk penyertaan modal daerah. Penyertaan modal kepada BUMD (Perusda) dilakukan secara bertahap. Penyertaan modal diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Kebijakan penyertaan modal di Kota Salatiga didasarkan pada analisis investasi dan kemampuan keuangan daerah sehingga dana publik yang diinvestasikan tidak memiliki risiko tinggi. Selain itu penyertaan modal perlu sejalan dengan rencana bisnis dan rencana pembangunan pemerintah daerah sehingga sinkron dengan concern pemerintah pusat untuk mendorong peran strategis BUMD dalam transformasi ekonomi sebagai *value creator* maupun *agent development*.

Pengeluaran Pembiayaan antara lain :

- a. Pembentukan dana cadangan.
- b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.
- c. Pembayaran pokok utang daerah.
- d. Pemberian pinjaman daerah
- e. dan lainnya

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 9. Realisasi Anggaran Penerimaan Pembiayaan Tahun 2025, Target Tahun 2026 dan Proyeksi Tahun 2027

Kode	Uraian	Tahun 2025			Target Tahun 2026	Proyeksi 2027
		Anggaran	Realisasi	%		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.546.057.288	94.546.057.288		26.000.000.000	26.000.000.000
6.1.1	Penggunaan SILPA	94.546.057.288	94.546.057.288		26.000.000.000	26.000.000.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0	0			
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0			
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0			
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	0	0			
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0	0			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0			
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0			
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0	0			
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0			
6.2.5	Pemberian Dana Bergulir	0	0			
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	94.546.057.288	94.546.057.288		26.000.000.000	26.000.000.000

Dengan memperhatikan target pendapatan daerah, proyeksi belanja daerah dan pembiayaan daerah, maka struktur APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2026 digambarkan sebagaimana tabel berikut di bawah ini.

Tabel 3. 10. Struktur APBD Kota Salatiga Tahun 2027

Kode	Uraian	Proyeksi Anggaran 2027	Perkiraan Maju Tahun 2028
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	313.422.633.337	313.422.633.337
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	99.270.000.000	99.270.000.000
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	184.145.031.052	184.145.031.052
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.055.000.000	23.055.000.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	6.952.602.285	6.952.602.285
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	456.841.486.000	456.841.486.000
4.2.01	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	412.250.546.000	412.250.546.000
4.2.02	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	44.590.940.000	44.590.940.000
5.1	BELANJA OPERASI	740.023.638.399	868.321.191.370
5.1.01	Belanja Pegawai	383.943.502.825	425.310.793.290
5.1.02	Belanja Barang	350.733.087.358	434.491.799.864
5.1.03	Belanja Bunga	0	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0	0

Kode	Uraian	Proyeksi Anggaran 2027	Perkiraan Maju Tahun 2028
5.1.05	Belanja Hibah	5.101.548.216	8.251.548.216
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	245.500.000	267.050.000
5.2	BELANJA MODAL	27.240.480.938	51.152.111.919
5.2.01	Belanja Tanah	50.000.000	3.000.000.000
5.2.02	Belanja Peralatan dan Mesin	7.135.219.897	9.246.430.635
5.2.03	Belanja Gedung dan Bangunan	6.466.300.000	3.752.500.000
5.2.04	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.237.500.341	34.082.647.200
5.2.05	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.351.460.700	1.070.534.084
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0	0
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.000.000.000	3.000.000.000
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.000.000.000	3.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	0	0
	JUMLAH BELANJA	770.264.119.337	922.473.303.289
	Surplus/Defisit		
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000	26.000.000.000
6.1.1	Penggunaan SILPA	26.000.000.000	26.000.000.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan		
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah		
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah		
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah		
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan		
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang		
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah		
6.2.5	Pemberian Dana Bergulir		
73	JUMLAH PEMBIAYAAN NETO	26.000.000.000	26.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN		

Sedangkan komposisi dan persentase alokasi pagu indikatif anggaran Perangkat Daerah pada RKPD tahun 2027 adalah sebagaimana tabel ini.

Tabel 3. 11. Alokasi Pagu Perangkat Daerah Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	PAGU OPD RKPD 2027
1	Dinas Pendidikan	105.503.450.231
2	Dinas Kesehatan	137.880.590.459
	Rumah Sakit Umum Daerah	156.000.000.000
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.752.944.837
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	19.147.297.914
5	Satuan Polisi Pamong Praja	11.322.872.517
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.754.004.678
7	Dinas Sosial	6.441.894.634

No	Perangkat Daerah	PAGU OPD RKPD 2027
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	7.343.522.198
9	Dinas Pangan dan Pertanian	10.232.457.102
10	Dinas Lingkungan Hidup	23.249.624.399
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.582.219.484
12	Dinas Perhubungan	18.803.178.041
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.303.343.083
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	5.582.219.484
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.012.876.402
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	17.257.268.752
17	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	5.274.370.254
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.356.740.395
19	Dinas Perdagangan	11.058.434.655
20	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.074.143.204
21	Sekretariat Daerah	32.110.145.036
22	Sekretariat DPRD	35.262.218.458
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	6.121.028.070
24	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	24.778.872.535
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.656.874.335
26	Inspektorat	7.771.927.359
27	Kecamatan Argomulyo	13.768.573.163
28	Kecamatan Sidomukti	11.400.496.665
29	Kecamatan Sidorejo	14.129.060.695
30	Kecamatan Tingkir	16.368.209.268
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.436.556.303
	JUMLAH	770.264.119.337

Selain itu, untuk mendukung pemberdayaan masyarakat kelurahan baik secara pemenuhan sarana dan prasana fisik, kegiatan sosial, ekonomi dan kemasyarakatan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku, Pemerintah Kota Salatiga pada RKPD 2027 mengalokasikan Dana Kelurahan Adapun proyeksi Dana Kelurahan tahun 2026 sebagaimana Tabel alokasi Dana Kelurahan berikut di bawah ini.

Tabel 3. 12. Alokasi Pagu Dana Kelurahan Tahun 2027

NO	KELURAHAN	RKPD 2026	RAPBD 2026	PAGU 2027
A	SIDOREJO			
1	Blotongan	1.794.000.000	795.885.700	905.250.000
2	Sidorejo Lor	1.702.000.000	891.676.200	858.750.000
3	Salatiga	1.541.000.000	791.677.700	858.750.000
4	Bugel	644.000.000	408.454.600	471.250.000
5	Kauman Kidul	644.000.000	424.360.040	471.250.000
6	Pulutan	805.000.000	439.611.700	517.750.000
B	TINGKIR			

NO	KELURAHAN	RKPD 2026	RAPBD 2026	PAGU 2027
1	Kutowinangun Lor	1.932.000.000	941.701.044	820.000.000
2	Kutowinangun Kidul	1.288.000.000	714.410.170	618.500.000
3	Gendongan	667.000.000	490.200.450	471.250.000
4	Sidorejo Kidul	1.610.000.000	687.464.780	672.750.000
5	Kalibening	621.000.000	368.601.640	401.500.000
6	Tingkir Lor	989.000.000	509.856.460	471.250.000
7	Tingkir Tengah	667.000.000	475.579.800	471.250.000
C	ARGOMULYO			
1	Noborejo	1.334.000.000	647.952.760	641.750.000
2	Ledok	1.403.000.000	770.131.600	734.750.000
3	Tegalrejo	1.357.000.000	721.618.900	742.500.000
4	Kumpulrejo	1.564.000.000	732.601.080	789.000.000
5	Randuacir	1.219.000.000	636.511.030	665.000.000
6	Cebongan	828.000.000	469.953.620	517.750.000
D	SIDOMUKTI			
1	Kecandran	1.288.000.000	541.046.600	680.500.000
2	Dukuh	1.702.000.000	782.961.000	820.000.000
3	Mangunsari	1.863.000.000	872.802.700	858.750.000
4	Kalicacing	667.000.000	440.403.400	471.250.000

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS

PEMBANGUNAN DAERAH

RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan perencanaan tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tahun 2027. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga di susun berdasarkan pada : (1) visi dan misi RPJMD beserta tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, tema dan prioritas pembangunan; (2) hasil evaluasi RKPD tahun 2025; (3) Isu Strategis Daerah; (4) Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027; (5) Prioritas dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027.

Substansi yang akan diuraikan dalam bab ini secara garis besar terdiri dari :

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027;
3. Permasalahan dan Isu Strategis yang diprioritaskan untuk ditangani pada tahun 2027
4. Pokok-Pokok Pikiran DPRD untuk Perencanaan 2027;
5. Sasaran dan Prioritas Daerah dalam Mendukung Kebijakan Nasional
 - a. Pencapaian Target SDG's Kota Salatiga;
 - b. Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Inklusi Sosial;
 - c. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
 - d. Penanggulangan Kemiskinan.

Secara detail diuraikan sebagai berikut :

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Visi Pembangunan Daerah

Visi menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan. Adapun visi pembangunan daerah adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah dan menjadi arah pembangunan yang ingin dicapai dalam periode masa jabatannya. Visi pembangunan daerah Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Tahun 2027 yaitu:

**“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai
Kota **BEDA**: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif
menuju Salatiga yang Mendunia”**

Makna dari visi Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Bergerak

Kata "Bergerak" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna bahwa pembangunan Kota Salatiga bertujuan untuk mewujudkan transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif, mewujudkan kota yang produktif, sejahtera, harmonis dan berkembang, bergeraknya pembangunan Kota Salatiga secara adil dan merata

2. Energik

"Energik" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna Kota Salatiga dapat mewujudkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni dalam menggerakkan kemajuan daerah, meningkatkan kesejahteraan, karakter kerja, dan mewujudkan indeks pembangunan manusia yang tinggi, seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bertumpu pada paradigma pembangunan yang inklusif - adil dan merata dengan optimalisasi sektor potensial perdagangan dan jasa, serta didukung sektor strategis ekonomi kreatif, koperasi, Usaha Mikro dan pariwisata.

3. Dinamis

"Dinamis" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan keberadaan pemerintah kota yang mampu mengurus dan memecahkan setiap masalah yang timbul, dengan mengoptimalkan segala sumber daya pemerintahan yang dimiliki, dengan trus aktif mendayagunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk memaksimalkan pelayanan publik serta berjalannya prinsip kolaborasi pemerintahan Pentahelix (pemerintah, masyarakat, akademisi, swasta dan media), dalam mewujudkan pemerintahan kota yang partisipatif, akuntabel, transparan dan berkelanjutan.

4. Adaptif

"Adaptif" dalam rumusan visi pembangunan Kota Salatiga bermakna untuk mewujudkan Pemerintah dan masyarakat Kota Salatiga yang selalu mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang berbeda, khususnya di tengah arus perubahan sosial, lingkungan dan distrupsi teknologi. Kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan melalui pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan upaya peningkatan kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif.

Perwujudan Kapasitas inovasi yang tinggi sebagai upaya memperkuat daya saing Kota Salatiga dalam interaksi sosial dan ekonomi di Tingkat nasional bahkan internasional. Lingkungan hidup Kota Salatiga harus dibangun untuk mampu menjadi lahan bertumbuhnya insan-insan berkualitas, agile terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakteristik adaptif karenanya juga ditanamkan khususnya pada pemuda, utamanya Generasi Z dan generasi millennial agar dapat mengembangkan diri serta berkontribusi optimal dalam pembangunan daerah secara produktif dan berkelanjutan

5. Salatiga yang Mendunia

Salatiga Kota "mendunia" berarti dikenal luas di seluruh dunia, atau menjadi salah satu kota yang berperan dalam interaksi hubungan internasional. Salatiga kota "mendunia" juga bisa merujuk pada sikap mental, perilaku, dan cara pandang pemerintah dan warga Kota

Salatiga yang mencerminkan semakin luasnya pergaulan dan persaingan dunia. Pada saat yang sama, Kota Salatiga juga memiliki strategi pembangunan dan pemerintahan yang selaras dengan kondisi globalisasi di mana jarak ruang dan batas waktu antara satu komunitas dengan komunitas dunia lainnya juga semakin tidak terbatas (*borderless*).

4.1.2 Misi Pembangunan Daerah

Dalam rangka menuju pencapaian Pembangunan Jangka Menengah Kota Salatiga tahun 2025-2029, ditetapkan melalui 5 (lima) misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing melalui peningkatan Pendidikan, keterampilan dan kesehatan.

Fondasi pembangunan Kota Salatiga adalah sumber daya manusia yang memiliki daya saing tinggi dengan didukung pemenuhan aksesibilitas sarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, berstandar internasional. Idealitas tersebut didukung dengan pembentukan profil Kota Salatiga sebagai pusat keunggulan pelayanan pendidikan dan Kesehatan. Kota yang mampu menyediakan ekosistem bagi warganya untuk mengaktualisasikan pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya untuk mencapai kualitas hidup yang dicita-citakan.

2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif berbasis sektor unggulan daerah melalui kolaborasi investasi daerah dan permodalan UMKM.

Bonus demografi yang telah terjadi di Kota Salatiga menjadi peluang dan tantangan dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun demikian, inklusivitas laju pertumbuhan ekonomi akan dijaga melalui titik berat kebijakan ekonomi daerah yang lebih memperkuat hilirisasi komoditas unggulan daerah dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Diharapkan melalui kolaborasi bersama investasi sektor swasta dan perluasan akses layanan permodalan UMKM akan menurunkan angka pengangguran dan angka penduduk miskin.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap pelayanan publik yang berkualitas melalui peningkatan teknologi informasi dan kompetensi sumber daya aparatur.

Upaya mendorong pemerataan pelayanan publik yang berkualitas memerlukan kompetensi Sumber Daya Aparatur (*supply side*) dan adopsi atau pemanfaatan teknologi informasi. Seiring itu, Upaya peningkatan partisipasi masyarakat Kota Salatiga (*demand side*) dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditempuh melalui keterbukaan informasi pemerintah yang lebih besar ke data dan dokumen pemerintah. Sinergi kedua sisi (*side*) pelayanan publik tersebut diharapkan memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah, koordinasi antar sektor/instansi dalam meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

4. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berorientasi pemanfaatan tata ruang yang inklusif dan berkualitas melalui peningkatan kesadaran Masyarakat, pemanfaatan teknologi dan penegakan hukum.

Upaya mewujudkan profil Kota Salatiga sebagai Kota inklusif, kota yang mampu yang menjamin hak — hak warganya secara setara, khususnya dalam dimensi ketersediaan layanan publik yang nyaman untuk semua. Hal ini memerlukan kualitas tata ruang lingkungan kota sesuai RTRW yang telah disepakati bersama, pengelolaan persampahan, akses air bersih dan sanitasi rumah tangga merata.

5. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan melalui pemerataan dan peningkatan kualitas.

Pembangunan infrastruktur pelayanan publik dasar di Kota Salatiga diarahkan untuk meningkatkan akses rumah tangga pada kawasan hunian yang sehat, air bersih dan akses sanitasi. Sekaligus dalam misi ke 5 ini adalah kebijakan revitalisasi sarana-sarana publik, termasuk rehabilitasi jalan lingkungan kelurahan dan jalan antar kecamatan untuk mobilisasi orang dan barang.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Salatiga untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai milestone pembangunan di Kota Salatiga. Penyusunan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Salatiga Tahun 2027 dilaksanakan dengan mengacu dan memperhatikan : (1) Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029; (2) Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Salatiga yang tertuang pada dokumen RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029; (3) RTRW Kota Salatiga Tahun 2023-2043; (4) Sasaran Pokok RPJPD 2025-2045 Tahap ke-1 (5) Hasil evaluasi kinerja RKPD tahun sebelumnya; dan (6) Prioritas pembangunan Nasional dan prioritas pembangunan Jawa Tengah guna menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga tingkat daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua dari RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Target tahun kedua dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 diupayakan akan tercapai melalui penyusunan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 yang diarahkan pada tahap **“Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup”**. Tahun kedua ini difokuskan pada **“Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul”**.

Dalam upaya pencapaian tema pembangunan Kota Salatiga sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029, maka Tujuan dan Sasaran Pembangunan dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4. 1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Salatiga beserta target kinerja Tahun 2027 berdasarkan hasil capaian tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian	Target	Urusan
				2025	2027	
Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia		Angka Kemiskinan	Persen	4,20	4,30-3,39	
		PDRB Perkapita	Juta Rp		112,68-117,68	
		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai		82,66	
		Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCO2eq		127,239.68	
		Indeks Daya saing Daerah			5,15	
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	86,23	86,85	Pendidikan, Kesehatan, Perpustakaan, Kebudayaan
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,67	3,82-3,52	Kepemudaan dan Olahraga, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Tenaga Kerja
	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,55	6,60-7,60	Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Penanaman Modal, Investasi, Perdagangan, Pariwisata
		Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)	Nilai		94,54	Pangan, Pertanian, Sosial
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	Indeks Pelayanan Publik	Nilai		4,7	Sekretariat Daerah, Ketentraman dan Ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat, Kesbangpol, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Indeks Integritas Nasional	Nilai		80,65	Inspektorat, Kepegawaian, Keuangan
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis	Nilai		3,81	Statistik, Persandian, Komunikasi dan Informatika,

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Capaian	Target	Urusan
				2025	2027	
		Elektronik (SPBE)				Perencanaan, Kearsipan
	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	Indeks Infrastruktur Wilayah	Nilai		66,04	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan, Perhubungan
		Indeks kualitas lingkungan Hidup	Nilai		70,03	Lingkungan Hidup, Trantibunlinmas, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai		53	Penelitian dan Pengembangan

Adapun strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk tahun 2027 adalah sebagaimana tersaji pada tabel ... berikut :

Tabel 4. 2. Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
Mewujudkan Kota Salatiga yang Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	I. Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	I.1. Peningkatan kualitas pendidikan dan literasi masyarakat secara merata	I.1.a Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)	Urusan Pendidikan
			I.1.b Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global	Urusan Pendidikan
			I.1.c Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	Urusan Pendidikan
		I.2. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	I.2.a Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi	Urusan Kesehatan
			I.2.a Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	Urusan Kesehatan
		I.3. Peningkatan kebugaran masyarakat dan Daya Saing Olahraga	I.3.a Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			I.3.b Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga dan pengembangan potensi atlet lokal	Urusan Kepemudaan Dan Olahraga
		I.4. Peningkatan apresiasi, pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah	I.4.a Melestarikan nilai-nilai budaya lokal, pemberdayaan pelaku seni dan budaya, serta pemanfaatan teknologi dan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat identitas dan keberlangsungan budaya daerah	Urusan Kebudayaan
			I.4.b Meningkatkan fasilitas, koleksi dan aksesibilitas museum, serta pembinaan sejarah daerah	Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan Dan Kearsipan
		I.5. Peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	I.5.a Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta kesejahteraan keluarga	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			I.5.b Penguatan pencegahan dan sistem layanan perlindungan terhadap pencegahan kekerasan dan diskriminasi	Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
			I.5.c Meningkatkan kualitas pengendalian penduduk dan keluarga berkualitas	Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
	II. Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	II.1. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi	II.1.a Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	Urusan Penanaman Modal
			II.1.b Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah	Urusan Pariwisata
			II.1.c Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja	Urusan Tenaga Kerja
			II.1.d Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi.	Urusan Perindustrian, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			II.1.e Memastikan pelaku usaha melakukan analisis kajian dampak lingkungan pada kegiatan usaha dan mendorong inovasi teknologi ramah lingkungan dalam mendukung penerapan ekonomi hijau di daerah	Urusan Lingkungan Hidup, Urusan Perijinan
		II.2. Peningkatan pelayanan sosial dan pangan masyarakat yang memenuhi standar untuk hidup sehat, aktif dan produktif	II.2.a Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	Urusan Sosial
			II.2.b Meningkatkan infrastruktur dan teknologi pertanian guna mempercepat hilirisasi produk pertanian yang didukung dengan pemberdayaan kelompok dalam meningkatkan produksi pertanian	Urusan Pertanian, Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			II.2.c Meningkatkan produksi peternakan dan perikanan budidaya lokal didukung pelatihan, teknologi, dan akses terhadap bibit unggul dan akses pasar.	Urusan Pertanian, Urusan Perikanan
		II.3. Pengembangan program upaya lintas sektor dalam pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat serta sinergitas program dalam mengurangi kantong kemiskinan	II.3.a Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan penguatan aktivitas usaha dalam mendukung peningkatan pendapatan	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
			II.3.b Melakukan sinergitas kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin	Urusan Sosial, Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
		II.4. Peningkatan kondusivitas wilayah dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi	II.4.a Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	Urusan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
	III. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	III.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital	III.1.a Meningkatkan kualitas dan budaya kerja ASN yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pelayanan masyarakat	Urusan Kepegawaian
			III.1.b Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	Urusan Keuangan
			III.1.C Meningkatkan sistem pengelolaan kemananan informasi daerah	Urusan Komunikasi Dan Informatika
		III.2 Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima	III.2.a Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Urusan Sekretariat Daerah
			III.2.b Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			III.2.c Pengembangan aplikasi layanan publik berbasis web dan mobile serta pengembangan konten.	Urusan Komunikasi Dan Informatika
			III.2.d Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	Urusan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
			III.2.e Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya.	Urusan Kecamatan
			III.2.f Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah yang didukung pemanfaatan teknologi informasi	Urusan Kearsipan
			III.2.g Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	Urusan Sekretariat Dewan
	IV. Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	IV. 1. Meningkatnya pembangunan infrastruktur daerah yang merata	IV.1.a Meningkatkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar (air minum, sanitasi dan rumah layak) bagi masyarakat.	Urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
			IV.1.b Mengembangkan sistem manajemen transportasi cerdas guna meningkatkan efisiensi, keselamatan dan kenyamanan sistem transportasi	Urusan Perhubungan
		IV. 2. Meningkatnya kualitas lingkungan perkotaan yang didukung dengan masyarakat yang adaptif dan inovatif	IV.2.a Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	Urusan Lingkungan Hidup

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Urusan
			IV.2.b Meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi antar instansi terkait dalam pencegahan dan penanggulangan bencana maupun peristiwa kebakaran	Urusan Kebencanaan
			IV.2.c Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat.	Urusan Kelitbangan

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman, perluasan cakupan, dan lanjutan prioritas pembangunan tahun sebelumnya serta merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan penuntasan permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang relevan, melalui kolaborasi semua Perangkat Daerah dan stakeholder.

RKPD tahun 2027 merupakan penjabaran tahun kedua RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029. Penyusunan RKPD tahun 2027 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD Provinsi Jawa Tengah tahun 2027. Penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kota Salatiga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-kriteria antara lain :

- a. Kesesuaian dengan dokumen perencanaan;
- b. Urgensi penanganan permasalahan pembangunan; dan
- c. Kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan jangka menengah yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan perencanaan tahunan di yang menjadi tahap pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025, evaluasi kebijakan tahun 2025, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, disosialisasikan bahwa tema RKP Tahun 2027 adalah **"penguatan fondasi transformasi ekonomi melalui implementasi proyek strategis nasional"**.

Sasaran pembangunan tahun 2027 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Target indikator sasaran pembangunan tahun 2027 ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 3. Target Indikator sasaran pembangunan tahun 2027

No	Indikator	Satuan	Target 2027
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,6 – 6,1
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	
3.	Tingkat Kemiskinan	%	
4.	Rasio Gini	Nilai	0,377 – 0,380
5.	Indeks Modal Manusia	Nilai	
6.	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	
7.	Gross National Income (GNI) per Kapita	USD	6.470
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2027, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut :

1. **Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial**

Untuk mengawal keberhasilan proses Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, telah dirumuskan sasaran pembangunan yaitu terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia dengan indikator Indeks Demokrasi Indonesia dan Indeks Hak Asasi Manusia.

Sedangkan Arah Kebijakan yang dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan tersebut adalah :

- a. Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional;
- b. Penguatan Komunikasi Publik dan Media;
- c. Penguatan Lembaga Demokrasi;
- d. Penguatan Kesenjangan Masyarakat Sipil

2. **Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru**

Untuk mendukung prioritas pembangunan ke – 2 tersebut telah dirumuskan dalam 6 (enam) sasaran pembangunan, sebagi berikut :

- a. Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan, dengan indikator :
 - 1) *Asia Power Index (Military Capability)*
 - 2) *Asia Power Index (Diplomatic Influence)*

- 3) Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
- 4) *Global Cybersecurity Index*
- 5) Indeks Keamanan Laut Nasional

Arah Kebijakan :

- 1) Pembangunan postur pertahanan
 - 2) Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
 - 3) Komponen cadangan dan komponen pendukung
 - 4) Intelijen dan keamanan dalam negeri
 - 5) Keamanan siber, sandi dan sinyal
 - 6) Keamanan laut dan hidro-oseanografi
 - 7) Keamanan dan ketertiban masyarakat
 - 8) Profesionalisme pelayanan kepolisian
 - 9) Diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi
- b. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*), dengan indikator :
- 1) Indeks Ketahanan Pangan;
 - 2) Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
- Arah Kebijakan :
- 1) Swasembada pangan
- c. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*), dengan indikator :
- 1) Indeks Ketahanan Energi
 - 2) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)
- Arah Kebijakan :
- 1) Swasembada energi
- d. Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (*FEW Nexus*), dengan indikator :
- 1) Indeks Ketahanan Air Nasional
 - 2) Kapasitas tampungan air (m³/kapita)
 - 3) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
 - 4) Rumah tangga dengan akses sanitasi Aman (%)
- Arah Kebijakan :
- 1) Swasembada air
- e. Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan, dengan indikator :
- 1) Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)

- 2) *Indonesia Blue economy Index (IBEI)*
- 3) Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)

Arah Kebijakan :

- 1) Ekonomi syariah
- 2) Ekonomi digital
- 3) Pengembangan ekonomi biru sebagai sumber pertumbuhan baru

f. Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau, dengan indikator :

- 1) Indeks Ekonomi Hijau
- 2) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)
- 3) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)
- 4) Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)
- 5) Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
- 6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
- 7) Indeks Kualitas Udara
- 8) Indeks Kualitas Air
- 9) Indeks Kualitas Lahan

Arah Kebijakan :

- 1) Ekosistem ekonomi sirkular
- 2) Pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik
- 3) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
- 4) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
- 5) Pembangunan rendah karbon
- 6) Pekerjaan hijau/green jobs
- 7) Pengelolaan hutan lestari

Selain intervensi kebijakan tersebut, terdapat juga dukungan program yang menjadi penekanan dan memiliki daya ungkit tinggi. Dalam merespons hal tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 2 didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat: Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.

3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi

Sasaran pembangunan untuk prioritas nasional adalah sebagai berikut :

a. Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan, dengan indikator:

- 1) Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimodal
- 2) Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik

b. Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB

- 1) Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)
- 2) Aset Perbankan/PDB (%)
- 3) Aset Dana Pensiun/PDB (%)
- 4) Aset Asuransi/PDB (%)
- 5) Kapitalisasi Pasar Modal/ PDB (%)
- 6) Total Kredit/PDB (%)
- 7) Inklusi Keuangan (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Pendalaman Sektor Keuangan
- c. Meningkatkan Lapangan Pekerjaan yang Berkualitas
- 1) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)
 - 2) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)
 - 3) Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)
 - 4) Rasio Kewirausahaan (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
- d. Meningkatkan Nilai Tambah Pariwisata
- 1) Rasio PDB Pariwisata (%)
 - 2) Devisa Pariwisata (Miliar USD)

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
- e. Meningkatkan Proporsi PDB Ekonomi Kreatif
- 1) Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual

4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Terdapat lima sasaran pembangunan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional 4 sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata, dengan indikator:
 - 1) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)
 - 2) Harapan lama sekolah (tahun)
 - 3) Rata-rata nilai PISA
 - 4) Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional
 - 5) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)
 - 6) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)
 - 7) Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)

Arah Kebijakan :

- 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
 - 2) Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran
 - 3) Pemenuhan layanan pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan yang berkualitas
 - 4) Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
 - 5) Penguatan sistem tata kelola pendidikan
 - 6) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan *Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)*
- b. Terwujudnya Kesehatan untuk Semua, dengan indikator:
- 1) Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
 - 2) Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate*) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15-49 tahun)
 - 3) Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
 - 4) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
 - 5) Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)
 - 6) Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat
 - 2) Pemberian makan gratis untuk pemenuhan gizi
 - 3) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
 - 4) Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan
 - 5) Penguatan pelayanan kesehatan dan tata kelola
- c. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif, dengan indikator:
- 1) Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga
 - 2) Indeks Perlindungan Anak
 - 3) Indeks Pembangunan Pemuda
 - 4) Indeks ketimpangan Gender
 - 5) Indeks Pembangunan Gender
 - 6) Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)
 - 7) Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan Ketangguhan keluarga
- 2) Peningkatan kualitas perlindungan anak
- 3) Peningkatan kualitas pemuda
- 4) Peningkatan Kesenjangan Gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
- 5) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia

d. Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja, dengan indikator:

- 1) Peringkat Indeks Inovasi Global
- 2) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
- 3) Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
- 4) Tingkat Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
- 2) Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
- 3) Pengembangan Manajemen Talenta Nasional

e. Meningkatkan Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat, dengan indikator:

- 1) Jumlah perolehan medali emas pada *Olimpic Games*
- 2) Jumlah perolehan medali emas pada *Paralimpic Games*
- 3) Peringkat pada *Asian Games*
- 4) Peringkat pada *Asian Paragames*
- 5) Peringkat pada *SEA Games*
- 6) Peringkat pada *ASEAN Paragames*
- 7) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan pembinaan prestasi olahraga
- 2) Pengembangan pembudayaan olahraga yang inklusif

Berdasarkan perspektif siklus hidup manusia, dimensi kesehatan dan pendidikan merupakan kunci tumbuh kembang dan produktivitas manusia. Dalam merespons isu tersebut, pencapaian Prioritas Nasional 4 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat:

- 1) Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pcsantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil;
- 2) Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten; dan
- 3) Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di sētiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang pcrlu renovasi.

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas berupa Pemberian Makan Bergizi untuk Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

Terdapat 2 (dua) sasaran utama pembangunan yang difokuskan untuk melaksanakan amanat Prioritas Nasional sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan, dengan indikator:

1) Rasio PDB Industri Pengolahan (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampi, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor
- 2) Aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi

- b. Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global, dengan indikator:

1) Biaya Logistik (% PDB)

2) Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)

3) Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)

Arah Kebijakan:

- 1) Optimalisasi *backbone* integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
- 2) Peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
- 3) Peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
- 4) Optimalisasi investasi strategis negara

6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 6 adalah sebagai berikut :

- a. Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan, dengan indikator:

1) Tingkat kemiskinan (%)

2) Tingkat kemiskinan ekstrem (%)

3) Proporsi penduduk kelas menengah (%)

4) Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)

5) Penyandang disabilitas yang berkerja di sektor formal (%)

Arah Kebijakan

- 1) Sistem pendataan sosial ekonomi terintegrasi
- 2) Perlindungan sosial adaptif dan inklusif
- 3) Peningkatan akses lapangan kerja dan penumbuhan usaha berkelanjutan dan inovatif

- b. Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan

1) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Percepatan penyediaan perumahan dan permukiman

- c. Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan

- 1) Persentase desa mandiri (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan kemandirian perdesaan yang berkelanjutan
- d. Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- 1) Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)
 - 2) Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan Perkotaan berkelanjutan
- 2) Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Dalam memastikan keberhasilan pembangunan dari desa dan dari bawah dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan pembangunan, serta pengentasan kemiskinan, maka dirumuskan Program Hasil Terbaik Cepat yang memiliki daya ungkit terhadap keberhasilan pencapaian sasaran Prioritas Nasional 6 yaitu :

- (1) Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut dan
- (2) Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk yang Membutuhkan, terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui Kegiatan Prioritas Melanjutkan dan Menambahkan Program Kartu-Kartu Kesejahteraan Sosial serta Kartu Usaha untuk Menghilangkan Kemiskinan Absolut.

7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 7 adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, tidak memihak serta sistem politik yang fungsional, dengan indikator:
 - 1) Indeks Pembangunan Hukum
 - 2) Indeks Persepsi Korupsi
 - 3) Indeks Materi Hukum
 - 4) Indeks Integritas Nasional
 - 5) Indeks Integritas Partai Politik

Arah Kebijakan:

- 1) Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilo
- 2) Reformasi Hukum
- 3) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
- 4) Penguatan Kelembagaan, Pelayanan, dan Penegakan Hukum
- 5) Transformasi Sistem Penuntutan dan *Advocaat Generaal*

b. Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani, dengan indikator:

- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Nasional
- 2) Indeks Pelayanan Publik
- 3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- 4) Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri

Arah Kebijakan:

- 1) Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
- 2) Pemerintah Digital
- 3) Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
- 4) Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
- 5) Perlindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk Pekerja Migran Indonesia

c. Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba, dengan indikator:

- 1) Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika

Arah Kebijakan:

- 1) Pencegahan, Pemberantasan Penyelenggaraan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

d. Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agem pembangunan, dengan indikator:

- 1) *Return on Asset* (ROA) BUMN

Arah Kebijakan:

- 1) Peningkatan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara

e. Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, dengan indikator:

- 1) Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB
- 2) Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB

Arah Kebijakan:

- 1) Optimalisasi Pendapatan Negara
- 2) Optimalisasi Belanja Negara
- 3) Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan

f. Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dengan indikator:

- 1) Tingkat Inflasi

Arah Kebijakan:

- 1) Pengendalian Inflasi

Pencapaian Prioritas Nasional 7 juga didukung oleh Program Hasil Terbaik Cepat:

- (1) menaikkan gaji aparatur sipil negara (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), Tentara Nasional Indonesia/ Kepolisian Republik Indonesia, dan pejabat negara; dan
- (2) mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto ke 23 persen.

Implementasi Program Hasil Terbaik Cepat dilakukan melalui kegiatan prioritas Peningkatan Kesejahteraan ASN Melalui Penerapan Konsep Total Reward Berbasis Kinerja ASN

8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Sasaran pembangunan untuk Prioritas Nasional 8 adalah sebagai berikut :

- a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju, dengan indikator:

- 1) Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)
- 2) Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
- 3) Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Arah Kebijakan:

- 1) Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
- 2) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa

- b. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim, dengan indikator:

- 1) Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)

Arah Kebijakan:

- 1) Pembangunan berketahanan iklim
- 2) Pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna

4.2.2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029, tahun 2027 merupakan tahap **“Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah”**, dengan fokus pada tema pembangunan yaitu **“Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi”**. Strategi yang dilakukan dalam rangka mewujudkan tema pembangunan daerah tersebut antara lain :

1. pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan berkelanjutan;
2. penguatan promosi pariwisata berbasis digital;
3. peningkatan kualitas destinasi wisata berbasis klaster dengan perbaikan prasarana sarana destinasi wisata;

4. penguatan diversifikasi daya tarik pariwisata sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah seperti pemanfaatan keragaman sumber daya alam, budaya, kreativitas, dan olahraga berbasis digital;
5. peningkatan infrastruktur konektivitas antar destinasi wisata;
6. penguatan integrasi antar destinasi wisata;
7. penguatan kapasitas SDM pelaku pariwisata termasuk pelaku UMKM pariwisata;
8. penguatan fasilitasi kemitraan untuk pengembangan destinasi pariwisata;
9. city beautification dalam rangka membangun citra, karakter, dan dignity kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan;
10. pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages) pada kawasan megapolitan/metropolitan (urban tourism), serta kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Magelang- Yogyakarta-Surakarta;
11. penguatan ekonomi dan keuangan syariah melalui penguatan halal value chain, penguatan keuangan syariah, penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan penguatan ekonomi digital;
12. penguatan kelembagaan pariwisata dan ekonomi syariah agar lebih efektif;
13. peningkatan pemenuhan sarana prasarana pendukung pariwisata desa;
14. peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan;
15. peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah;
16. peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan;
17. penguatan kapasitas dan kompetensi guru serta siswa SMA, SLB dan SMK bidang keahlian layanan pariwisata, seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, dan perbankan syariah termasuk ekonomi kreatif dan kewirausahaan halal;
18. revitalisasi kurikulum SMK seni, kriya, kuliner, tata boga, busana, perhotelan, layanan pariwisata dan perbankan syariah selaras dengan kebutuhan usaha dan industri;
19. penguatan integrasi tema pariwisata, budaya, ekonomi kreatif dan syariah dalam kurikulum SMA dan SLB berbasis project integratif dan lintas;
20. penguatan kemitraan DUDI melalui sinkronisasi kompetensi dan penyusunan Memorandum of Agreement (MoA) untuk kegiatan spesifik antara lain dengan perusahaan atau hotel syariah, restoran halal, biro perjalanan haji-umrah, bank syariah, UMKM kriya lokal, desa wisata halal, serta perguruan tinggi termasuk dukungan program magang dan sertifikasi halal;
21. peningkatan upaya pelestarian dan pemanfaatan karya budaya dan cagar budaya sebagai salah satu daya tarik wisata melalui pemetaan karya budaya dan cagar budaya potensial, pemeliharaan prasarana sarana kebudayaan, peningkatan upaya diplomasi budaya tingkat

- nasional/internasional, serta penguatan SDM/lembaga/komunitas kebudayaan sebagai agen diplomasi budaya;
22. penguatan event olahraga pariwisata ramah lingkungan dan berkelanjutan;
 23. perluasan literasi berwawasan lingkungan hidup berkelanjutan dan literasi ekonomi berbasis syariah melalui pelibatan pemangku kepentingan;
 24. mengoptimalkan fungsi kearsipan dalam melestarikan memori kolektif berbasis kelestarian lingkungan hidup berkelanjutan;
 25. peningkatan partisipasi pemuda dalam bidang pariwisata, wisata kreatif, membangun startup berbasis syariah.

Selanjutnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada tahap kedua **“Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah”** ini diarahkan pada prioritas daerah dengan fokus strategi sebagai berikut:

PP1. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Berintegritas dan Kolaboratif serta Stabilitas Pembangunan Daerah

- SP1.1 peningkatan kinerja pelayanan publik berteknologi tinggi dan integratif;
- SP1.2 peningkatan kapabilitas teknologi penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi guna mendukung transformasi digital
- SP1.3 pengembangan kualitas perencanaan berbasis data terintegrasi, riset dan risiko serta berorientasi kinerja
- SP1.4 peningkatan kinerja tata kelola data terintegrasi berbasis sistem informasi
- SP1.5 pengembangan ekosistem riset dan inovasi, integrasi IPTEK dalam sektor-sektor prioritas daerah, peningkatan hilirisasi hasil riset, penguatan kolaborasidalam pengembangan riset dan inovasi;
- SP1.6 peningkatan kualitas manajemen ASN dengan pengembangan manajemen kinerja dan talenta disertai reward and punishment yang berkeadilan
- SP1.7 pengembangan kompetensi berbasis analisis kesenjangan kinerja dan kompetensi disertai dengan penguatan nilai integritas
- SP1.8 peningkatan nilai-nilai anti korupsi dan budaya integritas penyelenggara pemerintahan
- SP1.9 peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian berbasis risiko, serta integrasi penguatan integritas dan pencegahan korupsi
- SP1.10 peningkatan kualitas analisis evaluasi dan pengawasan produk hukum, jaringan dokumentasi hukum, serta kapasitas penyusunan produk hukum
- SP1.11 peningkatan layanan bantuan hukum dan peningkatan fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum
- SP1.12 peningkatan kualitas pengelolaan digitalisasi manajemen kearsipan
- SP1.13 penguatan kelembagaan agar lebih efektif
- SP1.14 peningkatan sinergi pelaksanaan reforma agraria
- SP1.15 penguatan koordinasi administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta peningkatan pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam perencanaan pembangunan daerah
- SP1.16 peningkatan kapasitas SDM, penguatan pemetaan daerah rawan, penegakan produk hukum daerah serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga trantibum
- SP1.17 peningkatan pemenuhan hak asasi manusia bagi kelompok rentan terkait layanan dasar serta penjaminan kesetaraan dan kebebasan sipil

- SP1.18 pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat
- SP1.19 peningkatan integritas dan peran partai politik dalam pemajuan demokrasi
- SP1.20 pembentukan jejaring global dalam peningkatan perekonomian dan ketahanan regional
- SP1.21 penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila
- SP1.22 penguatan mitigasi ekstremisme, terorisme, radikalisme, dan kriminalisme
- SP1.23 peningkatan kapasitas fiskal daerah dengan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah dan peningkatan kualitas belanja daerah
- SP1.24 penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah
- SP1.25 sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
- SP1.26 perluasan pemanfaatan layanan jasa keuangan masyarakat untuk menumbuhkan perekonomian yang merata dan berkualitas
- PP2. Peningkatan Perekonomian Yang Berdaya Saing, Inklusif, dan Berbasis Lingkungan
 - SP2.1 peningkatan produktivitas sektor industri pengolahan dan pemberdayaan pelaku industri lokal
 - SP2.2 peningkatan kontribusi sektor perdagangan dengan efisiensi distribusi dan stabilitas harga
 - SP2.3 peningkatan kontribusi sektor pariwisata pada PDRB dan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis inovasi
 - SP2.4 peningkatan daya saing koperasi dan usaha kecil menengah (UKM)
 - SP2.5 peningkatan produksi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan
 - SP2.6 peningkatan pembinaan pertambangan dengan penerapan *Good Mining Practice*
 - SP2.7 peningkatan pertumbuhan penanaman modal
 - SP2.8 pengembangan ekosistem halal, industri halal dan penguatan keuangan syariah
 - SP2.9 peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa, dan penumpang, serta keterhubungan antar daerah (utamanya konektivitas antar destinasi wisata unggulan) dan kewilayahan
 - SP2.10 peningkatan pengembangan perekonomian desa berbasis potensi pariwisata berkelanjutan
 - SP2.11 peningkatan peran BUMDes dan lembaga ekonomi desa lainnya dalam mendukung pariwisata berkelanjutan dan ekonomi syariah
 - SP2.12 peningkatan kerja sama pengembangan potensi pariwisata desa dan peningkatan pengembangan kawasan perdesaan
 - SP2.13 peningkatan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan termasuk integrasi kegiatan posyandu untuk mendukung SPM dan penguatan peran lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan serta lembaga adat desa
 - SP2.14 peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa
 - SP2.15 peningkatan upaya pengendalian inflasi daerah
 - SP2.16 pemulihan ekosistem dan pelestarian keanekaragaman hayati
 - SP2.17 peningkatan produktivitas komoditi sumber daya alam dan jasa lingkungan dengan prinsip keberlanjutan
 - SP2.18 peningkatan penerapan inisiatif skema insentif/disinsentif bagi pelaku usaha serta apresiasi untuk masyarakat yang menerapkan praktik berkelanjutan

- SP2.19 peningkatan upaya dan inisiatif konservasi berbasis masyarakat dengan pendekatan keterpaduan/ integrasi pengelolaan lanskap darat dan laut
- SP2.20 penguatan infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air guna meningkatkan ketersediaan air baku
- SP2.21 peningkatan pengelolaan air tanah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
- SP2.22 inisiasi penerapan pendanaan hijau untuk mendukung kelestarian lingkungan hidup
- SP2.23 peningkatan ketahanan energi berbasis potensi lokal (utamanya mendukung kawasan pariwisata)
- SP2.24 akselerasi dan sinergi antar pemerintah, swasta dan masyarakat dalam implementasi kebijakan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim
- SP2.25 peningkatan pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir yang mencakup seluruh rantai layanan yang disertai dengan penguatan serta penegakan hukum dan peraturan
- SP2.26 peningkatan kualitas air melalui pengelolaan limbah industri UMKM
- SP2.27 peningkatan infrastruktur sanitasi air limbah domestik
- SP2.28 peningkatan akses air minum yang dikelola secara aman dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya air
- SP2.29 peningkatan aksesibilitas dan kualitas kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan
- SP2.30 penguatan infrastruktur hijau dan penerapan zero waste tourism dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan
- SP2.31 peningkatan integrasi rencana tata ruang dan rencana sektoral melalui penyusunan dokumen Sinkronisasi Program Penataan Ruang (SPPR)
- SP2.32 penguatan kelembagaan dan kapasitas institusi penanggulangan bencana
- SP2.33 peningkatan kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat bencana
- SP2.34 pemberdayaan sosial dan ekonomi untuk membangun ketahanan masyarakat
- SP2.35 pengelolaan data dan informasi untuk pengambilan keputusan
- SP2.36 pengembangan literasi kebencanaan, pemberdayaan masyarakat, dan inklusi sosial dalam penanggulangan bencana
- SP2.37 perluasan jejaring kemitraan serta pendanaan alternatif
- SP2.38 pengembangan riset dan inovasi kebencanaan serta pemanfaatan teknologi
- PP3. Peningkatan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing dan Berkarakter
 - SP3.1 peningkatan kompetensi siswa SMK, keahlian guru SMK berbasis industri serta revitalisasi alat praktik kejuruan
 - SP3.2 peningkatan pemerataan akses layanan pendidikan secara bertahap dengan penyediaan layanan pendidikan pada wilayah blankspot, penguatan kerja sama pemerintah-swasta, serta evaluasi strategi penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
 - SP3.3 peningkatan mutu pendidikan berbasis literasi-numerasi dan digital, STEAM, kualitas pengajaran guru dan pembelajaran siswa, serta pengelolaan SMK Boarding dan Semi Boarding
 - SP3.4 peningkatan pendidikan karakter melalui penanaman nilai agama dan budaya, implementasi kurikulum yang adaptif serta penguatan sekolah inklusi
 - SP3.5 penguatan tata kelola pendidikan berorientasi kepemimpinan instruksional dan berbasis telaah/analisis;
 - SP3.6 pengembangan prasarana sarana layanan kesehatan primer dan lanjutan

- SP3.7 pengembangan kompetensi SDM kesehatan untuk mendukung layanan rujukan berbasis kompetensi
- SP3.8 pengembangan keterampilan kader kesehatan
- SP3.9 peningkatan cakupan kepesertaan aktif
- SP3.10 pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan terintegrasi;
- SP3.11 pemerataan sumber daya kesehatan daerah serta tenaga cadangan kesehatan
- SP3.12 peningkatan dan penguatan literasi masyarakat di bidang kesehatan
- SP3.13 peningkatan jejaring pelayanan dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat daerah dan nasional
- SP3.14 peningkatan kualitas data dan informasi kebudayaan
- SP3.15 peningkatan pengembangan objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang berkelanjutan
- SP3.16 peningkatan kualitas SDM dan lembaga kebudayaan untuk mewujudkan talenta nasional seni budaya
- SP3.17 pengembangan kerja sama lintas sektor dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan
- SP3.18 peningkatan kualitas prasarana sarana kebudayaan
- SP3.19 peningkatan literasi masyarakat dalam berolahraga, peningkatan penyadaran masyarakat dalam berolahraga, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM keolahragaan, pembinaan atlet potensial, pembinaan cabang olahraga unggulan, peningkatan prasarana sarana olahraga masyarakat, peningkatan prasarana sarana olahraga cabor unggulan
- SP3.20 perluasan literasi melalui pelibatan pemangku kepentingan
- SP3.21 mengoptimalkan akuisisi arsip secara tematis
- SP3.22 peningkatan partisipasi pemuda melalui wirausaha muda kreatif dan inovatif
- SP3.23 peningkatan pemerataan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
- SP3.24 peningkatan pembangunan berbasis gender
- SP3.25 peningkatan ketahanan keluarga
- SP3.26 pelatihan peningkatan produktivitas, sertifikasi kompetensi dan perluasan kemitraan dengan dunia industri dan dunia usaha

Target indikator makro pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 yang akan dicapai antara lain meliputi :

- 1) Angka Kemiskinan sebesar 8,51 – 8,17%;
- 2) Indeks Modal Manusia sebesar 0,63;
- 3) Pertumbuhan Ekonomi antara 5,30 – 7,00%;
- 4) Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,65– 4,08 %;
- 5) Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 92,50;
- 6) Indeks Integritas Nasional sebesar 82,25;
- 7) Indeks Demokrasi Indonesia sebesar 86,80 – 90,22;
- 8) Otonomi Fiskal Daerah sebesar 66,80%
- 9) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 75,78;
- 10) Inflasi pada angka 1,5 – 3,5%;
- 11) PDRB per kapita sebesar 56,0 – 59,8 juta rupiah.

Keterangan :

*Perubahan metode perhitungan IKLH berdasarkan Surat Sekditjen PPKL KLHK Nomor S.135/SETPPKL/PEHKT/PKL.1.2/B/02/2024 yang berlaku mulai tahun 2025

4.2.3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027

Tahapan pelaksanaan pembangunan merupakan sebuah mekanisme pemilihan fokus dan tema pembangunan pada masing-masing tahun perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Pembangunan Kota Salatiga tahun 2027 berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 adalah pada tahap **“Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup”**. Kebijakan tahun 2027 diarahkan pada **“pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul”** yang difokuskan pada meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah; mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional; meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan; meningkatkan kualitas SDM dan fasilitasi kesehatan; serta meningkatkan kualitas dan pemerataan Pendidikan.

Memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta berdasarkan tahapan RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 maka pada tahun 2027 Pembangunan Kota Salatiga diprioritaskan pada :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter, dengan arah kebijakan pada :
 - a. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga
 - c. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular
 - d. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan
2. Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, dengan arah kebijakan pada:
 - a. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif
 - b. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja

- c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor
 - d. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS
 - e. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan
 - f. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat
3. Pengembangan Pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, dengan arah kebijakan pada:
- a. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari
 - b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang
 - c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat
 - d. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum
 - e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat
 - f. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya
 - g. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien
4. Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan pada:
- a. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat
 - b. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat
5. Pengembangan infrastruktur kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah, dengan arah kebijakan pada:
- a. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat

- b. Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi

Sasaran pembangunan pada tahun 2027 berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Salatiga Tahun 2025-2029 dan hasil rapat koordinasi teknis perencanaan pembangunan (Rakortekbang) Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Angka Kemiskinan antara 4,30% - 3,39%
2. Tingkat Pengangguran Terbuka antara 3,82% - 3,52%
3. Pertumbuhan Ekonomi antara 6,60% - 7,60%
4. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 86,85

Prioritas pembangunan Kota salatiga tahun 2027 yang disusun berdasarkan RPJMD 2025-2029 juga memperhatikan :

1. Prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi.
Persandingan prioritas pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah serta prioritas pembangunan Kota Salatiga sebagaimana dalam tabel 4.3;
2. Upaya penanganan permasalahan dan isu strategis
Sinkronisasi permasalahan, isu strategis dan program prioritas sebagaimana tersaji dalam tabel 4.4;
3. Upaya mendukung kebijakan Nasional antara lain Penerapan SPM, Pembangunan Berkelanjutan, penanggulangan kemiskinan dan Stunting yang akan dilaksanakan tahun 2027 .

Tabel 4. 4. Keterkaitan Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Tengah, dan Kota Salatiga Tahun 2027

TEMA RKP		Provinsi		Kota Salatiga	
Berdasarkan Teknokratik RPJMN	Berdasarkan Penajaman	Tahapan Pembangunan	Fokus Tematik	Tahapan Pembangunan	Fokus Tematik
Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi melalui Implementasi Proyek Strategis Nasional		Peningkatan Kinerja Pembangunan Daerah	Mengembangkan Pariwisata Berkelanjutan dan Ekonomi Syariah Sebagai Tulang Punggung Pertumbuhan Ekonomi	Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan Kepariwisata dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul

Pada tahun 2027 Kota Salatiga mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk Provinsi Jawa Tengah dengan dukungan arah kebijakan sebagai berikut :

- (1) Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 tahun pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah), antara lain melalui:
 - o Perluasan layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - o Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah dan madrasah yang berkualitas;
 - o Menyediakan sarana madrasah untuk menunjang pembelajaran;
 - o Penyaluran bantuan pendidikan yang tepat sasaran;
 - o Pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah;
 - o Revitalisasi pendidikan nonformal;
 - o Penguatan pengelolaan dan akselerasi penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas.
- (2) Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, antara lain melalui:
 - o Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi usia sekolah, usia produktif, dan lansia serta KB dan kespro;
 - o Pendayagunaan dokter spesialis.
 - o Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis melalui:
 - o Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis;
 - o Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis;
 - o Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu
 - o Pemeriksaan kesehatan gratis.
- (3) Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, antara lain melalui:
 - o Pengendalian penyakit tidak menular dan peningkatan upaya kesehatan jiwa;
 - o Penyehatan lingkungan;
 - o Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan gratis;
 - o Penguatan surveilans, pengendalian KLB/wabah dan penanganan bencana;
 - o Pemenuhan sediaan farmasi dan pengendalian resistensi antimikroba;
 - o Penguatan sistem pengawasan pangan, sediaan farmasi.
- (4) Penuntasan TBC melalui:
 - o Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT);
 - o Menanggulangi TB di tempat kerja;
 - o Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile;
 - o Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat.
- (5) Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Kab/Kota melalui:
 - o Meningkatkan kapasitas sarana, prasarana dan alat kesehatan serta ketersediaan tenaga kesehatan sesuai standar di RS Daerah;
 - o Mengembangkan layanan unggulan kanker, jantung, stroke, uronefrologi, dan kesehatan ibu anak;
 - o Pengadaan peralatan Kesehatan dan pendukungnya untuk Rumah Sakit (SIHREN) (LR - 11).
- (6) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, melalui:
 - o Peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan;
 - o Penguatan kapasitas dan kemandirian, serta peningkatan kepemimpinan perempuan dalam pengambilan keputusan;
 - o Peningkatan partisipasi aktif perempuan di ekonomi dan ketenagakerjaan;
 - o Pemenuhan dan perlindungan hak perempuan bebas dari kekerasan;
 - o Penguatan tata kelola dan kelembagaan PUG dalam proses pembangunan.
- (7) Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, antara lain melalui:
 - o Penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia;
 - o Penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam proses pembangunan
- (8) Reformasi Pengelolaan Sampah Terintegrasi dari Hulu ke Hilir, antara lain melalui:
 - o Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan;

- Peningkatan pengumpulan dan pengolahan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR.
- (9) Percepatan transisi energi menuju emisi karbon yang lebih rendah, melalui:
- Pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan (PLTM);
 - Pembangunan infrastruktur jaringan transmisi dan gardu induk;
 - Penerapan jaringan cerdas (smart grid) untuk memaksimalkan efisiensi dan pemantauan konsumsi energi;
 - Adopsi teknologi penyimpanan energi untuk menjaga stabilitas pasokan listrik;
 - Penerapan Internet of Things (IoT) di sektor energi guna meningkatkan keterhubungan dan analitik data secara real-time;
 - Perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan;
 - Pembangunan infrastruktur stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU);
 - Percepatan konversi BBM ke BBG.
- (10) Percepatan transformasi digital, antara lain melalui:
- Perluasan infrastruktur digital;
 - Peningkatan kapasitas SDM digital dan literasi digital;
 - Pembangunan jaringan broadband hingga ke pelosok.
- (11) Pelestarian dan pemajuan kebudayaan di Jawa Tengah, antara lain melalui:
- Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan;
 - Pelestarian Cagar Budaya, ODCB, dan OPK;
 - Event film, musik, dan seni;
 - Peningkatan kompetensi SDM kebudayaan;
 - Pengembangan pariwisata berbasis cagar budaya dan/atau objek pemajuan kebudayaan;
 - Penguatan industri kreatif berbasis seni dan budaya;
 - Pelindungan dan pelestarian warisan budaya;
 - Jaminan hak kebudayaan, ekspresi budaya, dan pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- (12) Pengelolaan hutan secara lestari melalui:
- Peningkatan produktivitas hasil kehutanan;
 - Pengembangan produk melalui agroforestri;
 - Pengembangan kapasitas pengelola kawasan;
 - Penguatan kelompok perhutanan sosial, dan perlindungan serta pengamanan.
- (13) Penguatan ekonomi syariah melalui:
- Pengembangan Industri dan UMKM Halal;
 - Peningkatan Ekspor Halal dan Kerjasama Ekonomi Syariah Internasional;
 - Penguatan Ekosistem Halal;
 - Penguatan Keuangan Syariah;
 - Penguatan Dana Sosial Syariah.
- (14) Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi, antara lain melalui:
- Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi;
 - Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif;
 - Pengembangan kewirausahaan.
 - Peningkatan kapasitas dan pengembangan infrastruktur SDM transportasi;
 - Irigasi Perpompaan (QW);
 - Sarana Sistem Rantai Dingin Hasil KP;
 - Peserta Pelatihan Vokasi Bidang Industri dan Jasa;
 - Kawasan Bawang Merah;
 - Kawasan Aneka Cabai;
 - Ternak Ruminansia Perah;
 - Pengembangan kawasan Perkebunan dengan peningkatan produksi dan produktivitas mendukung hilirisasi komoditas perkebunan;
 - Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat;
 - Penyusunan Materi Teknis dan Perpres RTR Nasional;
- (15) Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) melalui:
- Mendampingi perusahaan pers dalam pengembangan kapasitas pengelolaan perusahaan pers;
 - Menyelesaikan pengaduan masyarakat atas kasus pers;
 - Memfasilitasi uji kompetensi wartawan;

- Melaksanakan pelatihan bidang jurnalistik;
 - Melaksanakan pelatihan SDM bidang penyiaran.
- (16) Internalisasi HAM untuk Kebijakan Humanis, Inklusif dan Berperspektif Gender melalui:
- Pemajuan kerangka regulasi dan kolaborasi untuk mendorong Peran dan Kepemimpinan Perempuan dalam menjaga keberagaman dan pemenuhan HAM perempuan;
 - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pemerintah daerah melalui penilaian HAM;
 - Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi K/L melalui penilaian HAM;
 - Pendidikan HAM bagi K/L/D.
- (17) Penguatan Ekosistem Aplikasi dan Gim melalui:
- Indonesia Game Academy;
 - Fasilitasi Akses Pendanaan dan Pembiayaan Industri Gim.
- (18) Pencegahan tindak pidana korupsi melalui:
- Roadmap penguatan sistem antikorupsi;
 - Pemenuhan kewajiban Indonesia untuk akses Konversi Anti-Suap (OECD);
 - Integrasi pencegahan korupsi di K/L dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).
- (19) Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk melalui:
- Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha;
 - Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM;
 - Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal;
 - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria;
 - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.

Selain itu, Kota Salatiga melakukan dukungan dan penyelarasan dengan 136 program prioritas Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya termasuk 35 program delegatif, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 4. 5. Dukungan Kegiatan Kota Salatiga terhadap Program Prioritas Delegasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)	Menerbitkan SK Wali Kota yang mengatur Penggunaan Dana Kelurahan untuk Pemberdayaan Masyarakat
2	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional	Renovasi Lintasan Sintetik Atletik Stadion Kridanggo KOTA SALATIGA "Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota : - Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha - Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru"
3	Pelatihan dan Pendidikan Anti Korupsi berbasis ISO 37001 untuk ASN dan Penyelenggara Pemerintah Desa bekerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, OMBUDSMAN, Kepolisian, Kejaksaan, BPK & KPK	Peningkatan kapasitas APIP dengan penyediaan anggaran 1% dari APBD di luar Gaji
4	Puskesmas keliling, puskesmas pembantu dan pelayanan kesehatan di setiap desa	Posyandu ILP (Integrasi Layanan Primer) : 213 Posyandu, Rehab (Revitalisasi) Puskesmas Pembantu
5	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Tambak Ikan Nila	-
6	Mendorong Pengembangan SMA/SMK Unggulan di setiap Kecamatan bekerjasama dengan Pihak Sekolah Swasta	-
7	Mendorong pembentukan Rumah Perlindungan Anak, Perempuan dan disabilitas di setiap Kecamatan	Penyediaan anggaran sewa Rumah Aman untuk korban kekerasan
8	Membangun 1.000 desa/Kampung wisata baru	Sosialisasi dan Penetapan Desa Wisata
9	BUMDES Berdaya (Kepastian Hukum dan Bantuan Modal Usaha setiap Bumdes di Jateng)	-
10	Penguatan BPBD dan Tagana dalam Penanganan Bencana berbasis Kelompok Masyarakat	Sosialisasi Kegiatan Pencegahan dan mitigasi bencana di setiap kecamatan di Salatiga yang salah satunya ada praktik Dapur Umum (DU)
11	Cek Kesehatan Gratis	Pemenuhan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai), Penyiapan sarana dan prasarana di puskesmas, Sosialisasi, Promosi Media sosial
12	Mendorong penyediaan 1 Dokter, 1 Bidan setiap Puskesmas Pembantu	Penerapan Puskesmas dengan Integrasi Layanan Primer (ILP)
13	Melahirkan Pemerintahan yang <i>Good Clear Government</i> dan <i>Collaborative Governance</i> melalui peningkatan kesejahteraan, Profesionalitas dan kualitas ASN dan Perangkat Desa	Peningkatan Profesionalitas ASN dengan menerapkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit
		Pembinaan Kelurahan dan LPMK (bagian Pemerintahan)
14	Memberikan bantuan hukum bagi guru, disabilitas, perempuan dan anak	UPTD Pelindungan Perempuan Anak, pelaporan dan penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak. (tahap pembentukan UPTD PPA di tahun 2025)

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
15	Mengembangkan 10 Titik Aglomerasi menjadi Episentrum Pertumbuhan Ekonomi Baru	-
16	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin	Fasilitasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Pelatihan PRSE (Perempuan Rawan Sosial Ekonomi), Pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bintek Peningkatan Kapasitas 7 Pilar PSKS, Fasilitasi Adopsi, Visit dan Pendampingan Anak Terlantar, Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Fasilitasi Program Bantuan Yapi (Yatim Piatu), Fasilitasi Rujukan LKSA, Pelatihan Kemandirian Anak Terlantar, Porseni/Jambore Anak Terlantar, Fasilitasi Bantuan Kewirausahaan Orang Tua Anak Terlantar, Fasilitasi Akses SPMB Jalur Afirmasi Panti Dikdas dan Dikmen
17	Melahirkan ekosistem ekonomi syariah melalui penguatan regulasi dan pengembangan wisata ramah muslim	Pembinaan kepada Pelaku Usaha Pariwisata terkait Program Pengembangan Wisata Ramah Muslim
18	Pendampingan Sertifikasi Halal, HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) dan P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) secara Gratis	Fasilitasi Sertifikasi Halal bagi Produk UKM berbahan daging (Program Reguler) dan rekomendasi HAKI secara gratis.
		Penyelenggaraan Bimtek Keamanan pangan bagi pelaku usaha P-IRT.
19	Meningkatkan pelatihan untuk sertifikasi juru sembelih halal dan standar rumah pemotongan hewan	Pelatihan Juleha dan Sertifikasi Juru Sembelih Halal, Perbaikan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan
20	Desa maju dan berdaya melalui pembangunan lumbung kesejahteraan, produk unggulan go internasional, Sistem Informasi Desa (SID), dan Tim Tanggap Bencana	
21	Peningkatan desa mandiri energi melalui Pengembangan bio gas, hydro, maupun tenaga surya	
22	Pelatihan pengolahan dan manajemen keuangan bagi perempuan pesisir dan petani perempuan	Pelatihan pasaca panen bagi KWT / Poktan penerima program Pekarangan Pangan Lesatari
23	Pelatihan 1000 konten kreator desa wisata	Pelatihan bagi Pengelola Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)
24	Subsidi Modal dan Pendampingan UMKM 1 RT 1 Kelompok UMKM	Subsidi Kredit bagi UMKM melalui BPR Salatiga sebesar Rp 6 Milyar dan tanpa jaminan serta Pemdampingan bagi Kelompok UMKM agar mempunyai Legalilitas usaha (berbadan hukum)
25	Menyusun peraturan daerah dan Rencana Aksi Daerah tentang Ekonomi Hijau	-
26	Mendorong pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) baik di Kawasan Perkotaan maupun Wilayah Desa	Pemeliharaan taman (RTH) se Kota Salatiga, Belanja bibit tanaman
27	Moderasi Beragama dan wawasan kebangsaan melalui penguatan regulasi, pendidikan dan pelatihan	- Sosialisasi Peningkatan Rasa Solidaritas - Antisipasi Kerawanan Sosial Hari Raya Idul Fitri, Natal dan Tahun Baru - Sosialisasi Pencegahan Ekstrimisme dan Radikalisme
28	Mendorong Penguatan forum kerukunan antar umat beragama dan forum pembauran Kebangsaan	- Audiens Walikota dan Forkopimda dengan ormas - Fasilitasi Ormas - Hibah Ormas
29	Peningkatan operasional kader Posyandu	Honor petugas kesehatan Kader Posyandu ILP, Honor petugas kesehatan Kader Puskesmas Pembantu ILP

No	Program Delegasi	Dukungan Kegiatan Kabupaten/Kota
30	Peningkatan kualitas hidup lansia	Peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi bagi lansia melalui pemeriksaan / skrining kesehatan lansia sesuai standar, Puskesmas santun lansia dan lansia dengan ketergantungan sedang, berat dan total mendapatkan perawatan jangka panjang (PJP) Sekolah Lansia (Bina Keluarga Lansia /BKL)
31	Taruna karya mandiri melalui program kartu zilenial untuk membuka lapangan kerja	Penumbuhan wirausaha muda
32	Penguatan dan pemberdayaan koperasi untuk pengembangan perekonomian desa	Peningkatan SDM bagi Pengurus dan pengawas Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) bagi 23 Kelurahan
33	Meningkatkan Kesejahteraan Atlet, Pelatih, dan Manajemen Olahraga	Pemberian penghargaan bagi atlet dan pelatih di popda provinsi, uang saku bagi atlet dan pelatih pplopd
34	Pengembangan Sekolah Inklusif di setiap Kecamatan	Layanan konseling pendidikan inklusi, Pelatihan Guru Pembimbing Khusus dan Shadow Teacher, Psikotest Inklusi, Parenting Anak Berkebutuhan Khusus, Sosialisasi Hasil Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus
35	Monitoring dan sistem peringatan dini bencana berbasis teknologi seluruh wilayah rawan bencana	Pemasangan alat Early Warning Sistem (EWS) di wilayah rawan banjir/luapan air dan longsor

Sedangkan dukungan program Pembangunan Daerah Kota Salatiga terhadap Prioritas Nasional adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 4. 6. Dukungan Program Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 terhadap Program Prioritas Nasional Tahun 2027

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi Melalui Implementasi Proyek Strategis Nasional	
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		2 Program Penanggulangan Bencana
		3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		4 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		5 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		4 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		5 Program Penanganan Kerawanan Pangan
		6 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		7 Program Pengelolaan Persampahan
		8 Program Penyuluhan Pertanian
		9 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
		10 Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
		11 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		12 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	1 Program Redistribusi Tanah, Dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absentee
		2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		3 Program Penyelenggaraan Jalan
		4 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
		5 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)
		6 Program Pengembangan Kebudayaan
		7 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi Melalui Implementasi Proyek Strategis Nasional	
		8 Program Pemasaran Pariwisata
		9 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
		10 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	1 Program Pengelolaan Pendidikan
		2 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
		3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		4 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
		5 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
		6 Program Pemberdayaan Sosial
		7 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		8 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		9 Program Penempatan Tenaga Kerja
		10 Program Hubungan Industrial
		11 Program Pendaftaran Penduduk
		12 Program Pencatatan Sipil
		13 Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)
		14 Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)
5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		2 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
		4 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)
		Program Penyelenggaraan Jalan
		5 Program Promosi Penanaman Modal
		6 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
		7 Program Pelayanan Penanaman Modal
		8 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi Melalui Implementasi Proyek Strategis Nasional	
		9 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		10 Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
		11 Program Pengembangan Ekspor
		12 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
		13 Program Pengendalian Izin Usaha Industri
		14 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
		15 Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen
6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	1 Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
		2 Program Pemberdayaan Sosial
		3 Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		4 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
		5 Program Hubungan Industrial
		6 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
		7 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
		8 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	1 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
		3 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	1 Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
		2 Program Penanggulangan Bencana
		3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
		4 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		5 Program Pengelolaan Persampahan
		6 Program Pengembangan Kebudayaan
		7 Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

No	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS DAERAH
	Penguatan Fondasi Transformasi Ekonomi Melalui Implementasi Proyek Strategis Nasional	
		8 Program Pengelolaan Arsip
		9 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
		10 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Tabel.. Dukungan Pemerintah Kota Salatiga terhadap 17 Program Prioritas Presiden

No	Program Prioritas	Program RKPD 2027
1	Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
		2 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		3 Program Penanganan Kerawanan Pangan
		4 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
		5 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		6 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
		7 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
2	Penyempurnaan sistem penerimaan negara	8 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3	Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	9 Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
		10 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
		11 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
4	Pencegahan dan pemberantasan korupsi	12 Program Penyelenggaraan Pengawasan
5	Pemberantasan kemiskinan.	13 Program Perlindungan Jaminan Sosial
		14 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
6	Pencegahan dan pemberantasan narkoba	15 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
7	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	16 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
		17 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
8	Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	18 Program Pengelolaan Pendidikan
		19 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
		20 Program Aplikasi Informatika
9	Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif	
10	Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas	21 Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
		22 Program Perlindungan Perempuan
		23 Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak

No	Program Prioritas	Program RKPD 2027
11	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	24 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
12	Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani.	25 Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
13	Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersantitas baik untuk masyarakat	26 Program Kawasan Permukiman
		27 Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		28 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
14	Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya	29 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
		30 Program Pengembangan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
15	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasiskan Sumber Daya Alam (SDA), termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	
16	Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah	31 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
		32 Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
17	Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga	32 Program Pengembangan Kebudayaan
		33 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
		34 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
		35 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Tabel ... Keterkaitan Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas pada RKPD Kota Salatiga Tahun 2027

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul			
1 Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	86,85	PD1. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	FD2. Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	
				FD3. Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global		2 Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	
						3 Angka Putus Sekolah SD/MI	
						4 Angka Putus Sekolah SMP/MTs	
						5 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul			
						6 Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	
						7 Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	
						8 Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	
						9 Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	
						10 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
						11 Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
						12 Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
						13 Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul			
						14 Iklim Kebhinekaan SD	
						15 Iklim Kebhinekaan SMP	
						16 Iklim Keamanan SD	
						17 Iklim Keamanan SMP	
						18 Iklim Inklusivitas SD	
						19 Iklim Inklusivitas SMP	
	1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	3,82 - 3,52	FD5. Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional	1.01.04 Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1 Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA		
					2 Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD		
					3 Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP		
					4 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD		
					5 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD		
					6 Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP		

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul			
			PD2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga		2.23.02 Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	1 Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki	
					2.22.02 Program Pengembangan Kebudayaan	1 Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	
			PD3. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	FD4. Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1 Angka Kematian balita (AKABA)	
			PD4. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan			2 Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	
			PD5. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang			3 Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul				
			terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat			4	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	
						5	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	
						6	Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	
						7	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	
						8	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	
						9	Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	
						10	Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul				
						11	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	
						12	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	
						13	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	
						14	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	
						15	Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	
						16	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	
						17	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	
						18	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	
						19	Cakupan kepesertaan JKN	
						20	Cakupan kepesertaan JKN Aktif	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul				
						21	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
						22	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
						23	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	
						24	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	
						25	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	
						26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	
						27	Persentase lanjut usia yang mandiri	
						28	Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	
						29	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	
						30	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	
						31	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul				
						32	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	
						33	Prevalensi Obesitas > 18 tahun	
						34	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	
						35	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	
						36	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
						37	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
						38	Cakupan pembinaan remaja di sekolah	
						39	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	
						40	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	
						41	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	
						42	Persentase Puskesmas dengan Tempat	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul				
							Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat	
						43	Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	
						44	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	
						45	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	
						46	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	
						47	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	
						48	Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	
						49	Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	
						50	Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	
						51	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul			
						52 Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	
						53 Persentase Ibu hamil KEK	
						54 Persentase Ibu Hamil yang Anemia	
						55 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	
						56 Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	
						57 Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
						58 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah			
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul							
							kesehatan sesuai standar				
							59	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk			
							60	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam			
							61	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi			
2	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	2.1	Pertumbuhan ekonomi	6,60 - 7,60	PD6. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	FD1. Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dan perdagangan dalam perekonomian daerah	3.26.02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	
							2	Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota			
							3	Tingkat Hunian Akomodasi			
	2.2	Indeks Ketahanan Pangan Daerah (IKP)	94,54	3.26.05			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul			
					2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi PMA dan PMDN	
			PD7. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja		2.07.03 Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terlatih	
			PD8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor		2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	
					2.17.06 Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi Aktif	
			PD.9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan		3.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul			
			insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi				
			PD10. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS		3.31.02 Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang	
			PD11. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan		2.09.03 Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	
					3.27.02 Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	
						Produtivitas tanaman pangan (Padi dan Jagung)	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul			
					3.27.04 Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	
			PD12. Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkat Kulaitasnya dalam pelayanan sosial	
			PD13. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari		8.01.02 Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	
3 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Berbasis Digital	3.1 Indeks Pelayanan Publik	4,70	PD14. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan		5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul				
			sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang					
							Cash managenent (Persentase anggaran)	
							Persentase laporan keuangan tepat waktu	
					5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	
					5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	
	3.2 Indeks Integritas Nasional	80,65	PD15. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat					
	3.3 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,81	PD16. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum		2.16.02	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul				
	3.4 Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	1,2	PD17. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat		2.12.02 Program Pendaftaran Penduduk		Perekaman KTP-Elektronik	
							Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	
			PD18. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya		7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	
			PD19. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan		4.02.02 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program	Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul			
			Rakyat Daerah yang efektif dan efisien				
			PD21. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat		5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	
4 Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	4.1 Wilayah dengan Infrastruktur Kondisi Baik	66,04	PD5. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		1.03.09 Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	
	4.2 Indeks kualitas lingkungan Hidup	70,03	PD.9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru		1.03.12 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah KKPR yang diterbitkan	

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2027	Prioritas Kota Salatiga Tahun 2027		Program Prioritas	Indikator Kinerja Program		Perangkat Daerah
			Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif didukung dengan SDM Unggul				
			dalam proses produksi					
	4.3 Indeks Inovasi Daerah	53	PD20. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat		2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Persentase pemantauan status mutu air	
							Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	

Tabel 4. 7. Keselarasan Prioritas Pembangunan dan Prioritas Tahun 2027 sesuai Rancangan RPJMD dengan Program Unggulan Kepala Daerah

NO	PRIORITAS SESUAI RPJMD	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
1	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter	PROGRAM SALATIGA CERDAS
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional
		Mengembangkan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina).
		Menyediakan bantuan pembiayaan pada lembaga Pendidikan non formal (kursus, Bimbingan belajar, BLK, PKBM) untuk menyediakan pembelajaran kewirausahaan berorientasi global.
		PROGRAM SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi
		Layanan pendampingan tenaga medis di saat khamilan, kelahiran dan nifas.
		Layanan Kesehatan Ibu bebas Anemia dan Terpenuhi Nutrisi
		Layanan Jaminan Kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga Zerro stunting.
		Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
		Meningkatkan fasilitas Kesehatan dan Menyiapkan Tenaga Medis Profesional untuk RSUD berstandar Internasional.
		PROGRAM KOMIK : Kolaborasi Minelial Kreatif
		Pengembangan ruang ekspresi gaya hidup positif, seni dan budaya bagi Gen-Z, pemuda dan pelaku seni
2	Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif	PROGRAM SEKAR : SALATIGA BERKARYA
		Optimalisasi aset Pemerintah Kota Salatiga dan revitalisasi BUMD menjadi lebih produktif berkolaborasi dengan investasi swasta.
		Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas unggulan lokal melalui pendampingan UMKM
		pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM
		PROGRAM JARKOM MABAR
		Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha
3	Pengembangan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat	PROGRAM SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap
		Memperkuat Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga.
		Memperkuat digitalisasi pelayanan kependudukan, catatan sipil dan Perijinan UMKM agar tuntas di tingkat kecamatan.
		Membangun sistem pengaduan pelayanan publik terpadu sampai tingkat RT (Rukun Tetangga), Melalui Aplikasi Android dan memberikan jaminan respon cepat dalam hari yang sama.
4		PROGRAM SARI : Salatiga Lestari

NO	PRIORITAS SESUAI RPJMD	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup	Revitalisasi Taman Kota dan Ekowisata yang mengedepankan keunggulan kompetitif tiap wilayah (kelurahan/kecamatan).
		Penataan sarana prasarana publik, khususnya Gedung pemerintah, pedestrian, jalan sehingga berstandar pelayanan inklusif.
		Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW.
		Membangun sistem pengelolaan sampah terpadu ditingkat kelurahan/kecamatan.
		Mendorong terciptanya kawasan industri yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
5	Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah	PROGRAM BIRULAH (Bangun Rumah Layak Huni)
		Program bantuan sosial untuk pemugaran rumah tangga miskin untuk mendapatkan rumah yang sehat.
		PROGRAM STBM (Sanitasi total Berbasis Masyarakat)
		Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
		PROGRAM SOS : Salatiga Online System
		Program SOS bertujuan membangun infrastruktur jaringan online terpadu untuk pengawasan infrastruktur, lingkungan hidup, dan mobilitas masyarakat, yang berpusat pada Command Center tingkat kecamatan dan Kota.

Tabel 4. 8. Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Strategi sesuai Prioritas Pembangunan Kota Salatiga Tahun 2027

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
1	Masih adanya angka kemiskinan sebesar 4,20%, sedangkan target SDGs pada tahun 2030 adalah nol persen	Kemiskinan dan kesenjangan	PD10.	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS		Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
2	Tingginya tingkat ketimpangan pendapatan penduduk, termasuk 3 besar di Jawa Tengah		PD12.	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		
3	Tingkat Pengangguran Terbuka masih relative cukup besar, pada angka 3,67%					
4	Meningkatnya jumlah penduduk lansia seiring dengan Usia Harapan Hidup yang terus naik, pada tahun 2025 pada angka 78, 75 tahun					
5	Angka Partisipasi Sekolah belum mencapai 100%	Kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia	PD1.	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan		Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter
6	Belum optimalnya pencapaian Tingkat kesehatan keluarga dengan masih adanya kasus gizi buruk dan stunting pada anak, kasus kematian balita, dan kematian ibu		PD2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga		
			PD3.	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi		

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
				gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular		
			FD4.	Meningkatkan kualitas SDM dan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah berstandar internasional, dan klinik kesehatan daerah yang berkualitas dan modern didukung dengan sistem layanan terintegrasi		
			FD2.	Mengembangkan komunitas pembelajaran bahasa dan keterampilan komunikasi internasional (Bahasa Inggris, Bahasa Arab dan Bahasa Cina)		
			FD3.	Meningkatkan dukungan kelembagaan dan operasional pada pendidikan kesetaraan dan lembaga keterampilan dalam pembelajaran kewirausahaan berorientasi global		
			FD5.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan sarana prasarana, tenaga pendidik, dan kurikulum berbasis digital pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional		

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
7	Masih rendahnya Daya Saing Olahraga		PD5.	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		
8	Masih rendahnya koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan, tahun 2025 baru 25 %, dan prosentase pemajuan kebudayaan baru 76,81%	Pengelolaan dan pelestarian budaya daerah	PD2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga		
9	Belum optimalnya pencapaian perlindungan perempuan dan anak, masih adanya anak korban kekerasan dan kekerasan terhadap perempuan	Kesenjangan gender, perlindungan anak dan perempuan	PD1.	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan		
10	Kota Salatiga yang berada di persimpangan jalur utama Semarang–Solo, belum optimal dalam memanfaatkan peranannya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi regional dengan kondisi sumberdaya yang dimiliki saat ini, pertumbuhan ekonomi belum mencapai target pesimis tahun 2025 yaitu 6,10%	Pertumbuhan ekonomi yang merata didukung investasi dan produk unggulan yang berdaya saing	PD6.	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif		Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif
11	Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam terutama dalam pengembangan teknologi pertanian dan pengelolaan potensi wisata dalam mendukung perkembangan ekonomi masyarakat Kota Salatiga		PD7.	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja		

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
12	Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya menciptakan pemerataan kesejahteraan dengan masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan konsumsi rumah tangga		PD8.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor		
13	Keterbatasan investasi dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan daerah		PD.9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi		
			PD11.	Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan		
			PD12.	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
			PD13.	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari		
14	Daya dukung lahan tidak mampu memenuhi kebutuhan standar hidup layak penduduk, dan penurunan kualitas air	Pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan	PD20.	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat		Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup
15	Penurunan Indeks Inovasi Daerah (51,10 turun menjadi 48,88) dan masih belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan (73,68)		PD21.	Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat		
16	Belum optimalnya upaya peningkatan dan pemerataan insfrastruktur daerah dalam menunjang pelayanan	Pemenuhan kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur	PD5.	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		Pengembangan Infrastruktur Kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah
			PD.9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi		

Permasalahan Pembangunan		Isu Strategis Kota Salatiga Tahun 2025 -2029	Prioritas Pembangunan		Arah Kebijakan	
17	Kualitas sumber daya aparatur, pemanfaatan teknologi dalam pelayanan, penerapan standar pelayanan yang jelas dan terukur, pengembangan birokrasi dan penguatan sistem pengawasan dalam pelayanan public masih belum optimal	Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis dan Kolaboratif	PD14.	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang		Pengembangan pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat
18	Infrastruktur digital yang merata, literasi digital aparatur, serta sistem informasi antar-perangkat daerah yang masih belum optimal.		PD15.	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat		
19	Peran dan dukungan kelembagaan di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan belum optimal		PD16.	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum		
			PD17.	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat		
			PD18.	Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya		
			PD19.	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien		

4.3 Pokok – Pokok Pikiran DPRD

Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut terangkum ke dalam berbagai urusan kewenangan pemerintah tingkat Kota. Dengan demikian, dokumen pokok-pokok pikiran DPRD Kota Salatiga, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan tujuan dan sasaran Kota Salatiga.

Pokok-pokok pikiran DPRD Salatiga tahun 2027 merupakan wujud akumulasi dan representasi masyarakat Salatiga, melalui kegiatan reses dan kunjungan kerja yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRD di 4 daerah pemilihan yang meliputi 4 kecamatan. Kegiatan reses ini telah berhasil merangkum banyak aspirasi dari masyarakat, setiap anggota DPRD membawa aspirasi warga dari dapilnya masing-masing, untuk ditindaklanjuti Pemerintah Salatiga lewat mekanisme perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan daerah, dalam hal ini penyusunan RKPD tahun 2027, KUA-PPAS dan APBD tahun 2027.

Hasil indentifikasi dan analisa usulan dari aspirasi masyarakat berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah, selanjutnya dirumuskan dalam tema pokok-pokok pikiran DPRD yang dituangkan dalam Dokumen RKPD tahun 2027. Pokok-pokok pikiran DPRD dirinci dalam beberapa bidang yang selanjutnya diterjemahkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2027. Pokok- pokok pikiran DPRD masih dalam proses input pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) sesuai dengan kamus usulan aspirasi sejak tanggal 29 Desember 2025 sd 6 Pebruari 2026 yang selanjutnya akan dilakukan proses verifikasi. Berikut ini adalah usulan pokok-pokok pikiran berdasarkan kamus usulan dan permasalahan. Sebagai pedoman dalam pengusulan pokok-pokok pikiran DPRD, Perangkat Daerah telah menyusun Kamus Usulan Aspirasi berdasarkan permasalahan pembangunan dan prioritas pembangunan tahun 2027. Kamus usulan aspirasi untuk tahun 2027 adalah sebagai berikut :

No	OPD Tujuan		Permasalahan	Bidang Urusan
1	Dinas Sosial	1	Pelatihan Bidang Sosial (keluarga miskin)	Sosial
		2	Pelatihan Rehabilitasi Sosial (tuna sosial, anak jalanan, disabilitas)	
2	Dispangtan	1	Pelatihan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan (B2SA, Urban Farming, dll)	Pangan dan Pertanian
		2	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian (Pelatihan kelompok Ternak, bantuan bibit hewan ternak, bantuan bibit tanaman)	
		3	Pengelolaan Perikanan Budidaya (Pengadaan Sarpras bagi Kelompok Pembudidaya Ikan, Bantuan Bibit Ikan)	
		4	Pengadaan Sarana Prasarana bagi Kelompok Pemasar Ikan	
		5	Pengadaan sarana prasarana pendukung pertanian (JUT, Alat Mesin Pertanian)	
3	BPBD	1	Pelatihan Penanggulangan Bencana, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Trantibumlinmas
4	Disperinaker	1	Bimtek / Pelatihan / Sosialisasi / Seminar Ketenagakerjaan, UMSK, LKS	Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	DINKES	1	Rehab Pustu	Kesehatan
		2	Pemberian Makanan Tambahan (PMT Bumil & Balita, Pasien TB, ODHIV & anak)	
		3	Pengadaan Alkes TB	
		4	Sosialisasi kesehatan	
		5	Stimulan BMHP Posyandu ILP	
6	DISHUB	1	Pengadaan dan Pemasangan APILL, rambu-rambu, marka jalan, cermin tikungan	Perhubungan
		2	Penyediaan Perlengkapan Jalan	
7	KESBANGPOL	1	Penguatan Kapasitas Kader Partai Politik	Pemerintahan Umum
8	Dinkop UKM	1	Sertifikasi halal bagi UMKM	Koperasi dan UKM
		2	Pelatihan Bidang Koperasi dan UKM	

No	OPD Tujuan		Permasalahan	Bidang Urusan
		3	Pengembangan UMKM (sosialisasi, pelatihan, seminar)	
9	SATPOL PP	1	Pelatihan Penanganan Kebakaran	Trantibumlinmas
		2	Pelatihan dan lomba kader (SPM Posyandu, lomba PBB, lomba poskamling)	
10	Disbudpar	1	Pelatihan Konten Promosi Pariwisata & ekonomi	Kebudayaan dan Pariwisata
		2	Event Kebudayaan / Kesenian / Pariwisata tingkat Kota	
		3	Pelatihan Pemasaran Pariwisata, Pendampingan POKDARWIS	
		4	Parade budaya dan gelar seni	
		5	Kajian tokoh sejarah Kota Salatiga	
11	Dispora	1	Pelatihan / Workshop / Festival / Lomba untuk organisasi / komunitas kepemudaan	Pemuda dan Olahraga
		2	Pelatihan / Workshop / Festival / Lomba Olahraga Masyarakat	
		3	Pengadaan/ Rehabilitasi Sarana & Prasarana Olahraga Masyarakat	
		4	Pembinaan Atlet	
12	Disperkim	1	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh	Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2	RTLH	
		3	Penataan Prasarana, Sarana dan Utilitas Taman Pemakaman Umum (TPU)/ Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU)/ Tempat Pemakaman Khusus (TPK)	
		4	Prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan	
13	DPU PR	1	Pembangunan tanggul sungai / irigasi	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2	Perluasan SPAM Perpipaan	
		3	Penyediaan Sub-SPALD Setempat, Pembangunan SPALD berbasis Permukiman	
		4	Rehab / Pembangunan Drainase	
		5	Pemeliharaan Jalan dan jembatan	

No	OPD Tujuan		Permasalahan	Bidang Urusan
14	Kecamatan	1	Pelatihan / Workshop Kaderkes, bidang Pemberdayaan Masyarakat	Kecamatan
		2	Pengadaan Sarana Prasarana RT/RW (balai, sound system, dsb)	
15	DLH	1	Penyediaan Jaring Pengaman Sungai pada Crossing point (Titik jembatan yang melintasi sungai/ saluran)	Lingkungan Hidup
		2	Sosialisasi Pencegahan pencemaran &/atau kerusakan LH dengan penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran ketertiban umum	
		3	Pembangunan Sumur Resapan, Bio Gas	
		4	Pembangunan Taman Kelurahan, Taman Edukasi Biodiversity & Biosecurity	
		5	Sosialisasi pengelolaan, pengumpumpulan & pemilahan limbah B3	
		6	Penyediaan Sarana Prasarana Pengelolaan Sampah (Gerobak Sampah, Mesin Pengolah Sampah, Tempat Sampah Terpilah, Kendaraan Roda Tiga, Mesin Biopori, komposter, Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik dan Anorganik)	
		7	Pelatihan Pengolahan Sampah	
		8	Alat Berat dan Alat Mesin Pengelolaan Sampah untuk TPA dan TPS3R	
		9	Armada Pengangkut Sampah (Roda Tiga, Minidump, Dum Truck, Armroll)	
16	DP3APPKB	1	Satgas anti kekerasan perempuan	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		2	Satgas anti kekerasan anak	
		3	Pelatihan bagi perempuan	
		4	Sarpras ruang ramah anak	

4.4 Prioritas Pembangunan Daerah dalam mendukung Kebijakan Nasional

4.4.1 Sustainable Development Goals (SDGs)

Tabel ... Keterkaitan Sasaran, Prioritas terhadap Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2027 Kota Salatiga

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1 Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	TBP2 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Angka Kematian Ibu (AKI) Angka Kematian Balita (AKaBa) per 1000 kelahiran hidup Prevalensi Hipertensi Penduduk Usai >18 tahun Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%) CPR/ Peserta KB Aktif Total Fertility Rate (TFR) UN MEET NEED Persentase cakupan kepesertaan JKN	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Rehabilitasi Sosial - Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	- Dinas Kesehatan - Dinas Sosial - DP3APPKB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD2 Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	TBP6 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yg Inklusif Dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja Yg Produktif & Menyeluruh, Serta Pekerjaan Yg Layak Untuk Semua	- Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (laju pertumbuhan PDB per kapita) - Presentase Tenaga kerja formal (Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin) - Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Idem) - Jumlah wisatawan mancanegara - Jumlah wisatawan nusantara	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Pengelolaan Pendapatan Daerah - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting - Program Pengembangan Ekspor - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - Program Pemasaran Pariwisata	- Dinas Perdagangan - BPKPD - Dinas Perdagangan - Dinas Perinaker - Dinas Budpar - Dinas Budpar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
					- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Penempatan Tenaga Kerja	- Dinas Perinaker

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD3 Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	TBP3 Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua	- Angka Partisipasi Kasar (APK) - Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat	- Program Pengelolaan Pendidikan	- Dinas Pendidikan
		PD4 Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan	TBP4 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	- Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG - Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Sesuai Standart	- Program 1: Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan - Program 1: Program Perlindungan Perempuan	- DP3APPKB

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD6 Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	TBP7 Membangun Infrastruktur Yg Tangguh , Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	- Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik - Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur - Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
						Program Pengelolaan Persampahan	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
			PD7 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja				

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD8 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	TBP7 Membangun Infrastruktur Yg Tangguh , Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	- Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik - Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur - Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
						- Program Pengelolaan Persampahan	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi	TBP9 Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	- Cakupan ketersediaan rumah layak huni - Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan - Persentase Penanganan Sampah - Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Kelurahan Siaga Bencana	- Program Pengembangan Perumahan - Program 5: Program Kawasan Permukiman - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pembinaan Sejarah - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD - Satpol PP

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD10 Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	TBP8 Mengurangi Kesenjangan Intra Dan Antar Negara	- Koefisien Gini (Indeks Gini atau Rasio Gini)	- Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan - Program Pengelolaan Pendapatan - Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting - Program Pengembangan Ekspor - Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri - Program Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif - Program Pemasaran Pariwisata	- Dinas Perdagangan - BPKPD - Dinas Perdagangan - Dinas Perindustrian dan Ketenaga kerjaan - Disbudpar

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
			PD11 Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan	TBP10 Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	- Cakupan ketersediaan rumah layak huni	- Program Pengembangan Perumahan - Program 5: Program Kawasan Permukiman - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pembinaan Sejarah - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Keanekaragaman	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup
			PD12 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		- Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan		

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
			PD13 Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari		- Persentase Penanganan Sampah	Hayati (Kehati) - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- BPBD - Satpol PP

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
	- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD14 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	TBP7 Membangun Infrastruktur Yg Tangguh , Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	- Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik - Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur - Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPPLH)	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Persampahan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup - Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD15 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	TBP12 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh	- Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)		
		PD16 Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum		- Indeks Kriminalitas - Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun (Persentase anak yang memiliki akta kelahiran)	- Program : Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum - Program: Program Pendaftaran Penduduk	- Satpol PP - Disdukcapil
		PD17 Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat		- Opini BPK Atas Laporan Keuangan - Nilai SAKIP - Indeks Refomasi Birokrasi (Indeks RB)	- Program Pencatatan Sipil - Program : Program	- Badan Pengelolaan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD18 Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya		- Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik	Pengelolaan Keuangan Daerah	Keuangan dan Sekretariat Daerah
		PD19 Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien			- Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Sekretariat Daerah
		PD21 Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat			- Program : Program Informasi Dan Komunikasi Publik	- Dinas Komunikasi dan Informatika

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
	- Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD5 Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	TBP7 Membangun Infrastruktur Yg Tangguh , Meningkatkan Industri Inklusif Dan Berkelanjutan Serta Mendorong Inovasi	- Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik - Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur - Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)	- Program Penyelenggaraan Jalan - Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) - Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengelolaan Persampahan Program	- Dinas PUPR - Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
					Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi	TBP9 Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan	- Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni - Persentase Cagar Budaya Yang Dilestarikan - Persentase Penanganan Sampah - Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) - Kelurahan Siaga Bencana	- Program Pengembangan Perumahan - Program 5: Program Kawasan Permukiman - Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya - Program Pembinaan Sejarah - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) - Program Penanggulangan Bencana - Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - Dinas Kebudayaan dan Pariwisata - Dinas Lingkungan Hidup - BPBD - Satpol PP

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD20 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	TBP5 Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih Dan Sanitasi Yang Berkelanjutan Untuk Semua	- Persentase penduduk berakses air minum (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak) - Persentase Pemenuhan Air Baku - Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak - Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM - Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) - Persentase rumah tangga yang terlayani limbah sistem komunal	- Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program: Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan - Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan - Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program: Pemenuhan Upaya Kesehatan - Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program:	- Dinas PUPR - Dinas Kesehatan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	TBP	Indikator	Program	Perangkat Daerah
					Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	

4.4.2 Pengarusutaman Gender (PUG) dan Inklusi Sosial

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Indikator		Program		Perangkat Daerah	
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	-	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	-	Indeks Pembangunan Gender	-	Program Pengelolaan Pendidikan	-	Dinas Pendidikan
			PD2	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga			-	Program Pembinaan Perpustakaan	-	Dinpersip
			PD3	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular			-	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	-	Dinas Kesehatan
			PD4	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan			-	Program Rehabilitasi Sosial	-	Dinas Sosial
							-	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	-	Dinas Sosial

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Indikator		Program		Perangkat Daerah	
						-	Program perencanaan Tenaga kerja	-	Disnakertrans	
						-	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	-	Disnakertrans	
						-	Program Penempatan Tenaga Kerja	-	Disnakertrans	
			PD5 Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat			-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	Dispora	
						-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	Dispora	
						-	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	-	Dinas Perhubungan	
						-	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	DPUPR	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Indikator		Program		Perangkat Daerah	
	-	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD6	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif			-	Program Pembinaan Perpustakaan		Dinpersip
			PD7	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			-	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	-	DP3APKB
							-	Program Perlindungan Perempuan	-	DP3APKB
							-	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	-	DP3APKB
							-	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	-	DP3APKB
							-	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	-	DP3APKB
							-	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	-	DP3APKB

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	Indikator		Program		Perangkat Daerah		
			PD8	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor			-	Program Pengembangan Perumahan	-	DPKP
			PD9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi			-	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	-	Dinkop UKM
							-	Program Pengembangan UMKM	-	Dinkop UKM
PD10	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	-	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	-	Satpol PP					
PD11	Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani,	-	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	-	Dispangtan					

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	Indikator		Program		Perangkat Daerah		
			pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan			-	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-	Dispangtan	
						-	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	-	Dispora	
						-	Program Penyuluhan Pertanian	-	Dispangtan	
						-	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	-	Dispangtan	
			PD12			Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	-	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	-	DP3AP2KB
			PD13			Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi	-	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	-	DP3AP2KB
							-	Program Pengembangan Kebudayaan	-	Disbudpar

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Indikator		Program		Perangkat Daerah			
			dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari				-	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	-	Disbudpar		
							-	Program Penanganan Bencana	-	Dinas Sosial		
							-	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	-	Dinas Lingkungan Hidup		
	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD14	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang								
			PD15	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat								
			PD16	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum					-	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	-	Diskominfo
									-	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	-	Diskominfo

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	Indikator		Program		Perangkat Daerah	
			PD17 Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat			-	Program Pendaftaran Penduduk	-	Disdukcapil
						-	Program Pencatatan Sipil	-	Disdukcapil
						-	Program Pengendalian Penduduk	-	DP3AP2KB
			PD18 Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya						
			PD19 Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien						
			PD21 Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing						

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Indikator		Program		Perangkat Daerah	
			dan kesejahteraan masyarakat							
	-	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD5	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat			-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	-	Dispora
							-	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	-	Dispora
							-	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLaj)	-	Dinas Perhubungan
							-	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	-	DPUPR
			PD9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi						

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	Indikator		Program		Perangkat Daerah	
			PD20 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat			-	Program Penanganan Bencana	-	Dinas Sosial
						-	Program Penanggulangan Bencana	-	BPBD
						-	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	-	Satpol PP
						-	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	-	DPUPR
						-	Program Pengelolaan Persampahan	-	Dinas Lingkungan Hidup

4.4.3 Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan

Tabel .. Sasaran dan Prioritas dalam mendukung Pengarusutamaan Kerentanan Bencana dan Perubahan klim

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	- Indeks Ketahanan Daerah	
		PD2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga		
		PD3	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular		
		PD4	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD5 Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat			
		PD7 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			
	- Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD6 Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif			
		PD7 Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			
		PD8 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD.9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi			
		PD10 Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS			
		PD11 Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD12 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat			
		PD13 Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari			
	- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD14 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD15 Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat			
		PD16 Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum			
		PD17 Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat			
		PD18. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya		- Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	- Dinas Perkim
		PD19 Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD21 Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat			
	- Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD5. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat			
		PD9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi		- Program Penataan Bangunan Gedung	- DPUPR
				- Program Pengembangan Jasa Konstruksi	- DPUPR
				- Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	- DPUPR
				- Program Pengembangan Perumahan	- Dinas Perkim
					- Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Indikator	Program	Perangkat Daerah
		PD20 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat		- Program Penanggulangan Bencana	- BPBD
				- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	- Satpol PP
				- Program Penanganan Bencana	- Dinas Sosial
				- Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	- DLH
				- Program Pengelolaan Persampahan	- DLH
				- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- DLH

4.4.4 Standar Pelayanan Minimal

Tabel ... Sasaran Dan Prioritas Dalam Mendukung Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	- Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1 Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	- SPM BIDANG PENDIDIKAN	- Pendidikan Dasar	- Jumlah Warga Negara usia 7 - 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	- PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	- Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	- Dinas Pendidikan
		PD2. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga			- Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil <i>Asesmen Nasional</i>		- Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	
				- Pendidikan Kesetaraan	- Jumlah Warga Negara usia 7 - 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam		- Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					pendidikan kesetaraan		dalam pendidikan menengah pertama)	
					- Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional		- Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	
				- Pendidikan Anak Usia Dini	- Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD		- Angka Putus Sekolah SD/MI	
							- Angka Putus Sekolah SMP/MTs	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	
							- Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	
							- Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	
							- Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	
							- Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	
							- Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
							- Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
							- Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							Asesmen Nasional	
							- Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
							- Iklim Kebhinekaan SD	
							- Iklim Kebhinekaan SMP	
							- Iklim Keamanan SD	
							- Iklim Keamanan SMP	
							- Iklim Inklusivitas SD	
							- Iklim Inklusivitas SMP	
						- PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	- Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	
							- Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	
							- Persentase Guru bersertifikat	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							pendidik jenjang SMP	
							- Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	
							- Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	
							- Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	
		PD3 Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	- SPM BIDANG KESEHATAN	1 Pelayanan Kesehatan ibu hamil	- Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	- PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	- Angka Kematian balita (AKABA)	- Dinas Kesehatan

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD4 Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan		2 Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	- Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	
		PD5 Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat		3 Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	- Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrrollment TBC)	
				4 Pelayanan Kesehatan balita	- Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	
				5 Pelayanan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar	- Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	
				6 Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	- Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
				7 Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	- Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	
				8 Pelayanan Kesehatan hipertensi	- Jumlah warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	
				9 Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	- Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	
				10 Pelayanan Kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat	- Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
				1 Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	- Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	
				1 Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus)	- jumlah warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan		- Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	
							- Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	
							- Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	
							- Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	
							- Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							Makanan Tambahan	
							- Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	
							- Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	
							- Cakupan kepesertaan JKN	
							- Cakupan kepesertaan JKN Aktif	
							- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	
							- Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	
							- Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	
							- Cakupan pelayanan	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							kehatan ibu hamil	
							- Cakupan Pelayanan kehatan Ibu Nifas (KF3)	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	
							- Persentase lanjut usia yang mandiri	
							- Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Prevalensi Obesitas > 18 tahun	
							- Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	
							- Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	
							- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	
							- Cakupan pembinaan remaja di sekolah	
							- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	
							- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	
							- Persentase Puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat	
							- Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	
							- Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	
							- Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	
							- Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	
							- Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	
							- Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	
							- Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	
							- Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	
							- Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	
							- Persentase Ibu hamil KEK	
							- Persentase Ibu Hamil yang Anemia	
							- Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	
							- Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	
							- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	
							- Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	
							- Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							- Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	
	- Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD6. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	- SPM BIDANG SOSIAL	1 Rehabilitasi sosial ar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	- Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	- Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	
		PD7. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja		2 Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	- Jumlah Anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		- Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD8. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor		3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	- Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
		PD.9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi		4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	- Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD1 0 Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS		5 Perlindungan dan jaminan sosial pada tanggap saat bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	- Jumlah Warga Negara korban bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota	- PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	- Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	- Dinas Sosial
		PD1 1. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan					- Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	
		PD1 2 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat					- Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
							tuna sosial di luar panti	
	- Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD1 3 Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari	- SPM BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara Kabupaten/Kota	- PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	- Persentase Penegakan Perda dan Per Ka Da (Prosentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada) - Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan (prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran)	- Satuan Polisi Pamong Praja

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD1 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang		2 Pelayanan informasi rawan bencana	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	- Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana)	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		PD1 5. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat		3 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		- Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	
		PD1 6. Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum		4 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	- Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD1 7. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat		5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	- PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	- Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	- Satuan Polisi Pamong Praja
		PD1 8. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya						
		PD1 9. Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien						

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
		PD2 1. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat						
	- Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD2 0 Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	- SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1 Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	- Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				2 Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	- Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	- PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	- Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		PD1 2 Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	- Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	- Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	- Dinas Perkim

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	SPM	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
				2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota	- Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		- Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	

4.4.5 Penanggulangan Kemiskinan

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program	Indikator Program		Perangkat Daerah	
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	-	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	-	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	-	Dinas Pendidikan
					-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat		-	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)		
								-	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)		
								-	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)		
								-	Angka Putus Sekolah SD/MI		
								-	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga	Prioritas Tahun 2027	Strategi	Program	Indikator Program	Perangkat Daerah
					- Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI - Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs - Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang - Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik - Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik - Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional - Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional - Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional - Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional - Iklim Kebhinekaan SD - Iklim Kebhinekaan SMP - Iklim Keamanan SD	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
									-	Iklm Keamanan SMP		
									-	Iklm Inklusivitas SD		
									-	Iklm Inklusivitas SMP		
			PD2	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	-	Peningkatan pendapatan masyarakat	-	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
			PD3	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	Angka Kematian balita (AKABA)	-	Dinas Kesehatan
			PD4	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan					-	Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)		
									-	Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrrollment TBC)		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program	Perangkat Daerah	
									- Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah - Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk - Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat - Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran) - Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat - Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim - Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat - Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program	Perangkat Daerah	
									- Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan - Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD) - Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif - Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar - Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan - Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan - Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A - Cakupan kepesertaan JKN - Cakupan kepesertaan JKN Aktif		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program	Perangkat Daerah	
									- Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar - Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir - Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin - Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil - Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) - Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia - Persentase lanjut usia yang mandiri - Persentase Depresi yang mendapatkan layanan - Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV - Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB - Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
									- Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif			
									- Prevalensi Obesitas > 18 tahun			
									- Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis			
									- Persentase merokok penduduk 10-21 tahun			
									- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus			
									- Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi			
									- Cakupan pembinaan remaja di sekolah			
									- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional			
									- Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas			
									- Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program	Perangkat Daerah	
									- Persentase Puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat - Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil - Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) - Incident Rate DBD per 100.000 penduduk - Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV - Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan - Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup - Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja - Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja - Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program	Perangkat Daerah	
									- Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram) - Persentase Ibu hamil KEK - Persentase Ibu Hamil yang Anemia - Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional - Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar - Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
								-	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk			
								-	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam			
								-	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi			
		PD5	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat									
	-	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD20	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat	-	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	-	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	-	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						-	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							- PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	-	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota			
								-	Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota			
		PD5	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	-	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	-	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	-	Rasio konektivitas kabupaten/kota	-	Dinas Perhubungan	
								-	Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota			
								-	Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)			
		PD9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru	-	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	-	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	-	Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
				dalam proses produksi	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	-	Persentase Tenaga Kerja yang terlatih		
							-	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	-	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)		
					-	Peningkatan pendapatan masyarakat	-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	-	Dinas Koperasi dan UKM
	-	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD1 0	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	-	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	-	Dinas Sosial
			PD1 2	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat					-	Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	Strategi		Program	Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD9 Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi				- Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti			
							- Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti			
						- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	- Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi			
						- PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	- Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kulaitasnya dalam pelayanan sosial			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD1 1	Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan	-	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	-	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	Presentase Peningkatan Indeks ketahanan Pangan	-	Dinas Pangan dan Pertanian
			PD6	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	-	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023		
			PD8	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	-	Peningkatan pendapatan masyarakat						

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD7 .	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			-	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	-	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan		
									-	Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)		
									-	Produksi perikanan budidaya		
							-	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	-	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian		
									-	Produktivitas tanaman pangan (Padi dan Jagung)		
							-	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani		
									-	Pemula		
									-	Lanjut		
									-	Madya		
							-	Utama				
							-	PROGRAM PENGOLAHAN	-	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program	Indikator Program		Perangkat Daerah	
							DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)		
							- PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	-	Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian		
							- PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	-	Persentase penanganan bencana pertanian		
							- PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	-	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program	Indikator Program		Perangkat Daerah	
					-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					-	Peningkatan pendapatan masyarakat		-	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)		
								-	Cakupan Kader BKB yang Terlatih		
								-	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
									-	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri		
									-	Indeks Lansia Berdaya		
									-	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja		
							-	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	-	Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak		
					-	Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan	-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
							-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
							- PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	-	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
					-	Peningkatan pendapatan masyarakat	- PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	-		
			PD1 3	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari								
	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD1 5.	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	- PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	-	Perekaman KTP-Elektronik	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
									Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA			

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program	Indikator Program		Perangkat Daerah	
				kebutuhan masyarakat			- PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	-	Persentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		
			PD1 7.	Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat	-	Pengurangan beban pengeluaran masyarakat	- PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	-	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana)	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
			PD1 8.	Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung				-	Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)		

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
				tercapainya kecamatan berdaya					-	Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)		
			PD1 4	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang								
			PD1 6	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum								
			PD1 9	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien								

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027	Strategi		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
			PD2 1 Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat								

4.4.6 Percepatan Penurunan Stunting

Tujuan Pembangunan	Sasaran Kota Salatiga		Prioritas Tahun 2027		Program		Indikator Program		Perangkat Daerah	
Mewujudkan Kota Salatiga yang bergerak, Energi, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga Mendunia	-	Meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul	PD1	Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Pendidikan
			PD2.	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			-	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	-	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)				
							-	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)		

								-	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)		
								-	Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)		
								-	Angka Putus Sekolah SD/MI		
								-	Angka Putus Sekolah SMP/MTs		
								-	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI		
								-	Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs		
								-	Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang		

								-	Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik		
								-	Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik		
								-	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		
								-	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional		
								-	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		
								-	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional		
								-	Iklim Kebhinekaan SD		
								-	Iklim Kebhinekaan SMP		
								-	Iklim Keamanan SD		
								-	Iklim Keamanan SMP		
								-	Iklim Inklusivitas SD		
								-	Iklim Inklusivitas SMP		

			PD3	Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Kesehatan	
			PD4	Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan			-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
						-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				
						-	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	-	Angka Kematian balita (AKABA)		
							-	Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)			
							-	Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)			
							-	Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah			

							-	Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk		
							-	Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat		
							-	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)		
							-	Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat		
							-	Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim		
							-	Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat		
							-	Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat		
							-	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan		
							-	Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)		

							-	Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif		
							-	Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar		
							-	Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan		
							-	Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan		
							-	Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A		
							-	Cakupan kepesertaan JKN		
							-	Cakupan kepesertaan JKN Aktif		
							-	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar		
							-	Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		
							-	Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin		
							-	Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil		

								-	Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)		
								-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia		
								-	Persentase lanjut usia yang mandiri		
								-	Persentase Depresi yang mendapatkan layanan		
								-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV		
								-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB		
								-	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		
								-	Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		
								-	Prevalensi Obesitas > 18 tahun		
								-	Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis		
								-	Persentase merokok penduduk 10-21 tahun		

							-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus		
							-	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi		
							-	Cakupan pembinaan remaja di sekolah		
							-	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional		
							-	Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas		
							-	Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)		
							-	Persentase Puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat		
							-	Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil		
							-	Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)		
							-	Incident Rate DBD per 100.000 penduduk		
							-	Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV		

								-	Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan		
								-	Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup		
								-	Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja		
								-	Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja		
								-	Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)		
								-	Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)		
								-	Persentase Ibu hamil KEK		
								-	Persentase Ibu Hamil yang Anemia		
								-	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional		

							-	Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar		
							-	Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan		
							-	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar		
							-	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk		
							-	Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam		
							-	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi		
						-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	-	Cakupan desa siaga strata mandiri	
								-	Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	

						-	Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna			
						-	Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat			
						-	Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat			
						-	Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat			
						-	Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok			
			PD5.	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	-	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum		
							-	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH		

	-	Meningkatnya kualitas infrastruktur yang merata dan berkelanjutan	PD5.	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PD.9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
			PD20.	Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat			-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	-	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani		

					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Satuan Polisi Pamong Praja
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Sosial

							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
						-	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kulaitasnya dalam pelayanan sosial		
						-	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
								Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
								Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti		

						-	Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti		
					-	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	
					-	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	-	Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah	
									Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

							-	Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan		
							-	Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun		
							-	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)		
						-	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	-	Rasio akseptor KB baru	
								-	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	
								-	Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	
								-	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	
								-	Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	
								-	Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	

						-	Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	-	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	
							-	Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	
							-	Cakupan Kader BKB yang Terlatih	
							-	Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	
							-	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	
							-	Indeks Lansia Berdaya	
							-	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	

	-	Terwujudnya transformasi sosial dan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	PD11	Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Pangan dan Pertanian
					-		-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
					-		-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD6.	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	-	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	-	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023		
					-	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	-	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan		
					-	PROGRAM PENGOLAHAN DAN	-	Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan		

			PD7.	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja		PEMASARAN HASIL PERIKANAN	-	Persentase kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)		Dinas Lingkungan Hidup
					-	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	-	Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani		
							-	Pemula		
							-	Lanjut		
							-	Madya		
							-	Utama		
			PD8.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD.9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan	-	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	-	Persentase penanganan sampah		
							-	Persentase pengurangan sampah perkotaan		

				memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD10.	Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perhubungan
			PD12.	Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat	-		-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		

			PD13.	Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari			-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
	-	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berbasis digital	PD16	Perluasan jaringan internet broadband dan penyediaan akses WiFi publik di fasilitas layanan umum	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

					-	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah		
			PD6	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
			PD7	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
			PD8	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor			-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	-	Persentase Koperasi Aktif		

					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	-	Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha		
					-	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	-	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan		
			PD6	Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Prosentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	-	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan		
					-	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	-	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha		

			PD5	Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			
						-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
			PD2	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
						-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			
						-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
			PD2	Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD8	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk menghasilkan produk kualitas ekspor	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perdagangan
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
			PD9	Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi, peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

					-	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	-	Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang		
			PD15	Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Sekretariat Daerah
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	-	Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan		
							-	Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan		
							-	Cakupan Fasilitas Kerjasama Daerah		
							-	Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)		
							-	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum		

						-	Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat				
			PD19	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Sekretariat DPRD	
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah			
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
			PD14	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			PD21	Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat				-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
								-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

					-	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	-	Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah						
					-	Indeks Manajemen Risiko								
					-	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	-	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra						
					-	Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang								
					PD14	Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
											-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah													

					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
					-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				
					-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Inspektorat
					-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah				
					-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah				
		PD18	Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Kecamatan Argomulyo	

				dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya			-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		Kecamatan Sidomukti
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP		

					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel		Kecamatan Sidorejo
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
					-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan		Kecamatan Tingkir
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

					-	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP		
					-	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel		
					-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							-	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah		
							-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan daerah merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program/kegiatan/sub kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan kebutuhan dana/pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan secara lengkap dalam lampiran matrik rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Salatiga. Tahapan penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan analisis dan metodologi perumusan sasaran pembangunan daerah. Rencana kerja disusun untuk menjabarkan sasaran pembangunan daerah dan dalam rangka pencapaian indikator sasaran serta dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027 berisi program, kegiatan dan sub kegiatan dari pemerintah Kota Salatiga sebagai jawaban atas permasalahan pembangunan daerah yang berkembang saat ini. Program dan kegiatan dalam rencana kerja ditetapkan dengan memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran daerah, isu strategis, korelasi terhadap Standar Pelayanan Minimal, *Sustainable Development Goal's* (SDG's), pengentasan kemiskinan dan stunting serta aspirasi masyarakat yang telah disepakati dalam Musrenbang. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dalam rangka mencapai target RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2027 memuat program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfungsi sebagai pelaksana urusan daerah yang meliputi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pemerintahan pilihan, serta urusan pendukung urusan pemerintahan.

Program prioritas pembangunan Kota Salatiga Tahun 2027 diselaraskan dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan sesuai dengan amanat dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Kepmendagri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pelaksanaannya didukung dengan pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang merupakan unsur pendukung dan unsur penunjang urusan pemerintahan.

5.1. Rencana Kerja

Implementasi program, kegiatan, dan sub kegiatan memperhatikan urgensi dan kapasitas kemampuan keuangan daerah, sehingga penjabaran program dibedakan menjadi dua prioritas, yaitu :

- 1. Prioritas I, merupakan program prioritas pembangunan daerah tahun 2027 sesuai dengan pentahapan perencanaan tahun kedua RPJMD 2025-2029, program Intervensi yang bersifat kebijakan, isu global, isu Nasional, isu Provinsi, Prioritas pembangunan, isu strategis, SDGs dan SPM;
- 2. Prioritas II, merupakan prioritas program yang dilaksanakan Perangkat Daerah yang berhubungan dengan permasalahan pelayanan tugas fungsi sesuai urusan, bidang urusannya, atau sebagai unsur pendukung atau unsur penunjang pelaksanaan pemerintahan.

5.1.1. Rencana Kerja Prioritas Pertama

5.1.1.1. Rencana Kerja Dukungan untuk Prioritas Nasional

5.1.1.2. Rencana Kerja Prioritas RPJMD untuk Tahun 2027

Pelaksanaan prioritas Pembangunan yang merupakan penerjemahan Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Salatiga Tahun 2025-2029 harus direncanakan secara utuh dalam RKPD Kota Salatiga sesuai dengan pentahapan Tahun 2027 untuk mewujudkan Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup. Penentuan prioritas Pembangunan tidak terlepas dari penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang dirumuskan berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Pada RKPD tahun 2027, permasalahan dan isu strategis berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun 2025. Prioritas Pembangunan tersebut dilaksanakan dengan berpedoman pada nomenklatur perencanaan Pembangunan dan ketentuan regulasi yang terkait. Tidak semua program yang dilaksanakan Perangkat Daerah dijadikan program prioritas. Pemilihan program prioritas juga memperhatikan kemampuan keuangan daerah pada tahun rencana.

Hasil penyelarasan prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2027 dengan nomenklatur program sesuai ketentuan tersaji dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 5. 1 Rekapitulasi Dukungan Program pada Prioritas Pembangunan Kota Salatiga tahun 2027

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
1	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, cerdas dan berkarakter : c. Mengembangkan pembelajaran inklusif pada setiap sekolah untuk menjamin pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan memberikan kesetaraan d. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan dan naskah kuno serta pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Kota Salatiga e. Meningkatkan pengetahuan kesehatan masyarakat untuk	46.755.513.029	1 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	726.934.291	DISDIK	Program ini di tujukan untuk meningkatnya partisipasi anak usia sekolah, yang didukung dengan peningkatan kualitas sarana prasarana serta tenaga pengajar.	SALATIGA CERDAS Peningkatan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, dan bahan ajar pendidikan dasar dan menengah menuju Pendidikan Salatiga Standar Internasional Pengembangan pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri
			2 PROGRAM PENDIDIK dan TENAGA KEPENDIDIKAN	65.946.600	DISDIK	Program ini di arahkan pada menjamin kualitas tenaga pendidik yang sudah bersertifikat dan telah memenuhi kualifikasi minimal S1.	
			3 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	-	DISBUDPAR		
			4 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	125.000.000	DISBUDPAR		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	mendukung promotif dan preventif terutama dalam edukasi gaya hidup sehat, kesehatan mental, pencegahan penyakit menular dan tidak menular f. Meningkatkan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat secara keseluruhan		5 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.837.632.138	DINKES	Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan serta meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	SALATIGA SEHATI : Salatiga Sehat dan Terlindungi Layanan pendampingan tenaga medis di saat kehamilan, kelahiran dan Nifas Layanan kesehatan ibu bebas anemia dan terpenuhi nutrisi Layanan jaminan kesehatan bayi periode 1000 HPK menuju Salatiga zero stunting Pembiayaan Jaminan Kesehatan Daerah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Meningkatkan asilitas kesehatan dan menyiapkan tenaga medis profesional untuk RSUD berstandar Internasional
2	Pengembangan potensi perekonomian daerah yang memiliki keunggulan	3.162.313.624	1 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	25.000.000	DISBUDPAR		SEKAR : SALATIGA BERKARYA Pengembangan ekonomi kreatif dengan mengutamakan komoditas

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	komparatif dan kompetitif		2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				unggulan lokal melalui pendampingan UMKM pemberdayaan kewirausahaan melalui akses pendanaan dan pengembangan UMKM
	a. Meningkatkan investasi dalam mendukung kapasitas produksi daerah didukung peningkatan kondisi iklim investasi yang kondusif dengan pengembangan SDM, teknologi dan promosi potensi daerah secara masif		3 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	20.500.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	b. Meningkatkan kapasitas tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar kerja		4 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	340.070.691	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja		
	c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perdagangan dan mendorong digitalisasi serta kemitraan/kolaborasi antara pedagang dan UMKM untuk		5 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	555.000.000	DINKOP UKM	Program ini diarahkan pada Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri didukung dengan prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	
			6 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	280.000.000	DINKOP UKM		
			7 PROGRAM PENINGKATAN	340.000.000	DISDAG	Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas sarana	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	menghasilkan produk kualitas ekspor d. Meningkatkan cakupan perlindungan, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan ekonomi PPKS e. Mengembangkan ketahanan pangan berbasis komunitas, pengembangan urban farming, memperluas kerjasama antara petani, pedagang, dan konsumen untuk menciptakan sistem pangan yang lebih efisien dan berkelanjutan Meningkatkan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat		SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi didukung dengan pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	
			8 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	235.000.000	DISDAG		
			9 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	198.755.000	DISPANGTAN		JARKOM MABAR : Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha Jaringan Komunitas Mahasiswa dan Anak Muda berwirausaha
			10 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	323.638.000	DISPANGTAN	Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian didukung dengan pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian, stimulan bantuan benih padi, pengendalian OPT dan DPI, mempertahankan luas lahan pertanian yang ada	SMART URBAN FARMING Pengelolaan budidaya pangan yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan pertanian on farm dan off farm untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengembangan sektor unggulan daerah
			11 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN	75.000.000	DISPANGTAN		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			MASYARAKAT VETERINER				
			12 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	80.000.000	DINSOS		
			13 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	689.349.933	KESBANGPOL		
3	Pengembangan Pelayanan publik yang bermutu dan berorientasi pada kepuasan masyarakat a. Penguatan kerukunan sosial, agama, ras maupun kelompok masyarakat melalui peningkatan pendidikan politik dan wawasan kebangsaan dalam berbagai kegiatan guna	38.250.317.266	1 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	4.022.252.677	BPKPD	Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan keuangan didukung dengan presentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan serta cash management	SI AKAS : Salatiga Akuntabel, Kolaboratif, Adaptif dan Sigap Pemerintahan yang berintegritas akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan, serta memfasilitasi kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan
			2 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.347.000.000	BPKPD		
			3 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	865.000.000	BPKPD		
			4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN	146.500.000	DISKOMINFO		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	meningkatkan cinta tanah air, nilai-nilai toleransi dan saling menghormati dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari		KOMUNIKASI PUBLIK				
	b. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengembangan aset produktif dan mengembangkan sumber pendapatan daerah yang memiliki potensi jangka panjang		5 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	5.159.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
			6 PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	17.165.077.362	4 Kelurahan di Salatiga		
	c. Meningkatkan kualitas kelembagaan dan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat		7 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	10.414.135.848	Sekretariat DPRD		
	d. Perluasan jaringan internet broadband dan		8 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	158.308.900	BAPPEDA	Program ini diarahkan pada penigkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah di dukung dengan rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah	
						Program ini diarahkan pada peningkatan perizinan dan penanaman modal berbasis resiko dengan didukung oleh Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	e. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta jangkauan layanan kependudukan dan pencatatan sipil kepada masyarakat f. Meningkatkan peran kelembagaan ditingkat kecamatan dan kelurahan (PKK, LPMK dll) dalam pelaksanaan pemberdayaan, monitoring dan evaluasi pembangunan terutama dalam mendukung tercapainya kecamatan berdaya		4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	146.500.000	DISKOMINFO	Program ini diarahkan pada penguatan Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga, serta penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	
			5 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.241.980.000	SEKRETARIAT DAERAH	Program ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan kesejahteraan masyarakat yang didukung pengembangan kebijakan berbasis data dan bukti (evidence base policy) yang relevan dan responsif terhadap kebutuhan nyata masyarakat	
			6 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	669.835.000	SEKRETARIAT DAERAH	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan di dukung dengan cakupan koordinasi dari berbagai sektor	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	Meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang efektif dan efisien		7 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	449.820.000	BKPSDM	Program ini akan diarahkan pada peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian yang didukung dengan nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	
			8 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.548.748.479	BKPSDM	Program ini diarahkan pada peningkatan pengembangan sumber daya manusia dengan didukung dengan prosentase PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi	
			9 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	70.000.000	INSPEKTORAT DAERAH	Program ini diarahkan pada peningkatan cakupan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah didukung dengan tindak lanjut rekomendasi BPK dan juga hasil pengawasan internal N-1	
4	Integrasi rencana tata ruang dengan instrumen pengelolaan lingkungan hidup, dengan arah kebijakan pada a. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian pencemaran	47.321.133.138	1 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.837.632.138	DINKES	Program ini diarahkan pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimal urusan kesehatan serta meningkatkan kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	STBM : Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Upaya perubahan perilaku higiene Penyediaan sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat
			2 PROGRAM PENGELOLAAN DAN	225.001.000	DPU PR	Program ini diarahkan peningkatan akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	lingkungan secara konsisten yang didukung dengan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat		PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			air limbah didukung dengan Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dan dilakukan penyedotan secara berkala	
	b. Mengembangkan riset dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang mampu meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat		3 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	300.000.000	DLH	Program ini diarahkan pada penurunan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dengan didukung oleh pemantauan status mutu air dan peningkatan sarana prasarana laboratorium	PROGRAM SARI : Salatiga Lestari Penegakan regulasi daerah untuk pencegahan/penindakan pencemaran lingkungan dan pelanggaran RTRW untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan
			4 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	200.000.000	DLH	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati dengan dukungan RTH publik dan RTH privat terhadap peningkatan prosentase RTH tingkat kota	
			5 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	483.500.000	DLH	Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola persampahan dengan dukungan penanganan sampah, pengurangan sampah serta fasilitas pengolahan sampah	
			6 PROGRAM PENYELENGGARA	275.000.000	DPU PR	Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
			AN PENATAAN RUANG			penyelenggaraan penataan ruang, dengan dukungan tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	
			7 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA		DPU PR	Program ini diarahkan pada penjaminan kualitas bangunan gedung serta rasio ijin PBG	
5	Pengembangan infrastruktur kewilayahan sesuai arah pengembangan wilayah, dengan arah kebijakan pada: a. Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung olahraga yang terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat b. Mengembangkan infrastruktur industri yang memadai, penyediaan wilayah peruntukan industri yang terintegrasi,	24.868.424.134	1 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	580.000.000	Dinas PKP	Program ini diarahkan pada pengembangan perumahan	PROGRAM BIRULAH : Bangun Rumah Layak Huni Bantuan sosial untuk pemenuhan rumah yang layak dan sehat bagi rumah tangga miskin
			2 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.000.000.000	Dinas PKP	Program ini diarahkan pada peningkatan lingkungan permukiman kumuh kawsan permukiman	
			3 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.781.887.793	DINAS PKP	Program ini diarahkan pada pemberian bantuan keuangan kelurahan/RW untuk merubah perilaku higiene dan membangun sarana sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan tujuan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	
			4 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	146.500.000	Diskominfo	Program ini diarahkan pada penguatan Satu Data Salatiga sebagai rujukan terpadu dalam satu portal dan dapat diakses oleh semua, untuk	PROGRAM SOS : Salatiga Online System Membangun infrastruktur jaringan online untuk pengawasan infrastruktur

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PAGU INDIKATIF (Rp)	PROGRAM NOMENKLATUR	PAGU INDIKATIF (Rp)	PERANGKAT DAERAH	RENCANA KERJA	PROGRAM UNGGULAN KEPALA DAERAH
	peningkatan inovasi dengan memberikan insentif untuk adopsi teknologi terbaru dalam proses produksi					menciptakan transparansi tata kelola pemerintahan Kota Salatiga, serta penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	lingkungan hidup dan mobilitas masyarakat yang berpusat pada Command Center Peningkatan infrastruktur yang berkualitas untuk mempermudah akses pasar dan distribusi
			5 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.857.000.000	Diskominfo	Program ini diarahkan pada peningkatan akses internet oleh diskominfo kepada Organisasi Perangkat Daerah serta pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	
			6 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	12.163.036.341	DPU PR	Program ini diarahkan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman serta dapat diukur dengan rasio kemantapan jalan	
			7 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	340.000.000	DISDAG	Program ini diarahkan pada Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi didukung dengan pertumbuhan pasar rakyat yang terdigitalisasi	

5.1.1.3. Rencana Kerja Dukungan Program RKPD 2027 yang menerapkan Konsep Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

Dalam upaya memaksimalkan efektivitas kolaboratif pencapaian target prioritas pembangunan daerah, Pemerintah Kota Salatiga menerapkan konsep tematik, holistik, integratif dan spasial dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

5.1.1.3.1. Konsep Tematik

Dalam perencanaan pembangunan, konsep tematik diskenariokan secara lima tahunan dan dibreakdown tiap tahunnya. Lebih lanjut dijabarkan dalam kerangka prioritas pembangunan daerah setiap tahunnya dan sesuai dengan arah kebijakan daerah. Konsep tematik dalam arah kebijakan pembangunan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:



Konsep tematik diwujudkan dalam penetapan prioritas pembangunan daerah di Kota Salatiga pada tahun 2027 adalah :

- a. Peningkatan perekonomian Daerah
- b. Perwujudan SDM unggul

5.1.1.3.2. Konsep Holistik

Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Kota Salatiga menerapkan konsep holistik yaitu perencanaan yang komprehensif dari hulu ke hilir, antara lain pelaksanaan program penanganan kemiskinan dan penurunan stunting

5.1.1.3.3. Konsep Integratif

Penerapan konsep integratif juga dilakukan baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah. Hal ini dilakukan secara kolaboratif yang melibatkan semua perangkat daerah, antara lain penanganan kemiskinan stunting dan dalam upaya mengatasi kekumuhan.

Selain itu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah juga dilaksanakan Pemerintah Kota Salatiga berkolaborasi dengan aktor non pemerintah baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia dan pelaksanaan kegiatan, yaitu kegiatan penanganan kemiskinan, pembangunan berkelanjutan (SDGs), penanganan stunting, penanganan anak

usia sekolah tidak sekolah dan sebagainya. Dari sisi pentahelix non pemerintah yang dilibatkan adalah akademisi, tim penggerak PKK, BAZNAS, Mitra Perangkat Daerah, kelompok masyarakat, media massa, Forum CSR dan lainnya

5.1.1.3.4. Konsep Spasial

Konsep Spasial juga diterapkan dalam kebijakan pembangunan daerah di Kota Salatiga. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kegiatan penanganan stunting, kemiskinan dan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Tabel 5 ... Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2027 yang menerapkan Konsesp Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS)

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
1	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			65.946.600	
	Outcome : Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	100 %		
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	100 %		
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	100 %		
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesetaraan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	100 %		
		Angka Putus Sekolah SD/MI	0,003 %		
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,056 %		
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	88,46 %		
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	87,79 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	78,09 %		
		Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	87,45 %		
		Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik	95,47 %		
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	93,8 %		
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	85,08 %		
		Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	94,77 %		
		Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	90,94 %		
		Iklim Kebhinekaan SD	69,06 Nilai		
		Iklim Kebhinekaan SMP	74,59 Nilai		
		Iklim Keamanan SD	73,71 Nilai		
		Iklim Keamanan SMP	74,41 Nilai		
		Iklim Inklusivitas SD	61 Nilai		
		Iklim Inklusivitas SMP	64 Nilai		
2	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			45.837.632.138	

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
	Outcome :Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	<i>Angka Kematian balita (AKABA)</i>	11,49 per 1.000 KH		
		Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	135 kasus		
		Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Enrollment TBC)	92 %		
		Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	35 %		
		<i>Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk</i>	0,74 1.000 penduduk		
		Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	8 kelurahan		
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	100 Puskesmas		
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	50 %		
		Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	66,67 %		
		Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	31 %		
		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	71 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		<i>Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan</i>	100 %		
		Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	85 %		
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	83 %		
		Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	99 %		
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	100 %		
		Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	100 %		
		Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	99,6 %		
		Cakupan kepesertaan JKN	100 %		
		Cakupan kepesertaan JKN Aktif	82 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	100 %		
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	100 %		
		Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	99,55 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	100 %		
		Persentase lanjut usia yang mandiri	93 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	1,5 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	100 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	100 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100 %		
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	60 %		
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	50 %		
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	14,7 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100 %		
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %		
		Cakupan pembinaan remaja di sekolah	100 %		
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	100 %		
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	100 %		
		Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	99,73 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase Puskesmas dengan Tempat Fasilitas Umum (TFU) memenuhi syarat	66,67 %		
		Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	75,85 %		
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	98 %		
		Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	9,1 / 100 rb penduduk		
		Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	62 kasus		
		Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan	85 %		
		Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	20 %		
		Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	60 %		
		Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	100 %		
		Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	6 kasus		
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	7,24 %		
		Persentase Ibu hamil KEK	13,81 %		
		Persentase Ibu Hamil yang Anemia	7,46 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	60 %		
		Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	100 %		
		Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	88 %		
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	4 /1000 penduduk		
		Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	100 %		
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	82,03 %		
3	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			7.111.460.510	
	Outcome : Meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Cakupan desa siaga strata mandiri	100 %		
		Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	97,75 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	95,85 %		
		Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	100 %		
		Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	90,56 %		
		Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	94,56 %		
		Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok	62,5 %		
4	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			12.163.036.341	
	Outcome :Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Rasio kemantapan jalan	95,54 %		
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			225.001.000	
	Outcome : Meningkatnya askses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	23,8 %		
6	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			25.001.000	
	Outcome : Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	68,35 %		
7	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			580.000.000	

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
	Outcome : Terpuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terken relokasi akibat pemerintah	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	100 %		
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100 %		
8	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			3.000.000.000	
	Outcome : Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	23,25 %		
9	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			574.660.000	
	Outcome : Meningkatnya kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Prosentase rumah tidak layak huni yang diperbaiki	5,25 %		
10	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			5.781.887.793	
	Outcome : Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	70 %		
11	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			80.000.000	

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
	Outcome : Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kulaitasnya dalam pelayanan sosial	60 %		
12	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			100.000.000	
	Outcome : Meningkatnya rehabilitasi sosial	Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		
		Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		
		Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %		
		Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		
13	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			771.000.000	
	Outcome : Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	98 %		
14	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA			20.300.000	
	Outcome : Meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	100 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
15	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			340.070.691	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang terlatih	0,34 %		
16	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			180.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	71,91 %		
17	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			105.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Kelembagaan PUG Aktif	100 %		
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	100 %		
18	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			150.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Persentase PKK aktif	100 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
19	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			124.600.000	
	Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rasio akseptor KB baru	14,5 %		
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15- 49	68,77 %		
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	8,45 %		
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	27,05 %		
		Persentase Modern Contraceptive Prevelance Rate (mCPR)	70 %		
		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	11,2 %		
		Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	83,5 %		
20	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			79.000.000	
	Outcome : Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera	Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	46:23 rasio		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
		Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	100 %		
		Cakupan Kader BKB yang Terlatih	75,97 %		
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	96,93 %		
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	57,7 %		
		Indeks Lansia Berdaya	57,1 Indeks		
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	93,6 Indeks		
21	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			198.755.000	
	Outcome : Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	1,77 Rasio		
22	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			8.500.000	
	Outcome : Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	88,04 %		
23	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			25.000.000	
	Outcome : Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	91,05 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
24	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			323.638.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	75,38 %		
		Produtivitas tanaman pangan (Padi dan Jagung)	6.980 ton/ha		
25	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			115.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	100 %		
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	35,18 %		
		Produksi perikanan budidaya	719,187 ton		
26	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			300.000.000	
	<i>Outcome</i> : Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase pemantauan status mutu air	100 %		
		Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	100 %		
27	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			35.000.000	

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
	Outcome : Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100 %		
28	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			483.500.000	
	Outcome : Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase penanganan sampah	73 %		
		Persentase pengurangan sampah perkotaan	26 %		
29	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			2.857.000.000	
	Outcome : Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,50 Rasio		
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	9,26 %		
		Rasio Kinerja Lalu Lintas (VCR)	0,44 V/C		
30	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			2.857.000.000	
	Outcome : Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100 %		
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	70 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
31	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			280.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Koperasi Aktif	62,42 %		
32	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			555.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	48,64 %		
33	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			400.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya daya saing UMKM	Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	25,93 %		
34	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			1.315.997.300	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya daya saing kepemudaan	persentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	5 %		
35	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			8.991.002.100	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	17 %		

No	URUSAN/PROGRAM/OUTCOME RKPD 2027	INDIKATOR	TARGET DAN SATUAN	Anggaran	Perangkat Daerah
36	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			25.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	5 %		
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	5 %		
		Tingkat Hunian Akomodasi	58,92 %		
37	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			100.529.364	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Fasilitasi Pemasaran Pariwisata	100 %		
38	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			340.000.000	
	<i>Outcome</i> : Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	40 %		

5.1.1.4. Program Prioritas untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goal's* (SDGs) adalah isu global yang harus dipastikan prinsip-prinsip Pembangunan berkelanjutan sudah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dalam bentuk Program dan Kegiatan dalam rangka mencapai target tahunan menuju target di tahun 2030. Pada Dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2027, program prioritas untuk mendukung pencapaian SDGs menjadi salah satu prioritas program untuk rencana kerja yang akan dilaksanakan pada tahun 2027, dengan rencana program tersaji pada tabel berikut.

Tabel 5. 2 Akomodasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Salatiga Tahun 2027

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
TUJUAN : 1 Mengakhiri Kemiskinan Dalam segala Bentuk Dimanapun			
INDIKATOR SDGs: ANGKA KEMISKINAN			
INDIKATOR SDGs: Persentase (%) penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85.000.000	
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di Luar Panti Sosial	15.000.000	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	771.000.000	
PROGRAM 4: PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	500.000.000,00	
PROGRAM 5: PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.000.000.000	
PROGRAM 6: PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.001.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 7: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.001.000,00	Dinas PUPR
PROGRAM 8: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.103.671.533,00	Dinas Kesehatan
PROGRAM 9: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
	Kegiatan 1 : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.000.000,00	Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 2 : Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	31.500.000,00	
PROGRAM 10: PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
	Kegiatan 1 : Pembangunan Prasarana Pertanian	46.362.000,00	Dinas pangan dan Pertanian
PROGRAM 11: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
	Kegiatan 1 : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	280.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM
PROGRAM 12: PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
	Kegiatan: Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	555.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM
PROGRAM 13: PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
	Kegiatan 1: Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	400.000.000,00	DINAS KOPERASI DAN UKM
PROGRAM 14: PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
	Kegiatan 1 : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	182.500.000,00	BAPPEDA
PROGRAM 15: PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			DP3APPKB

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	64.000.000,00	
PROGRAM 16: PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	43.275.000,00	
PROGRAM 17: PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	63.600.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	61.000.000,00	
PROGRAM 18: PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			DISDIK
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	301.442.600,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	48.701.800,00	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	118.670.647,00	
	Kegiatan 4: Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	258.119.244,00	
PROGRAM 19: PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	255.000.000,00	
PROGRAM 20: PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	16.266.000,00	
PROGRAM 21: PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.070.691,00	
PROGRAM 22: PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perinaker
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	235.000.000,00	
PROGRAM 23: PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
PROGRAM 24: PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			DISBUDPAR
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
PROGRAM 25: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	135.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	605.000.000,00	
PROGRAM 26: PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			KECAMATAN
	Kegiatan 1: Pemberdayaan Kelurahan (di 4 Kecamatan)	16.218.904.344,00	
	Kegiatan 2: Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa (di 4 Kecamatan)	946.173.018,00	
TUJUAN 2 : Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Ketersediaan Pangan Utama Beras			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	31.500.000,00	
INDIKATOR SDGs: Penanganan Rumah tangga Rawan Pangan			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	31.500.000,00	
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.000.000,00	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.255.000,00	
INDIKATOR SDGs :Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/ kapita/hari			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	31.500.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Indikator SDGs Persentase Kasus Stunting di Salatiga			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885,00	
INDIKATOR SDGs: Prevalensi balita Gizi Buruk			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Ibu hamil yang anemia			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885,00	
INDIKATOR SDGS : Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eksklusif			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885,00	
INDIKATOR SDGs : Pola Pangan Harapan (Skor PPH)			
PROGRAM 1: PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			Dinas Pangan dan Pertanian
	Kegiatan 1: Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	31.500.000,00	
	Kegiatan 2: Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.000.000,00	
	Kegiatan 3: Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.255.000,00	
TUJUAN 3: Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia			
Indikator SDGs: Angka Kematian Ibu (AKI).			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885,00	
INDIKATOR SDGs: Angka Kematian Balita (AKaBa) per 1000 kelahiran hidup.			

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885,00	
INDIKATOR SDGs: Prevalensi Hipertensi Penduduk Usai >18 tahun			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885,00	
INDIKATOR SDGs: Proporsi penduduk yang terinfeksi HIV lanjut yang memiliki akses pada obat-obatan anti retroviral			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885,00	
INDIKATOR SDGs: Persentase eks penyandang penyakit sosial (eks. Narapida, PSK, Narkoba dan penyakit Sosial Lainnya) yang telah terbina (%)			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	15.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba			
PROGRAM: PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
INDIKATOR SDGs : CPR/ Peserta KB Aktif			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	63.600.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	61.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Total Fertility Rate (TFR)			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	63.600.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	61.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INIDIKATOR SDGs : UN MEET NEED			
PROGRAM : PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			DP3APPKB
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	63.600.000,00	
	Kegiatan 2 : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	61.000.000,00	
	Kegiatan 3: Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB		
INDIKATOR SDGs : Persentase cakupan kepesertaan JKN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Fasilitas Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885,00	
TUJUAN 4 : Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua			
Indikator SDGs : Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	48.701.800,00	
Indikator SDGs :Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	258.119.244,00	
Indikator SDGs: Persentase guru layak mengajar SD/ MI, SMP/MTs			
PROGRAM PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	65.946.600,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	48.701.800,00	
	Kegiatan 2 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	301.442.600,00	
	Kegiatan 3 : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	258.119.244,00	
TUJUAN 5 : Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan			
Indikator SDGs : Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG			

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM 1: PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	36.976.000,00	
	Kegiatan 2: Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten Kota		
	Kegiatan 3: Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	68.024.000,00	
Indikator SDGs : Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Sesuai Standart			
PROGRAM 1: PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			DP3APPKB
	Kegiatan 1: Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	22.065.200,00	
TUJUAN 6 : Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua			
INDIKATOR SDGs :Persentase penduduk berakses air minum (Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak)			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR MINUM			Dinas PUPR
	Kegiatan: Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.001.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Pemenuhan Air Baku			
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum			Dinas PUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.001.000,00	
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.001.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Sanitasi Layak			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.001.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Desa Kelurahan yang melaksanakan STBM			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.103.671.533,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
INDIKATOR SDGs : Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)			
PROGRAM: PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
	Kegiatan 1 : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.103.671.533,00	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		
INDIKATOR SDGs : Persentase rumah tangga yang terlayani limbah sistem komunal			
PROGRAM: PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			DPUPR
	Kegiatan 1 : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.001.000,00	
TUJUAN 7 : Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua			
TUJUAN 8 : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh serta Layak untuk Semua			
INDIKATOR SDGs : Laju Pertumbuhan PDRB per kapita (laju pertumbuhan PDB per kapita)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	255.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	85.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.291.452.677,00	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
	Kegiatan 1: Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	865.000.000,00	Dinas Perdagangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	16.266.000,00	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
	Kegiatan: Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	1.392.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
	Kegiatan: Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Disnas Perinaker
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	235.000.000,00	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100.529.364,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
INDIKATOR SDGs :Presentase Tenaga kerja formal (Proporsi lapangan kerja informal, berdasarkan sektor dan jenis kelamin)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.070.691,00	
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
	Kegiatan 1: Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Kegiatan 2: Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	180.000.000,00	
INDIKATOR SDGs :Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur (Idem)			
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.070.691,00	
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan mancanegara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
INDIKATOR SDGs : Jumlah wisatawan nusantara			
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Dinas Budpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		
TUJUAN 9 : Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi			
INDIKATOR SDGs : Presentase jalan kabupaten/kota dalam kondisi baik			
Program Penyelenggaraan Jalan			Dinas PUPR
Kegiatan: Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota		12.163.036.341,00	
INDIKATOR SDGs : Rasio emisi co2/ emisi gas rumah kaca dengan nilai tambah sektor industri manufaktur			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		300.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota		200.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang	30.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	27.500.000,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	456.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Perubahan Emisi CO2/Emisi Gas Rumah Kaca (Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri)			
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
TUJUAN 10 : Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara			
INDIKATOR SDGs: Koefisien Gini (Indeks Gini atau Rasio Gini)			
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	255.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			BPKPD
	Kegiatan: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.291.452.677,00	
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			Dinas Perdagangan
	Kegiatan 1 : Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	16.266.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			Dinas Perindustrian dan Ketenaga kerjaan
	Kegiatan 1 : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	235.000.000,00	
PROGRAM PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			Disbudpar
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	10.000.000,00	
	Kegiatan 2: Pengelolaan Destinasi Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota	15.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
	Kegiatan 1 : Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar		

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
INDIKATOR SDGs: Tingkat kemiskinan (Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur)			
PROGRAM 1: Program Pemberdayaan Sosial			Dinas Sosial
	Kegiatan 1 : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000,00	
PROGRAM 2: Program Rehabilitasi Sosial			
	Kegiatan 1 : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	15.000.000,00	
PROGRAM 3: Program Perlindungan dan Jaminan Sosial			
	Kegiatan 1 : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	771.000.000,00	
TUJUAN 11: Menjadikan Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan			
Indikator SDGs: Cakupan ketersediaan rumah layak huni			
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Kegiatan 1 : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	3.000.000.000,00	
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
	Kegiatan 1 : Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	500.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan			
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
	Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota		
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
	Kegiatan: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah			
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	456.000.000,00	
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	27.500.000,00	
INDIKATOR SDGs : PERSENTASE RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)			
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : KELURAHAN SIAGA BENCANA			
PROGRAM: PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			BPBD

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1 : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	135.000.000,00	
	Kegiatan 2 : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	605.000.000,00	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			SATPOL PP
	Kegiatan 1: Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	90.730.800,00	
	Kegiatan 2: Pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		
TUJUAN 12: Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs : Jumlah peserta PROPER yang mencapai minimal ranking BIRU			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	300.000.000,00	
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			
	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Persentase penyimpanan limbah B3 sesuai dengan ketentuan (Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan).			
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)			Dinas Lingkungan Hidup
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang	30.000.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA	
	Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
INDIKATOR SDGs : Persentase Penanganan Sampah (Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang)				
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	456.000.000,00		
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	27.500.000,00		
TUJUAN 13: Mengatasi langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya				
INDIKATOR SDGs : Tersusunnya Profil Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)				
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			Dinas Lingkungan Hidup	
	Kegiatan: Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				
	Kegiatan: Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	300.000.000,00		
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				
	Kegiatan: Pengelolaan Kehati Kabupaten/Kota	200.000.000,00		
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (B3) dan LIMBAH BAHAN BERBAHAYA dan BERACUN (LIMBAH B3)				
	Kegiatan 1: Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN dan IZIN PERLINDUNGAN dan PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000,00		
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				
	Kegiatan: Pengelolaan Sampah	456.000.000,00		
	Kegiatan : Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	27.500.000,00		
TUJUAN 14: Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan				
TUJUAN 15: Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati				
TUJUAN 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Kokoh				
INDIKATOR SDGs: INDEKS KRIMINALITAS				
PROGRAM : PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN dan KETERTIBAN UMUM			SATPOL PP	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Kegiatan 1:Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.125.523.968,00	
	Kegiatan 2 :Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	98.824.000,00	
INDIKATOR SDGs: Cakupan Akta Kelahiran anak usia 0-18 tahun (Persentase anak yang memiliki akta kelahiran)			
Program: PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Kegiatan 1: Pelayanan Pendaftaran Penduduk	3.000.000,00	
	Kegiatan 2: Penataan Pendaftaran Penduduk	9.000,00	
PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
	Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	42.454.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
	Kegiatan 1: Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	10.650.000,00	
	Kegiatan 2: Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		
INDIKATOR SDGs : Opini BPK Atas Laporan Keuangan			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
	Kegiatan 1 : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	727.000.000,00	
	Kegiatan 2: Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	378.800.000,00	
	Kegiatan 3: Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	425.000.000,00	
	Kegiatan 5: Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.291.452.677,00	
	Kegiatan 6: Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	200.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Nilai SAKIP			
PROGRAM : PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			Inspektorat
	Kegiatan 1: Penyelenggaraan Pengawasan Internal	36.000.000,00	
INDIKATOR SDGs : Indeks Refomasi Birokrasi (Indeks RB)			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	161.200.000,00	

PROGRAM/KEGIATAN		PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM : PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			Dinas Komunikasi dan
	Kegiatan 1: Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	146.500.000,00	Informatika
INDIKATOR SDGs: Tingkat Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik			
PROGRAM : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH			Sekretariat Daerah
	Kegiatan 1: Penataan Organisasi	161.200.000,00	
TUJUAN 17: Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan			
INDIKATOR SDGs: Rasio Penerimaan Pajak Pemerintah Daerah terhadap PDRB			
PROGRAM : PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			Badan Pengelolaan Keuangan dan
	Kegiatan 1: Pengelolaan Pendapatan Daerah	865.000.000,00	Pendapatan Daerah

5.1.1.5. Program prioritas pendukung Penerapan SPM

Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan SPM Tahun 2027 dalam RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 adalah sebagai berikut

Tabel 5. 3 Akomodasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kota Salatiga Tahun 2027

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
JENIS SPM : SPM BIDANG PENDIDIKAN			
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			Dinas Pendidikan
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	1.500.000	
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Sekolah	135.000.000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Literasi dan Numerasi	2.700.000	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Literasi dan Numerasi	1.700.000	
Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Literasi dan Numerasi	1.800.000	
Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Literasi dan Numerasi	4.000.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk	Literasi dan Numerasi	5.400.000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Literasi dan Numerasi	89.682.800	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Angka Partisipasi Sekolah	10.000.000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Kekhususan PAUD	1.895.400	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	1.830.000	
Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Kekhususan PAUD	9.568.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Kekhususan PAUD	4.257.600	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	16.000.000	
Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	1.280.000	
Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	1.475.000	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	15.502.000	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Angka Partisipasi Sekolah	1.280.000	
Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah	3.360.000	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	83.797.044	
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
Kegiatan : Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan	Literasi dan Numerasi	59.076.600	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Literasi dan Numerasi	6.870.000	
JENIS SPM : SPM BIDANG KESEHATAN			
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			Dinas Kesehatan
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Pelayanan Kesehatan Balita	33.899.360	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.086.150	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.540.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	216.819.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	16.335.800	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	346.300.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	92.656.812	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	15.275.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.006.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23.775.000	
JENIS SPM : SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
JENIS SPM : SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota	-	
Kegiatan : Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	
JENIS SPM : SPM BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	178.913.968	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	40.000.000	
Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	40.000.000	
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	500.000.000	
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	25.000.000	
Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75.000.000	
Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	25.000.000	
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20.000.000	
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Pelayanan dan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	15.000.000	
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Penyelamatan dan	76.030.800	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	JENIS LAYANAN DASAR	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
	Evakuasi Korban Kebakaran		
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	14.700.000	
JENIS SPM : SPM BIDANG SOSIAL			
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			Dinas Sosial
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	45.000.000	
Penyediaan Alat Bantu	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	10.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	15.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	15.000.000	

5.1.1.6. Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Stunting

Perwujudan peran pemerintah daerah dalam mendukung penurunan stunting adalah berupa sinkronisasi program dan kegiatan dalam dokumen perencanaan. Kebijakan Pemerintah pusat berupa “Antisipasi Generasi Stunting Guna Mencapai Indonesia Emas 2045”, merupakan salah satu kebijakan yang diadopsi pada perencanaan pembangunan pada tahun 2027. Pada RKPD tahun 2027 dilakukan penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan

Stunting. Penentuan dan pemetaan program pelaksana penerapan Penurunan Stunting Tahun 2026 dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 5. 4 Akomodasi untuk Kebijakan Penurunan Stunting Tahun 2027

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendidikan		Dinas Pendidikan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pendidikan		
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		1.500.000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		2.700.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik		89.682.800	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		-	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		-	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD		10.000.000	
Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD		-	
Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD		1.895.400	
Pengelolaan Dana BOP PAUD		-	
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		-	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		1.830.000	
Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD		13.577.200	
Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan		15.502.000	
Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan		1.655.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesehatan		Dinas Kesehatan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.000.000	
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Kesehatan		

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		2.000.000.000	
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		6.990.325.500	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga		-	
Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil		216.819.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin		32.540.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir		13.086.150	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita		33.899.360	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar		5.000.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif		16.006.200	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat		198.378.000	
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		158.375.000	
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan		38.640.000	
Pengelolaan Surveilans Kesehatan		33.425.000	
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		-	
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat		28.000.000.000	
Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)		30.400.000	
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak		900.000	
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga		109.212.960	
Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			
Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)		56.650.000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		157.296.435	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Kesehatan		
Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		6.510.378.260	
Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		601.082.250	
Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		-	
			Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		-	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		25.000.000	
Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		1.000	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman		-	
Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		225.000.000	
Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat		1.000	
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perumahan dan Kawasan Permukiman		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		150.000.000	
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan dan Kawasan Permukiman		
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni		553.300.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		54.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		25.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sosial		Dinas Sosial

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		90.000.000	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		25.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
Penyediaan Permakanan		45.000.000	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Sosial		
Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga		730.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		103.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		-	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		10.000.000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya		-	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
Kegiatan : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)		-	
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)		-	
Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pangan		Dinas Pangan dan Pertanian
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50.000.000	
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pangan		
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		-	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga		-	
Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		122.255.000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pangan		
Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota		-	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Kelautan dan Perikanan		
Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		15.000.000	
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		-	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Pertanian		
Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa		-	
			Dinas Lingkungan Hidup
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Lingkungan Hidup		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		87.101.500	
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Lingkungan Hidup		
Kegiatan : Pengelolaan Sampah			
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan		46.000.000	
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan		200.000.000	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional		200.000.000	
			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		115.500.000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		300.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perhubungan		Dinas Perhubungan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		205.366.000	
			Dinas Komunikasi dan Informatika
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Komunikasi dan Informatika		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Komunikasi dan Informatika		
Kegiatan : Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Media Komunikasi Publik		-	
			Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		190.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha		280.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro		150.000.000	
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro		-	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			
Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi		-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penanaman Modal		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		40.000.000	
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal		
Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik		26.000.000	
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Penanaman Modal		
Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha		17.500.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepemudaan dan Olahraga		Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		202.420.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kebudayaan		Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		50.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perpustakaan		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perdagangan		Dinas Perdagangan
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		80.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perindustrian		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		155.000.000	
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Perindustrian		
Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat Daerah		Sekretariat Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		511.935.051	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.340.000	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Sekretariat Daerah		
Kegiatan : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah		35.216.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Sekretariat DPRD		Sekretariat DPRD
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.000.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan		Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		289.612.279	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan		
Kegiatan : Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah		17.386.400	
Kegiatan : Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah		30.432.000	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Perencanaan		
Kegiatan : Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		7.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kuangan		Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kepegawaian		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		200.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Inspektorat		Inspektorat
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		300.000.000	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		5.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		Kecamatan Argomulyo
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		100.000.000	

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		72.379.500	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.050.569.100	
			Kecamatan Sidomukti
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		85.546.365	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		100.000.000	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Kecamatan Sidorejo
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1.497.262.200	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		120.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		55.000.000	Kecamatan Tingkir
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan : Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.148.428.100	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan		
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		54.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan		
Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	URUSAN	PAGU INDIKATIF	INSTANSI PELAKSANA
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		64.034.323	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kecamatan		
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		2.262.529.540	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kesatuan Bangsa dan Politik		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		125.479.000	

5.1.1.7. Program prioritas pendukung Kebijakan Nasional untuk Penurunan Kemiskinan

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, Kota Salatiga mendukung strategis nasional dalam melaksanakan optimalisasi pelaksanaan pengentasa kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan yang meliputi :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat, diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat, diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Untuk pelaksanaan tahun 2027 diarahkan sebagai berikut :

Tabel 5. 5 Akomodasi untuk Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Tahun 2027

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
1	Mengurangi Beban Pengeluaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	726.934.291	DINAS PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	301.442.600	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	-	
		Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	89.682.800	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	135.000.000	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	258.119.244	

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	64.500.000	
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	-	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	95.407.600	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	48.701.800	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	-	
		Pengelolaan Dana BOP PAUD	-	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	118.670.647	
		Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	16.000.000	
		Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	
		Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	-	
		Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	-	
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45.837.632.138	DINAS KESEHATAN
		Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	15.629.090.885	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	-	
		Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.103.671.533	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	216.819.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	32.540.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	13.086.150	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	33.899.360	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	5.000.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	16.006.200	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	23.775.000	

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	92.656.812	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	346.300.000	
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	198.378.000	
		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	
		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	28.000.000.000	
		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	882.500.000	BPBD
		Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	40.000.000	
		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	40.000.000	
		Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	605.000.000	
		Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20.000.000	
		Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	135.000.000	
		Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	20.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	80.000.000	DINAS SOSIAL
		Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	80.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	
		PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	100.000.000	DINAS SOSIAL

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	85.000.000	
		Penyediaan Permakanan	45.000.000	
		Penyediaan Alat Bantu	10.000.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	15.000.000	
		Pemberian Layanan Kedaruratan	15.000.000	
		Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	15.000.000	
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	-	
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	771.000.000	DINAS SOSIAL
		Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	771.000.000	
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	41.000.000	
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	730.000.000	
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	79.000.000	DP3APPKB
		Kegiatan : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	15.000.000	
		Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	-	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	198.755.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota	45.000.000	

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan		
		Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-	
		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	5.159.000	DISDUKCAPIL
		Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk	9.000	
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	9.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	10,650,000	DISDUKCAPIL
		Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	10.650.000	
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9.000.000	
		Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	1.650.000	
		Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	
		Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	
		Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	-	
		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	461,000,000	DISPERINAKER
		Kegiatan : Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000	
		Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	37.000.000	

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Kegiatan : Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	424.000.000	
		Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200.000.000	
2	Meningkatkan Pendapatan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000	DP3APPKB
		Kegiatan : Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000	
		Kegiatan : Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	122.255.000	
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	122.255.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	115.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	35.000.000	
		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	35.000.000	
		Kegiatan : Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	80.000.000	
		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	65.000.000	
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	30.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	15.000.000	
		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	323.638.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	20.000.000	
		Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20.000.000	
		Kegiatan : Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	
		Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	60.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	60.000.000	
		Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	60.000.000	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	15.000.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	15.000.000	
		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	15.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	400.000.000	DINKOP UKM
		Kegiatan : Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	400.000.000	
		Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	400.000.000	
		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	-	DISBUDPAR
		Kegiatan : Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	-	
		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	340.070.691	DISPERINAKER
		Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	340.070.691	
		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	340.070.691	
		Kegiatan : Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	-	
3	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	726.934.291	DINAS PENDIDIKAN
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	301.442.600	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	258.119.244	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	-	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	
		Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	118.670.647	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	400.000.000	DPU PR
		Kegiatan : Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	200.000.000	
		Pembangunan Tanggul Sungai	-	
		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	200.000.000	
		Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	-	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	25.001.000	DPU PR
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	25.001.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	25.000.000	
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	225.001.000	DPU PR
		Kegiatan : Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	225.001.000	
		Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	225.000.000	
		Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.000	
		Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-	
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	580.000.000	DINAS PKP
		Kegiatan : Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	
		Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	-	
		Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	3.000.000.000	DINAS PKP
		Kegiatan : Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh	3.000.000.000	

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha		
		Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	3.000.000.000	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	5.781.887.793	DINAS PKP
		Kegiatan : Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	5.781.887.793	
		Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	100.000.000	
		Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	3.115.187.793	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	-	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	
		Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	-	
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	198.755.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	45.000.000	
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	45.000.000	
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	8.500.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN
		Kegiatan : Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	8.500.000	
		Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	8.500.000	
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	46.362.000	DINAS PANGAN DAN PERTANIAN

No	Strategi	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Perangkat Daerah
		Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian	46.362.000	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	
		Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	46.362.000	
		PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.850.000.000	DINAS PERHUBUNGAN
		Kegiatan : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.740.000.000	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	
		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	55.000.000	DISPERINAKER
		Kegiatan : Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	55.000.000	
		Penyuluhan Transmigrasi	55.000.000	

5.1.2. Rencana Kerja Prioritas Kedua

Rencana program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2027 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 6 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

5.1.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

5.1.2.1.1. Pendidikan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1) Program Pengelolaan Pendidikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan pendidikan SD, pengelolaan pendidikan SMP dan pengelolaan pendidikan PAUD, serta pengelolaan pendidikan non formal/kesetaraan, pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) PAUD, SD, SMP dan Non Formal/Kesetaraan, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD dan SMP, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/ rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu APK PAUD, APK SD/MI/Paket A, APK SMP/MTs/Paket B, Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A, Angka Putus Sekolah

SMP/MTs/Paket B, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI, Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs, Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen, Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SD/MI, Persentase Jumlah Sekolah yang memenuhi kriteria minimum AKM Jenjang SMP/MTs, Persentase Sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang, Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik, Kondisi Sarpras Pendidikan Kesetaraan baik. Selain itu pada program ini juga diarahkan pada pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan PAUD maupun kesetaraan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi.

2) Program Pengembangan Kurikulum

Program ini diarahkan pada Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI dan SMP/MTs, Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang TK dan jenjang PKBM.

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA, SD, SMP dan Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD, SD, dan SMP.

4) Program Pengendalian dan Perizinan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pengendalian, pengawasan dan penilaian kelayakan perizinan Lembaga PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk dokumen penilaian kelayakan usulan perizinan pendidikan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase TK/RA yang terakreditasi, Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi, Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI, Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs.

5) Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Program ini diarahkan pada pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan memberikan fasilitasi, workshop serta apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI dan jenjang SMP/MTs dan Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa.

5.1.2.1.2. Kesehatan

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyediaan fasilitas pelayanan, sarana prasarana dan alat kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Kota, penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi, penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase ketersediaan obat esensial di puskesmas dan KPM, Persentase ketersediaan BHP di Puskesmas dan KPM, Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD), Cakupan pembinaan remaja di sekolah, Pembentukan Posyandu Remaja, Persentase Ibu hamil KEK, Persentase Ibu Hamil yang Anemia, Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan, Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan, Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin, Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A, Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3) , Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir, Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD), Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram), Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif, Cakupan pelayanan kesehatan balita, Angka Kematian balita (AKABA), Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan, Prevalensi Stunting pada Balita, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif, Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat, Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB, Angka Penemuan kasus baru TBC/ Case Notifikasi Rate (CNR), Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV, Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV, Incident Rate DBD per 100.000 penduduk, Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk, Angka Penemuan Pneumonia Balita, Deteksi Dini Hepatitis, Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), Cakupan UCI kelurahan, Cakupan BIAS DT/Td, Cakupan BIAS Campak Rubela, Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar, Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam, Penemuan kasus AFP, (Acute Flaccid Paralysis), Cakupan TTU yang memenuhi syarat higiene sanitasi, Cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan, Cakupan kelurahan yang melaksanakan STBM dengan 5 pilar, Persentase puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas, cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional, Cakupan kepesertaan JKN, Cakupan Puskesmas yang melaksanakan intervensi lanjut PIS PK, Persentase Puskesmas yang melaksanakan SIMPUS, Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Kesehatan, Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk, Persentase RS rujukan yang terakreditasi.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase akreditasi puskesmas strata utama.

3) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberian izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), penerbitan sertifikat produksi Pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan dan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga serta penerbitan sertifikat laik hygiene, sanitasi tempat pengelolaan makanan (TPM) antara lain jasa boga, rumah makan/restoran dan depot air minum. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase sarana produksi IRT yang memenuhi ketentuan, Persentase pangan IRT yang memenuhi syarat, Persentase SPP-IRT yang diterbitkan sesuai ketentuan, Persentase fasilitas pelayanan kefarmasian (apotek, toko obat) yg memenuhi standart dan persyaratan perijinan, Cakupan TPM yang memenuhi syarat higiene sanitasi.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Program ini diarahkan pada kegiatan advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Cakupan Desa Siaga Strata Mandiri, Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna, Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat, Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat.

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dasar dengan tingkat kepuasan masyarakat baik, Nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Rumah Sakit, Persentase Pemakaian Tempat Tidur (BOR), Average Length of Stay (Av LOS), Bed Turn Over (BTO), Turn Over Internal (TOI), Net Death Rate (NDR), Gross Death Rate (GDR).

5.1.2.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) Kota, pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion luas daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi.

2) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase rumah tangga dengan akses air minum.

3) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik melalui peningkatan prasarana sarana sanitasi dengan pendampingan pengelolaan sanitasi perkotaan dan berbasis masyarakat, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu Presentase rumah tangga dengan akses layanan pengolahan air limbah domestik.

4) Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai melalui pembangunan sistem drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase serta menyusun strategi dan teknis sistem drainase perkotaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja persentase jaringan drainase dalam kondisi baik.

5) Program Penataan Bangunan Gedung

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Kota, pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bangunan gedung melalui perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung melalui pemberian rekomendasi teknis IMB dan SLF. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasio Kepatuhan IMB.

6) Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya untuk mencapai indikator kinerja Presentase Penataan Bangunan dan Lingkungan.

7) Program Penyelenggaraan Jalan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan jalan Kota melalui perencanaan, pembangunan jalan dan jembatan, updating kondisi jalan dan jembatan, peningkatan struktur jalan serta melakukan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan untuk mencapai indikator kinerja Prosentase jalan yang menjadi kewenangan dalam SK Jalan kondisi mantap dan Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik.

8) Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi, dan Penerbitan izin usaha jasa konstruksi Nasional. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Rasion tenaga operator/teknisi/analisi yang memiliki sertifikat kompetensi.

9) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan RTRW dan rencana Rinci Tata Ruang, koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang daerah, koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah, serta koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah untuk mencapai indikator kinerja tingkat ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

5.1.2.1.4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pengembangan Perumahan

Program ini diarahkan melalui kegiatan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kota, Pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/atau rumah khusus serta Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni korban bencana/relokasi kab/kota, Fasilitasi Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kab/kota, Persentase peningkatan dokumen pengembangan perumahan.

2) Program Kawasan Permukiman

Program ini diarahkan dalam rangka upaya mewujudkan kawasan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha, serta Peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas di bawah 10 ha. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani, terfasilitasinya terbentuknya masyarakat atau kelompok pemelihara dan pemanfaat (KPP), Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layah Huni).

3) Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan prasarana sarana utilitas perumahan, penyediaan prasarana sarana utilitas perumahan untuk Menunjang fungsi hunian umum perumahan dalam rangka untuk mencapai indikator kinerja yaitu cakupan lingkungan perumahan yang sehat dan aman yang didukung PSU yang berkelanjutan, terfasilitasinya pengembangan atau perluasan TPU dan meningkatnya kapasitas TPU, cakupan lingkungan permukiman yang sehat didukung PSU.

4) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada daerah Kabupaten/Kota dalam rangka mencapai target indikator kinerja yaitu jumlah laporan hasil pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap perumahan dan kawasan permukiman kumuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.

5.1.2.1.5. Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini diarahkan pada kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan, serta pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum, Selain itu juga diarahkan pada kegiatan penegakan Perda melalui penanganan pelanggaran Perda dan Perwali dan juga Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk mencapai indikator kinerja persentase cakupan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan.

2) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran dan kegiatan Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran untuk mencapai indikator kinerja Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai, Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran, Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

3) Program Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan juga penataan sistem dasar penanggulangan bencana. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM), Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM), Persentase Kecukupan Sarana dan Prasarana, peralatan pendukung penanggulangan bencana dan logistik.

5.1.2.1.6. Sosial

Rencana program yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1) Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan potensi sumber kesejahteraan social untuk mencapai indikator kinerja persentase Terbentuknya Lembaga Puskesmas, persentase LKS/LKSA yang telah mengikuti Assesment, persentase PSKS yang dibina.

2) Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial, dan Rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti, Presentase Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.

3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kota untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pegemis yg terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti, Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi.

4) Program Penanganan Bencana

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kota untuk mencapai indikator kinerja Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah bencana bagi korban bencana kabupaten/kota, Presentase Warga Negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

5) Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kota untuk mencapai indikator kinerja cakupan pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

5.1.2.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

5.1.2.2.1. Tenaga Kerja

1) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pelatihan kerja berdasarkan unit kompetensi, pembinaan lembaga pelatihan swasta. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Persentase Tenaga Kerja yang bersertifikat kompetensi.

2) Program Penempatan Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja, perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan), dan Penertiban Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 daerah. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Realisasi Kegiatan Bursa Tenaga Kerja.

3) Program Hubungan Industrial

Program ini diarahkan pada kegiatan pengesahan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan dan kegiatan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan). Selain itu, pada program ini untuk kinerja cakupan kepesertaan jaminan Sosial Ketenagakerjaan, mulai mulai memperhatikan arah kebijakan perlindungan tenaga kerja yang informal, mengingat untuk kedepan target kepesertaan Jamsostek tidak hanya yang formal saja, namun yang informal juga dilihat capaiannya.

5.1.2.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1) Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan kabupaten/kota; Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan kabupaten/kota; Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan

kewenangan kabupaten/kota. Target kinerja dari program ini adalah Persentase ARG pada belanja langsung APBD; Persentase kelembagaan PUG aktif, presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG dan Persentase Perempuan di Lembaga legislatif.

2) Program Perlindungan Perempuan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan Kabupaten/kota dengan target kinerja persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart dan Rasio Kekerasan terhadap perempuan.

3) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan target kinerja Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.

4) Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kabupaten/kota untuk mencapai target kinerja Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak.

5) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelemagaan pemenuhan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha dan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan Kualitas Hidup Anak. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja Persentase anak yang terlibat dalam kegiatan anak.

6) Program Perlindungan Khusus Anak

Program ini diarahkan pada kegiatan Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak, penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja presentase anak korban kekerasan.

5.1.2.2.3. Pangan

1) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Program ini di arahkan pada penyediaan infrastruktur cadangan pangan termasuk hiliisasi komoditas susu dan daging serta komoditas pertanian lokal lainnya.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan; pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan kabupaten/kota dan pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi. Program ini direncanakan untuk mencapai target Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) dan kinerja ketersediaan dan penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya.

3) Program Penanganan Kerawanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan dan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota untuk mencapai target indikator kinerja penanganan rumah tangga rawan pangan.

4) Program Pengawasan Keamanan Pangan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar daerah kabupaten/kota untuk mencapai target pangan segar aman.

5) Program Penyuluhan Pertanian

Program ini di arahkan pada presentase cakupan bina kelompok tani kategori pemula, lanjut, madya serta utama serta upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pada lahan yang ada.

6) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada peningkatan distribusi dan kualitas prasarana pertanian didukung dengan pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian, stimulan bantuan benih padi, pengendalian OPT dan DPI, mempertahankan luas lahan pertanian yang ada.

5.1.2.2.4. Pertanian

1) Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Program ini diarahkan pada kegiatan koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi untuk mencapai target indikator kinerja persentase rencana pengadaan tanah berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA).

2) Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian permasalahan ganti kerugian tanah untuk pembangunan.

3) Program Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi, inventarisasi dan pengurusan hak atas tanah aset pemerintah untuk mencapai indikator kinerja persentase aset tanah pemerintah. Selain itu Program ini juga diarahkan pada pelaksanaan Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, bisa ditambahkan dukungan program pertanahan pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan penataan aset dan akses.

4) Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota untuk mencapai indikator kinerja persentase penataan akses dalam pemanfaatan redistribusi tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.

5) Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan untuk mencapai indikator kinerja persentase penyelesaian sengketa, konflik dan perkara dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota.

5.1.2.2.5. Lingkungan Hidup

1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dengan indikator kinerja berupa dokumen IKPLHD dan dokumen KLHS.

2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini diarahkan pada kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota. Target kinerja pada program ini Pemantauan Status Mutu Air, Persentase peningkatan sarana prasarana laboratorium, Presentase Konservasi Lahan, dan Persentase Konservasi Sumber Mata Air.

3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota dengan target kinerja peningkatan Persentase ruang terbuka hijau dan cakupan layanan penerangan jalan umum. Program kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam memenuhi luasan RTH di Kota Salatiga.

4) Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target capaian persentase penyimpangan dan atau pengangkutan limbah B3 sesuai dengan ketentuan.

5) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan. Indikator capaian program ini adalah Kegiatan penegakan hukum lingkungan, Prosentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan, Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti dan presentase tersusunnya dokumen IGRK.

6) Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan yang bertujuan untuk meraih prestasi berupa penghargaan tingkat kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat propinsi. Indikator capaian program ini adalah Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat Kabupaten/kota, Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi untuk penghargaan tingkat Provinsi, Peningkatan Kapasitas Pemahaman Lingkungan Hidup.

7) Program Pengelolaan Persampahan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan persampahan untuk mengurangi sampah perkotaan dan juga kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak Swasta. Indikator kinerja untuk program ini adalah Persentase Pengurangan Sampah, Persentase Penanganan Sampah, Persentase Pengangkutan Sampah.

5.1.2.2.6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1) Program Pendaftaran Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Penataan Pendaftaran Penduduk. Indikator yang ditargetkan untuk dicapai melalui pelaksanaan program ini yaitu Persentase perekaman KTP-el dan Persentase penerbitan KIA usia 0-5 tahun.

2) Program Pencatatan Sipil

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan pencatatan sipil dan Penyelenggaraan pencatatan sipil. Target capaian program ini yaitu Persentase penerbitan akta kelahiran usia 0-5 tahun dan Presentase akta perkawinan non muslim.

3) Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan; penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Indikator kinerja program ini yaitu untuk mencapai ketersediaan database kependudukan.

5.1.2.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1) Program Pengendalian Penduduk

Program ini diarahkan pada kegiatan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk; pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota. Capaian indikator program ini yaitu Cakupan Pembinaan kebijakan dan strategi pengendalian penduduk (penyusunan *Grand Design*, Profil/Parameter dan Proyeksi Penduduk), Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 thn) per 1000 perempuan usia 15-19 thn (ASVFR), Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan, Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP).

2) Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal; Pendayagunaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB); Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota; Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB. Capaian indikator program yaitu untuk mencapai Rasio akseptor KB baru, Cakupan peserta KB aktif, Rasio Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi

(*Unmetneed*), Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), dan Persentase Fasilitas Kesehatan yang siap melayani KB MKJP.

3) Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; kegiatan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/ kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indikator kinerja dari program ini yaitu Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD), Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA), Cakupan Perkawinan Usia di Bawah 21 tahun, Cakupan Kader BKB yang Terlatih, Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB, dan Persentase Baduta Stunting.

5.1.2.2.8. Perhubungan

1) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program ini diarahkan pada kegiatan penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota; Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota; Pengelolaan terminal penumpang Tipe C; Pengujian berkala kendaraan bermotor; Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota; Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan Kabupaten/Kota; Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 daerah kabuputeran/kota; dan Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan perdesaan dalam 1 daerah kabupaten/kota. Indikator capaian program ini yaitu Presentase rambu-rambu terpasang dan Presentase Layanan angkutan darat.

5.1.2.2.9. Komunikasi dan Informatika

1) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah.

2) Program Aplikasi Informatika

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota; pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota guna mencapai indikator kinerja Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dan Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi.

5.1.2.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase koperasi yang berkualitas.

2) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan capaian program Persentase KSP/USP koperasi sehat, dengan indikator kinerja Persentase koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan.

3) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase pengelola koperasi yang mengikuti pelatihan.

4) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota, capaian program ini yaitu persentase akses pasar anggota koperasi.

5) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan yang dilakukan untuk mencapai indikator program persentase UMKM yang mendapatkan akses pembiayaan.

6) Program Pengembangan UMKM

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil dengan capaian program persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha.

5.1.2.2.11. Penanaman Modal

1) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal dan pembuatan peta potensi investasi kabupaten/kota dengan capaian program Nilai investasi berskala nasional PMA dan PMDN.

2) Program Promosi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Nilai Prosentase kenaikan jumlah minat Investasi berskala nasional (PMA dan PMDN).

3) Program Pelayanan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota capaian Persentase perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan.

4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dengan capaian program Jumlah Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang masuk.

5) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dengan capaian program Prosentase kenaikan perizinan dan non perizinan yang dikelola.

5.1.2.2.12. Kepemudaan dan Olahraga

1) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten/kota dan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten/kota, dengan capaian program Persentase pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan.

2) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten/kota, pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi dan pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi. Capaian program adalah Persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga.

3) Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan dengan capaian program Persentase fasilitasi pengembangan kapasitas kepramukaan.

5.1.2.2.13. Statistik

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota untuk mencapai target Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah.

5.1.2.2.14. Persandian

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi.

5.1.2.2.15. Kebudayaan

1) Program Pengembangan Kebudayaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota, pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota dengan capaian program persentase obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan.

2) Program Pembinaan Sejarah

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase kajian sejarah.

3) Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase penetapan cagar budaya.

4) Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Program ini diarahkan pada kegiatan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Persentase SDM, Lembaga dan pranata yang dibina.

5) Program Pengelolaan Permuseuman

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan museum Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program adalah Presentase penambahan jumlah koleksi museum.

5.1.2.2.16. Perpustakaan

1) Program Pembinaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten/kota dan pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program nilai tingkat kegemaran membaca.

2) Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dengan capaian program presentase koleksi nasional dan kuno yang dilestarikan.

5.1.2.2.17. Kearsipan

1) Program Pengelolaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota serta Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota dengan capaian program Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku.

2) Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyelamatan arsip perangkat daerah kabupaten/kota yang digabung dan/atau dibubarkan, dan pemekaran daerah kecamatan dan desa/kelurahan; autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media serta pencarian arsip statis kabupaten/kota yang dinyatakan hilang dengan capaian program Persentase jumlah arsip yang diselamatkan.

3) Program Perizinan Penggunaan Arsip

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup di kabupaten/kota dengan capaian program Persentase peningkatan pengguna atau pengunjung arsip.

5.1.2.3. Urusan Pilihan

5.1.2.3.1 Kelautan dan Perikanan

1) Pengelolaan Perikanan Budidaya

Program ini diarahkan pada kegiatan pemberdayaan pembudi daya ikan kecil, pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pembudidaya ikan dan presentase kelompok pembudidaya ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

2) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemberdayaan pembudi daya ikan kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan dengan capaian program cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan serta indikator presentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

5.1.2.3.2 Pariwisata

1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota, pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase obyek wisata yang ditingkatkan.

2) Program Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan capaian program jumlah kegiatan/fasilitasi pemasaran pariwisata.

3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem ekonomi kreatif dengan capaian program Jumlah kegiatan pengelolaan ekonomi kreatif.

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar dengan capaian program Jumlah Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

5.1.2.3.3 Pertanian

1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengawasan penggunaan sarana pertanian; Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro organisme; Peningkatan Mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan; Penyediaan Benih/Bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang seumumnya dalam 1 daerah, dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan sarana pertanian.

2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian dengan capaian program Pemenuhan Kebutuhan prasarana pertanian.

3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Program ini diarahkan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota; Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota; Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian program Mortalitas Hewan/ternak akibat penyakit zoonosis.

4) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota dengan capaian program Prosentase kejadian bencana pertanian.

5) Program penyuluhan pertanian

Program ini diarahkan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan capaian program Cakupan Bina Kelompok Tani untuk Pemula, Lanjut, Madya dan Utama.

5.1.2.3.4 Perdagangan

1) Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, dan izin usaha toko swalayan; penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri; penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum di tempat. Capaian program ini yaitu Persentase jumlah perizinan yang dilegalitas terhadap jumlah pelaku usaha perdagangan.

2) Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan; pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerjanya. Capaian program ini adalah Persentase pasar tradisional yang memenuhi standar, Persentase kelompok pedagang (formal dan informal) yang dibina, Persentase kelompok PKL yang dibina, Persentase PKL yang ditata terhadap jumlah total PKL, Persentase PKL yang menempati lokasi peruntukan terhadap jumlah PKL.

3) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten/kota dan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah kabupaten/kota dengan capaian program adalah Persentase penerima pupuk bersubsidi terhadap pengguna pupuk dan Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan daerah.

4) Program Pengembangan Ekspor

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) daerah

kabupaten/kota capaian program adalah Persentase produk unggulan terhadap jumlah produk di Kota Salatiga.

5) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang, dan pengawasan guna mencapai indikator program berupa Persentase Alat UTP dan perlengkapannya di wilayah Kota Salatiga yang ditera ulang dan bertanda tera sah.

5.1.2.3.5 Perindustrian

1) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Program ini diarahkan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Program ini dilaksanakan untuk mendapatkan indikator berupa Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang.

2) Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pemenuhan komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional yang terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait; Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait.

5.1.2.3.6 Transmigrasi

1) Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

Program ini diarahkan pada kegiatan penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan capaian program Persentase pelaksanaan proses transmigrasi.

5.1.2.4. Urusan Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.4.1. Sekretariat Daerah

1) Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program ini diarahkan pada kegiatan administrasi tata pemerintahan, fasilitasi dan koordinasi hukum, fasilitasi kerjasama daerah dan Pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi administrasi pemerintahan; Cakupan koordinasi bidang administrasi kewilayahan; Cakupan fasilitasi Kerjasama daerah; skor LPPD; Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret); Prosentase pelaksanaan kebijakan bidang hukum dan Persentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

2) Program Perekonomian dan Pembangunan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelaksanaan kebijakan perekonomian; pemantauan kebijakan sumber daya alam; Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa, Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian; Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam; Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; Pelaksanaan Administrasi Pembangunan. Capaian program ini yaitu Cakupan

koordinasi program perekonomian dan pembangunan; cakupan koordinasi OPD pengampu DBHCHT; Cakupan koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD; Cakupan Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup dan SDA; Cakupan Koordinasi POK dan Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui pengadaan.

3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini diarahkan kegiatan pada Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah; Penataan Organisasi; Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Capaian program ini yaitu Cakupan koordinasi dan fasilitasi bidang keprotokolan dan kehumasan yang berkualitas; presentase kegiatan administrasi umum yang berhasil dikoordinasikan dan difasilitasi dan Cakupan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah.

5.1.2.4.2. Sekretariat DPRD

1) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Program ini diarahkan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD. Capaian program ini adalah Cakupan fasilitasi Fungsi Legislasi, Cakupan fasilitasi fungsi Penganggaran, Cakupan fasilitasi fungsi Pengawasan.

5.1.2.5. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

5.1.2.5.1. Perencanaan

1) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan penyusunan perencanaan dan pendanaan; analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah; pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah, capaian program ini adalah Rata-rata capaian kinerja sasaran pembangunan daerah.

2) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; koordinasi perencanaan bidang perekonomian dan SDA (sumber daya alam); koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Capaian program ini yaitu Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra dan Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang.

5.1.2.5.2. Keuangan

1) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah; koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah; koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah; penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan data dan implementasi sistem informasi pemerintah daerah lingkup keuangan daerah. Capaian program ini yaitu Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan, Persentase belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures), Budget execution, deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD, Cash management (Persentase anggaran), Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan, dan Akses publik terhadap informasi keuangan daerah.

2) Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk mencapai indikator kinerja program Asset Management.

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini diarahkan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah dengan capaian program Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD.

5.1.2.5.3. Kepegawaian

1) Program Kepegawaian Daerah

Program ini diarahkan kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN; mutasi dan promosi ASN; pengembangan kompetensi ASN dan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur. Capaian dari program ini adalah presentase Persentase PNS yang melanjutkan Pendidikan, Rasion PNS yang mengikuti assessment, Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan), Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan).

5.1.2.5.4. Pendidikan dan Pelatihan

1) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Program ini diarahkan kegiatan pengembangan kompetensi teknis dan Sertifikasi, kelembagaan, pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional. Capaian program ini yaitu Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Persentase ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial dan Fungsional.

5.1.2.5.5. Penelitian dan Pengembangan

1) Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Program ini diarahkan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dengan capaian program Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah.

5.1.2.5.6. Kecamatan

Program yang diselenggarakan oleh kecamatan di Kota Salatiga dilaksanakan oleh 4 kecamatan yaitu: Kecamatan Sidorejo, Tingkir, Argomulyo dan Sidomukti.

1) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, capaian program ini adalah Persentase Peningkatan Skor IKM.

2) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program ini diarahkan kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa, kegiatan pemberdayaan kelurahan. Capaian program ini adalah Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel.

3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini diarahkan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah dengan capaian indikator program yaitu Persentase upaya peningkatan ketentraman dan ketertiban di tingkat wilayah dan Persentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program ini diarahkan kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa dengan capaian program Persentase realisasi wajib pajak yang membayar PPB P2 dan Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP.

5.1.2.6. Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

5.1.2.6.1. Inspektorat Daerah

1) Program Penyelenggaraan Pengawasan

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan pengawasan internal, penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu. Capaian program ini yaitu Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal; Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Persentase Jumlah OPD Meningkatkan Nilai Evaluasi SAKIP.

2) Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan dan kegiatan pendampingan dan asistensi. Capaian program ini yaitu nilai MCP Korsupgah KPK.

5.1.2.7. Urusan Pemerintahan Umum

5.1.2.7.1. Kesatuan Bangsa Dan Politik

1) Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan dengan capaian program yaitu Persentase Pemahaman Masyarakat terhadap Nilai nilai Pancasila.

2) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

Program ini diarahkan pada kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik untuk mencapai indikator program persentase pendidikan Politik yang dilaksanakan.

3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan untuk mencapai indikator program yaitu Persentase Ormas yang berperan aktif dalam pembangunan.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan capaian program Persentase penurunan penyalahgunaan narkoba dan Indeks Kerukunan Umat Beragama.

5) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
Program ini diarahkan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan capaian program yaitu Persentase Penurunan Kejadian atau konflik sosial.

5.2. Pendanaan Daerah

Program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2027, didukung dengan pembiayaan yang berasal dari berbagai sumber dana. Kebutuhan penganggaran untuk membiayai pelaksanaan program hingga sub kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah, upaya pencapaian target capaian kinerja yang merupakan rangkaian upaya penerjemahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Pemerintah yang dilaksanakan secara bertahap. Pada tahun 2027, secara terperinci dipersiapkan kebutuhan anggaran per sub kegiatan yang nantinya sebagai pedoman dalam penggunaan belanja untuk menerjemahkan indikator kinerja yang akan dicapai.

Pencapaian kinerja Pembangunan daerah tahun 2027 tersebut didukung dengan rencana pendanaan yang dapat memenuhi kebutuhan akan belanja dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah tahun 2027 diproyeksikan sebesar Rp770.264.119.337,-, belanja daerah sebesar Rp770.264.119.337,-. Sedangkan perkiraan maju tahun 2028 diambil dari proyeksi pendanaan pada dokumen RPJMD 2025-2029 dan kebutuhan belanja pada Ranwal Renja Perangkat Daerah tahun 2028. Berikut adalah proyeksi kerangka pendanaan Kota Salatiga tahun 2027 dan perkiraan maju tahun 2028.

Tabel 5. 5 Kerangka Pendanaan Kota Salatiga Tahun 2027

No	Uraian	Proyeksi	
		2027	2028
1	PENDAPATAN	770.264.119.337	1.111.792.631.000
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	313.422.633.337	363.993.590.000
3	Pendapatan Pajak Daerah	99.270.000.000	131.421.930.000
4	Pendapatan Retribusi Daerah	184.145.031.052	192.634.490.000
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.055.000.000	24.791.979.000
6	Lain-lain PAD yang Sah	6.952.602.285	15.145.191.000
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s/d 6)	313.422.633.337	363.993.590.000
8	PENDAPATAN TRANSFER		
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN	412.250.546.000	689.093.645.000
10	Dana Bagi Hasil	16.519.286.000	37.720.843.000
12	Dana Alokasi Umum	395.731.260.000	525.729.000.000
13	Dana Alokasi Khusus	-	125.643.802.000
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s/d 13)	412.250.546.000	515.923.331.000
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA		
16	Dana Otonomi Khusus	-	-
17	Dana Penyesuaian	-	9.663.611.000
18	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (16 s/d 18)	412.250.546.000	9.663.611.000
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	44.590.940.000	49.041.785.000
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	-	-
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (20 s/d 21)	44.590.940.000	49.041.785.000
23	Total Pendapatan Transfer (14 + 18 + 22)	456.841.486.000	747.799.041.000
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH		
25	Pendapatan Hibah	-	-
26	Pendapatan Dana Darurat	-	-
27	Pendapatan Lainnya	-	-
28	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s/d 27)	-	-
29	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 23 + 28)	770.264.119.337	1.111.792.631.000
30	BELANJA		
31	BELANJA OPERASI		
32	Belanja Pegawai	383.943.502.825	425.310.793.290
33	Belanja Barang & Jasa	350.733.087.358	434.491.799.864
34	Belanja Bunga	-	-
35	Belanja Subsidi	-	-

No	Uraian	Proyeksi	
		2027	2028
36	Belanja Hibah	5.101.548.216	8.251.548.216
37	Belanja Bantuan Sosial	245.500.000	267.050.000
38	Jumlah Belanja Operasi (32 s/d 37)	740.023.638.399	868.321.191.370
39	BELANJA MODAL		
40	Belanja Tanah	50.000.000	3.000.000.000
41	Belanja Peralatan dan Mesin	7.135.219.897	9.246.430.635
42	Belanja Gedung dan Bangunan	6.466.300.000	3.752.500.000
43	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	12.237.500.341	34.082.647.200
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.354.460.700	1.070.534.084
45	Belanja Aset Lainnya	-	-
46	Jumlah Belanja Modal (40 s/d 45)	27.40.480.938	51.152.111.919
47	BELANJA TAK TERDUGA		
48	Belanja Tak Terduga	3.000.000	3.000.000.000
49	Jumlah Belanja Tak Terduga (48)	3.000.000	3.000.000.000
50	JUMLAH BELANJA (38 + 46 + 49)	770.264.119.337	922.473.303.289
51	TRANSFER	-	-
52	BELANJA TRANSFER	-	-
53	Belanja Bagi Hasil	-	-
54	Belanja Bantuan Keuangan	-	-
55	JUMLAH TRANSFER/BELANJA TRANSFER (53 s/d 54)	-	-
56	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (50 + 55)	770.264.119.337	922.473.303.289
57	SURPLUS / DEFISIT	-	189.319.327.711
58	PEMBIAYAAN		-
59	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
60	Penggunaan SILPA	-	-
61	Pencairan Dana Cadangan	-	-
62	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
63	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-
64	Penerimaan Kembali Pemerian Pinjaman Daerah	-	-
65	Penerimaan Piutang Daerah	-	-
66	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN (60 s/d 65)	-	-
67	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
68	Pembentukan Dana Cadangan	-	-
69	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	-

No	Uraian	Proyeksi	
		2027	2028
70	Pembayaran Pokok Utang	-	-
71	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
72	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN (67 s/d 70)	-	-
73	PEMBIAYAAN NETO (66 - 72)	-	-
74	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (73 + 57)	-	-

LAMPIRAN BAB V

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

<https://rkpd.salatiga.go.id/2026/01/materi-fkp-ranwal-rkpd-tahun-2027/>

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dari sisi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan dan daya saing. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode pertama RPJMD Kota Salatiga Tahun 2023-2026 dapat dicapai. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Kota Salatiga tahun 2026 berdasarkan hasil Rakortekbang Provinsi Jawa Tengah.

Selain itu, kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah juga memperhatikan target indikator makro yang merupakan Indikator Utama Pembangunan pada RPJPD 2025-2045 sebagai baseline tahun 2025 Tahap I RPJPD yang selaras dengan RPJPN 2025-2045. Penetapan target juga berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/1761SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 000.7/0002940 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 dengan memperhatikan dinamika pembahasan terkait Indikator Utama Pembangunan (IUP) dengan Pemerintah Pusat.

6.1 Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka upaya pencapaian prioritas pembangunan daerah tahun 2026, maka ditetapkan target pada Indikator kinerja utama pemerintah Kota Salatiga tahun 2026 sebagai berikut.

Tabel 6. 1. Indikator Kinerja Utama Kota Salatiga Tahun 2026

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		Perangkat Daerah Koordinator
			Realisasi 2024	Target 2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Nilai	85,72	86,43	Sekretariat Daerah
2	Pertumbuhan ekonomi	Persen	5,37	5,56 – 6,56	Sekretariat Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kinerja		Perangkat Daerah Koordinator
			Realisasi 2024	Target 2026	
3	PDRB Perkapita	Juta Rp	89,83	90,49-136,1	Sekretariat Daerah
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,86	3.84-3.54	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5	Angka Kemiskinan	Persen	4,57	4,34-4,20	Sekretariat Daerah
6	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	80,67	82,15	Sekretariat Daerah
7	Penurunan emisi GRK kumulatif	TonCO2eq	13.291,89	48.158,45	Dinas Lingkungan Hidup
8	Indeks Daya saing Daerah	Nilai	4,16	4,84	Bappeda

Keterangan :

*)Target tahun 2026 ditetapkan dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2024 dan proyeksi tahun 2025

6.2 Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Kota Salatiga tahun 2026. Indikator kinerja daerah tahun 2026 adalah sebagi berikut :

Tabel 6. 2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2026

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
I	INDIKATOR KINERJA DAERAH			
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI			
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	91,35	91,40
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	4,04	4,02
3	Konsumsi Listrik Per kapita	kWh/kapita	NA	280.630.448
4	Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	NA	66,09
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	61,45	69,98
6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	NA	19,4
7	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitasi Pengolahan Sampah	%	NA	10950
8	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	NA	30
9	Indeks Resiko Bencana	Angka	76,52	76,2
10	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,9	0,6
11	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,24	1,2
12	Kepadatan Penduduk	Orang/km2	3.619	4.063
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT			

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,37	5,46
2	Indeks Gini	Angka	0,402	0,372
3	Usia harapan Hidup	Tahun	78,26	78,64
4	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,468	0,41
5	Prevalensi stunting	%	5,92	5,6
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	11,48	16,07
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,46	11,23
8	Angka Literasi/Numerasi	%	NA	91,55
9	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Angka	100	100
10	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	%	NA	54
11	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	78,98	78,2
12	Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,222	0,12-0,11
13	Indeks Pembangunan Gender	Angka	95,59	95,41
	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
1	Angka Ketergantungan	%	43,16	49,49
2	Rasio PDRB Industri pengolahan	%	29,25	34,32
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	7,92	8,2
4	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	5,92	7,11
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	70,72	66,74
6	Indeks Inovasi Daerah	Angka	51,1	52
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	Angka	NA	91,94
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen	42,44	42
9	Ekspor Barang dan Jasa	Rp	157.256.067	180.042.471
10	Rasio panjang jalan	%	91,97	95,53
11	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	94,02	95
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,532	0,65
13	Tingkat Inflasi	%	0,35	2,5
14	Indeks Akses Keuangan Daerah	Angka	5,69	5,71
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
1	Indeks Reformasi Hukum	Angka	98,36	80,6
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,64	3,75
3	Indeks Pelayanan Publik	Angka	4,62	4,45
4	Indeks Integritas Nasional	Angka	78,16	79,49
5	Persentase Penegakan Perda	%	100	100
6	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%	94,54	100
II	INDIKATOR KINERJA KUNCI			
	URUSAN PENDIDIKAN			
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	97,88	100
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,33	100
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	96,82	100

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	71,04	100
	URUSAN KESEHATAN			
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	%	3,96	4,32
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	%	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
11	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100
	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	0	100
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota	%	0	0
3	Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	100	100
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kota	%	93,19	100
5	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	92,008	100
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	87,67	88,2
7	Rasio kemandapan jalan	%	91,97	93,09
8	Rasio tenaga operator/teknis/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	93,81	100

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100
URUSAN PERUMAHAN RAKYAT & PERMUKIMAN				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kota	%	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangan	%	10,6	10,6
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	5,17	4,44
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	65,69	68,32
URUSAN TRANTIBUM & LINMAS				
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	1.184	1.304,00
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	700	770
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	8.861	8.511,00
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7	<15
URUSAN SOSIAL				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kota	%	100	100
URUSAN TENAGA KERJA				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	10	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	100	100
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Jt Rp/org	106,182	114,67
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar	%	93,23	93,79
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	71,05	71,48
URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	9,23	9,69
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kota	%	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	69,63	42,35

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
	URUSAN PANGAN			
1	Persentase cadangan pangan (tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	267,676	100
	URUSAN PERTANAHAN			
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	0	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	%	0	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0	100
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	%	0	100
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100
	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP			
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota	%	61,45	61,63
2	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpada di wilayah Kota	%	98,15	98,35
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	17,8	19,44
	URUSAN ADMINISTRASI PENDUDUK & CATATAN SIPIL			
1	Perekaman KTP Elektronik	%	97,95	98,38
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	85,85	88,97
3	Persentase Penduduk usia 0- 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	99,44	99,63
4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100
	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	100
	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BEENCANA			
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	1,71	1,72
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	65,71	67,02
3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	8,51	7,66
	URUSAN PERHUBUNGAN			
1	Rasio konektivitas Kota	Rasio	0,88	0,87
2	Kinerja lalu lintas Kota	Rasio	0,31	0,32
	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kota	%	100	100
URUSAN KOPERASI DAN UMKM				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	71,57	74,43
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	100	100
URUSAN PENANAMAN MODAL				
1	Persentase peningkatan investasi di Kota	%	6,891	6,91
URUSAN PEMUDA DAN OLAHRAGA				
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,96	2,64
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	36,385	46,13
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	32	36,76
URUSAN STATISTIK				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
URUSAN PERSANDIAN				
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	70,85	72
Urusan Kebudayaan				
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	40
Urusan Perpustakaan				
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Indeks	75,23	75,73
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	100	100
Urusan Kearsipan				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)	%	88,67	89,17
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	16,67	17,17
Urusan Kelautan Perikanan				
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kota di wilayah kota (sumber data: one data KKP)	Ton	84,28	87
Urusan Pariwisata				
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	117,73	0,5
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kota	%	113,003	0,2
3	Tingkat hunian akomodasi	%	51,42	56,69

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	7,92	7,9
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD		0,16	0,18
	Urusan Pertanian			
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha	758,25	720,34
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	-179,89	100
	Urusan Kehutanan			
	Urusan Perdagangan			
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	48,27	65,25
3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,32	73,16
	Urusan Perindustrian			
1	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di Kota	%	0,43	0,5
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kota	%	97,76	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kota	%	0	-
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Ada/tidak	100	100
	Urusan Transmigrasi			
	Perencanaan dan Keuangan			
1	Persentase Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	0,815277778	19,16
2	Persentase PAD	%	30,24	32,17
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3	3.023
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3
5	Persentase Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	86,365	88,09
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP
	Pengadaan			
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0

No	Indikator	Satuan	Kinerja	
			Realisasi 2024	Target 2026
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	63,61	64
3	Persentase nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	58,99	59,83
4	Presentase Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		-0,7	1,5
Kepegawaian				
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	74,44	74,44
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	24,94	25,44
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	99,45	99,5
Manajemen Keuangan				
1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	4,3691	4,5
2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	22,43	22,45
3	Assets management	Satuan Hasil	4	4
	Apakah ada daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya
	Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	ada/tidak	Ya	Ya
	Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	ada/tidak	Ya	Ya
	Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran?	ada/tidak	Ya	Ya
4	Cash Management: Persentase anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	8,72	8,28
Transparansi dan Partisipasi Publik				
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	96,09	96,44
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	100	100

6.3 Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga diselaraskan melalui Rakortekbang dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6. 3. Keselarasan Sasaran Indikator Makro Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

NO	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2027	
			Provinsi	Kota Salatiga
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,3 – 7	6,60 – 7,60
2	PDRB Per Kapita	Juta Rp	56 – 59,8	112,68 – 117,68
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	8	
4	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,51 – 8,17	4,30 – 3,39
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,65 – 4,08	3,82 – 3,52
6	Rasio Gini	Angka	0,358 – 0,363	0,357
7	Indeks Modal Manusia	Angka	0,63	

NO	Indikator Makro	Satuan	Target Tahun 2027	
			Provinsi	Kota Salatiga
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka		86,85
9	Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	7,27	
10	Penurunan Emisi GRK Kumulatif	TonCo2EQ		127.239,68
11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Angka	75,78	70,03

6.4 Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Keselarasn Indikator Utama Pembangunan antara Provinsi Jawa Tengah dan Kota Salatiga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 6. 4. Keselarasan Indikator Utama Pembangunan Provinsi Jawa Tengah dengan Kota Salatiga

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan		IUP		Arah Pembangunan		IUP	
1	2		3	4	5		6
CJ01. Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,68	1. Kesehatan untuk Semua	4	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,87
	2	Kesehatan Ibu dan Anak :				Kesehatan Ibu dan Anak :	
	a	Angka Kematian Ibu	77,21		5	Jumlah Kasus Kematian Ibu (angka)	2
	b	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	16		6	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,43
	3	Penanganan Tuberkulosis:				Penanganan Tuberkulosis:	
	a	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	95		7	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	135
	b	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	92		8	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91,45
	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,43		9	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100
CJ02. Pendidikan Berkualitas secara Inklusif	5	Hasil Pembelajaran:		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata		Hasil Pembelajaran:	
	a	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:			10	Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	
		i) Literasi Membaca	90,00-92,86			a) Literasi Membaca SD/Sederajat	98,8

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
		ii) Numerasi	40,00-44,29			b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	94,77
						c) Numerasi SD/Sederajat	85,08
						d) Numerasi SMP/Sederajat	94,77
	b	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :			11	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	16,2
		i) Literasi Membaca	73,69 – 76,19				
		ii) Numerasi	66,55 – 69,05				
	c	Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,80 – 8,81		12	Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,39
	d	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,09 – 13,11		13	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	23,61
	6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	8,67		14	Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	100
	7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	68,52				
CJ03. Perlindungan Sosial yang Adaptif		Tingkat Kemiskinan (%)	8,51 – 8,17	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1	Tingkat Kemiskinan (%)	4,30-3,39

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	53,64		38	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	56,24
		Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	23,50				
CJ04. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	35,24 – 35,89	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	23	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	34,6
	12	Pengembangan Pariwisata:			24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	8,36
	a	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	3,72		25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	1,146
	b	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)*	74,76		26	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,25
	3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	13,54		27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,90
	4	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:			28	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	3,34
	a	Proporsi Jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	10,59		29	Disparitas Harga	±10
	b	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level Provinsi	6,45				
	c	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,85				

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	d	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	2,34				
	e	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,82				
	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,65 – 4,08		36	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,82-3,52
	16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	63,82		37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,52
	17	Tingkat Penguasaan IPTEK : Kapabilitas Inovasi	4,67		34	Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	3,86
CJ05. Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		5. Penerapan Ekonomi Hijau			
	a	Indeks Ekonomi Hijau	48,50				
	b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	21,87				
CJ06. Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,24	6. Transformasi Digital	39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	92,00
CJ07. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	6,50	7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,55
	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	30,75		55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota	112,68-117,68
	22	Ekspor Barang dan Jasa	11,33		56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia	17,43-17,93
CJ08. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan:		8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	95,5

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	a	Proposi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	2,49		41	Persentase Panjang Jalan Kondisi Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	95,54
	b	Rumah Tangga dengan Askes Hunian Layak, Terjangkau dan Berkenalan	76,08		42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	9,26
	c	Persentase Desa Mandiri	28,68		35	Persentase Desa Mandiri	-
	d	Persentase Panjang Jalan Provinsi Kondisi Permukaan Mantap	93,29				
	e	Indeks Pelayanan Transportasi	6,904				
	f	Persentase Keterwujudan Penataan Ruang					
CJ09. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas, Adaptif dan Kolaboratif	24	Indeks Reformasi Hukum	92,50	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	51	Indeks Reformasi Hukum	81,23
	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4,59		52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,81
	26	Indeks Pelayanan Publik	4,57		53	Indeks Pelayanan Publik	4,7
	27	Indeks Integritas Nasional	82,25		54	Indeks Integritas Nasional	80,65
					50	Indeks Reformasi Birokrasi	82,66
CJ10. Ketentraman dan Ketertiban, serta Demokrasi Substansial	28	Indeks Pembangunan Hukum : Nilai Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	79,50	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional			

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
				Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
	29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	79,50				
	30	Indeks Demokrasi Indonesia	86,80 – 90,22				
CJ11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,39	11. Stabilitas Ekonomi makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,64
	32	Tingkat Inflasi (%)	1,50 – 3,50		32	Total Dana Pihak Ketiga pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	64,38
	33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan:			33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	47,55
	a	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	24,84				
	b	Aset Dana Pensiun/PDRB	0,39				
	c	Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan	4.354.768				
	d	Total Kredit/PDRB	27,15				
	34	Inklusi Keuangan	93,37				
CJ12. Daya Saing Daerah dan Ketahanan Wilayah	35	Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah	Sedang	12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	36	Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah	Cukup Tangguh				
CJ13. Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan Karakter	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	63,40	13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	15	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	90,03
	38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	80,03 – 80,09		16	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	42,00
					17	Jumlah pengunjung tempat bersejarah	14.460
					18	Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,93
					19	Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	1,12
					20	Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	0
CJ14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	77,79	14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	21	Indeks Pembangunan Keluarga	63,50-64,82
	40	Indeks Ketimpangan Gender	0,301		22	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,12-0,11
CJ15. Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,492	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,81

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	42	Kualitas Lingkungan Hidup :			43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	23,8
	a	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,78		47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	29,30
	b	Rumah Tangga dan Akses Sanitasi Aman	21,89				
	c	Pengelolaan Sampah : - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	24,00				
		- Proposi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	30,50				
CJ16. Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	46,80
	a	Ketahanan Energi:			45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	66,50
	-	Konsumsi Listrik per Kapita	945,82		2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	3,63
	-	Intensitas Energi Primer	192,72		3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	94,54
	b	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	7,43				
	c	Ketahanan Air					

Provinsi Jawa Tengah			Target Tahun 2027	Kota Salatiga			Target Tahun 2027
Arah Pembangunan	IUP			Arah Pembangunan	IUP		
1	2		3	4	5		6
	-	Kapasitas Air Baku	6,45				
	-	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	45,73				
	-	Persentase Kondisi Baik Infrastruktur Tampung Air Kewenangan Provinsi	64,91				
	-	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Provinsi	69,17				
	-	Persentase Sungai Kondisi Baik Kewenangan Provinsi	52,46				
CJ17. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana	93,33	17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	72,89-71,67
	45	Persentase Penurunan Emisi GRK:			49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	295.302,60
	a	Kumulatif	7,27				
	b	Tahunan	17,05				

6.5 Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan RKP dengan RKPD

Keselaran Intervensi Pembangunan Kewilayahan antara RKP dan RKPD Kota Salatiga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 6. 5. Keselarasan Intervensi Pembangunan Kewilayahan antara RKP dengan RKPD Kota Salatiga

KODE	RKP 2026			RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	
	Jawa Tengah	A. Kawasan Pertumbuhan				
		5 WM Semarang - Kota Semarang - Kota Salatiga - Kab. Semarang - Kab. Kendal - Kab. Demak - Kab. Grobogan	Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di WM Semarang melalui pembangunan BRT dan peningkatan kereta komuter;			
			Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak;			
			Pengembangan Kawasan Perdesaan Plasma Petik Sari (Kab. Kendal);			
			Pembangunan TPST Bokongsemar;			
			Prasarana pengendalian banjir di kawasan metropolitan strategis Kabupaten Demak;			
			Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/Permukiman/Kawasan Tertentu.	Kota Salatiga	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
					Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	

KODE	RKP 2026			RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	
					Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
					Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
					Penyediaan Unit pengolahan setempat	
					Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	
		B. Kawasan Komoditas Unggulan				
		C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi				
		D. Kawasan Afirmasi				
		E. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana				
		1 Kawasan Konservasi TN Merbabu-Merapi	Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik;			

KODE	RKP 2026			RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	
			Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri;			
			Peningkatan fungsi sosial kawasan hutan;			
			Perlindungan dan pengamanan hutan;			
			Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi;	Kota Salatiga	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana;		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
			Peningkatan resiliensi masyarakat terhadap bencana.		<i>Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana</i>	
					<i>Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota</i>	
					<i>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</i>	
					<i>Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota</i>	

KODE	RKP 2026			RKPD 2026		KETERANGAN
	LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI		LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INTERVENSI	
					Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
					Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	
					Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	
					Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	

6.6 Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga

Keselarasn Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut.

Tabel 6. 6. Keselarasan Kegiatan Prioritas Utama (Prioritas Nasional) dengan Kota Salatiga

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
1	Prioritas Nasional 1	Penguatan Pers dan Media Massa yang Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S)	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
2	Prioritas Nasional 2	Transformasi tata kelola industri pertahanan dan penerapan skema spend to invest		
3		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Kalimantan Tengah		
4		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Sumatra Selatan		
5		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan Papua Selatan		
6		Pengembangan kawasan sentra produksi pangan (KSPP)/lumbung pangan lainnya	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
7		Pembangunan pangan akuatik (blue food)	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
8		Pembangunan pangan hewani	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
9		Pembangunan pangan lokal dan nabati	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
10		Fortifikasi dan biofortifikasi pangan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
11		Peningkatan penyediaan energi	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
12		Perluasan akses dan jangkuan pelayanan energi		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
13		Penguatan implementasi transisi energi berkeadilan		
14		Konservasi sumberdaya air	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
15		Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
16		Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
17		Pengembangan terpadu pesisir utara jawa		
18		Penguatan faktor pendukung ekonomi digital		
19		Penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya		
20		Pengelolaan susut dan sisa pangan		
21		Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keamanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
22		Peningkatan pengelolaan kualitas air sungai dan danau	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
23		Peningkatan kualitas ekosistem gambut		
24		Perubahan perilaku dan penguatan tata kelola persampahan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
25		Peningkatan pengumpulan dan pengelolaan sampah serta pemrosesan residu di TPA/LUR		
26		Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil laut		
27	Prioritas Nasional 3	Pembangunan infrastruktur jaringan ketenagalistrikan dan digitalisasinya	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
28		Pengembangan dan peningkatan ekosistem digital	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
29		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Borobudur Yogyakarta-Prambanan	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
30		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Lombok-Gili Tramen	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
31		Percepatan pembangunan destinasi pariwisata prioritas Danau Toba	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
32		Percepatan pembangunan destinasi prioritas Labuan Bajo		
33		Penguatan ekosistem aplikasi dan Gim	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
34		Pengembangan koperasi sektor produksi	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
35	Prioritas Nasional 4	Perluasan layanan pendidikan anak usia dini	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
36		Revitalisasi sarana dan prasarana sekolah madrasah yang berkualitas		
37		Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah		
38		Pembangunan dan penyelenggaraan sekolah unggul		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
39		Restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru meliputi formasi rekrutmen, pengangkatan dan penempatan, mobilitas, pembinaan karier profesional (e.g. pelatihan, in-service training), perlindungan hukum, dan kesejahteraan berbasis kinerja	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
40		Peningkatan relevansi dan perluasan akses pendidikan tinggi		
41		Peningkatan fungsi intermediasi dan layanan pemanfaatan IPTEK dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
42		Penurunan kematian ibu dan anak	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
43		Pencegahan dan penurunan stunting		
44		Penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis		
45		Penuntasan TBC		
46		Pemberian makan bergizi untuk siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita		
47		Penguatan ekosistem pendukung pemberian makan bergizi		
48		Eliminasi penyakit kusta dan Schistosomiasis		
49		Investasi pelayanan kesehatan primer		
50		Pembangunan RS lengkap berkualitas di kabupaten/kota dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses		
51		Produksi dan pendayagunaan SDM kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
52		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) seni budaya	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
53		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) riset dan inovasi	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
54		Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
55	Prioritas Nasional 5	Pengembangan hilirisasi Nikel	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
56		Pengembangan hilirisasi Tembaga	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
57		Pengembangan hilirisasi Bauksit	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
58		Pengembangan hilirisasi Timah	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
59		Pengembangan hilirisasi Kelapa Sawit	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
60		Pengembangan hilirisasi Kelapa	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
61		Pengembangan hilirisasi Rumput Laut	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
62		Pengembangan hilirisasi Kimia	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
63		Pengembangan industri semikonduktor	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
64		Pengembangan industri tekstil dan produk tekstil	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
65		Penguatan industri logam dasar, besi dan baja		
66		Pengembangan industri dirgantara		
67		Pengembangan KEK Sei Mangkei		
68		Pengembangan KIT Batang		
69		Pengembangan KI Weda bay		

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
70	Prioritas Nasional 6	Penyaluran bantuan sosial adaptif dan subsidi tepat sasaran melalui kartu kesejahteraan	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
71		Peningkatan daya saing melalui kartu usaha produktif	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
72		Peningkatan kemandirian melalui kartu usaha afirmatif	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
73		Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
74		Fasilitasi penyediaan perumahan terintegrasi dengan PSU	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
75		Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur desa	PROGRAM PEMBERDAYAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
76	Prioritas Nasional 7	Pencegahan tindak pidana korupsi	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
77		Peningkatan kesejahteraan ASN melalui penerapan konsep total reward berbasis kinerja ASN	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
78		Transformasi digital layanan publik prioritas	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

NO	PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	DUKUNGAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN DAERAH DALAM RKPD 2026	KETERANGAN
79		Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
80		Intensifikasi penerimaan negara bukan pajak		
81	Prioritas Nasional 8	Penguatan karakter dan jati diri bangsa	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
82		Pemanfaatan khazanah budaya dan pengembangan kawasan pemajuan kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
83		Peningkatan ketahanan iklim pesisir dan laut	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	

6.7 Indikator Kinerja Program

Adapun program perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Kota Salatiga Tahun 2026 berdasarkan masing-masing urusan dalam langkah penyelenggaraan pemerintah daerah dijabarkan dalam target kinerja program. Perincian program dan indikator program dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan sebagai berikut

Tabel 6. 7. Program , Indikator dan Target Kinerja berdasarkan urusan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2027

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
DINAS PENDIDIKAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					
1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	95,45	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,29	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,30*	79,32
1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah				
		Angka Partisipasi Sekolah PAUD (Tingkat parsipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD)	%	97,88	100
		Angka Partisipasi Sekolah SD/MI (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar)	%	99,34	100
		Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs (Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama)	%	96,82	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Angka Partisipasi Sekolah Pendidikan Kesenjangan (Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	%	71,05	100
		Angka Putus Sekolah SD/MI	%	0,005	0,003
		Angka Putus Sekolah SMP/MTs	%	0,058	0,056
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SD/MI	%	88,44	88,46
		Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik SMP/MTs	%	87,78	87,79
		Persentase sekolah TK yang memenuhi standar Holistik Integratif dengan kategori sedang	%	78,07	78,09
		Persentase Kondisi Kelas PAUD dalam Kondisi Baik	%	87,43	87,45
		Kondisi Sarpras Pendidikan Kesenjangan baik	%	95,45	95,47
		Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,81	93,8
		Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,55	85,08
		Rata-rata kompetensi literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,84	94,77
		Rata-rata kompetensi numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	%	2,73	90,94
		Iklim Kebhinekaan SD	%	78,15	69,06
		Iklim Kebhinekaan SMP	%	80,75	74,59

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Iklim Keamanan SD	%	77,9	73,70
		Iklim Keamanan SMP	%	76,73	74,40
		Iklim Inklusivitas SD	%	59,5	61
		Iklim Inklusivitas SMP	%	63,56	64
1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan				
		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SD/MI	%	74,19	74,21
		Persentase Sekolah yang telah menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang SMP/MTs	%	63,89	63,91
		Persentase sekolah yang menerapkan kegiatan yang dapat dikembangkan menjadi kurikulum mulok jenjang PKBM	%	75	75,02
1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi institusi pendidikan				
		Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang TK/RA	%	36,84	36,86
		Persentase Guru bersertifikat pendidik Jenjang SD	%	49,31	49,33
		Persentase Guru bersertifikat pendidik jenjang SMP	%	58,65	58,67
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang PAUD	%	87,8	87,82

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SD	%	97,15	97,17
		Persentase Pendidik yang telah memenuhi kualifikasi Minimal S1 jenjang SMP	%	99,1	99,12
1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan				
		Persentase TK/RA yang terakreditasi	%	90,35	90,37
		Persentase Pusat Kegiatan dan Belajar Masyarakat (PKBM) yang Terakreditasi	%	83,33	83,33
		Persentase lembaga Kursus dan Pelatihan yang berijin	%	92,86	92,86
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SD/MI	%	100	100
		Persentase Sekolah yang memiliki ijin operasional jenjang SMP/MTs	%	100	100
1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah				
		Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SD/MI	%	20,43	20,43
		Persentase Sekolah yang mengembangkan model pembelajaran bahasa jawa jenjang SMP/MTs	%	42,86	42,86
		Persentase PKBM yang sudah memasukkan pembelajaran Bahasa Jawa	%	66,67	66,67

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		pada mata pelajaran yang diberikan ke siswa			
DINAS KESEHATAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73,31	73,4
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	86,9	86,92
Rumah Sakit					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Rumah Sakit	Nilai	88,57	87
		Cost Recovery Rumah Sakit	Nilai	102,32	100
KPM (Klinik Paru Masyarakat)					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Klinik Paru Masyarakat	Nilai	84,92	86
Puskesmas Tegalrejo					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Tegalrejo	Nilai	86,5	87
Puskesmas Cebongan					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Cebongan	Nilai	88,52	89
Puskesmas Kalicacing					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Kalicacing	Nilai	88,4	89
<i>Puskesmas Mangunsari</i>					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Mangunsari	Nilai	85,17	87
<i>Puskesmas Sidorejo Lor</i>					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Lor	Nilai	82,05	87
<i>Puskesmas Sidorejo Kidul</i>					
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Puskesmas Sidorejo Kidul	Nilai	87,35	89
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat				
		Angka Kematian balita (AKABA)	per 1.000 KH	11,49	11,49
		Capaian penemuan kasus TB (Notifikasi kasus TB)	%	134	135
		Prosentase pasien TBC yang memulai pengobatan (Errollment TBC)	%	90,04	92
		Cakupan pemberian terapi pencegahan pada orang kontak serumah	%	20	35
		Annual Parasite Incidence (API) per 1.000 penduduk	1.000 penduduk	0,74	0,74
		Jumlah Kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kelurahan	2	8
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan KKS (SK Forkom kec, SK Pokja Kel, Sekretariat, Rencana Kegiatan, Anggaran)	Puskesmas	NA	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pengawasan kualitas udara dalam ruang memenuhi syarat	%	NA	50
		Persentase Puskesmas Yang memfasilitasi Kelurahan Sehat Iklim	%	NA	66,67
		Persentase rumah tangga dengan kualitas air minum memenuhi syarat	%	NA	31
		Persentase sarana air minum yang memenuhi syarat	%	NA	71
		Persentase KK dengan akses fasilitas sanitasi layak	%	NA	100
		Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	%	100	100
		Cakupan bayi baru lahir yang mendapat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)	%	84,87	85
		Cakupan Bayi Usia Kurang 6 Bulan Mendapat ASI Eksklusif	%	82,07	83
		Cakupan imunisasi di usia sekolah dasar	%	98,92	99
		Cakupan Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang Mendapat Makanan Tambahan	%	100	100
		Cakupan Ibu Hamil yang Mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) Minimal 90 Tablet Selama Masa Kehamilan	%	100	99
		Cakupan ibu nifas mendapat kapsul Vitamin A	%	99,6	99,6
		Cakupan kepesertaan JKN	%	98,55	100
		Cakupan pelayanan kesehatan balita	%	100	82

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin	%	100	100
		Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100
		Cakupan Pelayanan kesehatan Ibu Nifas (KF3)	%	99,55	99,55
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Lansia	%	100	100
		Persentase lanjut usia yang mandiri	%	90	93
		Persentase Depresi yang mendapatkan layanan	%	NA	1,5
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	%	338	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	%	100	100
		Prevalensi Obesitas > 18 tahun	%	NA	60
		Cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis	%	NA	50
		Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	NA	14,7
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	%	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	%	98,16	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Cakupan pembinaan remaja di sekolah	%	100	100
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	%	100	100
		Cakupan Puskesmas yang melaksanakan Perkesmas	%	100	100
		Cakupan Remaja Putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)	%	99,71	99,73
		Cakupan Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	99,44	66,67
		Deteksi Dini Triple Eliminasi Ibu Hamil	%	75,78	75,85
		Imunisasi Dasar Lengkap (IDL)	%	100	98
		Incident Rate DBD per 100.000 penduduk	/ 100 rb penduduk	9,18	9,1
		Kasus HIV/ AIDS baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV	%	60	62
		Presentase penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	NA	20
		Persentase tempat kerja formal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	NA	60
		Persentase tempat kerja informal yang melaksanakan kesehatan kerja	%	NA	100
		Penemuan kasus AFP (Acute Flaccid Paralysis)	Kasus	9	6
		Persentase Bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (Berat Badan kurang dari 2500 gram)	%	7,21	7,24
		Persentase Ibu hamil KEK	%	13,78	13,81
		Persentase Ibu Hamil yang Anemia	%	7,43	7,46

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	NA	60
		Proporsi jamaah haji Kota Salatiga yang mendapat pemeriksaan dan pembinaan kesehatan sesuai standar	%	100	100
		Persentase Pustu, Puskesmas, dan RSUD yang memenuhi standar Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan (SPA) dan Sumber Daya Manusia Kesehatan	%	100	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	NA	88
		Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	/1000 penduduk	3,99	4
		Tertanganinya KLB/Bencana dalam 1 x 24 jam	%	100	100
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi	%	66,13	82,03
1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (RSUD)	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standart	%	100	100
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan				
		Persentase tenaga kesehatan yang sudah mengikuti pelatihan sesuai kompetensinya	%	73,04	73,77

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	%	8,82	9
		Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	%	100	100
		Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	%	100	100
1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN (RSUD)					
		Persentase karyawan RSUD yang yang mendapatkan pelatihan peningkatan kompetensi minimal 20 jam per tahun	%	57,5	60,25
1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan, dan makanan minuman				
		Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	%	50	62
		Persentase pangan Industri Rumah Tangga aman dan bermutu	%	74,58	77
		Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP-IRT sesuai standar	%	16,27	36,51
		Persentase apotek dan toko obat yg mampu memelihara persyaratan perijinan	%	100	100
		Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	81	84,5

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Persentase Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) yang memenuhi syarat higiene sanitasi	%	89,28	90,5
1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan				
		Cakupan desa siaga strata mandiri	%	100	100
		Cakupan PHBS tatanan rumah tangga strata paripurna	%	97,55	97,75
		Cakupan PHBS tatanan institusi pendidikan strata paripurna	%	95,65	95,85
		Cakupan PHBS tatanan institusi kesehatan sehat	%	100	100
		Cakupan PHBS tatanan tempat kerja sehat	%	90,34	90,56
		Cakupan PHBS tatanan tempat umum sehat	%	94,34	94,56
		Cakupan sosialisasi dan edukasi Kawasan Tanpa Rokok	%	37,5	62,5
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,22	88,7
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,96	73
1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman				
		Rasio kemantapan jalan	%	91,97	95,54
1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi				
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Nilai	64,84	66,5
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya askes masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah				
		Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	10,29	23,8
1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan				
		Prosentase jaringan drainase kondisi baik	%	96,49	96,9
1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum				
		Akses Rumah Tangga terhadap Konsumsi Air Minum	%	63,83	68,35
1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Meningkatnya kualitas bangunan gedung				
		Presentase Bangunan Gedung Negara milik Pemerintah Kota dalam Kondisi Baik	%	71,93	77,43

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata				
		Persentase penataan bangunan dan lingkungan	%	25	33,77
1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi				
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi analis/teknisi operator terlatih dan tersertifikasi	Orang	67	75
1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang				
		Jumlah KKPR yang diterbitkan	Dokumen	396	400
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	95	95,2
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,6	74,8
1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
	bencana dan yang terkena relokasi akibat pemerintah				
		Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni korban bencana atau relokasi kabupaten/kota	%	100	100
		Persentase fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100
1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman				
		Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani	%	10,01	23,25
1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
		Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki	%	5,11	5,25
1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Meningkatnya penyediaan PSU Permukiman				
		Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	46	70
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					
2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	50	100
2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan				
		Persentase peningkatan penggunaan dan pemanfaatan tanah	%	100	100
2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)				
		Persentase bidang tanah yang didistribusi	%	100	100
2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Meningkatnya luas lahan bersertifikat				
		Persentase luas lahan bersertifikat	%	50	100
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)					
URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,09	88
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,55*	70,05

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada dan Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum				
		Prosentase Penegakan Perda dan Perkada (Prosentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada)	%	100	100
		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100
1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran				
		Presentase ketersediaan Sarana Prasarana Damkar yang memadai	%	75	80
		Tingkat Waktu Tanggap Daerah Layanan Wilayah Kebakaran (Waktu tanggap (response time) penanganan kkebakaran)	Menit	7	< 15
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (prosentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran)	%	100	100
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86	88,25
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	63	67
1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat, dan Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana				
		Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana)	%	100	100
		Persentase Cakupan Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana)	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Persentase Cakupan Layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana)	%	100	100
DINAS SOSIAL					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					
1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	89,91	91,03
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,75	71,05
1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Meningkatnya pemberdayaan sosial				
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan sosial yang Meningkatkan Kulaitasnya dalam pelayanan sosial	%	NA	60
1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Meningkatnya rehabilitasi sosial				
		Presentase penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Presentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100
		Presentase lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	100	100
		Presentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	%	100	100
1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial				
		Persentase Data Fakir Miskin yang divalidasi	%	95.5	98
1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Meningkatnya perlindungan sosial korban dan bencana				
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten/Kota	%	100	100
1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan				
		Persentase TMP yang terkelola dengan baik	%	100	100
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA					
URUSAN TENAGA KERJA					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,78	89,28
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,6*	75,2
2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja				
		Persentase Tenaga Kerja yang terlatih	%	0,232	0,34
2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya penempatan tenaga kerja				
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah	%	71,05	71,91
2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi				
		Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	93,24	94,35
URUSAN PERINDUSTRIAN					
3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pembangunan industri				
		Persentase industri Kota Salatiga yang berkembang	%	0,31	0,88

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN /KOTA	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian				
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100
3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri				
		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100
URUSAN TRANSMIGRASI					
3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi				
		Persentase pelaksanaan proses transmigrasi	%	20	60
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,44	85,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,9	77,1
2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan				
		Persentase Kelembagaan PUG Aktif	%	100	100
		Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG	%	100	100
2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase perempuan korban kekerasan yang ditangani sesuai standart	%	100	100
		Persentase UPTD PPA sesuai standart layanan	%	0	100
2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					
		Persentase PKK aktif	%	100	100
2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
	gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak				
		Persentase Perangkat Daerah yang berkontribusi dalam sistem data gender dan anak	%	100	100
2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak				
		Persentase kelembagaan forum anak yang aktif	%	100	100
2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif				
		Persentase korban kekerasan anak yang mendapat layanan komprehensif	%	100	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					
2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase OPD yang mengintegrasikan dokumen GDPK 5 pilar ke dalam dokumen Perencanaan daerah	%	100	100
		Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100
		Cakupan PUS yang istrinya di bawah 20 tahun	%	0,07	0,07

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	Tahun	23	23
2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)				
		Rasio akseptor KB baru	%	14,31	14,5
		Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	%	67,7	68,77
		Cakupan PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmetneed)	%	8,51	8,45
		Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	26,65	27,05
		Persentase Modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	%	65,71	70
		Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD)	%	13	11,2
		Demand Satisfied (Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi)	%	81	83,5
2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera				
		Rasio Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD)	rasio	45:23	46:23
		Cakupan Balita/ Anak dengan Tumbuh Kembang sesuai dengan Kartu Kembang Anak (KKA)	%	100	100
		Cakupan Kader BKB yang Terlatih	%	74,74	75,97

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB	%	95,3	96,93
		Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	%	56,5	57,7
		Indeks Lansia Berdaya	Indeks	55,6	57,1
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja	Indeks	92,1	93,6
DINAS PANGAN DAN PERTANIAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					
2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	89,10	90,06
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71,65	71,7
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan				
		Presentase Peningkatan Indeks ketahanan Pangan	%	-3,03	0,15
2.09.03PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	Rasio	1,49	1,77
2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan				
		Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	87,14	88,04
2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan				
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	89,7	91,05
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					
3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian				
		Pemenuhan kebutuhan sarana pertanian	%	70	75,38
		Produtivitas tanaman pangan (Padi dan Jagung)	Ton/ha	6,938	6,980
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian				
		Pemenuhan kebutuhan prasarana pertanian	%	50	75,38
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Mortalitas hewan/ternak akibat penyakit zoonosis	%	0	0
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian				
		Persentase kejadian bencana pertanian	%	5	100
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian				
		Persentase Cakupan Bina Kelompok Tani			
		- Pemula	%	40	39,38
		- Lanjut	%	46,25	45,63
		- Madya	%	13,75	15
		- Utama	%	0	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					
3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya produksi perikanan budidaya				
		Cakupan bina kelompok pembudidaya ikan	%	100	100
		Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35,18
		Produksi perikanan budidaya	ton	677,706	719,187
3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya produksi perikanan budidaya				
		Cakupan bina kelompok pengolah dan pemasar ikan	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Persentase kelompok kelompok pengolah dan pemasar ikan yang telah menerapkan Cara Budidaya ikan yang Baik (CBIB)	%	35	35,18
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					
2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,43	83,23
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	77,1	77,13
2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan				
		Nilai tingkat kegemaran membaca	nilai	75,23	76,73
2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno				
		Persentase koleksi nasional dan kuno yg dimiliki	%	0	100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					
2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) (Pasal 40 dan Pasal 59 UU Nomor 43 Tahun tentang Kearsipan)	%	88,67	88,92
2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK				
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	16,67	60
2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip yang bersifat tertutup				
		Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	0	30
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	83	85
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,1	75,4
2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP				
		Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan LH	%	100	60
2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup				
		Persentase pemantauan status mutu air	%	100	100
		Persentase pemeliharaan sarana prasarana laboratorium	%	100	100
2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati				
		Persentase Ruang Terbuka Hijau Tingkat Kota	%	17,4	18,5
2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Meningkatnya penangan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)				
		Persentase kelompok masyarakat yang memahami rencana aksi pengurangan dan penghapusan peralatan bermerkuri	%	5	20
		Persentase sampah spesifik yang mengandung bahan berbahaya beracun	%	0	40

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		(B3) dan limbah bahan berbahaya beracun (limbah B3) yang terkumpul			
2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan				
		Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	%	89,28	38,93
2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup				
		Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh penyuluhan, kampanye dan pelatihan lingkungan hidup	%	30	63
2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup				
		Persentase penghargaan lingkungan hidup yang terfasilitasi	%	100	100
2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup				
		Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan				
		Persentase penanganan sampah	%	76,51	73
		Persentase pengurangan sampah perkotaan	%	21,65	26
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	82,91	83
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,85	91,25
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,51	68,7
2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk				
		Perekaman KTP-Elektronik	%	98,19	98,5
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	85,86	86,72
2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil				
		Persentase Penduduk usia 0 - 18 tahun yang mempunyai Akte Kelahiran	%	99,44	99,55

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan				
		Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100
DINAS PERHUBUNGAN					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					
2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,82	89
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	74,1	74,5
2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat				
		Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,35	0,50
		Persentase Perlengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal Pada Jalan Kabupaten/Kota	%	7	9,26
		Kinerja Lalu Lintas	V/C	0,31	0,44
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82	88,75
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,15	75,3
2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah				
		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	100
2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika				
		Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100
		Persentase pelayanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	60,05	70
2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)				
		Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100
		Presentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100
2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					
2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi di lingkungan pemerintah daerah				
		Persentase tingkat kematangan daerah dalam penyelenggaraan keamanan informasi	%	70,85	71,05
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH					
2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					
2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,42	86,1
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,9	69,2
2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi				
		Prosentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	%	62,5	71,97
2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi				
		Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	%	71,58	77,41
2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian				
		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	%	57,89	53,06
2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya produktivitas koperasi				
		Persentase Koperasi Aktif	%	53,98	62,42
2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri				
		Prosentase usaha mikro yang mendapatkan legalitas usaha	%	40,88	48,64
2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM				
		Prosentase UMKM yang mengakses pembiayaan	%	24,8	25,93
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					
2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	91,84	92,23
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	76,9	77,1
2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Meningkatnya kemudahan berinvestasi				
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN	Miliar rupiah	634,854	638,03
2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal				
		Jumlah investor berskala nasional	pelaku usaha	363	370
2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko				
		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	%	97,64	97,8
2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal				
		Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	%	67	70
2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		persentase ketepatan dalam proses pemenuhan permohonan data	%	0	80
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	78,84	80
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,2	68,5
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Meningkatnya daya saing kepemudaan				
		persentase Pemuda yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Kepemudaan	%	5,44	5
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga				
		persentase Atlet yang mengikuti pengembangan kapasitas Daya Saing Olahraga	%	17,04	17
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan				
		persentase fasilitasi pengembangan Kapasitas Kepramukaan	%	65	65
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					
2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,64	88
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,6	70,05
2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan				
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	%	38,57	42
2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Meningkatnya tata kelola museum				
		Persentase Penambahan Jumlah Koleksi Museum	%	38,18	39,18
2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan				
		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan	%	57,97	59
2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional				
		Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	0	59

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah				
		Persentase Sejarah yang Dilestarikan dan Dikembangkan	%	0	30
3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata				
		Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara	%	NA	5
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke Kabupaten / Kota	%	NA	5
		Tingkat Hunian Akomodasi	%	51,42	58,92
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata				
		Persentase Fasilitasi Pemasaran Pariwisata	%	100	100
3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif				
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	%	0	5
3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	%	0	75
DINAS PERDAGANGAN					
3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					
3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	96,46	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,66	87,46
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	67,35	67,95
3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha				
		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	%	100	100
3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi				
		Prosentase fasilitasi pedagang pasar rakyat yang menggunakan platform digital	%	90	40
3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Menigkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	%	100	100
		Disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	-0,68	-0,62
3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor				
		Fasilitasi Pelaku Usaha Ekspor Barang dan Jasa	%	3,3	3,7
3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk				
		Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	70,23	55
SEKRETARIAT DAERAH					
4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	NA	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,19	87
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,86	73,25
4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat				
		Cakupan Koordinasi Administrasi Pemerintahan	%	185	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Cakupan Koordinasi Bidang Administrasi Kewilayahan	%	136	100
		Cakupan Fasilitasi Kerjasama Daerah	%	430	100
		Ketepatan waktu penyampaian LKPJ (30 maret)	%	100	100
		Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Hukum	%	120	100
		Prosentase Pelaksanaan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	100	100
4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan				
		Cakupan Koordinasi Program Perekonomian dan Pembangunan	%	312	100
		Cakupan Koordinasi OPD Pengampu DBHCHT	%	162	100
		Cakupan Koordinasi dan Pembinaan BUMD/BLUD	%	120	100
		Cakupan Koordinasi bidang Lingkungan Hidup dan SDA	%	100	100
		Cakupan Koordinasi POK	%	99,04	100
		Persentase Nilai Belanja yang dilakukan melalui Pengadaan	%	57,13	63
SEKRETARIAT DPRD					
SEKRETARIAT DPRD					
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	84,07	86,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72	73
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan				
	Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan	Tingkat capaian kinerja dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	100
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					
5.01 PERENCANAAN					
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,58	83,2
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,9	71,8
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah				
		Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah	%	98	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Indeks Manajemen Risiko	Angka	2,897	2,929
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, bidang infrastruktur dan kewilayahan, bidang perekonomian dan SDA				
		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Kesra	%	97,24	100
		Penjabaran Konsistensi kegiatan RENSTRA ke dalam RENJA Bidang Perencanaan Ekbang	%	88,38	90,46
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					
5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya dukungan hasil kelitbangan di bidang inovasi dalam perencanaan pembangunan				
		Persentase terfasilitasinya inovasi masyarakat daerah	%	44,3	44,53
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					
5.02 KEUANGAN					
5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	82,73	82,77
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,11	72,19
5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan				
		Persentase belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	18,94	19,36
		Cash managenent (Persentase anggaran)	%	15,07	7,14
		Persentase laporan keuangan tepat waktu	%	100	100
5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Meningkatnya tata kelola aset daerah				
		Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	2,7	3,3
5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital				
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	%	100	100
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
5.03 KEPEGAWAIAN					
5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	87,519	87,65
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	79,9	79,99
5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian				
		Nilai Indeks NSPK Manajemen ASN	Nilai	75,11	77
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar, kader, manajerial dan fungsional				
		Persentase PNS yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	NA	16
INSPEKTORAT					
6.01 INSPEKTORAT DAERAH					
6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	80	81,5
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	78	78,4
6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan atau penyimpangan, baik yang				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
	bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan				
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Tahun Anggaran N- 1	%	90	90,15
		Tindaklanjuti Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	94	94,15
6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi				
		Nilai Monitoring Controlling Surveillance For Prevention (MCSP)	Nilai	94	94,7
		Prosentase Penyelesaian Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS)	%	100	100
KECAMATAN ARGOMULYO					
7.01 KECAMATAN					
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	85,26	87
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	73	73,01
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	85
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	73	76
KECAMATAN SIDOMUKTI					
7.01 KECAMATAN					
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	90,28	90,3
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70,9	71

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	85
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	89,73	90,17
KECAMATAN SIDOREJO					
7.01 KECAMATAN					
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	88,67	89,2
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	69,15	70,2
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	85
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	82,9	83,5
KECAMATAN TINGKIR					
7.01 KECAMATAN					

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	91,45	91,48
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	72,35	72,37
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				
		Tingkat pencapaian pembangunan kelurahan dalam 1 tahun	%	0	85
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan				
		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangkel	%	100	100
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum				
		Prosentase Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	%	100	100
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa				
		Persentase penyampaian SPPT PBB pada WP	%	83,48	83,5

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan penunjang penyelenggaraan urusan perangkat daerah				
		Persentase terlaksananya kegiatan pendukung urusan pemerintahan	%	100	100
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai	86,13	86,14
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	68,7	68,7
8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan				
		Cakupan penguatan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Kegiatan	5	5
8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MEMALALUI PENDIDIKAN POLITIK DANPENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Meningkatnya etika dan budaya politik				
		Prosentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik	%	NA	58
8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan				

BIDANG, URUSAN, PROGRAM DAN OPD	OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA TAHUN 2027
		Prosentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	%	60	61
8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat				
		Prosentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonmi , sosial,budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	%	80	80,25
8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Menigkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan				
		Prosentase Konflik Sosial yang yang diselesaikan	%	100	100

6.8 Indikator Utama Pembangunan

Indikator utama Pembangunan daerah tahun 2027 merupakan penjabaran indikator dalam dokumen RPJPD Kota Salatiga tahun 2025-2045.

Tabel 6. 8. Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2027

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2027
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Terdidik, Sehat, dan Berkualitas	1. Kesehatan untuk Semua	4 Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	78,87
			Kesehatan Ibu dan Anak :	
			5 Jumlah Kasus Kematian Ibu (kasus)	2
			6 Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	5,43
			Penanganan Tuberkulosis:	
			7 Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	135
			8 Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91,45
			9 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100
		2. Pendidikan Berkualitas yang Merata	Hasil pembelajaran:	
			10 Persentase Siswa yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional (seluruh jenjang):	
			a) Literasi Membaca SD/Sederajat	98,8
			b) Literasi Membaca SMP/Sederajat	94,77
			c) Numerasi SD/Sederajat	85,08
			d) Numerasi SMP/Sederajat	94,77

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)	2027
			11 Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	16,2
			12 Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,39
			13 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	23,61
			14 Angka partisipasi sekolah 5 - 6 tahun (%)	100
		13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	15 Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar mulok bahasa daerah dan atau seni budaya dan mengarusutamakan kebudayaan (%)	90,03
			16 Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) yang dilestarikan (%)	42
			17 Jumlah pengunjung tempat bersejarah	14.460
			18 Persentase Kelompok Kesenian yang Aktif Terlibat/Mengadakan Pertunjukan Kesenian dalam 1 Tahun Terakhir	18,93
			19 Tingkat pemanfaatan perpustakaan (%)	1,12
			20 Jumlah Kejadian Konflik Sara (kali)	0
		14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	18 Indeks Pembangunan Keluarga	63,50-64,82
			19 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,221-0,209
2	Terwujudnya Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat	3. Perlindungan Sosial yang Adaptif	1 Tingkat Kemiskinan (%)	4,30-3,39
			38 Cakupan Kepesertaan	56,24

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		2027
				Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	
3	Terwujudnya Perekonomian yang Berdaya Saing	4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	23	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	34,6
			24	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	8,36
			25	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (ribu orang)	1,146
			26	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,25
			27	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,9
			28	<i>Return on Aset</i> (ROA) BUMD (%)	3,34
			29	Disparitas Harga	±10
			36	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,82-3,52
			37	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	67,52
			34	Kapabilitas Inovasi (Angka) (bagian dari IDSD)	3,86
		5. Penerapan Ekonomi Hijau			
		6. Transformasi Digital	39	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Internet	92
		7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	30	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	41,55
			55	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita Kabupaten/Kota (Juta Rupiah)	112,68-117,68
			56	Distribusi Pengeluaran Berdasarkan Kriteria Bank Dunia (%)	17,43-17,93
		8. Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	40	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak (%)	95,5
			41	Persentase Panjang Jalan Kondisi	95,54

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		2027
				Permukaan Mantap (%) (sesuai kewenangan)	
			42	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang Terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota	9,26
			35	Persentase Desa Mandiri	-
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, adil dan demokratis	9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	51	Indeks Reformasi Hukum	81,23
			52	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,81
			53	Indeks Pelayanan Publik	4,7
			54	Indeks Integritas Nasional	80,65
			50	Indeks Reformasi Birokrasi	82,66
		10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial			
		11. Stabilitas Ekonomi makro	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,64
			32	Total Dana Pihak Ketiga Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	64,38
			33	Total Kredit Pada Bank Milik Kabupaten/Kota per PDRB	47,55
		12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan			
5	Terwujudnya Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adaptasi perubahan iklim	15. Lingkungan Hidup Berkualitas	46	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	61,81
			43	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	23,8
			47	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas	29,3

No	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan	Indikator Utama Pembangunan (IUP)		2027
				Pengolahan Sampah (%)	
		16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian pangan	44	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	46,8
			45	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota (Angka)	66,5
			2	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	3,63
			3	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	94,54
		17. Resiliensi terhadap Bencana dan perubahan Iklim	48	Indeks Risiko Bencana (IRB)	72,89-71,67
			49	Kontribusi Penurunan Emisi GRK (TonCO2eq)	#####

BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi target dan capaian pembangunan tahun 2025 serta kebijakan pusat dan provinsi Jawa Tengah serta sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran Pembangunan. Dengan demikian seluruh kebijakan, strategi dan program atau kegiatan pembangunan Kota Salatiga tahun 2027 akan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kota Salatiga tahun 2027. Selain itu, RKPD Tahun 2027 juga diselaraskan dengan RPJMN 2025-2029, RKP tahun 2027 dan mendukung pencapaian Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs), Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta mewujudkan perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam bentuk rumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator yang terukur beserta sumber pembiayaannya.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Agar pelaksanaan RKPD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan RKPD sebagai berikut :

- a. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga agar melaksanakan program-program RKPD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RKPD;
- b. RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan perangkat daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. RKPD akan menjadi instrumen dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga dan masyarakat diharapkan dapat mengawal dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program-program pembangunan yang tertuang dalam RKPD.

Keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 memerlukan kerja bersama seluruh perangkat daerah dan dukungan para pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Oleh karena itu dukungan, kesungguhan, rasa tanggung jawab, dan semangat kerja keras harus dimiliki oleh seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan di Kota Salatiga. Semoga dengan pelaksanaan RKPD Kota Salatiga tahun 2027 yang masuk pada tahap **““Pengembangan SDM yang sehat dan cerdas dan perekonomian daerah yang unggul, didukung pelayanan publik bermutu dan infrastruktur wilayah yang sesuai daya dukung lingkungan hidup”** dapat mewujudkan cita-cita Kota Salatiga di tahun 2029 yaitu :

“Terwujudnya Kota Salatiga Sebagai Kota BEDA: Bergerak, Energik, Dinamis dan Adaptif menuju Salatiga yang Mendunia”

RKPD selain fokus dalam mencapai visi Kota Salatiga tahun 2025-2029, juga memiliki peran krusial dalam mengintegrasikan berbagai isu penting ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah. Secara nasional, terdapat 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan RKPD di daerah, yaitu gender dan inklusi sosial, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), transformasi digital, pembangunan rendah karbon; dan pembangunan berketahanan iklim.

7.2 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pengendalian sangat penting dalam pelaksanaan RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 untuk memastikan bahwa semua program berjalan sesuai dengan rencana dan selaras dengan tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Tanpa pengendalian yang efektif, RKPD berisiko tidak mencapai target, mengalami penyimpangan, atau bahkan mengalami kegagalan. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa pengendalian menjadi hal yang penting dilakukan dalam implementasi RKPD Kota Salatiga Tahun 2027 :

1. Memastikan Seluruh Program Dilaksanakan

Seluruh program yang tertuang dalam RKPD yang disertai dengan target kinerja dan kebutuhan pendanaan pembangunan telah dijabarkan kedalam rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Perangkat Daerah, termasuk dalam RAPBD tahunan.

2. Memastikan Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Pengendalian berfungsi sebagai mekanisme untuk memantau kemajuan dan mengevaluasi kinerja secara berkala. Ini membantu pemerintah daerah mengidentifikasi hambatan atau masalah yang muncul di tengah jalan, sehingga dapat mengambil tindakan korektif secepat mungkin.

3. Optimalisasi penggunaan sumberdaya

Memastikan bahwa sumber daya yang terbatas digunakan secara efisien dan efektif untuk kepentingan publik dalam pelaksanaan RKPD.

4. Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi

Proses pengendalian yang transparan dan terukur akan membuat pemerintah daerah lebih akuntabel terhadap masyarakat. Laporan hasil pengendalian dapat diakses publik, sehingga masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah dalam melaksanakan janji-janji politik yang tertuang dalam RKPD.

5. Menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan

Lingkungan eksternal (sosial, ekonomi, politik) dapat berubah sewaktu-waktu. Pengendalian yang fleksibel memungkinkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan strategi dan program kerja agar tetap relevan dan efektif. Misalnya, jika terjadi krisis ekonomi, pengendalian dapat membantu mengidentifikasi program yang perlu diprioritaskan atau direstrukturisasi.

6. Mendorong Perbaikan Berkelanjutan

Hasil dari proses pengendalian (evaluasi, audit, dan laporan) memberikan umpan balik yang berharga. Umpan balik ini dapat digunakan untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan program di masa mendatang. Ini menciptakan siklus pembelajaran dan perbaikan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Pelaksanaan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah proses penting untuk mengukur keberhasilan, mengidentifikasi kendala, dan memberikan masukan untuk perbaikan di masa mendatang. Evaluasi ini diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Evaluasi dilakukan dengan tujuan:

1. Mengukur Pencapaian Sasaran, yaitu menilai sejauh mana target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD telah tercapai.
2. Menilai Efektivitas dan Efisiensi, yaitu dapat meninjau efektivitas program dan penggunaan anggaran.
3. Mengidentifikasi Masalah, yaitu menemukan faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan program.
4. Meningkatkan Akuntabilitas, yaitu dalam rangka mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
5. Menyediakan Masukan, yaitu dalam rangka memberikan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan periode berikutnya.

Evaluasi membantu memastikan konsistensi antara RPJMD dengan rencana tahunan (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Anggaran (APBD). Hal ini penting untuk mencegah adanya penyimpangan kebijakan dan memastikan bahwa setiap program yang dijalankan selaras dengan tujuan jangka menengah. Pelaksanaan Evaluasi RKPD merupakan langkah krusial yang berfungsi sebagai cerminan keberhasilan dan kegagalan sebuah rencana pembangunan. Proses ini tidak hanya mengukur pencapaian, tetapi juga memberikan landasan untuk perbaikan di masa depan.

Dalam perjalanannya, RKPD selalu menghadapi ketidakpastian dan berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan. Untuk itu, manajemen risiko berperan sebagai "penjaga" yang memastikan rencana tersebut berjalan sesuai jalur. Untuk memastikan perencanaan yang tertuang dalam RKPD perlu dilakukan analisis manajemen risiko dengan mengidentifikasi potensi risiko baik pada lingkup internal maupun eksternal. Faktor risiko yang teridentifikasi sejak dini, pemerintah daerah dapat menyusun rencana yang lebih realistis dan memiliki strategi mitigasi yang kuat.

Penerapan manajemen risiko pada RKPD Kota Salatiga tahun 2027 diharapkan akan membantu dalam meningkatkan kemungkinan pencapaian target, mengoptimalkan alokasi sumber daya dan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui pengelolaan risiko secara proaktif, pemerintah daerah dapat mencegah atau mengurangi kendala yang berpotensi

menghambat program dan kegiatan, seperti keterlambatan proyek, pembengkakan biaya, atau kegagalan program yang menghambat pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Hal ini secara langsung meningkatkan kemungkinan tercapainya tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RKPD Kota Salatiga tahun 2027.

